

KAJIAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH BARAK DI KELURAHAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

LAPORAN TUGAS AKHIR

Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Tugas Akhir



Disusun Oleh :

Arif Rivan

203060050

**PROGRAM PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

**PERNYATAAN ORIGINALITAS KARYA TULIS DAN TIDAK
MELAKUKAN FLAGIARISME**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arif Rivan

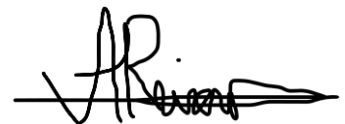
NPM : 203060050

Judul : Kajian Penanganan Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis
Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

Menyatakan bahwa karya tulis ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan flagiarisme, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari karya tulis ini terbukti bukan hasil sendiri dan saya dinyatakan melakukan tindakan flagiarisme sebagaimana diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Flagiat di Perguruan Tinggi. Saya bersedia mempertanggungjawabkan tindakan saya dan menerima sanksinya.

Bandung, Oktober 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AR.' followed by a stylized flourish.

(Arif Rivan)

**KAJIAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH BARAK DI KELURAHAN
CIAMIS KABUPATEN CIAMIS**

Oleh:

Arif Rivan

203060050

Menyetujui:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : Furi Sari Nurwulandari, ST., MT |
| 2. Pembimbing 1 | : Dr. Ir. H. Ari Djatmiko, MT. |
| 3. Pembimbing 2 | : Ibnu Kusuma Ardhi, ST., MT. |
| 4. Penguji 1 | : Ratih Rantini, ST., MT. |
| 5. Penguji 2 | : Ir. Supratignyo Aji, MT. |



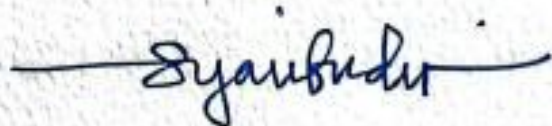
Mengetahui:

**Koordinator Kemahasiswaan Program
Studi Perencanaan Wilayah dan Kota**



(Furi Sari Nurwulandari, ST., MT)

**Ketua Program Studi Perencanaan
Wilayah dan Kota**



(Deden Syarifudin, ST., MT)

**KAJIAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH BARAK DI KELURAHAN
CIAMIS KABUPATEN CIAMIS**



Arif Rivan

NPM : 203060050

Email : arifrivan726@gmail.com

Mengetahui dan Menyetujui

Pembimbing Utama



(Dr. Ir. H. Ari Djatmiko, MT.)

Co-Pembimbing



(Ibnu Kusuma Ardhi, ST., MT)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kajian Penanganan Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pasundan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. H. Ari Djatmiko, MT. selaku dosen pembimbing utama tugas akhir penulis yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini dari sejak awal hingga akhir.
2. Ibnu Kusuma Ardhi, ST., MT. selaku Co-pembimbing tugas akhir penulis yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini dari sejak awal hingga akhir.
3. Deden Syarifudin, ST., MT. selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan.
4. Seluruh Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan penulis ucapkan terima kasih atas bimbingannya selama perkuliahan.
5. Kedua Orang Tua penulis, alm Bapak Memed dan Ibu Yati Supriati, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih banyak atas segala kasih sayang dan do'a yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Terima banyak Ibu sekali lagi, semoga alm bapak bangga melihat penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.

6. Kepada Keluarga Alm Kakek Maman Sulaeman dan Kelurga Kakek Rusman yang telah memberikan dukungan fasilitas, baik itu dari segi ekonomi maupun non ekonomi, terkhusus nenek juju juariah dan kakek rusman terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
7. Kepada Teman Angkatan 2020 Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan yang memberikan arahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini
8. Kepada Natasya Fadilla Andani yang memberikan semangat daya juang yang tinggi serta do'a dan dukungan yang tiada henti agar tercapainya sedikit demi sedikit proses skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi berkah dan dapat membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan serta bermanfaat untuk masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

Bandung, Oktober 2025

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arif Rivan', written over a horizontal line.

Arif Rivan

ABSTRAK

KAJIAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH BARAK DI KELURAHAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

Oleh:

Arif Rivan

NRP: 203060050

Permukiman kumuh adalah masalah yang dihadapi di setiap kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Pengkajian tentang permukiman kumuh (*slum*), pada umumnya mencakup tiga hal, diantaranya keadaan fisik, keadaan sosial ekonomi yang bermukim tersebut serta dampak dari kondisi tersebut. Permasalahannya yaitu kepadatan penduduk makin tinggi, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap lingkungan serta kondisi fisik bangunan yang kurang layak ditempati dan kepadatan atau keteraturan bangunan sehingga mencirikan kekumuhan. Urgensi penelitiannya dengan merumuskan arahan penanganan yang tepat di kawasan kumuh barak ini dengan menganalisis karakteristik kekumuhan, tingkat kekumuhan dan merumuskan arahan penanganannya lalu setelah itu terdapat temuan studi yang dilihat dari Surat Keputusan Kawasan kumuh dengan analisis yang dikerjakan, terdapat perbedaan prioritas penanganannya.

Kata Kunci : Karakteristik Permukiman Kumuh, Tingkat Kekumuhan, Arahan Penanganan

ABSTRACT

STUDY OF HANDLING THE BARAK SLUM AREA IN CIAMIS VILLAGE, CIAMIS REGENCY

Author:

Arif Rivan

NRP: 203060050

Slums are a problem faced by every city in Indonesia, even large cities in other developing countries. Studies on slums generally cover three things: the physical condition, the socio-economic conditions of those living there, and the impact of these conditions. The problems are increasing population density, a lack of public awareness of the environment, and the physical condition of buildings that are less than suitable for habitation. The density or regularity of buildings, thus characterizing slums, is urgently needed. The urgency of this research is to formulate appropriate management guidelines for this slum barracks area by analyzing the characteristics of slums, the level of slums, and formulating management guidelines. After that, there are study findings seen from the Decree on Slum Areas and the analysis carried out, there are differences in handling priorities.

Keywords: Slums, Slum Level, Priority Scale, Handling Directions

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Sasaran	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Sasaran	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	5
1.4.2 Ruang Lingkup Materi	9
1.5 Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Teori.....	15
2.1.1 Permukiman Kumuh	15
2.1.2 Ciri Ciri Kawasan Permukiman Kumuh	16
2.1.3 Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	17
2.1.4 Tingkat Kekumuhan Pada Lokasi Kawasan Kumuh	22
2.1.5 Skala Tingkat Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh	29
2.1.6 Pola Penanganan dan Program Penanganan Kawasan Kumuh di Indonesia ...	30
2.2 Tinjauan Kebijakan.....	34
2.2.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman	34
2.2.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	35
2.2.2.1 Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	35
2.2.2.2 Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	36

2.2.3 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037...	38
2.2.4 Rencana Strategis Dinas Perumahan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024.	40
2.3 Tinjauan Terdahulu.....	42
2.4 Kerangka Pustaka.....	52
BAB III METODOLOGI	53
3.1 Metode Penelitian	53
3.1.1 Metode Pendekatan.....	53
3.1.2 Metode Pengumpulan Data.....	54
3.1.2.1 Data primer	54
3.1.2.2 Data Sekunder.....	66
3.2 Metode Analisis	67
3.2.1 Mengidentifikasi Karakteristik Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis	67
3.2.2 Mengidentifikasi Tingkat Prioritas Kekumuhan di Kelurahan Ciamis	70
3.2.3 Teridentifikasi Arah Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ciamis	82
3.3 Matriks Analisis	87
3.4 Kerangka Analisis.....	89
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	90
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ciamis	90
4.1.1 Struktur Ruang.....	90
4.1.2 Pola Ruang.....	93
4.2 Gambaran Umum Kecamatan & Kelurahan Ciamis.....	95
4.2.1 Profil Kecamatan Ciamis	95
4.2.2 Profil Kelurahan Ciamis.....	98
4.3 Kondisi Fisik Wilayah	102
4.3.1 Topografi, Kemiringan Lereng dan Morfologi Kawasan.....	102
4.3.2 Curah Hujan dan Hidrologi Kawasan	107
4.3.3 Jenis Tanah dan Geologi Kawasan	110
4.3.4 Tutupan Lahan Kawasan.....	113
4.3.5 Risiko Bencana Alam Kawasan.....	115
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	118
5.1 Karakteristik Kawasan Kumuh di Kelurahan Ciamis	118
5.1.1 Vitalitas Non Ekonomi.....	118

5.1.1.1 Kondisi Bangunan Hunian	118
5.1.1.2 Kondisi Kependudukan.....	121
5.1.2 Vitalitas Ekonomi	123
5.1.3 Status Legalitas Tanah	126
5.1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana.....	130
5.1.4.1 Kondisi Jalan Lingkungan	130
5.1.4.2 Kondisi Drainase Lingkungan	136
5.1.4.3 Kondisi Penyediaan Air Bersih / Minum	140
5.1.4.4 Kondisi Pengelolaan Air Limbah.....	143
5.1.4.5 Kondisi Pengelolaan Persampahan	145
5.1.4.6 Kondisi Proteksi Kebakaran.....	147
5.1.5 Kesimpulan Karakteristik Kawasan Kumuh Barak	148
5.2 Tingkat Prioritas Kekumuhan di Kelurahan Ciamis	164
5.2.1 Kondisi Kekumuhan	164
5.2.1.1 Kondisi Bangunan Hunian.....	164
5.2.1.2 Kondisi Jalan Lingkungan	167
5.2.1.3 Kondisi Air Minum.....	169
5.2.1.4 Kondisi Drainase Lingkungan	171
5.2.1.5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah.....	173
5.2.1.6 Kondisi Pengelolaan Persampahan	175
5.2.1.7 Kondisi Proteksi Kebakaran.....	177
5.2.2 Status Legalitas Tanah	179
5.2.3 Pertimbangan Lain	180
5.2.3.1 Nilai Strategis Lokasi.....	180
5.2.3.2 Kependudukan	181
5.2.4 Kesimpulan Tingkat Prioritas Kekumuhan Kawasan Kumuh Barak.....	183
5.2.5 Perbandingan Tingkat Kekumuhan Hasil Analisis dengan SK Kumuh.....	185
5.3 Rencana Hasil Arahkan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ciamis ..	186
5.3.1 Tata Ruang dan Guna Lahan.....	187
5.3.2 Penataan Tanah dan Legalitas.....	189
5.3.3 PSU 1 + PSU 2 (Pembangunan Prasarana dan Utilitas) + (Pembangunan Perumahan dan Sarana Lingkungan Perumahan)	192
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	204

6.1 Kesimpulan	204
6.1.1 Karakteristik Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis.....	204
6.1.2 Tingkat Prioritas Kekumuhan Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis.....	204
6.1.3 Arahan Penanganan Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis	205
6.2 Saran	206
6.2.1 Saran Bagi Masyarakat	206
6.2.2 Saran Bagi Pemerintah.....	206
DAFTAR PUSTAKA.....	207
TABEL KENDALI	210
LAMPIRAN.....	215
Lampiran A Form SK Pembimbing	215
Lampiran B Form Bimbingan Dosem Pembimbing 1	216
Lampiran C Form Bimbingan Dosen Pembimbing 2	217
Lampiran D Form Surat Pengantar Survei.....	218

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Studi Rancangan Penelitian	50
Tabel II. 1 Kriteria Tingkat Kekumuhan	22
Tabel II. 2 Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018	35
Tabel II. 3 Parameter Tingkat Kekumuhan.....	36
Tabel II. 6 Kebijakan dan Strategi Penantaan Ruang Kabupaten Ciamis	38
Tabel II. 7 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	41
Tabel II. 8 Matriks Tinjauan Terdahulu.....	42
Tabel III. 1 Variabel - Variabel Penelitian.....	54
Tabel III. 2 Point Observasi Lapangan	57
Tabel III. 3 Point Topik Wawancara.....	59
Tabel III. 4 Populasi Bangunan / KK.....	62
Tabel III. 5 Sampel di Kawasan Kumuh Barak	65
Tabel III. 6 Kebutuhan Data Sekunder	66
Tabel III. 7 Karakteristik Kawasan Kumuh Barak.....	68
Tabel III. 8 Kriteria Kondisi Kekumuhan.....	70
Tabel III. 9 Contoh Tabel Pengisian Numerik Peraspek.....	74
Tabel III. 10 Jumlah Nilai Aspek Penilaian Tingkat Skala Prioritas Permukiman Kawasan Kumuh Barak Ciamis.....	74
Tabel III. 11 Rumusan Perhitungan Numerik Kawasan Kumuh	75
Tabel III. 12 Kriteria Aspek Legalitas Lahan	79
Tabel III. 13 Kriteria Aspek Pertimbangan Lain	79
Tabel III. 14 Formula Penentuan Tingkatan Prioritas.....	80
Tabel III. 15 Total Tingkat Kekumuhan Awal	82
Tabel III. 16 Keterangan Tingkatan Prioritas	84
Tabel III. 17 Matriks Analisis	87
Tabel III. 18 Hasil Formulasi Tingkatan Prioritas	183
Tabel IV. 1 Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis	93
Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk serta Jumlah Rumah di Kecamatan Ciamis Tahun 2024	95
Tabel IV. 3 Luas dan Pembagian Wilayah di Kecamatan Ciamis	96
Tabel IV. 4 Pembagian Administratif Lingkungan Kelurahan Ciamis.....	98

Tabel IV. 5 Sebaran Kawasan Kumuh Terdeliniasi di Kec. Ciamis berdasarkan SK Bupati Nomor 593/Kpts.719-Huk/2021	99
Tabel IV. 6 Topografi Kawasan Kumuh Barak Ciamis	102
Tabel IV. 7 Morfologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis	103
Tabel IV. 8 Kemiringan Lereng Kawasan Kumuh Barak Ciamis	103
Tabel IV. 9 Curah Hujan Kawasan Kumuh Barak Ciamis	107
Tabel IV. 10 Hidrologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis	107
Tabel IV. 11 Jenis Tanah Kawasan Kumuh Barak Ciamis	110
Tabel IV. 12 Geologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis	110
Tabel IV. 13 Tutupan Lahan Kawasan Kumuh Barak Ciamis	113
Tabel IV. 14 Tingkat Risiko Banjir di Kawasan Kumuh Barak Ciamis	115
Tabel IV. 15 Tingkat Risiko Bencana Gerakan Tanah di Kawasan Kumuh Barak Ciamis	115
Tabel V. 1 Kondisi Bangunan Hunian di Kawasan Kumuh Barak Kelurahan Ciamis ...	118
Tabel V. 2 Jumlah Kependudukan	121
Tabel V. 3 Pusat kegiatan strategis di Kawasan Kumuh Barak	123
Tabel V. 4 Legalitas Tanah menurut SK Bupati Ciamis Nomor 593/Kpts.719- Huk/2021	127
Tabel V. 5 Kondisi Aksesibilitas Jaringan Jalan	130
Tabel V. 6 Rekapitulasi Kondisi Aksesibilitas Jaringan Jalan	133
Tabel V. 7 Kondisi Saluran Drainase Lingkungan	136
Tabel V. 8 Sistem Jaringan Air PDAM di Kawasan Kumuh Barak	140
Tabel V. 9 Sistem Jaringan Air Bersih berdasarkan Sumber Air (KK)	141
Tabel V. 10 Sistem Pengelolaan Air Limbah berdasarkan Jenis & Jumlah KK	143
Tabel V. 11 Sistem Pengelolaan Persampahan Berdasarkan Jenis & Jumlah KK	145
Tabel V. 12 Karakteristik di RW 15 Kawasan Kumuh Barak	149
Tabel V. 13 Karakteristik di RW 16 Kawasan Kumuh Barak	156
Tabel V. 14 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Bangunan Hunian di RW 15	164
Tabel V. 15 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Bangunan Hunian di RW 16	166
Tabel V. 16 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Jalan Lingkungan RW 15	167
Tabel V. 17 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Jalan Lingkungan RW 16	168
Tabel V. 18 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Air Minum RW 15	169

Tabel V. 19 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Air Minum RW 16.....	170
Tabel V. 20 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Drainase Lingkungan RW 15	171
Tabel V. 21 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Drainase Lingkungan RW 16	172
Tabel V. 22 Hasil Nilai Numerik Kondisi Pengelolaan Air Limbah RW 15.....	173
Tabel V. 23 Hasil Nilai Numerik Kondisi Pengelolaan Air Limbah RW 16.....	174
Tabel V. 24 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan RW 15	175
Tabel V. 25 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan RW 16	176
Tabel V. 26 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran RW 15	177
Tabel V. 27 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran RW 16	178
Tabel V. 28 Perbandingan Tingkat Kekumuhan Hasil Analisis dengan SK Kumuh.....	185
Tabel V. 29 Sebagian Contoh Legalitas (By Name By Address) di Kawasan Kumuh Barak.....	191
Tabel V. 30 Arahkan Penanganan di Kawasan Kumuh Barak	193

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Peta Wilayah Kajian Kecamatan Ciamis	6
Gambar I. 2 Peta Wilayah Kajian Kelurahan Ciamis	7
Gambar I. 3 Peta Deliniasi Kumuh Barak Kelurahan Ciamis.....	8
Gambar IV. 1 Peta Struktur Ruang Kabupaten Ciamis.....	91
Gambar IV. 2 Peta Pola Ruang Kabupaten Ciamis.....	94
Gambar IV. 3 Peta Kecamatan Ciamis	97
Gambar IV. 4 Peta Kelurahan Ciamis.....	100
Gambar IV. 5 Deliniasi Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis	101
Gambar IV. 6 Peta Topografi Kawasan Kumuh Barak Ciamis	104
Gambar IV. 7 Peta Kemiringan Lereng Kawasan Kumuh Barak Ciamis	105
Gambar IV. 8 Peta Morfologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis	106
Gambar IV. 9 Peta Curah Hujan Kawasan Kumuh Barak Ciamis.....	108
Gambar IV. 10 Peta Hidrologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis.....	109
Gambar IV. 11 Peta Jenis Tanah Kawasan Kumuh Barak Ciamis	111
Gambar IV. 12 Peta Geologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis	112
Gambar IV. 13 Peta Tutupan Lahan Kawasan Kumuh Barak Ciamis	114
Gambar IV. 14 Peta Rawan Bencana Banjir di Kawasan Kumuh Barak Ciamis	116
Gambar IV. 15 Peta Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kawasan Kumuh Barak Ciamis	117
Gambar V. 1 Visualisasi Kondisi Bangunan Hunian di Kawasan Kumuh Barak Kelurahan Ciamis	119
Gambar V. 2 Peta Bangunan Hunian	120
Gambar V. 3 Visualisasi Warga di teras Rumah	122
Gambar V. 4 Visualisasi Masjid dan Mushola	126
Gambar V. 5 Peta Legalitas Tanah di Kawasan Kumuh Barak	128
Gambar V. 6 Visualisasi Kondisi Aksesibilitas Jaringan Jalan	134
Gambar V. 7 Peta Kondisi Jaringan Jalan.....	135
Gambar V. 8 Visualisasi Kondisi Drainase Lingkungan	138
Gambar V. 9 Peta Kondisi Drainase Lingkungan	139
Gambar V. 10 Visualisasi Sistem Jaringan Air PDAM	140
Gambar V. 11 Visualisasi Jaringan Kondisi Air Bersih Sumur Bor Galian	141
Gambar V. 12 Peta Penyediaan Air Bersih.....	142

Gambar V. 13 Visualisasi Pengelolaan Air Limbah	143
Gambar V. 14 Peta Pengelolaan Air Limbah.....	144
Gambar V. 15 Visualisasi Kondisi Pengelolaan Persampahan dengan cara Dibakar	145
Gambar V. 16 Peta Pengelolaan Persampahan	146
Gambar V. 17 Media Sarana Sistem Proteksi Kebakaran.....	147
Gambar V. 18 Peta Kondisi Kekumuhan di Kawasan Kumuh Barak.....	163
Gambar V. 19 Peta Overlay Kondisi Kekumuhan, Legalitas Tanah dan Pemanfaatan Pola Ruang di Kawasan Kumuh Barak.....	184
Gambar V. 20 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Kumuh Barak.....	188
Gambar V. 21 Peta Tingkatan Prioritas dan Rencana Penanganan Bangunan Hunian di Kawasan Kumuh Barak	197
Gambar V. 22 Peta Tingkatan Prioritas dan Rencana Penanganan Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Barak	198
Gambar V. 23 Peta Tingkatan Prioritas dan Rencana Penanganan Drainase Lingkungan di Kawasan Kumuh Barak	199
Gambar V. 24 Peta Tingkatan Prioritas dan Rencana Penanganan Pengelolaan Air Minum di Kawasan Kumuh Barak	200
Gambar V. 25 Peta Tingkatan Prioritas dan Rencana Penanganan Pengelolaan Air Limbah di Kawasan Kumuh Barak.....	201
Gambar V. 26 Peta Tingkatan Prioritas dan Rencana Penanganan Pengelolaan Persampahan di Kawasan Kumuh Barak	202
Gambar V. 27 Peta Tingkatan Prioritas dan Rencana Penanganan Proteksi Kebakaran di Kawasan Kumuh Barak	203

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh adalah masalah yang dihadapi di setiap kota di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Pengkajian tentang permukiman kumuh (*slum*), pada umumnya mencakup tiga hal, diantaranya keadaan fisik, keadaan sosial ekonomi yang bermukim tersebut serta dampak dari kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi buruk, infrastruktur serta sanitasi dan drainase serta persampahan yang kurang berfungsi dengan baik. RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan).

Dalam penanganan permukiman kumuh, kalangan ahli mengemukakan pilihan-pilihan strategi penanganan permukiman kumuh berdasarkan persebaran kawasan kumuh ataupun berdasarkan kebutuhan *problem solution* atau pemecahan masalah. Pilihan-pilihan strategi penanganan tersebut adalah: (1) penanganan terpadu yakni perbaikan dan pemugaran, perumahan, relokasi (Emerson, 2011); (2) Penataan (Supriyatno, 2014); (3) penerapan konsep pembangunan bertumpu pada masyarakat (Conyers, 1991; Daljoeni, 1997 dalam Sutiarti (2006).

KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten (termasuk di Kabupaten Ciamis) pada 34 Provinsi (termasuk di Provinsi Jawa Barat) yang menjadi “*platform*” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana Pemerintah Daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku 7 kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi

masyarakat (Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh, DJCK Kementerian. PUPR Tahun 2016).

Tujuan dari program Kotaku tidak lain adalah mengurangi jumlah wilayah Kota Kumuh yang mencapai 11.067 Desa/Kelurahan dengan total wilayah seluas 23.656 Ha. Program ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan infrastruktur Indonesia sebesar 4,1% per tahun dan merupakan pertumbuhan paling tinggi di Kawasan Asia (<http://kotaku.pu.go.id>). Sebaran Kawasan kumuh Perkotaan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 – 2019 menurut Badan Pusat Statistik mengalami kenaikan yang mana pada tahun 2018 sebesar 11.16 % dan pada tahun 2019 menjadi 19.86 %. (*Susenas, BPS*).

Setelah melihat data di Indonesia dan Provinsi Jawa Barat maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 593/Kpts.719- Huk/2021 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis terdapat 71 kawasan kumuh dengan luasan 366,54 ha, yang terbagi di dalam kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis memandang perlu untuk menyusun peta kawasan kumuh prioritas sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis. Sehingga pada akhirnya pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam membuat kebijakan terkait arahan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Ciamis.

Dengan adanya persebaran kawasan permukiman kumuh tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis mengalami masalah dalam arahan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dan pengelompokan basis data kumuh. Data yang mendukung secara teknis lapangan belum terintegrasi, multisektor dan berbasis kawasan. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sulit dalam mengambil keputusan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan. Hal ini berefek kepada arahan penanganan kawasan kumuh yang telah berlangsung lama belum mampu memberikan hasil yang optimal (*Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Ciamis*)

Dari sekian banyaknya kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Ciamis, Kelurahan Ciamis khususnya Kawasan Kumuh Barak, terdapat perbedaan yang sangat kontras, yaitu bangunan yang sudah tidak layak huni dan beberapa penunjang fasilitas prasarana tidak memadai serta kawasan kumuh barak ini berada di pusat kota, oleh karena itu penulis mengambil wilayah studi ini sebagai acuan penelitian dalam penanganan permukiman kawasan kumuh barak di Kelurahan Ciamis.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka penulis membuat penelitian di Kelurahan Ciamis Kumuh Barak yang dimana dalam arahan penanganannya merupakan salah satu target program pemerintah pusat di Kabupaten Ciamis. Dengan sumber dana DAK perumahan (Bantuan Rumah Swadaya) untuk arahan penanganan yang menyebar di 10 kecamatan/kelurahan di Kabupaten Ciamis (*LKPJ Bupati Kabupaten Ciamis 2021-2023*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai kriteria dari beberapa sumber dan beberapa asumsi yang dikembangkan oleh penulis. Kriteria yang digunakan adalah Variabel - variabel yang menyebabkan timbulnya permukiman itu sendiri sehingga dimulai dari identifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh, tingkat dan skala prioritas dan akan ditemukan solusi arahan penanganan permukiman kawasan kumuh tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan maka permasalahan yang ada di Kelurahan Ciamis saat ini yang paling menonjol adalah masih adanya permukiman yang kurang layak yang ditempati masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin rendahnya pendapatan masyarakat karena dominasi mata pencaharian warga adalah sebagai buruh swasta dan pedagang kaki lima sehingga untuk mengandalkan pekerjaan tersebut sangat sulit dapat mensejahterakan (*Hasil Observasi awal, 2024*).

Berdasarkan hal tersebut maka diambil rumusan masalah sebagai berikut diantaranya meliputi:

- Kondisi Fisik Bangunan yang kurang layak ditempati dan kepadatan bangunan sehingga mencirikan kekumuhan di Kelurahan Ciamis
- Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang relatif rendah yang disebabkan kurang minatnya mengenyam pendidikan merupakan penyebab timbulnya berbagai macam penyakit sosial yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan sumber hasil observasi dan sumber *detikjabar*. maka timbul pertanyaan yang dapat dijadikan bahan kajian dalam penyusunan laporan Tingkat Akhir ini meliputi :

1. Bagaimana karakteristik kekumuhan di kelurahan ciamis?
2. Bagaimana tingkat prioritas yang terjadi di kelurahan ciamis?
3. Bagaimana arahan penanganan yang tepat di kelurahan ciamis?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuannya yaitu merumuskan pola penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Ciamis.

1.3.2 Sasaran

Sasaran yang harus dicapai dalam mencapai tujuan diatas adalah sebagai berikut :

1. Teridentifikasinya Karakteristik Kawasan Kumuh di Kelurahan Ciamis
2. Teridentifikasinya Tingkat Prioritas Kekumuhan di Kelurahan Ciamis
3. Teridentifikasinya Arahan Penanganan Kekumuhan di Kelurahan Ciamis

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian bidang perencanaan wilayah dan kota terdapat dua macam ruang lingkup yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi atau substansi. Ruang lingkup wilayah merupakan ruang lingkup yang bersifat spasial atau keruangan secara fisik yang menjadi objek studi penelitian dengan batasan

administratif. Ruang lingkup materi atau substansi lebih difokuskan kepada substansi atau materimateri lain yang berhubungan dengan tema yang diambil.

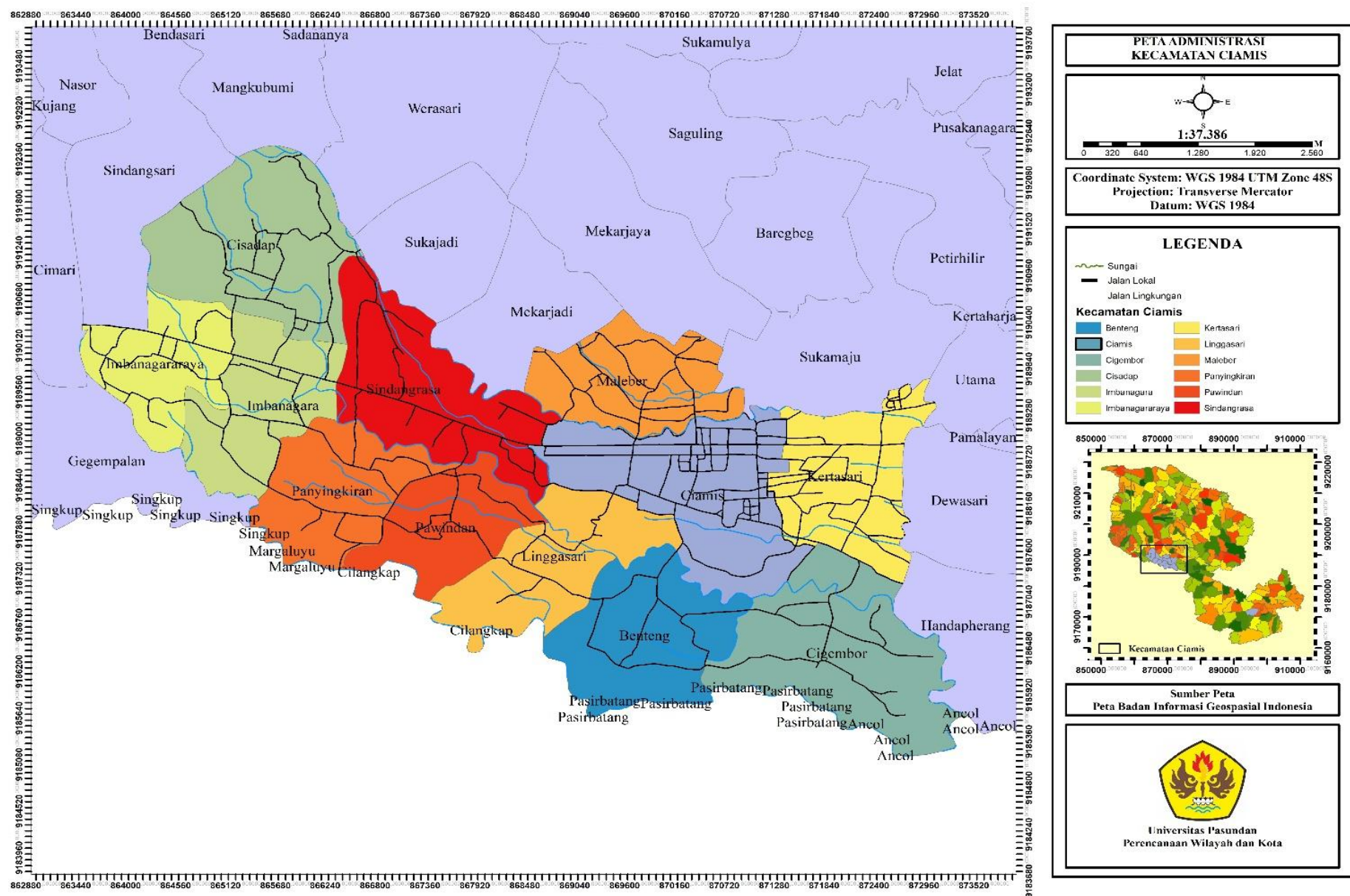
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Pada penelitian ini, fokus wilayah yang diamati merupakan Kawasan Permukiman yang mempunyai tingkat kepadatan dan kekumuhan tinggi, Adapun ruang lingkup wilayahnya yaitu Kelurahan Ciamis merupakan salah satu nama wilayah Kecamatan dari 27 wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Luas Kelurahan Ciamis khususnya di RW 15 dan 16, untuk di RW 15 itu terdiri dari 3 RT dan untuk di RW 16 terdiri 2 RT. Atau sekitar 6.14 ha

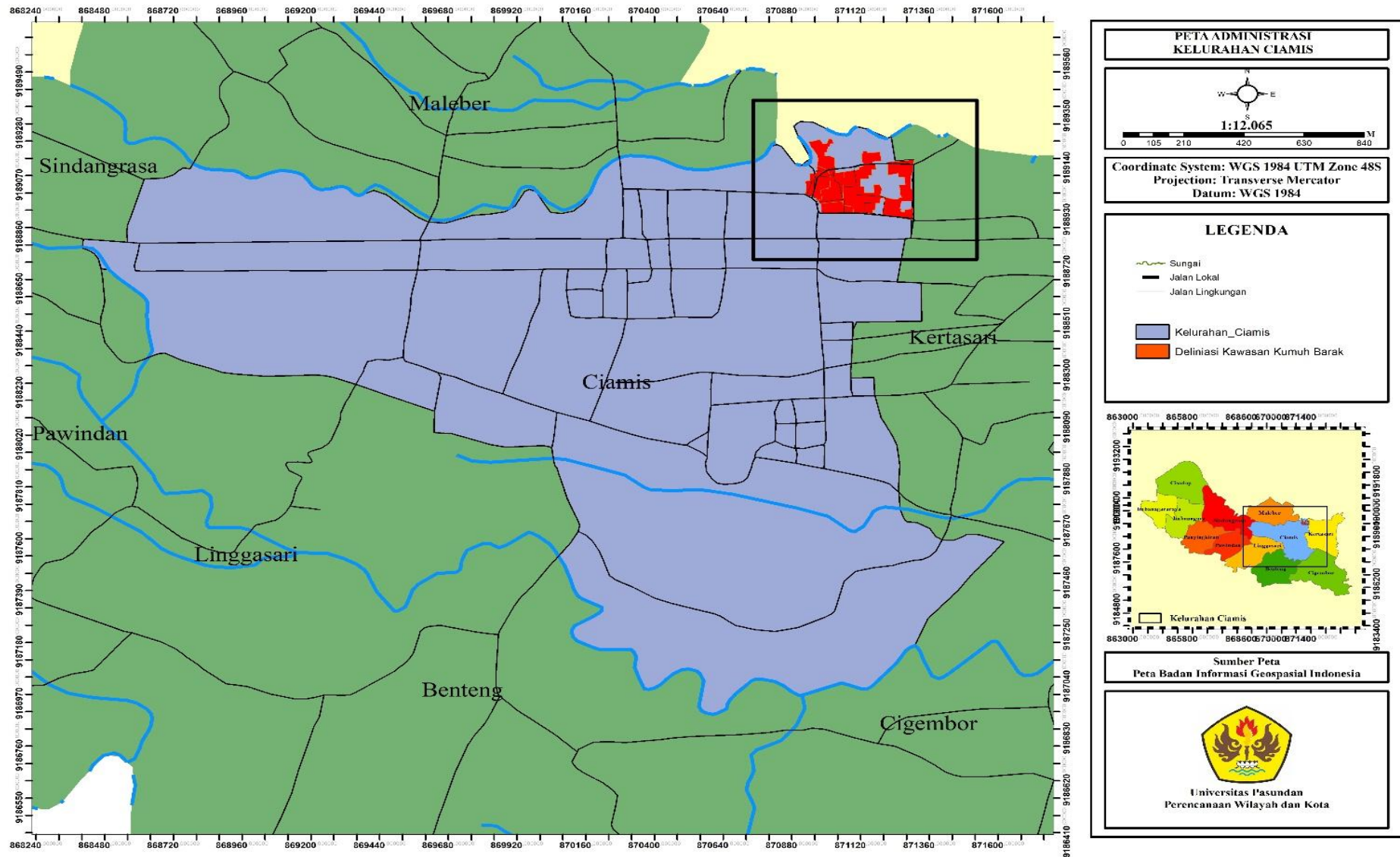
3,42 Km^2 Atau 2,12 % dari seluruh luas Kabupaten Ciamis, serta jumlah kepadatan penduduk nya yaitu 5.000/ km^2 .

Secara Administratif Kelurahan Ciamis berada pada ketinggian sekitar 0 – 500 MDPL (Diatas Permukaan Laut). Dengan keadaan letak geografis tersebut, Kelurahan Ciamis mempunyai batas batas wilayah sebagai berikut :

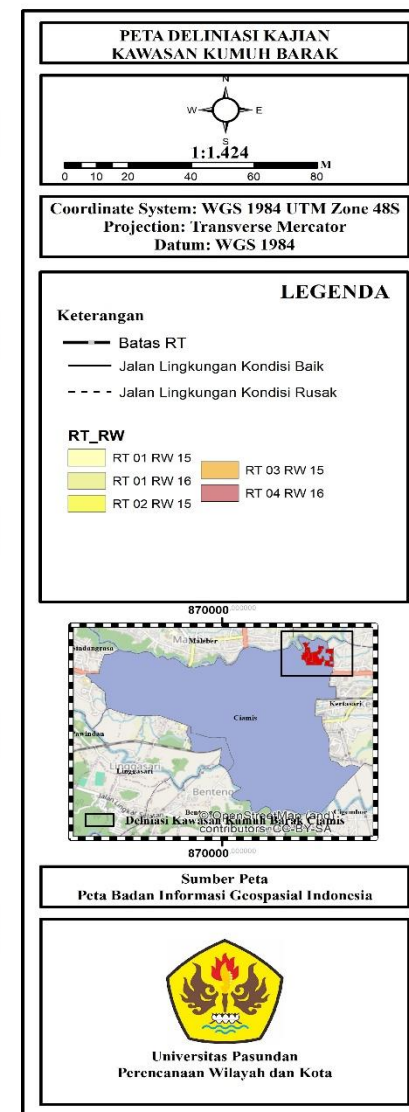
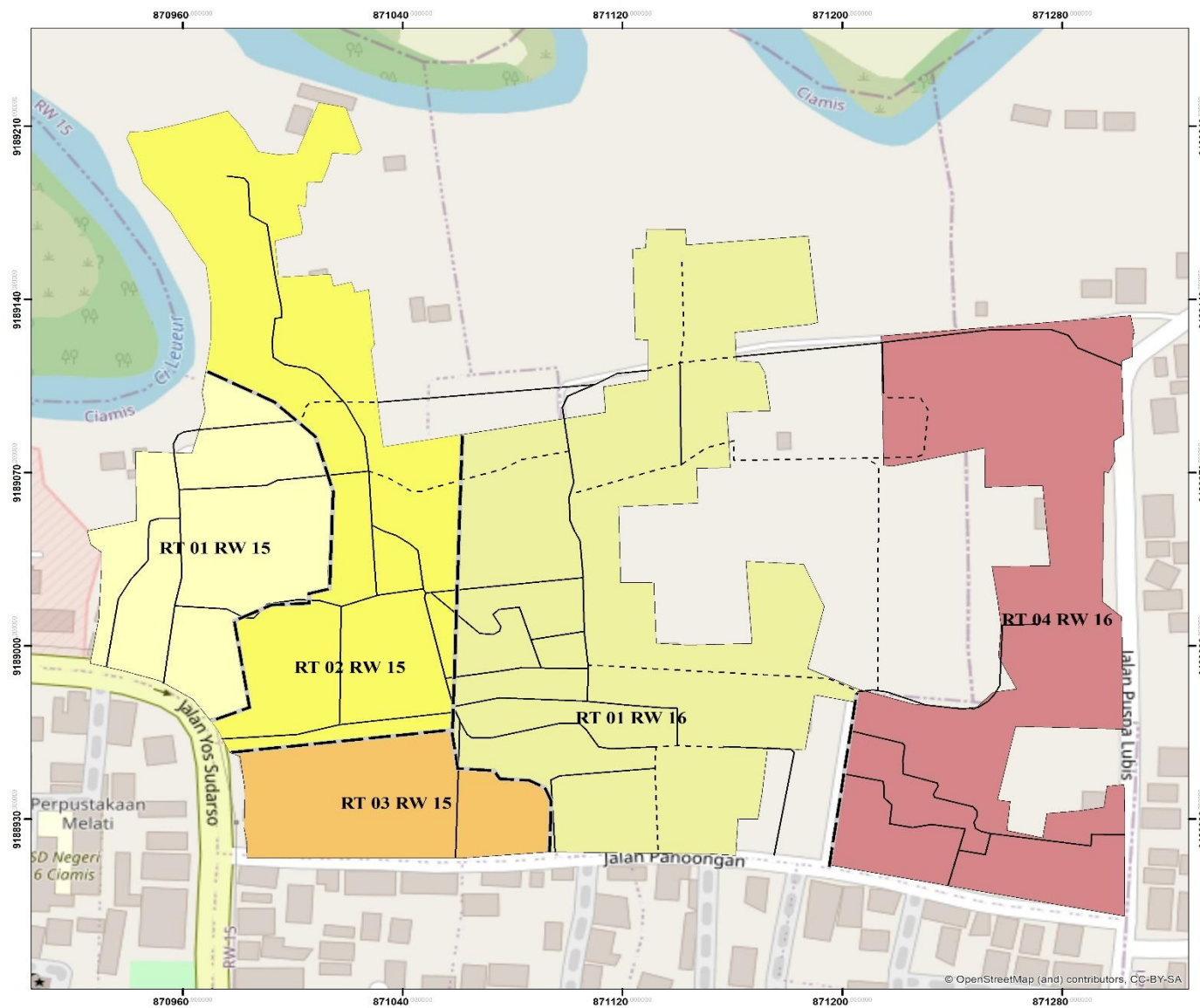
- Utara : Kelurahan Maleber
- Barat : Kelurahan Kertasari dan Kelurahan Cigembor
- Selatan : Kelurahan Benteng
- Timur : Kelurahan Sindangrasa dan Kelurahan Linggasari



Gambar I. 1 Peta Wilayah Kajian Kecamatan Ciamis



Gambar I. 2 Peta Wilayah Kajian Kelurahan Ciamis



Gambar I. 3 Peta Deliniasi Kumuh Barak Kelurahan Ciamis

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Materi adalah penjelasan batasan materi yang dilakukan dalam penelitian. Berikut materi yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Mengidentifikasi Karakteristik Kawasan Kumuh Permukiman di Kelurahan Ciamis, dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh dengan indikator sebagai berikut :
 - 1) Vitalitas Non Ekonomi
 - a. Kondisi Fisik Bangunan
 - Ketidakteraturan Bangunan
 - Tingkat Kepadatan Bangunan
 - Ketidaksesuaian kualitas Bangunan
 - b. Kondisi Kependudukan
 - Tingkat Kepadatan Penduduk
 - Tingkat Pertumbuhan Penduduk
 - 2) Vitalitas Ekonomi
 - a. Letak Strategis Kawasan
 - b. Sosial Budaya Kawasan
 - 3) Status Tanah
 - a. Kriteria Status Tanah
 - 4) Kondisi Sarana dan Prasarana
 - a. Kondisi Jalan
 - b. Kondisi Drainase
 - c. Kondisi Air Bersih
 - d. Kondisi Air Limbah
 - e. Kondisi Persampahan
 - f. Kondisi Proteksi Kebakaran
2. Mengidentifikasi Tingkat Prioritas kawasan kumuh barak berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan

Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh.

1) Kondisi Kekumuhan

- a. Keteraturan Bangunan Gedung: Keteraturan bangunan merujuk pada tingkat keteraturan dan kepatuhan suatu bangunan terhadap aturan dan standar yang berlaku. Dalam konteks perumahan dan permukiman, keteraturan bangunan meliputi garis sempadan bangunan, tata bangunan, kualitas bangunan, dan ketentuan teknis lainnya.
- b. Jalan Lingkungan: Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rerata rendah. Jalan ini umumnya digunakan untuk menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
- c. Penyediaan Air Minum: merupakan proses penyediaan air bersih bagi masyarakat dengan mengolah sumber air baku sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan.
- d. Drainase Lingkungan: saluran pembuangan air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Drainase lingkungan berfungsi untuk mengalirkan air dari satu titik ke titik lain, sehingga dapat membantu proses pengaliran air seperti curah hujan agar tidak terjadi genangan bahkan hingga bencana banjir.
- e. Pengelolaan Air Limbah: proses yang bertujuan untuk menghilangkan kontaminan dari air limbah dan mengubahnya menjadi air bersih yang aman untuk dibuang kembali ke lingkungan.
- f. Pengelolaan Persampahan: serangkaian kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah hingga pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan akhir.
- g. Proteksi kebakaran: dengan melihat adanya ketersediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran disekitar wilayah tersebut.

2) Legalitas Tanah

- a. Status Tanah: merujuk pada keabsahan kepemilikan tanah yang diakui oleh hukum. Legalitas status tanah dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah hak milik yang tertera atas nama pemilik
- b. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang: kesesuaian penggunaan lahannya dibandingkan rencana tata ruang dengan kawasan permukiman kumuh dengan klasifikasi Tanah Legal dan Tanah Ilegal.

3) Pertimbangan Lain

- a. Nilai Strategis Lokasi: faktor yang dapat menentukan nilai strategis suatu lokasi antara lain aksesibilitas, kepadatan, pemanfaatan, dan potensi pasar.
- b. Kepadatan Penduduk: banyaknya penduduk yang tinggal di suatu wilayah per satuan luas. Satuan luas yang sering digunakan adalah kilometer persegi (km²) atau hektar (ha).
- c. Kondisi Sosial, Ekonomi, Dan Budaya: Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya merujuk pada situasi atau keadaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kondisi sosial mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, seperti interaksi sosial, struktur sosial, dan nilai-nilai sosial. Kondisi ekonomi mencakup aspek-aspek seperti pendapatan, pekerjaan, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi. Sedangkan kondisi budaya mencakup aspek-aspek seperti adat istiadat, kepercayaan, seni, dan budaya populer

3. Merumuskan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh dari hasil identifikasi kawasan kumuh (sasaran 1), tingkat dan skala prioritas (sasaran 2) diketahui bahwa variabel kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, ini adalah indikator variabel yang membentuk Permukiman Kumuh.

Selanjutnya setelah melakukan pentabelan variabel diatas dilakukanlah arahan penanganan dengan dasar Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman dimana dalam Bagian Ketiga Pasal 97

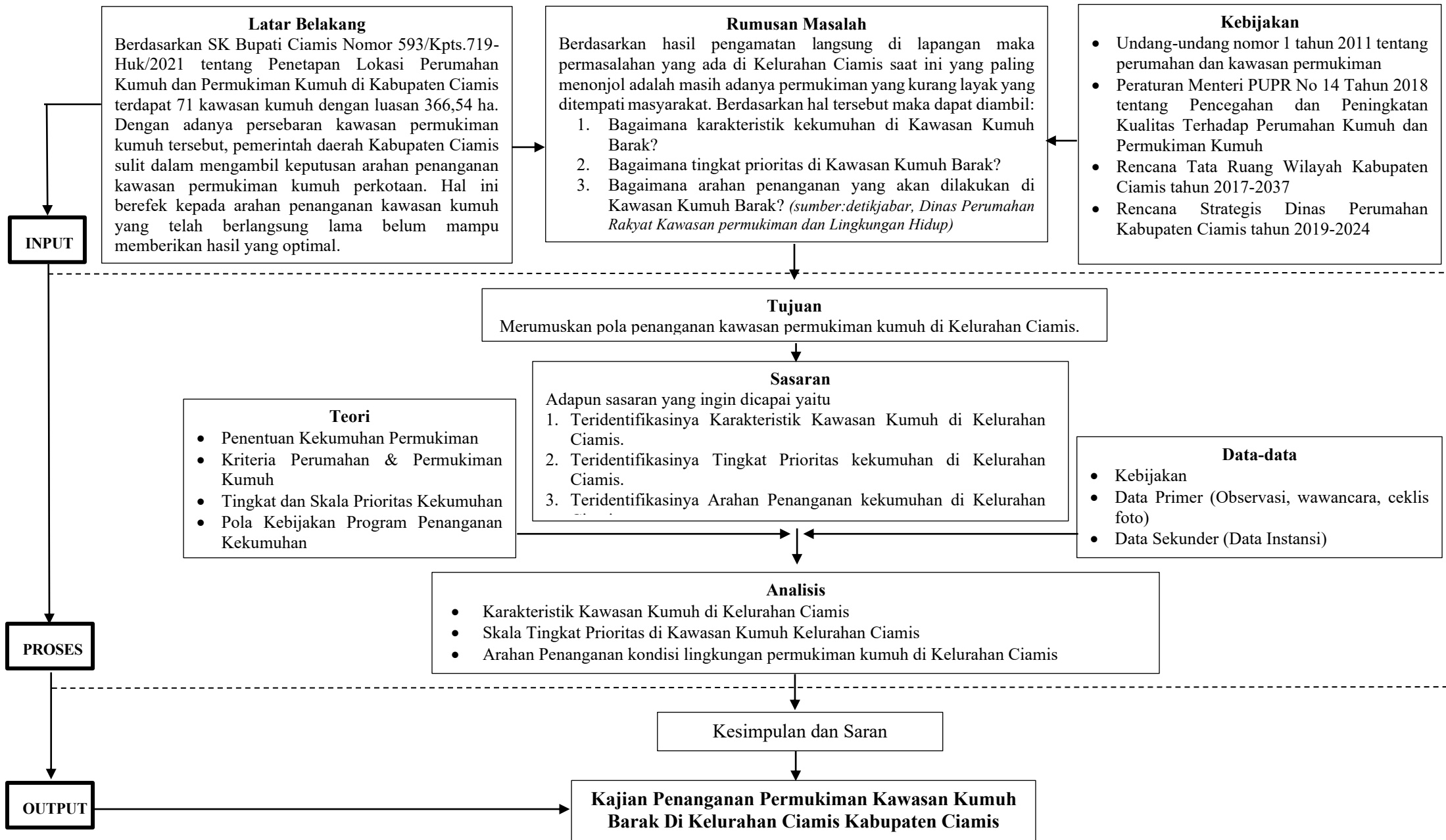
tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh yaitu sebagai berikut:

- Pemugaran
- Peremajaan
- Permukiman Kembali

Dalam peningkatan kualitas permukiman kawasan kumuh diatas ada beberapa hal yang diperhatikan dengan ketentuan penanganan fisik yang diatur sesuai dengan faktor permasalahan kawasan kekumuhan setiap lokasi yang teridentifikasi yaitu Kondisi kekumuhan yang meliputi bangunan gedung, jalan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah dan persampahan serta proteksi kebakaran.

Adapun kerangka pikir dari proses penyusunan materi studi ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar I.1 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan penulisan laporan yang akan dijelaskan dalam penelitian kali ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup materi serta sistematika pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang tinjauan teori, tinjauan kebijakan, tinjauan penelitian terdahulu dan kerangka pustaka.

BAB III METODOLOGI

Menjelaskan tentang metode penelitian, metoda analisis dan matriks analisis serta kerangka analisis

BAB IV GAMBARAN UMUM

Menjelaskan tentang gambaran umum wilayah penelitian, gambaran lokasi penelitian dan kondisi fisik wilayah

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang analisis karakteristik kawasan kumuh barak, analisis skala tingkat prioritas kekumuhan dan rencana hasil arahan penanganan permukiman kawasan kumuh.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan tentang kesimpulan dari 3 sasaran dan saran bagi masyarakat maupun pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Dalam tinjauan teori menjelaskan tentang permukiman kumuh, ciri-ciri permukiman kumuh, kriteria permukiman kumuh, tingkat kekumuhan dan skala prioritas penanganan permukiman kumuh.

2.1.1 Permukiman Kumuh

Menurut Luthfi' Mutaali dan Arif Rahman Nugroho (2019) “Permukiman dalam bahasa Inggris, permukiman dikenal sebagai *human settlement*, yaitu suatu kumpulan manusia baik di kota maupun desa, lengkap dengan aspek- aspek sosial, spiritual, dan nilai- nilai budaya yang menyertainya.

Beberapa konsep menyangkut permukiman, Menurut Finch (1957) dalam Nugroho (2010), *settlement* atau permukiman adalah kelompok satuan- satuan tempat tinggal atau kedamaian manusia yang mencakup fasilitas seperti bangunan rumah, jalur jalan dan fasilitas lain yang digunakan sebagai sarana pelayanan manusia tersebut. Dari batasan tersebut jelas bahwa permukiman bukan hanya kelompok bangunan tempat tinggal tetapi juga di dalamnya termasuk semua sarana dan prasarana penunjang kehidupan penghuninya. Hudson (1970) menjelaskan istilah *settlement* dalam dua arti yang berbeda walau saling berkaitan, yakni permukiman yang mengacu pada arti kolonisasi pada daerah baru dengan proses migrasi penduduk di dalamnya dan permukiman yang mengacu pada arti kelompok- kelompok bangunan rumah tinggal manusia.

Menurut Barlow dan Newton (1971) dalam Nugroho (2010), istilah permukiman atau *settlement* adalah semua tipe tempat tinggal manusia baik satu gubuk atau pondok tunggal beratapkan dedaunan, atau rumah- rumah di perlandangan hingga permukiman yang sangat besar/ kota dengan ribuan kota tempat tinggal. Zee (1979) dalam Ridarjono (2012) memberikan batasan *settlement* bahwa “*The word settlement means the process where by people become sedentary*

whithin in area the result of this process”. Dalam hal ini kata *settlement* berarti proses penduduk dapat bertempat tinggal, dengan demikian dalam bahasa Indonesia arti *settlement* yang dikemukakan oleh Zee berarti permukiman sekaligus permukiman.

Berdasarkan Undang- undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman terdapat pengertian- pengertian sebagai berikut:

- Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
- Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan yang layak huni.
- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
- Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian perumahan dan permukiman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat erat hubungannya, pada hakikatnya saling melengkapi Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

2.1.2 Ciri Ciri Kawasan Permukiman Kumuh

Ciri dari pemukiman kumuh adalah letak dan bentuk perumahan yang tidak teratur, sarana infrastruktur kota sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali,

tingkat pendidikan yang rendah, kepadatan bangunan dan penduduknya, pendapatan penduduk yang rendah, serta pada umumnya penduduknya bekerja disektor informal. Bangunan yang padat dan material bangunannya dalam keadaan darurat tetapi karakteristik pemukiman kumuh sebenarnya terbagi-bagi dan tertentu. Menurut Anas (1995), ada tiga bentuk dasar pemukiman kumuh, yaitu :

- Menetap dan permanen, yaitu pemukiman kumuh yang terjadi secara organis akibat semakin padatnya penduduk pada suatu kawasan. Pemukiman ini berasal dari lingkungan yang teratur tetapi lambat laun menjadi kumuh akibat kurang kontrolnya penendalian pembangunan oleh penghuni pemukiman tersebut.
- Transit, yaitu bentuk pemukiman yang kumuh yang sifatnya sementara dan sebagian besar penghuninya menetap untuk sementara waktu.
- Permukiman kumuh yang tumbuh karena adanya spekulasi demi mendapatkan ganti rugi bila digusur. Kondisi ini berlangsung secara perlahan-lahan menempati lahan kosong yang ada pada tempat terlarang di pusat kota.

2.1.3 Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Menurut Deliana (2015) permukiman kumuh dapat dilihat berdasarkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi dan dapat dipastikan kondisi fisiknya tidak sesuai dengan standar rumah yang layak huni serta kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung. Dari kondisi fisik dapat dilihat bagaimana kualitas bangunannya, kepadatan bangunan, dan kondisi sarana dan prasarana permukiman. karakteristik permukiman kumuh mempunyai kondisi perumahan dengan kepadatan tinggi dan ukuran unit perumahan relatif kecil, atap rumah di daerah kumuh biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan dinding

Permen PUPR No.14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti, bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air

minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

1. Kriteria Kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung yang mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang. Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang meliputi :
 - a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata bangunan dan lingkungan, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona
 - b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan.
 - c. Tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman kumuh dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR dan RTBL atau koefisien lantai bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR dan RTBL.
2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan yang meliputi :
 - a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman.
 - b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
 - c. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagai lingkungan perumahan dan permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
 - d. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk yang merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan serjadi kerusakan permukaan jalan.
3. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum yang mencakup :
 - a. Ketidaktersedian akses aman air minum

- b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku
 - c. Ketidaktersediaan akses aman air minum merulakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarakat kesehatan.
 - d. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu yang merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 30 liter/orang/hari.
4. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan yang mencakup:
- a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan.
 - b. Ketidaktersediaan drainase
 - c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
 - d. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya.
 - e. Kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk.
 - f. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan yang merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
 - g. Kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk yang merupakan kondisi dimana kualitas kontruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup telah terjadi kerusakan.
5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah yang mencakup :
- a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
 - b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

- c. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
 - d. Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat.
6. Kriteria ditinjau dari pengelolaan persampahan yang mencakup:
- a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
 - b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
 - c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
 - d. Kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai seperti, tempat sampah dengan pemilihan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tempat pengumpulan sampah (TPS) pada skala 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan, gerobak sampah dan atau truk sampah pada skala lingkungan, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.
 - e. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis yang merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai, pewadahan dan pemilihan domestik, pengumpulan lingkungan, pengangkutan lingkungan, dan pengolahan lingkungan.
7. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran yang merupakan kondisi dimana tidak tersedianya :
- a. Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan
 - b. Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran
 - c. Sarana komunikasi untuk pembitahuan terjadinya kebakaran
 - d. Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

Berikut adalah Kriteria Permukiman Kumuh dan Kriteria Khusus Permukiman Kumuh yang berdasarkan sebagai berikut :

1. Kriteria Umum Permukiman Kumuh
 - a. Mandiri dan produktif dalam banyak aspek, namun terletak pada tempat yang perlu dibenahi.
 - b. Keadaan fisik hunian minim dan perkembangannya lambat. Meskipun terbatas, namun masih dapat ditingkatkan.
 - c. Para penghuni lingkungan permukiman kumuh pada umumnya bermata pencaharian tidak tetap dalam usaha non formal dengan tingkat pendidikan rendah.
 - d. Pada umumnya penghuni mengalami kemacetan mobilitas pada tingkat yang paling bawah, meskipun tidak miskin serta tidak menunggu bantuan pemerintah, kecuali dibuka peluang untuk mendorong mobilitas tersebut.
 - e. Kehadirannya perlu dilihat dan diperlukan sebagai bagian sistem kota yang satu, tetapi tidak semua begitu saja dapat dianggap permanen.
2. Kriteria Khusus Permukiman Kumuh
 - a. Berada di lokasi tidak legal
 - b. Dengan keadaan fisik yang substandar, penghasilan penghuninya amat rendah miskin.
 - c. Tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota.
 - d. Tidak diingini kehadirannya oleh umum, kecuali yang berkepentingan.
 - e. Permukiman kumuh selalu menempati lahan dekat pasar kerja (nonformal), ada sistem angkutan yang memadai dan dapat dimanfaatkan secara umum walau tidak selalu murah.

2.1.4 Tingkat Kekumuhan Pada Lokasi Kawasan Kumuh

Menurut Drakakakis dan Grimes (dalam Muta'ali, 2016: 57), tingkat permukiman kumuh menurutnya adalah permukiman yang memiliki tingkat kekumuhan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, dan kualitas lingkungan fisik yang buruk.

Penentuan Tingkat Permukiman Kumuh berdasarkan variabel dan indikator yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2018.

Tabel II. 1 Kriteria Tingkat Kekumuhan

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	- Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau - Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
			51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
			25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	- KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; - KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau - Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: - untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha - untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha	76% - 100% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan
			51% - 75% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan
			25% - 50% bangunan memiliki lepadatan tidak sesuai ketentuan

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter
	c. Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan: • pengendalian dampak lingkungan • pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum • keselamatan bangunan gedung • kesehatan bangunan gedung • kenyamanan bangunan gedung • kemudahan bangunan gedung	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
			• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	• 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
			• 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
			• 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	• Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk • 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk • 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	• Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter
		berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
			25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
	b. Tidak Terpenuhi Kebutuhan Air Minum	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal 60 liter/orang/hari	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
			51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
			51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
			25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	b. Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman yaitu saluran tersier dan saluran lokal	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter
	c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan
			76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
			25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
	d. Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannyapemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman,baik: 1. pemeliharaan rutin; dan/atau 2. pemeliharaan berkala	76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
			51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
			25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk
			51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter
			25% - 50% area memiliki kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
			51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
			25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	- Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: - kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; - tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
			51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
			25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis
6. Kondisi Pengelolaan Air Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	- Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: - tempat sampah	76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter
		dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;	an yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada skala lingkungan;	51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		3. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan	25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan	
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:	76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
		1. pewadahan dan pemilahan domestik;	51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
		2. pengumpulan lingkungan;	
	c. Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3. pengangkutan lingkungan	25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar
		4. pengolahan lingkungan	
		Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik:	76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
		1. Pemeliharaan rutin dan	51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
		2. Pemeliharaan berkala	

Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter
			25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara
7. Proteksi Kebakaran	a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu : - Pasokan air - Jalan lingkungan - Sarana komunikasi - Data sistem proteksi kebakaran lingkungan	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
			51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: - Alat pemadam api ringan (APAR) - Kendaraan pemadam kebakaran - Mobil tangga sesuai kebutuhan	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
			51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Sumber : Permen PUPR No 14 Tahun 2018

2.1.5 Skala Tingkat Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh

Didalam Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018 Skala prioritas penanganan adalah pengelompokan permukiman kumuh kedalam berbagai klasifikasi prioritas penanganan dengan memperhatikan aspek penilaian permukiman kumuh yaitu kondisi kekumuhan, kondisi legalitas tanah/lahan dan pertimbangan lain.

1. Kondisi Kekumuhan

- Bangunan Gedung (ketidakteraturan, tingkat kepadatan, ketidaksesuaian)
- Jalan Lingkungan (tidak melayani seluruh lingkungan perumahan, permukaan jalan lingkungan buruk)
- Penyediaan Air Minum (akses air minum tidak tersedia, kebutuhan air minimal setiap individu tidak terpenuhi)
- Drainase Lingkungan (drainase tidak tersedia, drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan, kualitas konstruksi)
- Pengelolaan Air Limbah (sistem pengelolaan air limbah, prasarana dan sarana nya tidak memenuhi persyaratan teknis)
- Pengelolaan Persampahan (sistem pengelolaan sampah, prasarana dan sarana nya tidak memenuhi persyaratan teknis)
- Proteksi Kebakaran (prasarana dan sarana kebakaran tidak tersedia)

2. Legalitas Lahan

- Kejelasan status penguasaan lahan dan kesesuaian RTR

3. Pertimbangan Lain

Pertimbangan akan potensi, baik ekonomi, sosial maupun budaya. Pertimbangan akan lokasi permukiman, dan pertimbangan kondisi kependudukan. Pertimbangan lainnya dapat di dibedakan menjadi tiga klasifikasi yaitu

- Pertimbangan lain kategori rendah
- Pertimbangan lain kategori sedang
- Pertimbangan lain kategori tinggi

2.1.6 Pola Penanganan dan Program Penanganan Kawasan Kumuh di Indonesia

Di Indonesia pola-pola penanganan kawasan kumuh yaitu:

1. Pembaharuan Kota (*Urban Renewal*)

Kawasan kota di mana kebanyakan kawasan sudah terbangun dan tidak dapat dibongkar secara langsung atau secara keseluruhan sehingga fokus lebih cenderung pada suatu renovasi kawasan. Pendekatan ini berfokus pada proses pembangunan yang agak lama di mana tidak semua akan dirancang dan dibangun secara bersamaan. Melalui sebuah master plan prioritas-prioritas sudah ditentukan sesuai dengan kekurangan dan kelebihan kualitas kawasan tersebut. (*Markus Zahnd, 2006*)

2. Konsolidasi Tanah

Kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali, penguasaan tanah serta usaha pengadaaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau pemeliharaan sumber daya alam, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. (*Boedi Harsono, 1999*)

3. Relokasi

Proses pemindahan penduduk dari daerah kumuh ke lokasi baru yang menyediakan kondisi kehidupan yang lebih baik. Strategi ini sering digunakan ketika daerah kumuh yang ada dianggap tidak layak huni karena masalah keamanan, bahaya lingkungan, atau kebutuhan pembangunan perkotaan.

4. Pembagian Lahan (*Landsharing*)

Menurut Angel dan Boonyabancha (1988), land sharing merupakan proses sharing lahan, terjadi dengan kondisi

- Lahan dimiliki oleh satu orang/instansi
- Lahan yang dulunya dalam keadaan kosong diokupasi/dihuni secara liar oleh sekelompok orang

- Lahan mau digunakan kembali oleh pemilik dengan konsekuensi membagi lahan menjadi dua - sebagian besar untuk pemilik lahan dan sisanya untuk pemukim liar
- Keputusan bersama/atas persetujuan dua belah pihak, dan
- masyarakat mau berperan aktif dalam proses tersebut—ikut serta dalam memberikan ide/pemikiran.

5. Pemugaran

Kegiatan menata kembali bangunan-bangunan yang ada di permukiman kumuh meliputi, sarana prasarana, drainase, air bersih, pengelolaan air limbah, jaringan jalan dan proteksi kebakaran.

6. Peremajaan

Kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman.

7. Permukiman Kembali

Kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Berikut Adalah Pola program penanganan yang ada di Indonesia

1. Kampung Improvement Program (KIP)

Pemerintah mengupayakan program penanganan permukiman kumuh melalui Kampung Improvement Program (KIP) yang telah berjalan dari tahun 1969 sebagai upaya penanganan kawasan permukiman kumuh. Target dari program KIP adalah perbaikan fisik dan non-fisik fasilitas publik dan administrasi warga yaitu kelurahan dengan kategori kumuh, kurang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan layak hunian, dan padat penduduk.

Tujuan dari pelaksanaan ini yaitu mencapai keberhasilan dalam membangun kota menjadi kawasan modern dengan fasilitas desa yang lengkap, infrastruktur fisik

yang memadai. Program KIP itu sendiri pertama kali dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1969, yang berfokus pada perbaikan infrastruktur pada kawasan M. Husni Thamrin. Program ini mencakup sekitar 20% wilayah perkotaan Jakarta dalam 5 tahun setelah perbaikan infrastruktur pertama dilaksanakan (*Susilowati dkk, 2020*).

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Sebagai upaya dalam peningkatan tingkat kemakmuran dan taraf kehidupan masyarakat, pembangunan ekonomi di masyarakat harus diperhatikan oleh setiap negara. Pendapatan per kapita merupakan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kemakmuran dan taraf hidup masyarakat. P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) adalah program khusus berbasis prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas atau organisasi sebagai wujud penanggulangan kemiskinan pada tingkat kelurahan di perkotaan secara berlanjut. P2KP memiliki strategi pendekatan dengan memberdayakan keterlibatan masyarakat serta masyarakat berposisi menjadi subjek pembangunan sehingga masyarakat terutama kelompok miskin dapat menyampaikan akar permasalahan dari kemiskinan untuk memecah permasalahan dan penanggulangan kemiskinan (*Sukidjo, 2005*).

Program P2KP pertama kali dilakukan ketika Indonesia sedang berada pada puncak krisis ekonomi tahun 1999 dimana angka krisis ekonomi saat itu mencapai hingga 23,4% dan mengalami penurunan hingga tahun 2006 menjadi 17,75%. Pelaksanaan program ini membantu Indonesia memasuki era baru dalam pengentasan kemiskinan.

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)

Pemerintah Indonesia membentuk program PNPM Mandiri sebagai upaya pembangunan nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri bertujuan mengajak masyarakat dalam merancang dan menyetujui agenda pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan peningkatan tata pemerintahan daerah. Program ini berdasarkan PP RI No. 54 Tahun 2005 yang menjabarkan mengenai kebijakan dan program pemberdayaan bagi masyarakat, peraturan ini berjudul tim

koordinasi penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, dan dilanjutkan surat keputusan menteri No. 414.2/675/PMD Tahun 2007.

4. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP)

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) adalah upaya menanggulangi kemiskinan yang berada di masyarakat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dinas Pekerjaan Umum setiap provinsi. Konsep yang ditawarkan dari P2KKP adalah pemberdayaan pelaku pembangunan lokal seperti pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat sekitar. Nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal menjadi tumpuan dalam implementasi P2KKP dengan harapan tercipta gerakan masyarakat yang sadar untuk menanggulangi kemiskinan dan pembangunan daerah secara mandiri.

5. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) berubah dan konsep pada April 2016 menjadi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). KOTAKU merupakan strategi percepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia yang menggunakan tujuh indikator pengukuran tingkat kekumuhan. Akan tetapi, bobot pada indikator permukiman kumuh masih belum jelas karena sifatnya yang subjektif pada bobot kriteria yang digunakan

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) bertujuan untuk menurunkan luas kawasan permukiman kumuh yang berada di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan dalam kemasyarakatan untuk meningkatkan penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pencegahan kawasan permukiman kumuh bertumbuh. Terdapat empat tahap utama dalam program KOTAKU yaitu (1) tahap perencanaan pada program KOTAKU direncanakan sedemikian rupa agar kegiatan akan dilaksanakan nantinya. (2) Tahap survei lokasi dilakukan oleh pihak faskel untuk mengetahui keadaan lingkungan yang apakah layak atau tidak disebut sebagai permukiman kumuh. (3) Tahap pendanaan bersumber dari sumber dana APBN, sumber dana APBD Provinsi, sumber APBD

Kota, dan sumber dana swadaya masyarakat. (4) Tahap pelaksana dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2.2 Tinjauan Kebijakan

Berdasarkan Tinjauan Kebijakan ada beberapa kebijakan yang dibahas yaitu:

2.2.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman, upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dapat dilakukan dengan melalui 3 (tiga) pola penanganan:

1. Pemugaran Untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
2. Peremajaan Upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang lebih baik dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Untuk meremajakan suatu kawasan, terlebih dahulu perlu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat yang terkena dampak. Peremajaan harus menghasilkan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
3. Pemukiman kembali Upaya untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat dengan memindahkan masyarakat dari lokasi eksisting yang dilakukan oleh dukungan pemerintah dan pemerintah daerah juga dengan menetapkan lokasi untuk pemukiman kembali dengan turut melibatkan peran masyarakat.

2.2.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Terdapat tujuan, kriteria dan pendekatan dari Peraturan Menteri No 14 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

Tabel II. 2 Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018

Kebijakan	Tujuan	Kriteria	Pendekatan
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018	Untuk lebih spesifik dalam hal klasifikasi dan indikator penentuan kategori kumuh	Menetapkan kriteria dan indikator yang lebih terperinci untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi Kawasan kumuh, termasuk aspek vitalitas non-ekonomi dan kondisi fisik, sosial dan ekonomi masyarakat	Menyediakan panduan teknis yang lebih jelas untuk identifikasi dan penanganan Kawasan kumuh, dengan penekanan pada peremajaan Kawasan kumuh dan penilaian yang lebih sistematis terhadap kondisi kawasan

Sumber: Perumahan & Kawasan Permukiman.id 2020

Didalam Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018 terbagi menjadi 2 bagian yaitu pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan permukiman kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap perumahan permukiman kumuh. namun pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.2.2.1 Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Didalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan melalui

1. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan atas kesesuaian perizinan, standar teknis (tahap Pembangunan) dan kelayakan fungsi (tahap pemanfaatan), dengan cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pemantauan disini dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

- Langsung: pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh
 - Tidak Langsung: data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman, dan pengaduan masyarakat maupun media massa.
2. Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan cara Pendampingan dan Pelayanan Informasi
- Pendampingan masyarakat melalui fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis.
 - Pelayanan Informasi mengenai rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan serta standar teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik atau media cetak.

2.2.2.2 Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Didalam Peningkatan Kualitas terhadap perumahan atau permukiman kumuh terdapat 3 (tiga) kriteria penilaian untuk hasil dari identifikasi permukiman kumuh yaitu tingkat kekumuhan, Status lahan, dan pertimbangan lain sebagai berikut:

1. Tingkat Kekumuhan

Tabel II. 3 Parameter Tingkat Kekumuhan

No	Kriteria	Indikator
1	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan bangunan
		Tingkat kepadatan bangunan
		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman
		Kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk

No	Kriteria	Indikator
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Akses aman air minum tidak tersedia
		Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Drainase lingkungan tidak tersedia
		Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan
		Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	System pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis
		System pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia
		Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

Sumber: PERMEN PUPR No 14 Tahun 2018

Berdasarkan kriteria ini dapat ditentukan tingkat kekumuhan suatu permukiman kumuh dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kumuh Ringan
- b. Kumuh Sedang dan
- c. Kumuh Berat

2. Status Lahan

a. Kejelasan Status Pengusaan Lahan

Untuk menentukan status legal tidaknya tanah yaitu dimana status penguasaan lahan harus memiliki sertifikat hak atas tanah untuk tanah kepemilikan sendiri dan kepemilikan pihak lain (termasuk tanah milik adat/ulayat) harus dengan bukti izin pemanfaatan tanah dengan pemegang hak atas tanah/lahan dan serta terdaftar di ATR/BPN.

b. Kesesuaian dengan RTR (Rencana Tata Ruang)

Legalitas lahan juga dilihat dari aspek kesesuaian dengan RTR yaitu kesesuaian penggunaan lahannya dibandingkan rencana tata ruang dengan kawasan permukiman kumuh. Sehingga penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan dapat di klasifikasikan sebagai:

- Status tanah legal dengan nilai positif (+) dan
- Status tanah illegal / tidak legal dengan nilai negatif (-)

c. Pertimbangan Lain

Dalam penilaian permukiman kumuh terdapat faktor diluar aspek fisik yang menjadi salah satu faktor dalam penilaian yaitu pertimbangan akan potensi, baik ekonomi, sosial maupun budaya. Pertimbangan akan lokasi permukiman, dan pertimbangan kondisi kependudukan. Pertimbangan lainnya dapat di dibedakan menjadi tiga klasifikasi yaitu:

- Pertimbangan Lain Kategori Rendah
- Pertimbangan Lain Kategori Sedang
- Pertimbangan Lain Kategori Tinggi

2.2.3 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037

Tabel II. 4 Kebijakan dan Strategi Penantaan Ruang Kabupaten Ciamis

No	Kebijakan	Strategi
1	Pengembangan kawasan serta pusat-pusat kegiatan yang terhirarkis dalam rangka mendukung pengembangan agrobisnis, pariwisata, perdagangan dan jasa,	• mengembangkan Kecamatan Ciamis, Kawali dan Banjarsari serta wilayah sekitarnya yang secara eksisting sudah merupakan kawasan perkotaan sebagai kawasan perkotaan di Kabupaten Ciamis; • mengembangkan kecamatan-kecamatan yang memiliki daya dukung lingkungan untuk berkembang menjadi kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan kawasan; • mengembangkan kecamatan-kecamatan lainnya yang relatif harus dipertahankan ciri perdesaannya sebagai pusat pelayanan lingkungan; • mengembangkan pusat distribusi dan koleksi untuk pertanian dengan dominasi kegiatan pertanian untuk mendukung agrobisnis; • memprioritaskan pengembangan pariwisata di kecamatan-kecamatan yang secara eksisting memiliki potensi pariwisata; • mengembangkan pengembangan permukiman di kawasan yang secara eksisting sudah berkembang sebagai kawasan pengembangan permukiman.
2	Pengembangan sistem jaringan prasarana yang	• mempertegas sistem hirarkis pada jaringan jalan yang ada meliputi arteri, kolektor dan lokal, baik pada sistem jaringan jalan primer

No	Kebijakan	Strategi
	menghubungkan pusat-pusat kegiatan serta mampu melayani keseluruhan wilayah	maupun sekunder, dengan mengembangkan sistem jaringan jalan sekunder pendukung sistem primer yang sudah ada serta sistem jaringan kolektor dan lokal pendukung jaringan arteri yang sudah dan akan dikembangkan; • mengembangkan terminal dalam tipe yang sesuai di setiap pusat kegiatan; • mengembangkan secara bertahap sistem angkutan umum; • mengembangkan jaringan pelayanan air bersih, kelistrikan, limbah dan persampahan yang secara optimal dapat melayani kawasan pengembangan permukiman serta kawasan perkotaan lainnya dan secara bertahap dapat melayani seluruh kawasan perdesaan; dan • mengembangkan pasar induk skala regional di PKWP Ciamis, PKL Kawali dan PKL Banjarsari.
3	Melindungi kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	• menetapkan kawasan lindung pada kawasan yang memiliki: (a) sempadan sungai, (b) sempadan danau/waduk/situ, (c) suaka margasatwa, (d) cagar alam, (e) cagar budaya, (f) kerawanan bencana yang diketahui ada di wilayah kabupaten ciamis; • melindungi dan menjaga fungsi lindung yang ada di masing-masing kawasan lindung yang ditetapkan; dan • secara khusus memperhatikan keberadaan situs-situs sejarah sebagai bukti kesejarahan di Kabupaten Ciamis.
4	Pengembangan kawasan agrobisnis	• mengembangkan mengoptimalkan kawasan pertanian; • mengembangkan kawasan pusat pengembangan agrobisnis; • meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agrobisnis; • mempertahankan luasan lahan pertanian yang ditetapkan sebagai LP2B; dan • mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis agrobisnis.
5	Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal	• mengembangkan kawasan objek wisata unggulan; • mengembangkan kawasan agrowisata; • mengembangkan zona wisata terpadu; dan • meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
6	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada jalur utama transportasi antar kota dan provinsi	• menetapkan kawasan yang secara eksisting didominasi oleh lahan perdagangan dan jasa sebagai kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; • mengarahkan pengembangan perdagangan dan jasa di kecamatan-kecamatan yang merupakan jalur utama transportasi antar kota dan provinsi; • meminimalkan alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi peruntukan perdagangan dan jasa; dan • mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala regional.
7	Pengembangan pola ruang yang mengarahkan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah berdasarkan kebutuhan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya	• menetapkan pola ruang wilayah Kabupaten Ciamis yang meliputi kawasan peruntukan cagar alam, suaka margasatwa, hutan lindung, sempadan sungai, hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan rakyat, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, permukiman dan peruntukan industri; • merumuskan ketentuan pemanfaatan ruang di setiap kawasan peruntukan dengan prinsip setiap kegiatan yang akan

No	Kebijakan	Strategi
		dikembangkan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta menurunkan kualitas ruang; • melindungi fungsi dan keberadaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, hutan lindung, sempadan sungai, pengembangan pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa; dan
8	Pendistribusian sarana pelayanan umum sesuai pengembangan sistem perkotaan	• menetapkan pembangunan sarana pelayanan umum sesuai distribusi kepadatan penduduk; dan • meningkatkan sarana pelayanan umum

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Ciamis 2017-2037

2.2.4 Rencana Strategis Dinas Perumahan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 adalah:

1. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima
2. Terwujudnya sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kawasan Permukiman Perkotaan/Pedesaan
4. Terwujudnya upaya pengendalian pencemaran dan/atau lindung berfungsi lindung melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2. Sasaran

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan organisasi perangkat daerah
2. Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni dan Kualitas kawasan kumuh
4. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi (termasuk di dalamnya jaringan jalan)

Tabel II. 5 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

MISI 5 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya kinerja organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas kinerja	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur, peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur
MISI 2 : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG Mendukung PENGEMBANGAN WILAYAH			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara Merata	Meningkatnya ketersediaan Rumah Layak Huni Meningkatnya Kualitas kawasan kumuh	Meningkatkan kualitas perumahan dan sarana prasarana kawasan permukiman	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
MISI 3 : MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA BIJAKSANA UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pengendalian pendamaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pelestarian kawasan lindung dan berfungsi lindung serta melalui konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatkan kualitas tata kelola kawasan lindung dan berfungsi lindung serta Sumber Daya Alam	Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan berfungsi lindung serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Renstra Dinas Perumahan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024

2.3 Tinjauan Terdahulu

Tabel II. 6 Matriks Tinjauan Terdahulu

Penerbit	D.R. Oktavia dan L. Warlina (Vol 04 No 02 – Oktober 2017)	Maresty Krisandriyana, Winny Astuti dan Erma Fitriarini (Vol 1 No 01 – 2019)	Reivandy Christal Joenso dan Suzanna Ratih Sari (Vol 4 No 02 – Juli 2020)	Elpidia Agatha Crysta dan Yanto Budisusanto (Vol 13 No 2 – Marh 2018)	Semuel Dave Karisoh, Linda Tondobala dan Renny Syafriny (Vol 7 No 01 – 2020)
Judul	Identifikasi Permukiman Kumuh Dan Alternatif Penataan Di Kelurahan Cijorolebak (Studi Kasus:Sempadan Sungai Ciujung)	Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta	Klasifikasi Kekumuhan Dan Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Lampu Satu, Merauke)	Analisis Tingkat Kekumuhan Dan Pola Penanganannya (Studi Kasus: Kelurahan Keputih, Surabaya)	Pengaruh Kekumuhan Terhadap Kualitas Hdup Masyarakat Di Perkampungan Kota Manado
Latar Belakang	karakteristik kawasan kumuh di kelurahan Cijorolebak permasalahan yang dihadapi yaitu kepadatan penduduk yang tinggi, serta masalah yang terus timbul dan berkembang kearah kebutuhan penduduk akan tempat tinggal, pendapatan masing-masing penduduk yang berbeda menyebabkan daya beli terhadap tempat tinggal meningkat. Dapat disimpulkan bahwa pesatnya perkembangan perkotaan akan menyebabkan meningkatnya nilai permintaan lahan kota dan berkembang kearah kebutuhan penduduk akan tempat tinggal atau perumahan	Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai strategi, antara lain yaitu meningkatkan pemberdayaan dalam pemenuhan rumah sehat dan lingkungan yang layak huni, penanganan banjir dan genangan, meningkatkan jumlah rumah layak huni, meningkatkan akses terhadap infrastruktur serta upaya penyediaan rumah layak huni yang legal.	Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting untuk diketahuinya upaya yang yang dapat dilakukan untuk menciptakan permukiman kumuh Lampu Satu yang berkelanjutan dengan melakukan suatu kajian secara khusus terkait karakteristik dan klasifikasi kekumuhan pada Kawasan Permukiman Lampu Satu Merauke yang mencakup kondisi fisik (sarana dan prasarana) serta merumuskan konsep penanganannya.	Kelurahan Keputih sebagai studi penelitian karena lokasi tersebut memiliki potensi terindikasi terdapat kawasan kumuh berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh tim penyusun RTRW Kota Surabaya pada tahun 2004 yang diterbitkan dalam RTRW Tahun 2005. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kondisi permukiman yang semakin padat akibat jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan, pembangunan potensi lahan yang pesat dan kegiatan (Dinas Pekerjaan Umum	Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan kekumuhan dalam rangka menetapkan kawasan kumuh di Kota Manado, terdapat 25 lokasi kawasan kumuh yang tersebar di 27 kelurahan. Hal tersebut ditetapkan dalam SK. Walikota No. 163 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh, total luasan sebesar 157, 33 Ha.

Penerbit	D.R. Oktavia dan L. Warlina (Vol 04 No 02 – Oktober 2017)	Maresty Krisandriyana, Winny Astuti dan Erma Fitriarini (Vol 1 No 01 – 2019)	Reivandy Christal Joenso dan Suzanna Ratih Sari (Vol 4 No 02 – Juli 2020)	Elpidia Agatha Crysta dan Yanto Budisusanto (Vol 13 No 2 – Marh 2018)	Semuel Dave Karisoh, Linda Tondobala dan Renny Syafriny (Vol 7 No 01 – 2020)
				Cipta Karya Kota Surabaya, 2010).	
Isu Permasalahan	• Bagaimana karakteristik masyarakat di kawasan kumuh di sempadan Sungai Ciujung Kelurahan Cijorolebak? • Bagaimana karakteristik permukiman kumuh di sempadan Sungai Ciujung Kelurahan Cijorolebak? • Bagaimana harapan dan keinginan masyarakat dalam penataan/perbaikan kawasan kumuh di sempadan Sungai Ciujung Kelurahan Cijorolebak?	Faktor utama atau faktor yang paling berkontribusi dalam mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh di Surakarta belum diketahui. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan agar mendapatkan output berupa faktor utama atau faktor dominan yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh di Surakarta.	Masih terdapatnya daerah-daerah permukiman kumuh yang belum tertata dengan baik diwilayah Kabupaten Merauke; masih terdapat banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di rumah-rumah sederhana yang kurang layak; pembangunan kawasan permukiman masih kurang memperhatikan aspek tata ruang dan kaidah lingkungan hidup.	• Bagaimana mengidentifikasi kawasan kumuh di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya? • Bagaimana pola sebaran kawasan kumuh secara spasial di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya? • Bagaimana perencanaan pola penanganannya sesuai dengan hasil penetapan lokasi kawasan kumuh di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya?	Adanya kawasan kumuh berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang menempatnya maka dari itu berdasarkan uraian tersebut mengenai pengaruh kekumuhan terhadap kualitas hidup dan faktor- faktor yang paling mempengaruhi kekumuhan terhadap kualitas hidup masyarakat
Metode Pengumpulan Data	Metode pengumpulan data dengan menggunakan survei data primer dan sekunder.	teknik wawancara, kuesioner dan studi literature. Teknik wawancara / kuesioner dilakukan dengan cara menanyakan kebutuhan data penelitian secara langsung kepada narasumber yang dipilih.	metode analisis kuantitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara kepada responden yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian		Pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder.
Variabel Penelitian	• Karakteristik Masyarakat • Karakteristik Permukiman Kumuh • Harapan dan Keinginan Masyarakat	• Tipologi Kawasan Kumuh • Faktor prioritas kawasan kumuh	• Tipologi dan Karakteristik Kawasan • Konsep Arahkan Penanganan Kawasan Kumuh	• Tingkat Kekumuhan • Pola Penanganannya	• Korelasi pada Kawasan Kumuh • Regresi pada Kawasan Kumuh

Penerbit	D.R. Oktavia dan L. Warlina (Vol 04 No 02 – Oktober 2017)	Maresty Krisandriyana, Winny Astuti dan Erma Fitriarini (Vol 1 No 01 – 2019)	Reivandy Christal Joenso dan Suzanna Ratih Sari (Vol 4 No 02 – Juli 2020)	Elpidia Agatha Crysta dan Yanto Budisusanto (Vol 13 No 2 – Marh 2018)	Semuel Dave Karisoh, Linda Tondobala dan Renny Syafriny (Vol 7 No 01 – 2020)
Indikator Penelitian	- Responden (kepala keluarga, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, pendapatan perbulan, asal, alasan pindah, dan lama tinggal) - Status (penghuni rumah, kepemilikan rumah dan lahan) - Penanganan sampah, sumber air bersih, MCK, perbaikan drainase, jalan lingkungan dan penanganan banjir.	- Bantaran sungai, Padat perkotaan dan Permukiman kumuh sepanjang rel kereta api. - Faktor lama tinggal penghuni, faktor sarana dan prasarana dan faktor sosial budaya.	- Kawasann dataran rendah dan berbatasan langsung dengan pantai (tepi air) - Pola pencegahan dilakukan dengan sosialisasi terhadap prosedur perizinan dan standar, serta pola peningkatan kualitas dilakukan pada prasarana dan sarana yang masih belum sesuai standar dan kriteria yang berlaku.	- Tingkat klasifikasi (bukan kumuh, kumuh ringan). Status lahan (legal, tidak legal dan campuran) - Pola penanganan penyebab kekumuhan (proteksi kebakaran, air minum, jalan lingkungan, kondisi bangunan dll). Perencanaan penanganan (tidak ada, pemugaran, permukiman kembali)	- Hubungan variabel, Koefisien korelasi, keterangan (sedang, rendah, dan sangat rendah) - Pengaruh Variabel, koefisien regresi, keterangan (penurunan dan peningkatan)
Analisis Data	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metoda deskriptif. Metode deskriptif digunakan dengan memberikan gambaran secara utuh mengenai karakteristik masyarakat, kondisi permukiman kumuh, harapan dan keinginan pemukim serta alternatif penataannya. Metode ini sangat baik dipergunakan untuk mengadakan kajian penataan permukiman kumuh, khususnya pada daerah bantaran Sungai Ciujung Kelurahan Cijorolebak.	Menggunakan analisis AHP. Hasil dari analisis AHP digunakan untuk menentukan faktor prioritas apa saja yang paling mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh di Surakarta. Faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh di tiap tipologinya memiliki faktor yang sama, namun akan menghasilkan output prioritas yang berbeda tiap tipologinya berdasarkan hasil		Dari hasil klasifikasi tingkat kekumuhan dan identifikasi legalitas lahan pada setiap lokasi, didapatkan hasil pilihan perencanaan pola penanganan untuk setiap kawasan permukiman kumuh yang secara rinci. diidentifikasi bahwa seluruh lokasi di Kelurahan Keputih belum memiliki proteksi kebakaran. Hal ini disebabkan seluruh permukiman di Kelurahan Keputih masih bergantung	- Metode distribusi frekuensi ini yaitu mengolah data dengan berbagai perhitungan statistik sederhana menggunakan bantuan program SPSS V.23 dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner - Analisis Korelasi : Untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan (korelasi) antar variabel kekumuhan yaitu kondisi bangunan

Penerbit	D.R. Oktavia dan L. Warlina (Vol 04 No 02 – Oktober 2017)	Maresty Krisandriyana, Winny Astuti dan Erma Fitriarini (Vol 1 No 01 – 2019)	Reivandy Christal Joenso dan Suzanna Ratih Sari (Vol 4 No 02 – Juli 2020)	Elpidia Agatha Crysta dan Yanto Budisusanto (Vol 13 No 2 – Marh 2018)	Semuel Dave Karisoh, Linda Tondobala dan Renny Syafriny (Vol 7 No 01 – 2020)
		kuesioner yang diisi oleh stakeholder/ ahli.		pada pemerintah di kelurahan untuk pengamanan kebakaran	Analisis Regresi: digunakan untuk menelaah hubungan antara faktor-faktor kekumuhan terhadap kualitas hidup masyarakat yang paling berpengaruh, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui
Kesimpulan	Berdasarkan harapan dan keinginan masyarakat, masyarakat menginginkan adanya penanganan sampah berupa tempat sampah permanen di setiap RT, pemerintah menyediakan lahan baru untuk program bank sampah, dan petugas pengangkut sampah.	Faktor prioritas untuk tipologi kawasan permukiman kumuh bantaran sungai, kawasan permukiman kumuh padat perkotaan dan kawasan permukiman kumuh sepanjang rel kereta api berbeda-beda. tiga faktor prioritas yang paling mempengaruhi keberadaan kawasan permukiman kumuh bantaran sungai adalah faktor lahan perkotaan, faktor tata ruang dan faktor status kepemilikan bangunan.	Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat diketahui klasifikasi Permukiman Kumuh Lampu Satu yaitu memiliki tingkat kekumuhan sedang. Konsep penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan pola pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. Dimana pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi terhadap prosedur perizinan dan standar dalam membangun hunian, sosialisasi perilaku hidup sehat dalam pengelolaan	Adanya peta klasifikasi tingkat kekumuhan dari hasil identifikasi lokasi yang menghasilkan dua tingkat kekumuhan di Kelurahan keputih. Untuk pola sebaran kawasan kumuh secara spasial di lokasi permukiman cenderung menunjukkan pola bergerombol di sisi bagian timur Kelurahan Keputih. Perencanaan Penanganan Pemugaran: 2 RT dengan luas permukiman 5,293 Ha. Perencanaan Permukiman Kembali: 6 RT dengan luas permukiman 7,406 Ha. Perencanaan Penanganan Pemugaran dan Permukiman	Pengaruh kekumuhan terhadap kualitas hidup masyarakat pada ketiga lokasi penelitian, yaitu : di kawasan kumuh Titiwungan Utara variabel yang paling berhubungan yaitu variabel kondisi bangunan terhadap kondisi kesehatan sebesar - 0,404 dengan hubungan sedang, di kawasan kumuh Komo Luar variabel. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekumuhan terhadap kualitas hidup masyarakat pada ketiga lokasi penelitian, yaitu : Berdasarkan hasil yang ada bahwa, di kawasan kumuh Titiwungan Utara penurunan

Penerbit	D.R. Oktavia dan L. Warlina <i>(Vol 04 No 02 – Oktober 2017)</i>	Maresty Krisandriyana, Winny Astuti dan Erma Fitriarini <i>(Vol 1 No 01 – 2019)</i>	Reivandy Christal Joenso dan Suzanna Ratih Sari <i>(Vol 4 No 02 – Juli 2020)</i>	Elpidia Agatha Crysta dan Yanto Budisusanto <i>(Vol 13 No 2 – Marh 2018)</i>	Semuel Dave Karisoh, Linda Tondobala dan Renny Syafriny <i>(Vol 7 No 01 – 2020)</i>
			air limbah, pelatihan pengelolaan sampah, sosialisasi tentang bencana kebakaran, serta sosialisasi tentang rencana tata ruang kawasan	Kembali: 2 RT dengan luas permukiman 8,438 Ha	kondisi bangunan sebesar - 0,487 maka kekumuhan pada kondisi bangunan

Penerbit	Dewi Marni, Sofyan Husein Siregar, Imam Suprayogi <i>(Vol 14 No 1 – 2020)</i>	Hanafi Hidayat ST. <i>(Universitas Islam Riau – 2021)</i>	Donny Wahyu Wijaya <i>(Vol 2 No 1 – 2016)</i>	Saiful Amin dan Erwin Fahmi <i>(Vol 5 No 2 – Oktober 2021)</i>	Gabriel Dave Ponto, Sofia E. Pangemanan dan Ventje Kasenda <i>(Vol 2 No 1 – 2022)</i>
Judul	Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru	Studi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru	Perencanaan Penanganan Kaw Permuk Kumuh studi penentuan kaw prioritas untuk peningkatan kualitas infrastruktur pada kaw permuk kumuh di Kota Malang	Tantangan Penanganan Permuk Kumuh dari sudut pandang Institusional: studi kasus kolektif di Kel. Bintaro dan Kel. Banjar Kota Mataram	Strategi Dinas Perumahan dan Kaw Permuk dalam penanganan permuk kumuh di kec. Singkil Kota Manado; studi kasus di Kel. Kombos Timur
Latar Belakang	Kota Pekanbaru. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk semakin bertambah dan daerah ini menjadi tempat pemukiman yang ramai dan padat penduduk. Berikut data jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari Tahun 2016-2018	Wilayah perkotaan merupakan sebuah kawasan dengan tingkat pembangunan yang cukup tinggi dan jumlah penduduk yang cukup besar, salah satunya Kota Pekanbaru. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk semakin bertambah dan daerah ini menjadi tempat	Kota Malang sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat cepat baik dalam pertumbuhan fisik maupun ekonomi. Hal tersebut menjadi daya tarik bagi para pendatang sebagai kaum urban untuk	Kota Mataram merupakan salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan maupun penanganan permukiman kumuh. Sejak tahun 1999 sejumlah program pemerintah telah dijalankan, mulai Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan	Berdasarkan 25 lokasi permukiman kumuh di Kota Manado, diketahui bahwa salah satu daerah yang termasuk dalam penetapan lokasi kawasan kumuh yaitu Kelurahan Kombos Timur. Kelurahan Kombos Timur adalah salah satu dari 9 (sembilan) kelurahan di wilayah kecamatan Singkil.

Penerbit	Dewi Marni, Sofyan Husein Siregar, Imam Suprayogi (Vol 14 No 1 – 2020)	Hanafi Hidayat ST. (Universitas Islam Riau – 2021)	Donny Wahyu Wijaya (Vol 2 No 1 – 2016)	Saiful Amin dan Erwin Fahmi (Vol 5 No 2 – Oktober 2021)	Gabriel Dave Ponto, Sofia E. Pangemanan dan Ventje Kasenda (Vol 2 No 1 – 2022)
		pemukiman yang ramai dan padat penduduk. Berikut data jumlah penduduk Kota Pekanbaru dari Tahun 2016-2018	mengadu nasib dalam mencari nafkah di Kota Malang yang menyebabkan semakin padatnya jumlah penduduk	(P2KP) sampai dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	kelurahan ini memiliki 7 (tujuh) lingkungan.
Isu Permasalahan	Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas penduduk yang tinggi dan cepat, perlu untuk disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait.	- Bagaimana tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kel. Sri Meranti - Bagaimana Rumusan arahan penanganannya	Pemerintah Kota Malang belum memiliki perencanaan penanganan kawasan kumuh yang komprehensif, sehingga dalam implementasinya penentuan prioritas penanganannya dilakukan secara sporadis.		air bersih belum cukup mampu melayani kebutuhan warga, jenisnya sumur buatan warga serta sumur bor. Persampahan belum mampu melayani warga, sehingga sampah-sampah yang ada dibuang disekitar permukiman dan seringkali digunakan halaman rumah sebagai areal pembuangan sampah.
Metode Pengumpulan Data	metode survei yang dianalisis secara <i>deskriptif eksploratif</i>	Metode mix method dalam analisis deskripsi kuantitatif	Metode angket atau kuesioner; (2) Metode observasi; dan (3) Metode dokumentasi. Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik <i>purposive sampling</i>	Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur/dokumentasi, data statistik wilayah penelitian, peta, dan lain-lain. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan dinas terkait, pelaku pemberdayaan maupun masyarakat di Kelurahan Bintaro dan Kelurahan Banjar	Metode Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder.

Penerbit	Dewi Marni, Sofyan Husein Siregar, Imam Suprayogi (Vol 14 No 1 – 2020)	Hanafi Hidayat ST. (Universitas Islam Riau – 2021)	Donny Wahyu Wijaya (Vol 2 No 1 – 2016)	Saiful Amin dan Erwin Fahmi (Vol 5 No 2 – Oktober 2021)	Gabriel Dave Ponto, Sofia E. Pangemanan dan Ventje Kasenda (Vol 2 No 1 – 2022)
Variabel Penelitian	- Skala Prioritas - Strategi Penanganan	- Tingkat Kekumuhan - Sebaran Kawasan Kumuh - Arahan Penanganan	- Klasifikasi Skala Prioritas - Pola Penanganan	Program Penanganan Kawasan Kumuh	- Perumusan Strategi Penanganan - Implementasi Strategi Penanganan - Evaluasi Strategi Penanganan
Indikator Penelitian	- Bobot nilai tinggi (factor utama prioritas). Bobot nilai rendah (semakin kecil prioritasnya) - Pemugaran , peremajaan dan permukiman kembali	- Skoring pembobotan (nilai numerik dan perhitungan persentase) - Deskriptif dan kualitatif dalam variabel tingkat kekumuhan	- Kumuh berat, sedang, ringan – status lahan ilegal, campuran, legal – kepadatan tinggi, sedang dan rendah - Faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Faktor eksternal (peluang dan ancaman)	Aspek kepastian bermukim, aspek keberlanjutan, dan aspek pelibatan Masyarakat.	- Program revitalisasi melalui peningkatan kualitas lingkungan. Kelemahannya yaitu dalam masalah anggaran, untuk Peluangnya yaitu masih banyak lahan RTH dan Olahraga. - Peningkatan rumah tidak layak huni, pembangunan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dll.
Analisis Data	Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan panduan wawancara AHP terhadap 3 (tiga) orang yang dinilai pakar dalam penanganan permasalahan kawasan permukiman kumuh. Data	- Menganalisis tingkat kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti - Merumuskan arahan penanganan kawasan	analisis faktor internal dan eksternal dalam peningkatan kualitas infrastruktur pada kawasan permukiman kumuh, sehingga perlu	Model pendekatan ini berupaya untuk mengkaji konsistensi dan koherensi keputusan atau kebijakan pada 3 (tiga) tingkat pengambilan keputusan,	Menganalisis Perumusan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado

Penerbit	Dewi Marni, Sofyan Husein Siregar, Imam Suprayogi (<i>Vol 14 No 1 – 2020</i>)	Hanafi Hidayat ST. (<i>Universitas Islam Riau – 2021</i>)	Donny Wahyu Wijaya (<i>Vol 2 No 1 – 2016</i>)	Saiful Amin dan Erwin Fahmi (<i>Vol 5 No 2 – Oktober 2021</i>)	Gabriel Dave Ponto, Sofia E. Pangemanan dan Ventje Kasenda (<i>Vol 2 No 1 – 2022</i>)
	yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) guna mengidentifikasi strategi penanganan yang tepat untuk kawasan kumuh di Kelurahan Tanah Datar.	permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti.	diketahui faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman).	yakni tingkat pilihan operasional, tingkat pilihan kolektif dan tingkat pilihan konstitusional.	Menganalisis Implementasi Strategi kegiatan -kegiatan di Kota Manado
Kesimpulan	Strategi yang direkomendasikan adalah memperkuat komitmen arahan kebijakan dan alokasi anggaran serta ketersediaan sarana prasarana dan SDM, memperkuat kolaborasi pemerintah (pusat dan daerah) dengan <i>stakeholder terkait</i> / pihak swasta	Perhitungan tingkat kekumuhan akhir yang mana seluruh tingkat kekumuhan masing-masing RT di akumulasikan sehingga skor nilai tingkat kekumuhan akhir skala Kelurahan Sri Meranti adalah 22. Termasuk dalam tingkat kekumuhan ringan. Maka didapat hasil akhir dari perhitungan tingkat kekumuhan di Kelurahan Sri Meranti adalah 22 dan rata-rata kekumuhan sektoral adalah 28,55%.	Karakteristik kawasan permukiman kumuh berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan, terbagi ke dalam sebelas (11) klasifikasi kawasan permukiman kumuh. enentuan kawasan permukiman kumuh prioritas disusun berdasarkan hasil klasifikasi kawasan permukiman kumuh, dengan pertimbangan utama kondisi kekumuhan Kawasan.	Tantangan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di Indonesia adalah pada aspek <i>institutional governance</i> yang belum berjalan dengan baik. Indikasinya dapat dilihat pada kebijakan yang disusun dan dilaksanakan pada <i>constitutional level</i> , yang belum koheren dan belum sepenuhnya diturunkan ke dalam kebijakan yang lebih rinci untuk dapat diimplementasikan dan/atau disinkronkan pada <i>collective level</i>	Dalam menangani masalah permukiman kumuh, Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Manado berkolaborasi dengan Program KOTAKU dari Kementerian PUPR untuk mendata dan menganalisa permasalahan permukiman kumuh, kemudian menentukan Strategi Revitalisasi yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendorong ekonomi kawasan dengan memanfaatkan sarana prasarana yang ada di Kelurahan Kombos Timur

Sumber: Hasil analisis 2024

Studi yang penulis kerjakan:

Tabel I. 1 Studi Rancangan Penelitian

Penulis	Arif Rivan
Judul	Kajian Penanganan Permukiman Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis
Latar Belakang	Berdasarkan SK Bupati Ciamis Nomor 593/Kpts.719- Huk/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Ciamis terdapat 71 kawasan kumuh dengan luasan 366,54 ha. Dengan adanya persebaran kawasan permukiman kumuh tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sulit dalam mengambil keputusan arahan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan. Hal ini berefek kepada arahan penanganan kawasan kumuh yang telah berlangsung lama belum mampu memberikan hasil yang optimal.
Isu Permasalahan	Bagaimana Karakteristik kekumuhan permukiman di Kawasan Kelurahan Ciamis itu bisa terjadi, tingkat kekumuhannya dan apa saja skala prioritas yang ada di Kawasan Kelurahan Ciamis serta penanganan yang akan dilakukannya?
Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif dan Analisis Deskriptif Kuantitatif.
Variabel Penelitian	- Karakteristik Kekumuhan - Skala Tingkat Prioritas Kekumuhan - Arahan Penanganan
Indikator Penelitian	- Parameter, Nilai skoring pembobotan - Kondisi Kekumuhan (kumuh berat, sedang, ringan). Legalitas Lahan (Legal dan tidak legal). Pertimbangan Lain (Pertimbangan Tinggi, sedang dan rendah) - Hasil dari variabel Tingkat Kekumuhan dengan Skoring Pembobotan
Analisis Data	Menganalisis Tingkat Kekumuhan dan menentukan skala prioritas dengan menggunakan Analisis Skoring (pembobotan) dan merumuskan arahan penanganan dari tingkat pembobotan diatas agar sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018.
Kesimpulan (perbedaan dengan studi studi terdahulu)	- Studi yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu hampir semua peneliti di atas tidak meneliti suatu arahan penanganan yang berbasis Peta tingkatan prioritas dengan melihat Peraturan Menteri PUPR No 14 Tahun 2018 yaitu Pemugaran, Peremajaan dan Permukiman Kembali. - Dalam Metoda Analisis di atas tidak terdapat suatu analisis yang menjelaskan suatu identifikasi karakteristik kawasan kumuh dengan melihat variabel vitalitas ekonomi maupun non ekonomi.

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa persamaan judul, variabel penelitian maupun indikator penelitian, berikut adalah penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan direncanakan:

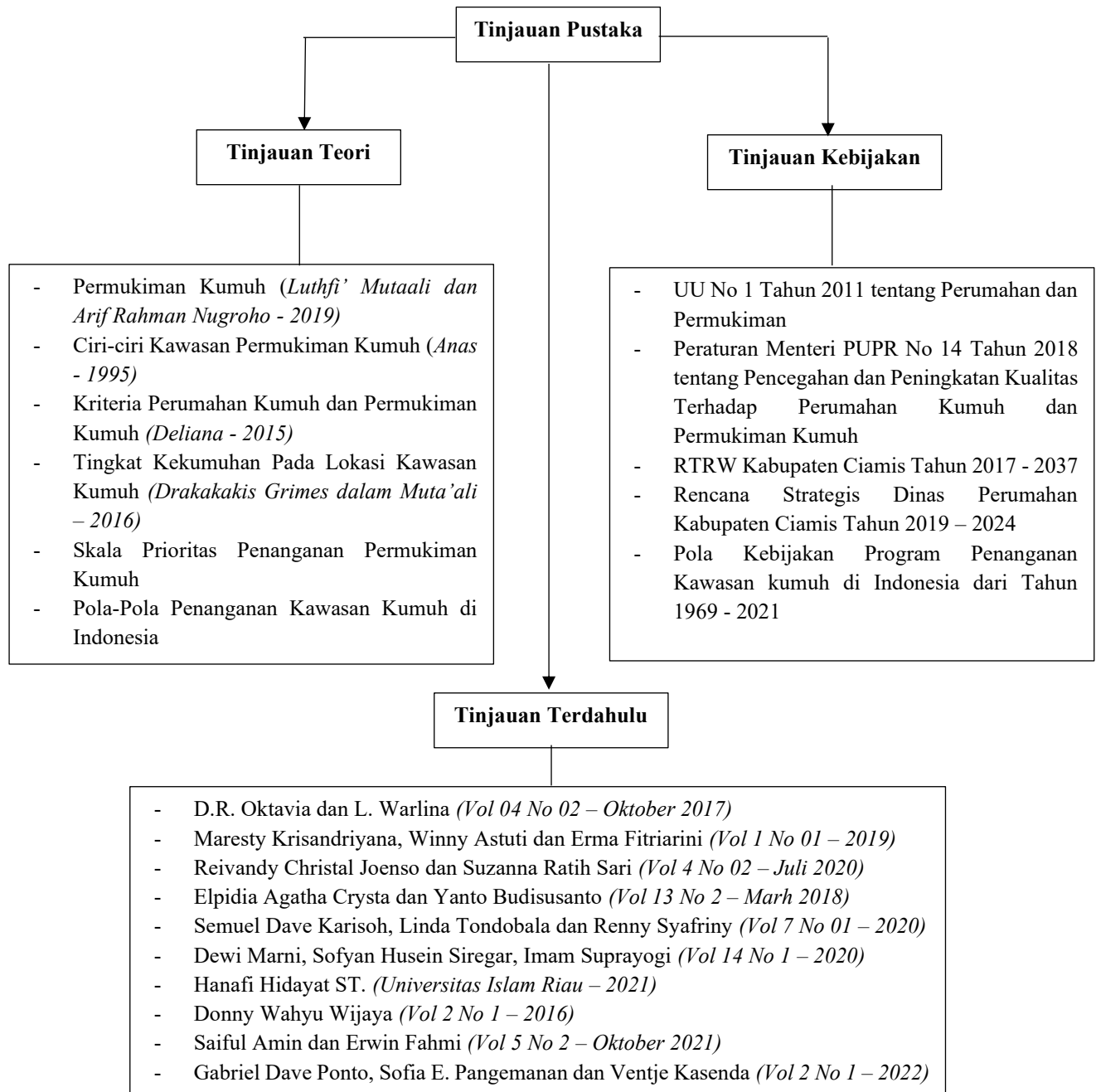
- Dewi Marni, Sofyan Husein Siregar, Imam Suprayogi (Vol 14 No 1 – 2020) yang berjudul “*Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru*”.
- Hanafi Hidayat ST. (Universitas Islam Riau – 2021) yang berjudul “*Studi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru*”.

Lalu, variabel dan indikator pada penelitian ini yang sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, tersebut terdiri dari :

- Aspek Kekumuhan
 - a. Kondisi bangunan gedung
 - b. Kondisi jalan lingkungan
 - c. Kondisi drainase
 - d. Kondisi penyediaan air minum
 - e. Kondisi pengelolaan air limbah
 - f. Kondisi pengelolaan persampahan
 - g. Kondisi proteksi kebakaran
- Status Lahan
 - Legalitas lahan
- Pertimbangan Lain
 - a. Kependudukan
 - b. Strategis lokasi
 - c. Sosial budaya ekonomi

Berikut ini adalah kerangka pustaka hasil dari pembahasan di atas, agar lebih jelasnya yaitu sebagai berikut

Gambar II.1 Kerangka Pustaka



BAB III

METODOLOGI

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, diperlukan metode untuk melakukan kajian kekumuhan permukiman, di mana metodologi yang dilakukan terdiri atas metode pendekatan studi, metode pengumpulan data, metode analisis dan variabel penelitian.

3.1.1 Metode Pendekatan

Untuk mencapai tujuan dalam studi ini, maka dibuat kerangka pendekatan yaitu berawal dari potensi dan permasalahan wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penerapan kerangka metode penelitian dalam mengumpulkan informasi dari berbagai aspek, di mana informasi yang telah diperoleh dapat digunakan lagi untuk kepentingan selain penelitian tersebut. Penelitian mengenai kajian identifikasi kawasan kumuh, tingkat kekumuhan dan penentuan skala prioritas di Kawasan Kelurahan Ciamis pada dasarnya adalah merupakan studi kasus pada suatu kawasan dengan melakukan analisa data sekunder dan primer dengan pendekatan kualitatif dan Kuantitatif menggunakan metode deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perumusan definisi permukiman kumuh;
2. Perumusan variabel, parameter dan data;
3. Pengumpulan data sekunder dan primer yang relevan;
4. Membuat komparasi dan interpretasi data yang didapat;
5. Membuat analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif tentang data yang diperoleh untuk menentukan lokasi kumuh berdasarkan analisis variabel dan parameter yang telah ditetapkan, dan menentukan klasifikasi permukiman kumuh;
6. Menentukan rekomendasi penanganan permukiman kumuh di kawasan Kelurahan Ciamis.

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data ini amat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan harus cukup akurat untuk digunakan. Keakuratan data tersebut dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambilan data tersebut cukup akurat. Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu dengan dua cara, meliputi:

3.1.2.1 Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapat secara langsung dari narasumber yang didapatkan langsung dari lapangan (Observasi lapangan) dengan cara mengamati objek suatu penelitian. Survei primer dilakukan cara melakukan observasi lapangan dan wawancara kepada ketua RT/RW setempat. Untuk variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 1 Variabel - Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Kriteia	Sub Kriteria	Tujuan	Sumber
1	Vitalitas Non Ekonomi	Kondisi Fisik Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan: - kenyamanan, kemudahan, kesehatan, keselamatan bangunan gedung. - pembangunan gedung diatas/dibawah tanah, air dan prasarana/sarana umum.	Mengetahui kelayakan kawasan seperti fisik bangunan, kesesuaian tata ruang	Masyarakat, Ketua RT/RW Setempat
			Tingkat Kepadatan Bangunan			
			Ketidaksesuaian Persyaratan Teknis Bangunan			
		Kondisi Kependudukan	Tingkat Kepadatan Penduduk	rendah dibawah (150 jiwa/ha). Sedang (151 - 200 jiwa/ha). Tinggi (201 - 400 jiwa/ha). Sangat padat > (400 jiwa/ha)	Mengetahui rendah dan padatnya kondisi kependudukan di wilayah tersebut	
			Tingkat Pertumbuhan Penduduk			

No	Variabel	Indikator	Kriteia	Sub Kriteria	Tujuan	Sumber
2	Vitalitas Ekonomi	Letak Strategis Kawasan	Lokasi Strategis Kawasan	pertimbangan letak lokasi perumahan permukiman baik itu fungsi strategis atau bukan fungsi strategis kabupaten	Mengetahui dan menyediakan akses mudah ke lapangan kerja, seperti dekat dengan pasar, kawasan industri, dsb	Masyarakat, Ketua RT/RW Setempat
		Sosial Budaya Kawasan	Kegiatan Budaya yang dimiliki Masyarakat Setempat	Potensi sosial tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Potensi Ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat. Potensi Budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat.	Mengetahui dan memahami aspek aspek sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat	
3	Status Tanah	Kriteria Status Tanah	Kejelasan Status Penguasaan Tanah	Kepemilikan sendiri dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah. Kepemilikan pihak lain (adat/ulayak) dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hal atas tanah	Mengetahui Kejelasan dan kesesuaian rencana tata ruang dari pemegang hak atas tanah	Masyarakat, Ketua RT/RW Setempat
4	Kondisi Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	Mengetahui kualitas jalan lingkungan baik itu konektivitas dan dimensi jalan yang sesuai dengan fungsi jalan.	Masyarakat, Ketua RT/RW Setempat
			Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman		
		Kondisi Drainase	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	Mengetahui dan mengukur jaringan drainase yang memadai untuk mengalirkan air hujan maupun limbah	
			Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman yaitu saluran tersier dan saluran lokal		
			Kualitas Drainase	Tidak terjaganya saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman		

No	Variabel	Indikator	Kriteia	Sub Kriteria	Tujuan	Sumber
		Kondisi Air Bersih	Ketidakterediaan Akses air bersih	masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa	Mengetahui dan mengukur ketersediaan air minum yang layak dan memadai untuk kebutuhan penduduk	
			Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih	kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal 60 liter/orang/hari		
		Kondisi Air Limbah	sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitukakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	Mengetahui dan mengukur kualitas pengelolaan air limbahnnya yang memadai untuk mengurangi pencemaran lingkungan	
			sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis	kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik, dan tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.		
		Kondisi Persampahan	sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai standar teknis	tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, TPS 3R, gerobak atau truk sampah pada skala lingkungan.	Mengetahui kualitas pengelolaan persampahan yang memadai untuk mengurangi pencemaran lingkungan	
			sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis	Pewadahan dan pemilahan domestik, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan lingkungan		
		Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi dan sistem proteksi kebakaran lingkungan.	Mengetahui dan mengukur ketersediaan prasarana proteksi kebakaran baik itu sarana dan peralatan pemadam api ringan	
			Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana alat pemadam api ringan (APAR), kendaraan pemadam kebakaran.		

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berikut ini Observasi Lapangan, merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan, atau dengan kata lain yaitu pengambilan data dengan cara mengamati langsung daerah yang dikaji. Dimana data yang di observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi variabel kekumuhan, seperti :

Tabel III. 2 Point Observasi Lapangan

No	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	Alat
1	Vitalitas Non Ekonomi	Kondisi Fisik Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan: - kenyamanan, kemudahan, kesehatan, keselamatan bangunan gedung. - pembangunan gedung diatas/dibawah tanah, air dan prasarana/sarana umum.	Form Ceklis Data, Alat Tulis, Wawancara dan Dokumentasi Observasi
			Tingkat Kepadatan Bangunan		
			Ketidaksesuaian Persyaratan Teknis Bangunan		
		Sosial Budaya Kawasan	Kegiatan Budaya yang dimiliki Masyarakat Setempat	Potensi sosial tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan. Potensi Ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat. Potensi Budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat.	
2	Status Tanah	Kriteria Status Tanah	Kejelasan Status Penguasaan Tanah	Kepemilikan sendiri dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah. Kepemilikan pihak lain (adat/ulayak) dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hal atas tanah	
3	Kondisi Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	Form Ceklis Data, Alat Tulis, Wawancara dan Dokumentasi Observasi
			Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	
		Kondisi Drainase	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	
			Ketidaktersediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman yaitu saluran tersier dan saluran lokal	
			Kualitas Drainase	Tidak terjaganya saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman	

No	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	Alat
		Kondisi Air Bersih	Ketidaktersediaan Akses air bersih	masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa	
			Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih	kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal 60 liter/orang/hari	
		Kondisi Air Limbah	sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitukakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	
			sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis	kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik, dan tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.	
		Kondisi Persampahan	sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai standar teknis	tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, TPS 3R, gerobak atau truk sampah pada skala lingkungan.	
			sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis	Pewadahan dan pemilahan domestik, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan lingkungan	
		Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi dan sistem proteksi kebakaran lingkungan.	
			Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana alat pemadam api ringan (APAR), kendaraan pemadam kebakaran.	

Sumber: Hasil Analisis 2025

Wawancara, yaitu proses pengambilan data atau dengan kata lain merupakan cara pengamatan untuk dapat memperoleh keterangan dimana dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang terkait. Wawancara ini dilakukan kepada tokoh-tokoh dan pemerintah yang terkait dengan penelitian ini, seperti kepala desa, RT, RW, camat, bappeda, PU Ciptakarya. Dimana Pertanyaan yang diajukan terkait:

Tabel III. 3 Point Topik Wawancara

No	Variabel	Topik Wawancara	Sub Indikator	Parameter	Tujuan	Sumber
1	Vitalitas Non Ekonomi	Kondisi Fisik Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	Kualitas bangunan yang tidak memenuhi persyaratan: - kenyamanan, kemudahan, kesehatan, keselamatan bangunan gedung. - pembangunan gedung diatas/dibawah tanah, air dan prasarana/sarana umum.	Mengetahui kelayakan kawasan seperti fisik bangunan, kesesuaian tata ruang	Masyarakat, Ketua RT/RW Setempat
			Tingkat Kepadatan Bangunan			
			Ketidaksesuaian Persyaratan Teknis Bangunan			
2	Status Tanah	Kriteria Status Tanah	Kejelasan Status Penguasaan Tanah	Kepemilikan sendiri dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah. Kepemilikan pihak lain (adat/ulayak) dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hal atas tanah	Mengetahui Kejelasan dan kesesuaian rencana tata ruang dari pemegang hak atas tanah	Masyarakat, Ketua RT/RW Setempat
3	Kondisi Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	Mengetahui kualitas jalan lingkungan baik itu konektivitas dan dimensi jalan yang sesuai dengan fungsi jalan.	Masyarakat, Ketua RT/RW Setempat
			Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman		
		Kondisi Drainase	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	Mengetahui dan mengukur jaringan drainase yang memadai untuk mengalirkan air hujan maupun limbah	
			Ketidakterediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman yaitu saluran tersier dan saluran lokal		
			Kualitas Drainase	Tidak terjaganya saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman		

No	Variabel	Topik Wawancara	Sub Indikator	Parameter	Tujuan	Sumber
		Kondisi Air Bersih	Ketidakterediaan Akses air bersih	masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa	Mengetahui dan mengukur ketersediaan air minum yang layak dan memadai untuk kebutuhan penduduk	
			Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih	kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal 60 liter/orang/hari		
		Kondisi Air Limbah	sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitukakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	Mengetahui dan mengukur kualitas pengelolaan air limbahnya yang memadai untuk mengurangi pencemaran lingkungan	
			sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis	kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik, dan tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.		
		Kondisi Persampahan	sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai standar teknis	tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, TPS 3R, gerobak atau truk sampah pada skala lingkungan.	Mengetahui kualitas pengelolaan persampahan yang memadai untuk mengurangi pencemaran lingkungan	
			sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis	Pewadahan dan pemilahan domestik, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan lingkungan		

No	Variabel	Topik Wawancara	Sub Indikator	Parameter	Tujuan	Sumber
		Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana pasokan air, jalan lingkungan, sarana komunikasi dan sistem proteksi kebakaran lingkungan.	Mengetahui dan mengukur ketersediaan prasarana proteksi kebakaran baik itu sarana dana peralatan pemadam api ringan	
			Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya sarana alat pemadam api ringan (APAR), kendaraan pemadam kebakaran.		

Sumber: Hasil Analisis 2025

- Dokumentasi merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting permukiman yang ada di kelurahan kajian yakni Kelurahan Ciamis dan juga dapat menjadi bukti faktual terkait gambaran daerah kajian
- Kuesioner yaitu, merupakan instrument pengumpulan data atau informasi yang dioprasionalisasikan ke dalam bentuk item atau pertanyaan. Penyusunan kuesioner dilakukan dengan harapan dapat mengetahui variabel-variabel apa saja yang menurut responden merupakan hal penting. Kuesioner ini dilakukan kepada masyarakat di lokasi kajian Kelurahan Ciamis. Bisa dilihat Pada Lampiran

Populasi

Populasi menurut Tika (1999:24) adalah himpunan individu atau objek yang banyaknya terbatas atau tidak terbatas, sedangkan menurut Sumaatmadja (1988:112) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan individu, kasus dan masalah yang diteliti yang ada di daerah penelitian dan menjadi objek penelitian.

Sesuai dengan pendapat di atas, maka yang menjadi populasi penduduk penelitian ini adalah seluruh penduduk yang berada di kawasan kumuh barak, sedanhkan populasi wilayahnya adalah sebagian wilayah yang di RW 15 dan RW 16 di Kelurahan Ciamis. Terdapat 2 RW yang menjadi deliniasi kajian penelitian kali ini yaitu RW 15 dan 16 dengan total luas wilayah 6,14 Ha, total jumlah kartu

keluarga yaitu 197 KK dan jumlah penduduk di kedua RW tersebut adalah 788 Jiwa.

Tabel III. 4 Populasi Bangunan / KK

No	Kawasan Kumuh Barak	Luas Kawasan kumuh Wilayah	Bangunan / KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK
1	RW 15	2,62	97	416	104
2	RW 16	3,52	73	372	93
Jumlah		6,14	170	788	197

Sumber: Kecamatan Ciamis dalam angka 2024

Teknik Sampling

Cara pengambilan sampel disebut teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Sampel harus valid, yaitu dapat mengukur apa yang perlu diukur. Sampel yang efektif ditentukan oleh dua pertimbangan, yaitu:

- Akurasi yaitu sejauh mana tidak ada “bias” (kesalahan) dalam sampel. Dengan kata lain, semakin kecil kesalahan dalam sampel, semakin akurat sampel tersebut.
- Presisi kriteria kedua dari sampel yang baik adalah memiliki tingkat akurasi estimasi tertentu. Presisi mengacu pada kedekatan perkiraan kami dengan karakteristik keseluruhan.

Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu pemilihan sampel probabilistik dan pemilihan sampel non-probabilitik. Perbedaan utama antara kedua metode tersebut adalah probabilitas bahwa setiap elemen dalam populasi dipilih sebagai objek sampel.

Metode probabilistik memberikan kesempatan yang sama untuk mengambil sampel setiap item dalam **populasi** dengan menggunakan pemilihan sampel secara acak. Sampel yang dipilih dengan metode non-probabilitas tidak acak, sehingga setiap item dalam populasi memiliki peluang yang berbeda untuk dipilih sebagai sampel. akan mengadopsi metode simple random sampling untuk mendapatkan data komunitas berdasarkan setiap elemen dalam total populasi dengan probabilitas yang sama untuk dipilih.

Sampel

Menurut Sumaatmadja (1988:112) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi (cuplikan contoh) yang mewakili populasi yang bersangkutan. Sedangkan menurut Arikunto (2006: 131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.

- Pemerintah Daerah (*Purposive Sampling*)

Purposive Sampling Mengumpulkan data melalui wawancara dengan instansi ini untuk mencari informasi terkait profil permukiman kumuh di kelurahan ciamis. Informasi yang diharapkan dapat diperoleh melalui wawancara dengan instansi, yang diwawancarai adalah kepala staf perencanaan daerah atau yang benar-benar memahami dan menguasai informasi yang ingin diperolehnya.

- Masyarakat (*Simple Random Sampling*)

Pengambilan data terhadap masyarakat melalui penyebaran kuisioner pada kelurahan kajian yakni Kelurahan Ciamis ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik masyarakat untuk mengetahui informasi serta gambaran eksisting diantaranya terkait pekerjaan, kondisi hunian (air bersih dan limbah), status kepemilikan rumah, pengelolaan persampahan, prasarana proteksi kebakaran serta data serta informasi yang diperlukan dalam proses analisis terkait permukiman kumuh pada daerah kajian. Adapun form kuesioner yang akan disebar terdapat pada lampiran.

Sampel ini diperoleh dengan menggunakan formula dari Dixon dan B. Leach (Tika, 2005:35), yaitu :

1. Menentukan Persentase Karakteristik (P)

$$P = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100 \dots \dots \dots (1)$$

$$P = \frac{197}{788} \times 100$$

$$P = 25$$

2. Menentukan variabilitas (V)

$$V = \sqrt{P(100 - P) \dots \dots \dots (2)}$$

$$V = \sqrt{25(100 - 25)}$$

$$V = \sqrt{25(75)}$$

$$= 43.30$$

3. Menentukan jumlah sampel (n)

$$N = \left(\frac{Z \times V}{c} \right)^2$$

$$N = \left(\frac{1.96 \times 43.30}{10} \right)^2$$

$$N = (8,4)^2$$

$$N = 72,02$$

Keterangan :

N = Jumlah Sampel

Z = *Convidence level* atau tingkat kepercayaan

V = Variabel yang diperoleh dengan rumus (2)

4. Menentuuakan Jumlah sampel yang dikoreksi dengan rumus:

$$n' = \frac{n}{1 + \frac{n}{N}}$$

$$n' = \frac{72,02}{1 + \frac{72,02}{197}}$$

$$n' = \frac{72.02}{1 + 0,365}$$

$$n' = \frac{72,02}{1,365}$$

$$n' = 52,76 = 53$$

Keterangan :

n' = Jumlah sampel yang telah dikoreksi

n = Jumlah sampel yang dihitung dengan rumus sebelumnya

N = Jumlah populasi (KK)

Dengan menghitung sampel penduduk menggunakan formula dari Dixon dan B. Leach (Tika, 2005:35), maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 53. Pengambilan 53 sampel tidak pada satu tempat, namun tersebar pada dua RW. Agar pengambilan sampel dapat mewakili populasi, maka sampel pada setiap RW

ditentukan dengan rumus :

$$n^n = \frac{p^n}{p} \times n$$

1. Jumlah Sampel di RW 15

$$n^n = \frac{104}{197} \times 53$$

$$n^n = 28$$

2. Jumlah Sampel di RW 16

$$n^n = \frac{93}{197} \times 53$$

$$n^n = 25$$

Berikut ini Adalah tabel sampel di Kawasan kumuh barak :

Tabel III. 5 Sampel di Kawasan Kumuh Barak

No	Lokasi	Jumlah KK	Jumlah Sampel
1	RW 15	104	28
2	RW 16	93	25
Jumlah		197	53

Sumber: Hasil Analisis 2025

Didalam tabel diatas untuk di RW 15 dengan jumlah KK 104 mempunyai sampe 28 sedangkan RW 16 memiliki jumlah KK 93 dengan jumlah sampel 25. Dan untuk total jumlah sampel di kedua RW tersebut berjumlah 53 sampel.

3.1.2.2 Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu melalui studi pustaka atau studi literatur dengan cara mengkaji sumber teoritis berupa jurnal-jurnal, *text book*. Literatur yang digunakan antara lain yang memuat teori tentang permukiman kumuh, penanganan kawasan kumuh, relokasi, penataan kawasan, dan kajian lain yang terkait. Survei instansi juga dilakukan untuk mendapatkan data-data melalui instansi-instansi terkait seperti instansi pemerintahan setempat. Data-data berupa dokumen yang diperoleh tersebut kemudian akan ditelaah dan diinterpretasikan. Pengumpulan data sekunder berfungsi untuk mendukung data primer yang diperoleh dari lapangan.

Tabel III. 6 Kebutuhan Data Sekunder

No	Sasaran	Data	Keterangan	Sumber
1	Karakteristik Kawasan Kumuh Barak	Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Kumuh	Mengetahui pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh	JDIH Kabupaten Ciamis
		Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman	Mengetahui upaya arahan penanganan dalam peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali	
		SK Bupati Nomor 593/Kpts.719-Huk/2021 tentang Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh	Mengetahui persebaran lokasi kawasan kumuh di Kabupaten Ciamis khususnya di Kelurahan Ciamis	
		Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 - 2037	Mengetahui tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kabupaten Ciamis	
		Rencana Strategis Dinas Perumahan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024	Mengetahui tata kelola pemerintahan, ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah, dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	
2	Tingkat Prioritas Kawasan Kumuh Barak	Dokumen Laporan Akhir Pemetaan Kawasan Permukiman Prioritas Kecamatan Ciamis	Mengetahui data data dalam Kawasan prioritas kumuh barak.	Scribd Document
		SHP Kabupaten Ciamis	Membuat peta kajian lokasi untuk bahan penelitian	Badan Informasi Geospasial
		Legalitas Lahan dan Bangunan	Mengetahui legalitas lahan dan bangunan Kawasan kumuh barak dengan tipe bidang terdaftar dan tidak terdaftar, baik itu hak milik, hak wakaf dan kosong	Bhumi ATR/BPN
3	Arahan Penanganan	Indikator dan Penanganan Kawasan Padathuni - Kumuh	Mengetahui Tindakan dan penanganan yang tepat sesuai dengan pedoman	Kementrian PUPR bidang pengembangan Perkim

Sumber: Hasil Analisis 2025

3.2 Metode Analisis

Metode analisis diperlukan dalam analisis data penelitian. Metode analisis menjelaskan mengenai teknik analisis data. Analisis yang digunakan adalah Metode Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif

Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik dasar dari kumpulan data yang telah terkumpul metode ini digunakan dalam sasaran ke satu yaitu mengidentifikasi karakteristik kawasan kumuh barak di kelurahan ciamis. Metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan dan pengolahan data menggunakan angka dan nilai numerik, metode ini digunakan dalam sasaran ke dua yaitu mengidentifikasi tingkat prioritas kekumuhan di kelurahan ciamis.

3.2.1 Mengidentifikasi Karakteristik Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis

Karakteristik kawasan kumuh disini yaitu menjelaskan tentang permukiman kumuh yang disertai dengan aspek ketidakaturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta sosial ekonomi budaya yang ada di kawasan kumuh tersebut, namun disini ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis kawasan kumuh di Kelurahan Ciamis ini yaitu terkait dengan variabel dan indikator dalam penetapan kawasan kumuh di Kelurahan Ciamis yang diperoleh melalui hasil observasi lapangan dan wawancara ke ketua RT/RW setempat, untuk melihat kondisi eksisting dilapangan dengan isian numerik dan dokumentasi kegiatan. Berikut adalah data isian variabel numerik untuk mengetahui data data skala tingkat prioritas pada kawasan kumuh barak di RW 15 dan RW 16 yaitu sebagai berikut:

Tabel III. 7 Karakteristik Kawasan Kumuh Barak

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh		Jumlah	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	RW 15	RW 16			
1	Vitalitas Non Ekonomi	Kondisi Fisik Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur				Unit	
			Tingkat Kepadatan Bangunan	Kepadatan bangunan dengan bangunan lainnya				Unit	
			Ketidaksesuaian Bangunan	Jumlah bangunan tidak sesuai keterangan				Unit	
		Kondisi Kependudukan	Tingkat Kepadatan Penduduk	rendah dibawah (150 jiwa/ha). Sedang (151 - 200 jiwa/ha). Tinggi (201 - 400 jiwa/ha). Sangat padat > (400 jiwa/ha)				KK	
			Tingkat Pertumbuhan Penduduk						
2	Vitalitas Ekonomi	Letak Strategis Kawasan	Lokasi Strategis Kawasan	lokasi tersebut apakah masuk kedalam lokasi strategis atau tidaknya, dan bagaimana kegiatan sosial budaya dilokasi tersebut				Teks	
		Sosial Budaya Kawasan	Kegiatan Budaya yang dimiliki Masyarakat Setempat						
3	Status Tanah	Kriteria Status Tanah	Kejelasan Status Penguasaan Tanah	status tanah milik pribadi atau pemerintah dan apakah legal atau ilegal				Legal (+), Ilegal (-)	
4	Kondisi Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal (m), panjang jalan existing (m)				Meter	
			Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Panjang jalan rusak (m)					
		Kondisi Drainase	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan				Meter	

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh		Jumlah	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	RW 15	RW 16			
			Ketidaktersediaan Drainase	Panjang drainase ideal (m), panjang drainase existing (m)					
			Kualitas Drainase	Panjang drainase yang buruk					
		Kondisi Air Bersih	Ketersediaan Akses air bersih	Jumlah KK tidak terakses air minum aman				KK	
			Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih	Jumlah KK tidak terakses air minum cukup					
		Kondisi Air Limbah	sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai dengan keterangan				KK	
			sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sarana prasarana air limbah tidak sesuai dengan keterangan					
		Kondisi Persampahan	sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sarana prasarana persampahan tidak sesuai dengan keterangan				KK	
			sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan keterangan					
		Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran				Unit	
			Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran					

Sumber: Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kawasan Perkotaan dan Hasil Analisis 2025

3.2.2 Mengidentifikasi Tingkat Prioritas Kekumuhan di Kelurahan Ciamis

Penentuan Tingkat Prioritas Permukiman Kumuh yaitu dengan teknik skoring berdasarkan variabel dan indikator yang ditetapkan pada UU No. 1 Tahun 2011, dan Buku Saku- Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh tahun 2022. Analisis Skoring dilakukan dengan menilai kondisi eksisting terhadap kriteria / indikator yang ditetapkan. Nilai bobot tersebut akan mencerminkan tingkat kekumuhan pada masing masing variabel yang digunakan. Masing masing variabel dalam analisis skoring ini memiliki parameter. Penilaian akan dilakukan melalui obsevasi penelitian dengan skala penelitian tiap tiap variabel adalah 5,3,1. Analisis Skoring (Pembobotan) merupakan berbagai macam perhitungan yang digunakan untuk melakukan skoring pada setiap aspek yang dilakukan melalui observasi lapangan oleh peneliti. Berikut ini adalah perhitungan dari segi kondisi kekumuhan, legalitas tanah dan pertimbangan lain.

A. Perhitungan dari segi Kondisi Kekumuhan

Tabel III. 8 Kriteria Kondisi Kekumuhan

Aspek	Kriteria	Bobot Persentase	Nilai	Sumber Data
KONDISI KEKUMUHAN				
1. Kondisi Bangunan Gedung	1. Ketidakteraturan Bangunan	• 76% - 100% bangunan pada Lokasi tidak memiliki keteraturan	• 5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		• 51% - 75% bangunan pada Lokasi tidak memiliki keteraturan	• 3	
		• 25% - 50% bangunan pada Lokasi tidak memiliki keteraturan	• 1	
	2. Tingkat Kepadatan Bangunan	• 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai keterangan	• 5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		• 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai keterangan	• 3	
		• 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai keterangan	• 1	

Aspek	Kriteria	Bobot Persentase	Nilai	Sumber Data
	3. Kualitas Bangunan Yang Tidak Sesuai Keterangan	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi indikator keterangan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi indikator keterangan	3	
		25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi indikator keterangan	1	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	1. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
		25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	2. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
		25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	1. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
		25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3	

Aspek	Kriteria	Bobot Persentase	Nilai	Sumber Data
		25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	• 1	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	• 5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	• 3	
		25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	• 1	
	2. Ketidakterediaan Saluran Drainase	76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan	• 5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan	• 3	
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan	• 1	
	3. Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	• 5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	• 3	
		25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	• 1	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai keterangan	76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai indikator keterangan	• 5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai indikator keterangan	• 3	
		25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai indikator keterangan	• 1	
	2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air	76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai indikator keterangan	• 5	Wawancara, Format Isian, Peta

Aspek	Kriteria	Bobot Persentase	Nilai	Sumber Data
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	Limbah Tidak Sesuai dengan keterangan	• 51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai indikator keterangan	• 3	Lokasi, Observasi
		• 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai indikator keterangan	• 1	
	1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan keterangan	• 76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi keterangan	• 5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		• 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi keterangan	• 3	
		• 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi keterangan	• 1	
	2. Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Keterangan	• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai indikator keterangan	• 5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		• 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai indikator keterangan	• 3	
		• 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai indikator keterangan	• 1	
7. Proteksi Kebakaran	1. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	• 5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		• 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	• 3	
		• 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	• 1	
	2. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	• 5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
		• 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	• 3	
		• 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	• 1	
		• Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	• 1	

Sumber : Buku Saku- Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh 2022

Berikut ini contoh pengisian tabel numerik menurut kondisi kekumuhan:

Tabel III. 9 Contoh Tabel Pengisian Numerik Peraspek

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan	Kondisi Eksisting			
					RW 15 & 16			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
	Aspek							

Sumber: Buku Saku- Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh 2022

Setelah tabel diatas diisi oleh per aspeknya, selanjutnya dilakukan rekapitulasi numerik pada setiap aspek kondisi kekumuhan yaitu sebagai berikut

Tabel III. 10 Jumlah Nilai Aspek Penilaian Tingkat Skala Prioritas Permukiman Kawasan Kumuh Barak Ciamis

No	Keterangan	Lokasi Kumuh	
		RW 15	RW 16
Kondisi Kekumuhan			
1	Bangunan Gedung		
2	Jalan Lingkungan		
3	Penyediaan Air Minum		
4	Drainase Lingkungan		
5	Pengelolaan Air Limbah		
6	Pengelolaan Persampahan		
7	Proteksi Kebakaran		
Jumlah Nilai			

Sumber: Hasil Analisis 2025

Pada tabel diatas menjelaskan yaitu hasil setiap aspek kondisi kekumuhan, hasil akhirnya yaitu total jumlah nilai dan keterangan, hasil ini akan mempengaruhi aspek tingkat prioritas dengan cara:

Teknik Skoring

Teknik skoring adalah metode sistematis yang digunakan untuk menentukan Kawasan yang harus diprioritaskan dengan memberikan skor akhir atau nilai pada sejumlah kriteria atau parameter yang telah ditetapkan

Dalam penentuan kawasan prioritas peningkatan kualitas infrastruktur pada Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Ciamis khususnya Kawasan barak ini dilakukan dengan metode skoring pada seluruh kriteria sehingga mendapatkan nilai tingkat kekumuhan sebagai dasar pengambilan Keputusan pada Kawasan prioritas, berikut ini merupakan rumus tingkat kekumuhan:

$$Si \text{ (Total Skor)} = \frac{\sum Bi \text{ (Skor Sub Kriteria)}}{\sum P \text{ (Jumlah Skor Kriteria)}}$$

Keterangan:

Si = Total Skor Pada Setiap Kriteria

Bi = Skor Sub Kriteria

P = Jumlah Sub Kriteria

Setelah melihat rumus tingkat kekumuhan di atas menjelaskan bahwa total skor pada setiap kriteria itu turunan dari hasil skor sub kriteria dibagi dengan jumlah skor kriteria menghasilkan total skor secara keseluruhan, itu adalah mengetahui total skor. Berikutnya adalah rumus pada setiap aspek perhitungan numerik yang akan di jelaskan pada sub bab berikut ini:

Rumus Perhitungan Numerik Kawasan Kumuh

Rumus perhitungan numerik kumuh ini adalah untuk membuat baseline masing masing kriteria per aspek sebagai acuan dalam melakukan penilaian yang sudah disesuaikan dengan rumus dan satuannya. Berikut adalah rincian tabel rumusan perhitungan kriteria kekumuhan:

Tabel III. 11 Rumusan Perhitungan Numerik Kawasan Kumuh

Variabel	Aspek	Kriteria	Sub Kriteria	Rumus Perhitungan
Vitalitas Non Ekonomi	Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur (unit)	$\frac{\sum \text{Bangunan tidak teratur (Unit)}}{\sum \text{Bangunan Keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$
		Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas Kawasan Permukiman	$\frac{\text{Jumlah Bangunan Hunian}}{\text{Luas sebagian Kawasan Kumuh (Ha)}} \times 100\%$

Variabel	Aspek	Kriteria	Sub Kriteria	Rumus Perhitungan
			memiliki kepadatan bangunan dengan bangunan lainnya (Unit /Ha)	
		Kualitas Bangunan yang tidak sesuai keterangan	Jumlah bangunan tidak sesuai keterangan (unit)	$\frac{\sum \text{Bangunan tidak sesuai keterangan (Unit)}}{\sum \text{Bangunan Keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$
	Aspek Kondisi Bangunan			
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Menghitung Jalan Ideal	$\frac{\text{Luas Jalan Tidak Terlayani (M)}}{\text{Luas keseluruhan Kawasan Kumuh (Ha)}} \times \text{Panjang Jalan Eksisting}$
			• Panjang jalan ideal (m) • Panjang jalan existing (m)	$\frac{\text{Panjang Jalan ideal (M)} - \text{Panjang Jalan Eksisting (M)}}{\text{Panjang Jalan Ideal (M)}} \times \text{Luas keseluruhan Kawasan Kumuh (Ha)} \times 100\%$
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Panjang jalan rusak (m)	$\frac{\text{Panjang Jalan Rusak}}{\text{Panjang Jalan ideal}} \times 100\%$
	Aspek Kondisi Jalan Lingkungan			
	Kondisi Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum aman}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum cukup	$\frac{\sum \text{KK tidak terakses air minum cukup}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
		Aspek Kondisi Air Minum		
			Luas kawasan	

Variabel	Aspek	Kriteria	Sub Kriteria	Rumus Perhitungan
	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	yang terkena genangan (Ha)	$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$
		Ketidaktersediaan Drainase	Menghitung Panjang Drainase Ideal	$\frac{\text{Panjang Drainase Eksisting}}{\text{Luas keseluruhan Kawasan kumuh (Ha)}} \times 100\%$
			• Panjang drainase ideal (m) • Panjang drainase existing (m)	$\frac{\text{Panjang Drainase ideal (M)} - \text{Panjang Drainase Eksisting (M)}}{\text{Panjang Drainase Ideal (M)}} \times 100\%$
		Kualitas Drainase	Panjang drainase yang buruk (m)	$\frac{\text{Panjang Drainase yang buruk}}{\text{Panjang Drainase Ideal}} \times 100\%$
	Aspek Kondisi Drainase			
	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai dengan keterangan	$\frac{\sum \text{KK dengan sistem air limbah tidak sesuai keterangan}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
		Prasarana dan Sarana pengelolaan Air Limbah tidak sesuai dengan keterangan	Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai dengan keterangan	$\frac{\sum \text{KK dengan Sarpras air limbah tidak sesuai keterangan}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$
	Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah			
	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan keterangan	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana sampah yang tidak sesuai keterangan	$\frac{\sum \text{KK dengan Sarpras dan persampahan tidak sesuai keterangan}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$

Variabel	Aspek	Kriteria	Sub Kriteria	Rumus Perhitungan
		Sistem Pengelolaan persampahan tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai keterangan	$\frac{KK \text{ dengan Sistem } \Sigma \text{ pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis}}{\Sigma KK \text{ keseluruhan}} \times 100\%$
	Kondisi Pengelolaan Persampahan			
	Proteksi Kebakaran	Prasarana Proteksi Kebakaran tidak tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)	$\frac{Bangunan \text{ tidak terlayani } \Sigma \text{ prasarana proteksi kebakaran (Unit)}}{\Sigma \text{ Bangunan keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$
		Sarana Proteksi Kebakaran tidak Tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (unit)	$\frac{Bangunan \text{ tidak terlayani } \Sigma \text{ sarana proteksi kebakaran (Unit)}}{\Sigma \text{ Bangunan keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$
	Aspek Proteksi Kebakaran			

Sumber: Buku Saku- Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh 2022

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rumusan numerik di atas untuk menghitung tingkat skala prioritas yang ada di sasaran 2 yang dimana semua hasil tersebut akan mempengaruhi untuk ke sasaran 3 yaitu arah penanganan yang terjadi di kawasan kumuh barak.

B. Perhitungan dari segi Legalitas Lahan

Tabel III. 12 Kriteria Aspek Legalitas Lahan

Aspek	Kriteria	Parameter	Nilai	Sumber Data
Legalitas Tanah	Kejelasan status penguasaan lahan	Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(+)	BHUMI Geoportal ATR/BPN dan Observasi lapangan
		Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain	(-)	
	Kesesuaian Rencana Tata Ruang	Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(+)	
		Sebagian atau keseluruhan lokasi berada bukan pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR	(-)	

Sumber: Buku Saku- Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh 2022

Dalam tabel diatas menjelaskan bahwa perhitungan dari segi legalitas lahan memiliki 2 kriteria yaitu,:

- kejelasan status penguasaan lahan yang berdasarkan observasi lapangan dengan cara sampling dan dilengkapi dengan web sumber BHUMI geoportal ATR/BPN
- kesesuaian rencana tata ruang yang berdasarkan overlay peta pemanfaatan ruang dengan Kawasan yang akan dikaji, apakah zona tersebut peruntukannya untuk Kawasan permukiman / industri dsb.

C. Perhitungan dari segi Pertimbangan Lain

Tabel III. 13 Kriteria Aspek Pertimbangan Lain

No	Kriteria	Parameter	Nilai	Sumber Data
1	Nilai Strategis Lokasi	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen RTRW &
		Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1	
2	Kependudukan	- Untuk metropolitan & kota besar kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar >400 jiwa/ha	5	

No	Kriteria	Parameter	Nilai	Sumber Data
		- Untuk kota sedang & kota kecil kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar >200 jiwa/ha		RPJMD, Observasi lapangan
		Kepadatan penduduk pada observasi Lokasi sebesar 151 – 200 jiwa/ha	3	
		Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar <150 jiwa/ha	1	
3	Kondisi sosial, ekonomi dan budaya	Lokasi memiliki potensi sosiak ekonomi dan budata untuk dikembangkan atau dipelihara	5	
		Lokasi tidak memiliki potensi sosiak ekonomi dan budata untuk dikembangkan atau dipelihara	1	

Sumber: Buku Saku- Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh 2022

Setelah mengetahui jumlah nilai pada setiap aspek kondisi kekumuhan, legalitas tanah dan pertimbangan lain, maka selanjutnya dibuatkanlah tingkatan prioritas kekumuhan, menurut sumber Buku Saku – Identifikasi dan Penilaian Lokasi kumuh pada tahun 2022 yang di kelompokkan dalam berbagai klasifikasi prioritas yaitu:

Tabel III. 14 Formula Penentuan Tingkatan Prioritas

Nilai	Keterangan	Berbagai Kemungkinan Klasifikasi																	
Kondisi Kekumuhan		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
60 - 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 - 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 - 37	Kumuh Rendah													X	X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status lahan legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status ilegal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 - 15	Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 - 10	Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 - 5	Rendah					X	X					X	X					X	X
Tingkatan Prioritas		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber: Buku Saku- Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh 2022

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi kekumuhan yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;

2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
- 10 B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
- 11 B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
- 12 B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
- 13 C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
- 14 C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
- 15 C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
- 16 C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;

17 C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;

18 C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Tingkat kekumuhan awal

Setelah diketahui semua skor setiap indikator kumuh, maka selanjutnya dijumlahkan agar didapatkan tingkat kekumuhan dalam Kawasan tersebut dengan menggunakan Teknik skoring.

Tabel III. 15 Total Tingkat Kekumuhan Awal

Total Nilai	
Tingkat Kekumuhan	
Rata-Rata Kekumuhan Sektoral	

Sumber: Buku Saku- Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh 2022

3.2.3 Teridentifikasi Arahan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ciamis

Arahan Penanganan terhadap permukiman kumuh itu sendiri adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencegah pembentukan, pertumbuhan, atau memperbaiki permukiman kumuh. Permukiman kumuh seringkali disebut juga sebagai permukiman tidak teratur atau permukiman ilegal, dan biasanya terkait dengan masalah seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya fasilitas dasar, sanitasi yang buruk, dan akses terbatas terhadap layanan publik. Penanganan permukiman kumuh memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan menciptakan komunitas yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan Buku Saku – Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh dan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh dibagian kelima yaitu Pola penanganan pada pasal 44 ayat 4 yaitu:

1. Pemugaran adalah upaya memperbaiki atau membangun kembali prasarana, dan utilitas umum agar fungsi kawasan permukiman layak huni dapat

dipulihkan. Pemugaran dilakukan dengan memperbaiki kondisi fisik bangunan dan infrastruktur yang rusak atau tidak memenuhi standar, seperti jalan lingkungan, saluran drainase dan fasilitas umum lainnya yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi kawasan agar layak dan aman untuk masyarakat serta tanpa mengubah secara drastis struktur sosial dan pola permukiman yang sudah ada. Secara konseptual, implementasi prinsip pemugaran meliputi: Revitalisasi, Rehabilitasi, Renovasi dan Rekonstruksi.

2. Peremajaan adalah upaya yang dilakukan dengan pembaruan atau pembangunan ulang kawasan secara menyeluruh, upaya ini dapat dilakukan apabila kawasan dengan tingkat kekumuhan tinggi, kepadatan penduduk sangat tinggi atau lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Peremajaan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik, aman dan layak huni dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
3. Permukiman Kembali adalah upaya dalam pemindahan penduduk dari kawasan kumuh ke lokasi baru yang telah disiapkan oleh pemerintahan, dalam permukiman kembali ini diterapkan jiwa kawasan kumuh berada di lokasi yang sangat tidak layak huni, rawan bencana, atau diperlukan kepentingan revitalisasi kota.

Pada pola penanganan yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 yang dimana diatur dalam ketentuan yaitu:

- a. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu **Peremajaan**.
- b. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah tidak legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu **Permukiman Kembali**.
- c. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu **Pemugaran**, dan
- d. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah tidak legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu **Permukiman Kembali**.

Oleh karena itu melanjutkan dari tingkatan prioritas pada sasaran 2 yaitu berikut ini tabel tingkatan prioritas beserta pola penanganannya:

Tabel III. 16 Keterangan Tingkatan Prioritas

Tingkatan Prioritas	Klasifikasi	Keterangan	Pola Penanganan
Prioritas 1	A1	kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal	Peremajaan
	A2	kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal	Permukiman Kembali
Prioritas 2	B1	lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal	Peremajaan
	B2	lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal	Permukiman Kembali
Prioritas 3	C1	lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal	Pemugaran
	C2	lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal	Permukiman Kembali
Prioritas 4	A3	lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal	Peremajaan
	A4	lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal	Permukiman Kembali
Prioritas 5	B3	lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal	Peremajaan
	B4	lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal	Permukiman Kembali
Prioritas 6	C3	lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal	Pemugaran
	C4	lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal	Permukiman Kembali
Prioritas 7	A5	lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal	Peremajaan
	A6	lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal	Permukiman Kembali
Prioritas 8	B5	lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal	Peremajaan
	B6	lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal	Permukiman Kembali
Prioritas 9	C5	lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal	Pemugaran
	C6	lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal	Permukiman Kembali

Sumber: Buku Saku- Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh 2022

Setelah melakukan pola penanganan general selanjutnya arahan penangan lebih detail yang bersumber menurut Kementrian PUPR Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang berjudul Indikator dan Penanganan Kawasan Padathuni-Kumuh.

Dalam model penentuan Tingkat Kekumuhan dan cara penanganannya yaitu lokasi kajian kawasan kumuh barak ini termasuk kedalam tipologi kawasan padathuni-kumuh dengan tindak penanganan PHKP tahap Embrio di kawasan legal/*slum*. Dengan upaya **PREVENTIF** penanganan PHKP tahap **Embrio** ini yaitu pencegahan lingkungan hunian padathuni-kumuh yang baru tumbuh (tahap embrio) menjadi berkembang/ekspansif secara informal di zona peruntukan permukiman, dengan tahapan penanganan dan rumus penanganan sebagai berikut:

$$\text{TRGL} \rightarrow \text{PT} + \text{L} \rightarrow \text{PSU 1} + \text{PSU 2}$$

Keterangan :

TRGL : Tata Ruang dan Guna Lahan

PT : Penataan Tanah

L : Legalitas

PSU 1 : Prasarana dan Utilitas

PSU 2 : Perumahan dan Sarana Lingkungan

1. Tata ruang dan guna lahan (TRGL)

- Penegasan aturan pembangunan rumah di perkotaan pada penghuni, berikut konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan
- Penegasan dan penegakan hukum garis sempadan sebagai zona aman dan harus bebas bangunan
- Pembangunan *buffer zone* berupa jalur inspeksi, jalur hijau / biru (*green blue belt*) pada garis sempadan (pantai, sungai, jalan, rel KA, dan sebagainya) yang tidak boleh dijadikan area hunian.
- Pengawasan berkala pertumbuhan penggunaan dan pembangunan lahan untuk tidak melebihi ambang batas daya dukung dan melanggar persyaratan pembangunan rumah (administrasi, ekologis, teknis)

- Penegakan hukum penerapan NSPK tata ruang dan peruntukan lahan

2. Penataan Tanah (PT)

- Penegasan batas kawasan peruntukan perumahan dan penataan kembali batas-batas kavling sesuai daya tampung populasi pada kawasan tersebut.
- Pengendalian perkembangan pemanfaatan tanah kavling oleh penghuni
- Program pembangunan
 - a. Pembangunan kembali lokasi perumahan melalui perbaikan setempat
 - b. Program pembangunan baru tatanan perumahan menggunakan *Guided Land Development, Site Services* dan kasiba lisiba dengan tanah matang.

3. Legalitas (L)

- Peningkatan legalitas kependudukan dengan menerbitkan KTP tetap dan KTP sementara
- Pengendalian migran (KTP sementara)
- Penyederhanaan administrasi pertanahan untuk memperoleh legalitas hasil penataan tanah yang dilaksanakan melalui *Landsharing* (LS) atau Konsolidasi tanah (KT)
- Penyederhanaan prosedur perizinan mendirikan bangunan (IMB) secara efektif

4. PSU 1 : Prasarana dan Utilitas

- Implementasi prasyarat pranata pembangunan prasarana perumahan
- Rehabilitas peningkatan prasarana (infrastruktur) perumahan
- Sosialisasi dan penyiapan SDM untuk pemeliharaan prasarana dan sarana terbangun

5. PSU 2 : Perumahan dan Sarana Lingkungan

- Implementasi prasyarat pranata pembangunan perumahan dan sarana perumahan
- Rehabilitasi dan penyediaan hunian yang layak huni

3.3 Matriks Analisis

Berikut adalah Matriks Analisis pada penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III. 17 Matriks Analisis

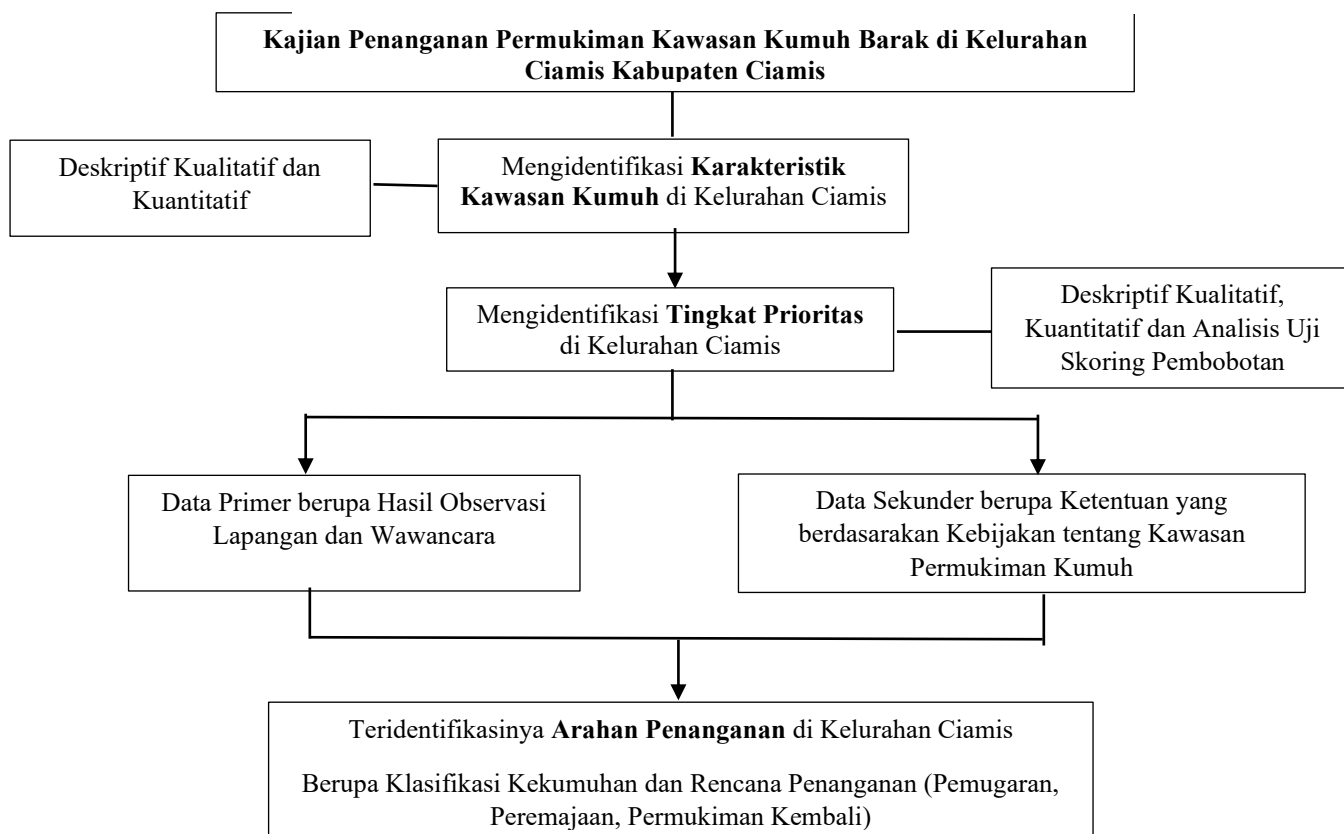
No	Sasaran	Variabel	Indikator	Metode Pendekatan	Sumber Data	Output
1	Mengidentifikasi Karakteristik Kawasan Kumuh di Kelurahan Ciamis	Vitalitas Non Ekonomi	Kondisi Fisik Bangunan	Pendekatan Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif	Observasi Lapangan, Wawancara dan JDIH Kabupaten Ciamis	Mengetahui Identitas atau karakteristik Kawasan Kumuh di Kelurahan Ciamis untuk menunjukan tingkat dan skala prioritas kekumuhan
			Kondisi Kependudukan			
		Vitalitas Ekonomi	Letak Strategis Kawasan			
			Fungsi Sekitar Kawasan			
		Status Tanah	Kriteria Status Tanah			
		Kondisi Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan			
			Kondisi Drainase			
			Kondisi Air Bersih			
			Kondisi Air Limbah			
			Kondisi Persampahan			
			Kondisi Proteksi Kebakaran			
2	Mengidentifikasi Tingkat Prioritas Kawasan Kumuh di Kelurahan Ciamis	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Pendekatan Deskriptif Kualitatif, Kuantitatif, dan Analisis Skoring Pembobotan	Observasi Lapangan, Wawancara, dan Kuesioner	Mengetahui Nilai bobot dari Tingkat Kekumuhan dan menentukan Skala Prioritas dengan Parameter yang telah ditetapkan.
			Tingkat Kepadatan Bangunan			
			Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat			
		Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan			
			Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan			
		Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum			
			Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum			
		Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air			
			Ketidakterediaan Drainase			
			Kualitas Kontruksi Drainase			
		Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai standar teknis			

No	Sasaran	Variabel	Indikator	Metode Pendekatan	Sumber Data	Output
		Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
			Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis			
			Sistem Pengelolaan Persampahan tidak sesuai standar teknis			
		Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana Proteksi Kebakaran tidak tersedia			
			sarana proteksi kebakaran tidak tersedia			
		Legalitas Tanah	Kejelasan Status Tanah			
			Kesesuaian Rencana Tata Ruang			
		Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi			
			Kependudukan			
			Kondisi sosial, ekonomi dan budaya			
3	Teridentifikasinya Arahan Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Ciamis	Pemugaran	Tingkatan kekumuhan Rendah	Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Hasil Identifikasi Kawasan Kumuh, Tingkat dan Skala Prioritas di Kelurahan Ciamis	Mengetahui Karakteristik Kawasan Kumuh, Tingkat dan Skala Prioritas di Kelurahan Ciamis dengan menentukan Arahan Penanganan Berupa Pemugaran,
		Peremajaan	Tingkatan kekumuhan Sedang			
		Permukiman Kembali	Tingkatan kekumuhan Tinggi			

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berikut ini adalah tabel kerangka analisis yang dibuat oleh peneliti yang menjelaskan tentang alur alur analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya

Gambar III.1 Kerangka Analisis



BAB IV

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum ini terdiri dari Gambaran umum eksternal dan Gambaran umum internal yang berisikan tentang profil, batas administrasi dan kondisi fisik wilayah.

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ciamis

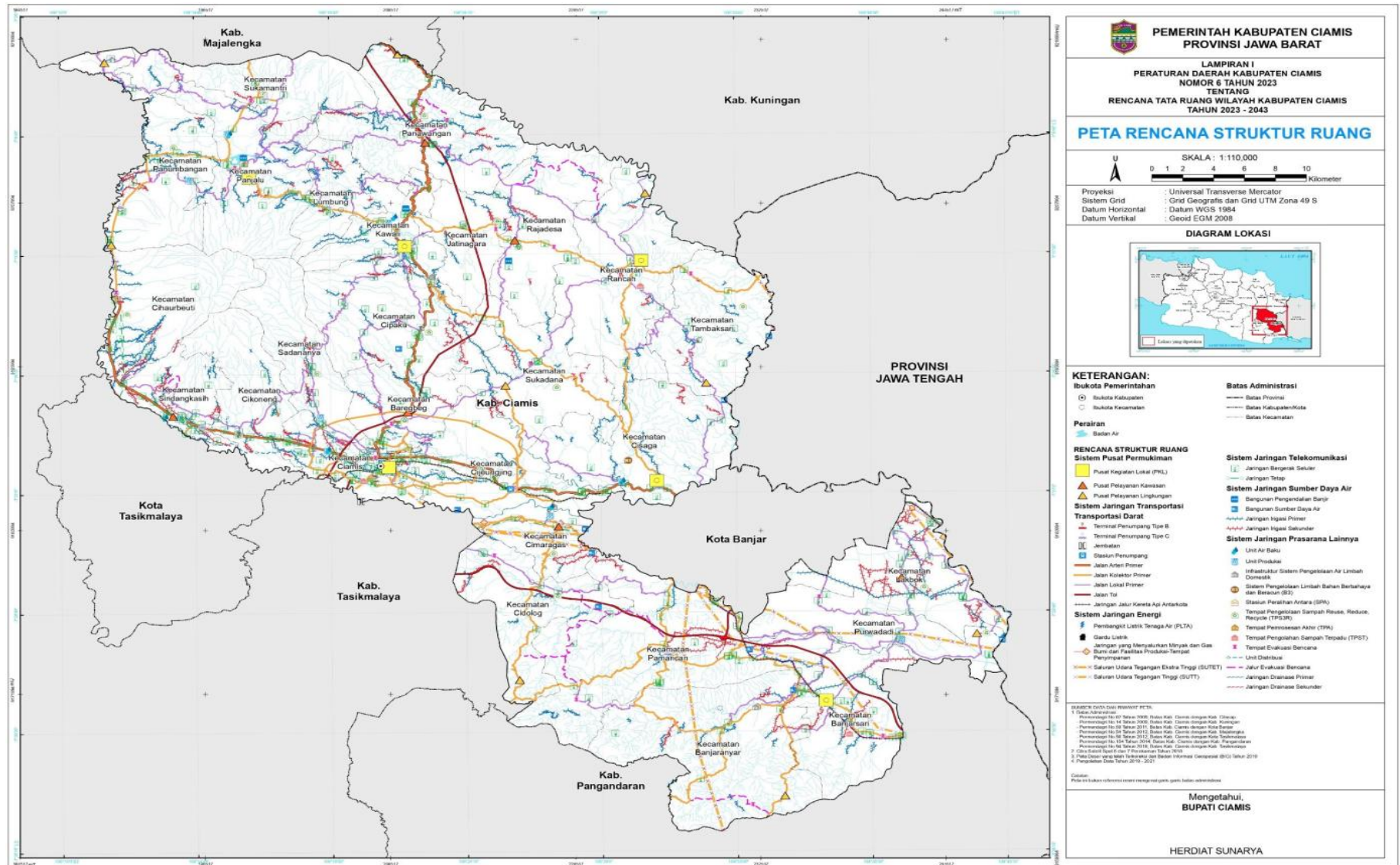
4.1.1 Struktur Ruang

Berdasarkan RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2017 – 2037 ini merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat – pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi dan sistem pusat permukiman.

Sistem pusat permukiman terdiri dari **Pusat kegiatan lokal (PKL)** dan pusat layanan Kawasan serta lingkungan, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terbagi menjadi 6 kawasan perkotaan yaitu:

- Kawasan Perkotaan Banjarsari
- Kawasan Perkotaan Ciamis
- Kawasan Perkotaan Cisaga
- Kawasan Perkotaan Kawali
- Kawasan Perkotaan Panjalu
- Kawasan Perkotaan Rancah

Dari 6 kawasan di atas Kawasan perkotaan Ciamis didalamnya terdapat 2 Kecamatan yaitu **Kecamatan Ciamis** dan Kecamatan Sadananya. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah Peta Struktur Ruang Kabupaten Ciamis tahun 2023:



Gambar IV. 1 Peta Struktur Ruang Kabupaten Ciamis

Sumber: PERDA Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023 - 2043

Berdasarkan gambar IV. 1 berupa peta struktur ruang Kabupaten Ciamis, Kelurahan Ciamis berlokasi di Kecamatan Ciamis ini adalah kecamatan yang paling banyak rencana struktur ruangnya yaitu meliputi:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Perkotaan Ciamis – Kecamatan Ciamis
Pusat kegiatan lokal disini berfungsi untuk melayani kegiatan yang berskala lokal, mendukung sistem pusat pelayanan dan mendukung jaringan prasarana dan sarana di Kecamatan Ciamis.
2. Sistem Jaringan Prasarana
 - Jaringan Transportasi (sistem jaringan jalan dan kereta api)
 - Jaringan Energi (Saluran Udara Tegangan Tinggi, Gardu Listrik)
 - Jaringan Telekomunikasi (jaringan tetap dan bergerak)
 - Jaringan Sumber Daya Air (sistem irigasi)

Namun selain Pusat Kegiatan Lokal (PKL), di Wilayah Kabupaten Ciamis khususnya kecamatan ciamis yang berdasarkan arahan struktur RTRW, Kecamatan Ciamis Merupakan **Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)**.

Pusat Kegiatan Wilayah Promosi ini adalah Kawasan perkotaan yang dirancang untuk dipromosikan dan dikembangkan menjadi **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur diwilayah tersebut.

4.1.2 Pola Ruang

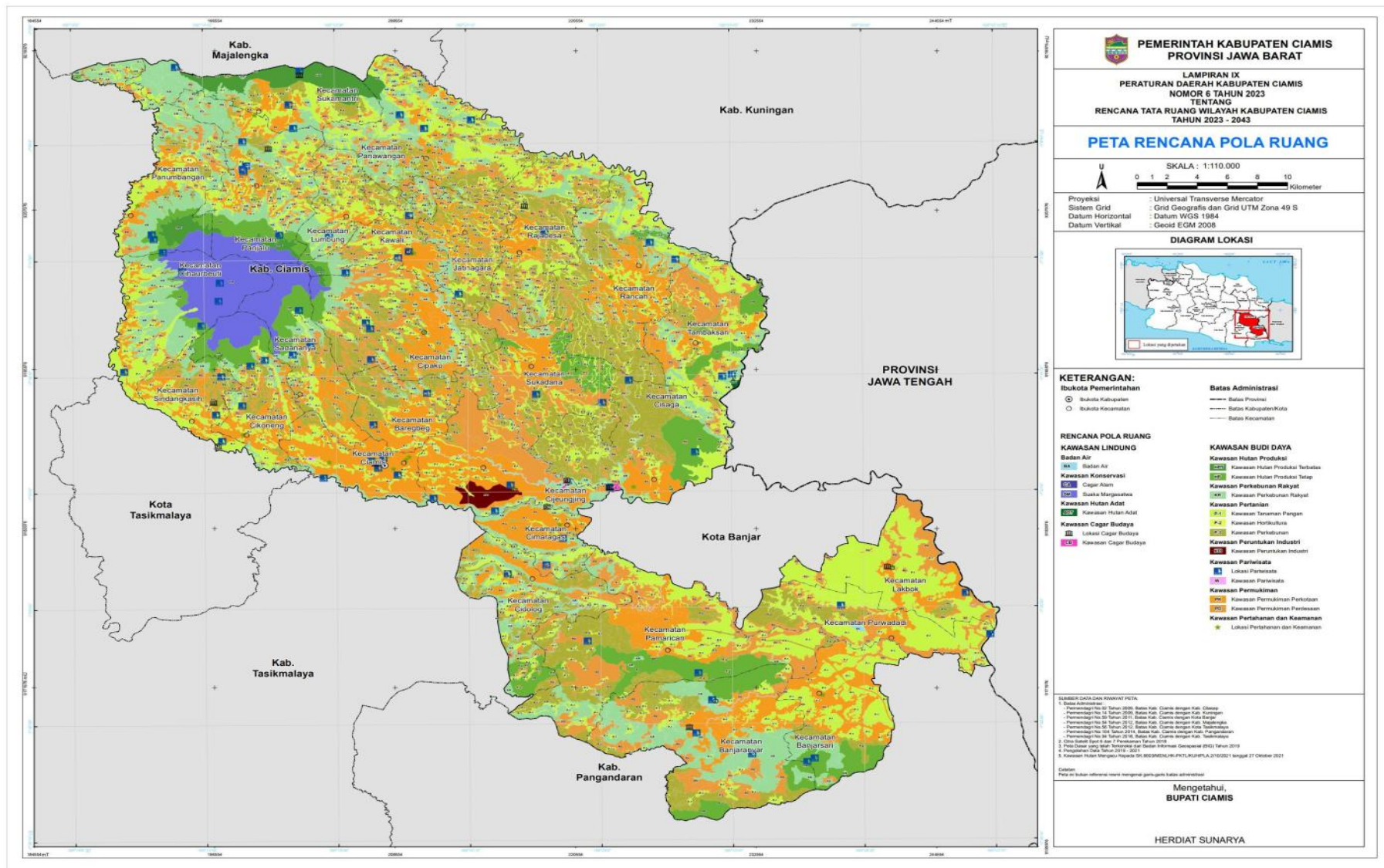
Rencana Pola Ruang RTRW, peruntukan kawasan permukiman terbagi menjadi dua bagian yaitu rencana kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman pedesaan, Kecamatan Ciamis sendiri termasuk kedalam kategori rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang mencakup desa dan kelurahan. Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih **18.785,14 Ha** meliputi:

Tabel IV. 1 Rencana Pola Ruang Kabupaten Ciamis

Rencana Pola Ruang	Luas (ha)	%
Rencana Kawasan Lindung		
Kawasan Resapan Air	9.062,80	5,67
Kawasan Sempadan Sungai	1.571,03	0,98
Kawasan Sempadan Danau	27,80	0,02
Kawasan Suaka Margasatwa	5.540,50	3,47
Kawasan Cagar Alam	9,02	0,01
Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah	2.231,21	1,40
Kawasan Sesuai Hutan Lindung	5.512,36	3,45
Rencana Kawasan Budidaya		
Kawasan Hutan Produksi	10.602,77	6,64
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	2.456,27	1,54
Kawasan Hutan Rakyat	20.418,79	12,78
Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	30.450,12	19,06
Kawasan Hortikultura	4.577,53	2,87
Kawasan Perkebunan	33.362,02	20,88
Kawasan Peruntukan Industri	495,70	0,31
Kawasan Permukiman Perkotaan	18.785,14	11,76
Kawasan Permukiman Pedesaan	13.368,86	8,37
Badan Air		
Sungai	1.183,52	0,74
Danau	112,23	0,07
Kabupaten Ciamis	159.767,67	100

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2017 - 2037

Dalam Tabel IV.I menjelaskan bahwa secara keseluruhan tota Rencana Pola Ruang seluas 159.767,56 Ha. Untuk Kawasan Lindung paling tinggi yaitu kawasan resapan air dengan luas 9.062,80 Ha atau 5,67 %. Untuk Kawasan Budidaya, Kawasan Perkebunan yang memiliki luasan paling tinggi seluas 33.362,02 Ha atau 20,88 % dari total keseluruhan, untuk lebih jelasnya berikut Peta Pola Ruang Kabupaten Ciamis menurut Revisi RTRW tahun 2017 - 2037



Gambar IV. 2 Peta Pola Ruang Kabupaten Ciamis

Sumber: PERDA Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2023 - 2043

4.2 Gambaran Umum Kecamatan & Kelurahan Ciamis

4.2.1 Profil Kecamatan Ciamis

Kecamatan Ciamis merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Ciamis. Secara geografis Kecamatan Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan nasional lintas provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Sadananya dan Kecamatan Baregbeg

Sebelah Barat : Kecamatan Cikoneng

Sebelah Timur : Kecamatan Cijeungjing

Sebelah Selatan : Kabupaten Tasikmalaya

Jumlah Penduduk di Kecamatan Ciamis mengalami peningkatan pada tahun 2023 – 2024. Pada tahun 2023 jumlah penduduk di kecamatan ciamis sebesar 100.053 Jiwa. Sedangkan pada tahun 2024 mencapai 101.008 Jiwa. Pada Tahun 2024 jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Ciamis dengan 17.147 jiwa dengan kepadatan penduduk 4943,4 jiwa/km². Sedangkan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kelurahan Cigembor yaitu 4.975 jiwa dengan kepadatan penduduk 1323,8 jiwa/km². Berikut tabel yang lebih jelasnya:

Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk serta Jumlah Rumah di Kecamatan Ciamis Tahun 2024

No	Kelurahan / Desa	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk (km ²)		Jumlah Rumah (Unit)
			2023	2024	2023	2024	
1	Imbanagara Raya	1,905	7.144	7.276	3750,1	3819,4	1.474
2	Cisadap	3,854	6.255	6.346	1623,0	1646,6	1.269
3	Imbanagara	2,195	7.615	7.687	3469,2	3502,1	1.503
4	Sindangrasa	2,980	11.104	11.094	3726,2	3722,8	2.004
5	Panyingkiran	2,298	6.547	6.684	2849,0	2908,6	1.349
6	Pawindan	2,056	5.025	5.102	2444,1	2481,5	950
7	Linggasari	2,503	7.698	7.863	3075,5	3141,4	1.407

No	Kelurahan / Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk (km2)		Jumlah Rumah (Unit)
			2023	2024	2023	2024	
8	Ciamis	3,475	17.140	17.147	4932,4	4934,4	4.004
9	Benteng	2,981	4.986	5.039	1672,6	1690,4	1.058
10	Cigembor	3,758	4.881	4.975	1298,8	1323,8	971
11	Kertasari	2,564	11.414	11.432	4451,6	4458,7	2.626
12	Maleber	2,198	10.244	10.363	4660,6	4714,7	2.041
Jumlah		32,767	100.053	101.008	3053,5	3082,6	20.656

Sumber: Kecamatan Ciamis dalam angka, 2024

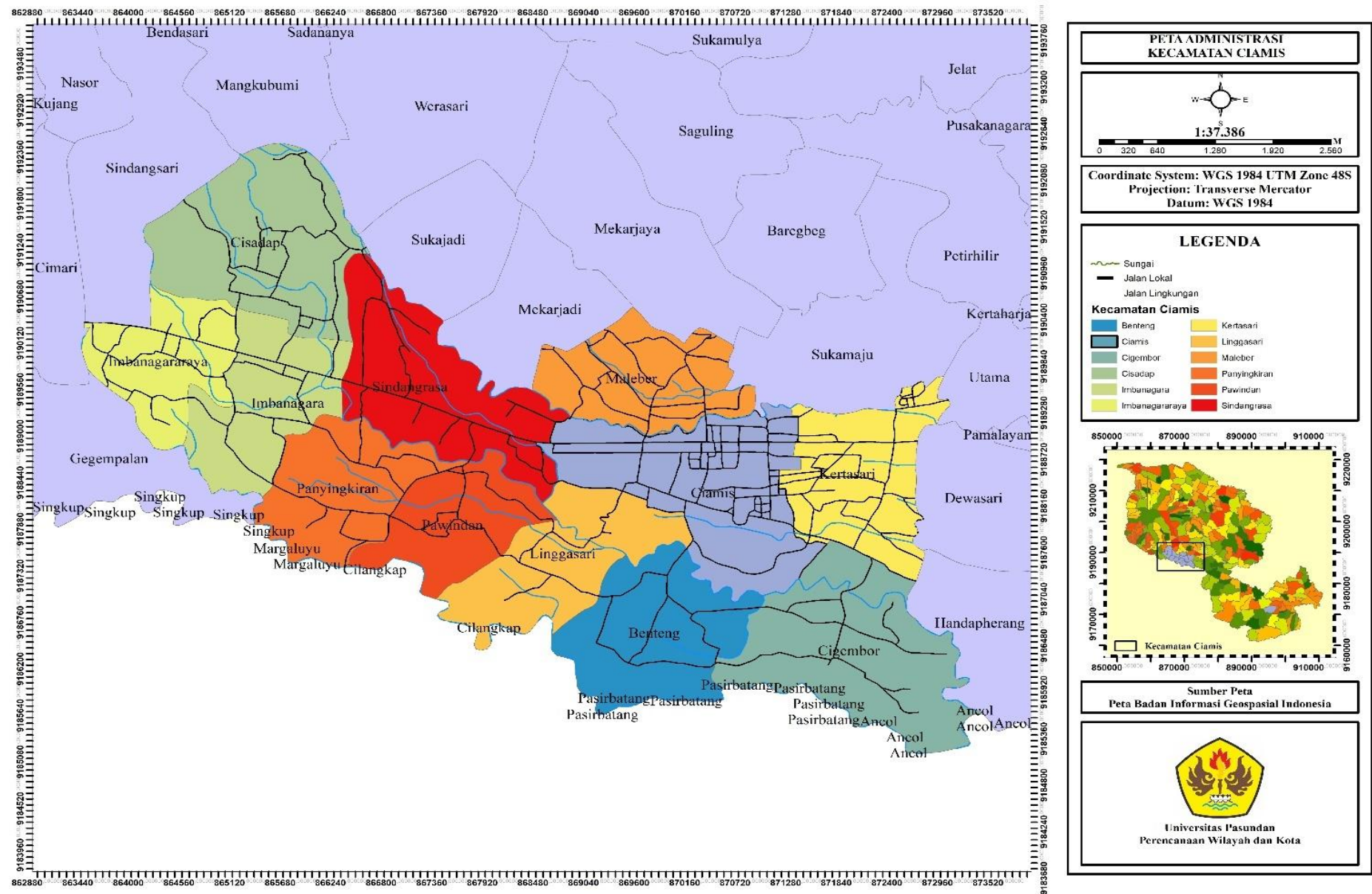
Setelah melihat data jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan jumlah rumah unit dalam tabel di atas, tabel berikut ini menjelaskan pembagian wilayah administrasi Per Dusun, RW dan RT untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

Tabel IV. 3 Luas dan Pembagian Wilayah di Kecamatan Ciamis

No	Kelurahan / Desa	Pembagian Wilayah Administrasi		
		Dusun	RW	RT
1	Imbanagara Raya	4	11	47
2	Cisadap	6	24	52
3	Imbanagara	5	20	42
4	Sindangrasa	0	13	54
5	Panyingkiran	3	9	35
6	Pawindan	3	11	26
7	Linggasari	0	12	48
8	Ciamis	0	32	134
9	Benteng	0	9	30
10	Cigembor	0	8	42
11	Kertasari	0	12	58
12	Maleber	0	13	62
Jumlah		21	174	630

Sumber: Kecamatan Ciamis Dalam Angka 2024

Dalam tabel diatas Kelurahan Ciamis memiliki 32 RW dan 134 RT tertinggi dari kelurahan atau desa lain di Kecamatan Ciamis.



Gambar IV. 3 Peta Administrasi Kecamatan Ciamis

4.2.2 Profil Kelurahan Ciamis

Kelurahan Ciamis merupakan salah satu dari 10 desa/kelurahan yang masuk dalam Kawasan Perkotaan Ciamis yang diapit oleh kelurahan disekelilingnya atau tepat berada ditengah tengah kota. Berikut ini batas wilayah yang ada di kelurahan ciamis:

Sebelah Utara : Kelurahan Maleber

Sebelah Timur : Kelurahan Kertasari dan Kelurahan Cigembor

Sebelah Selatan : Kelurahan Benteng

Sebelah Barat : Kelurahan Sindangrasa dan Kelurahan Linggasari

Kelurahan Ciamis ini dengan jumlah penduduk sebanyak 17,100 jiwa, dengan luas wilayah 3,42 km² dan dengan kepadatan 5.000 km². Berikut adalah pembagian administratif kelurahan ciamis:

Tabel IV. 4 Pembagian Administratif Lingkungan Kelurahan Ciamis

No	Nama Lingkungan	Pembagian Administratif Lingkungan		
		Urutan RW	RW	RT
1	Kota Kulon	(1,2,3,4)	4	15
2	Janggala	(5,6,7)	3	9
3	Kota Kidul	(8,9,10)	3	11
4	Lebak	(11,12,13)	3	12
5	Panoongan	(14,15,16)	3	14
6	Kalapajajar	(17,18,19)	3	11
7	Desa Kolot	(20,21,22,23,24,25)	6	33
8	Rancapetir	(26,27,28)	3	12
9	Karang	(29,30)	2	9
10	Cilame	(31,32)	2	8
Jumlah			32	134

Sumber: Hasil Analisis 2025

Dalam tabel diatas Kelurahan Ciamis terdiri dari 10 lingkungan yang dibagi menjadi 134 rukun tetangga atau RT dan 32 rukun warga atau RW, yang dimana lingkungan desa kolot menjadi RT dan RW paling banyak di kelurahan Ciamis dengan 6 RW dan 33 RT. Namun dalam penelitian kali ini terdapat di lingkungan Panoongan dengan Jumlah 3 RW dan 14 RT.

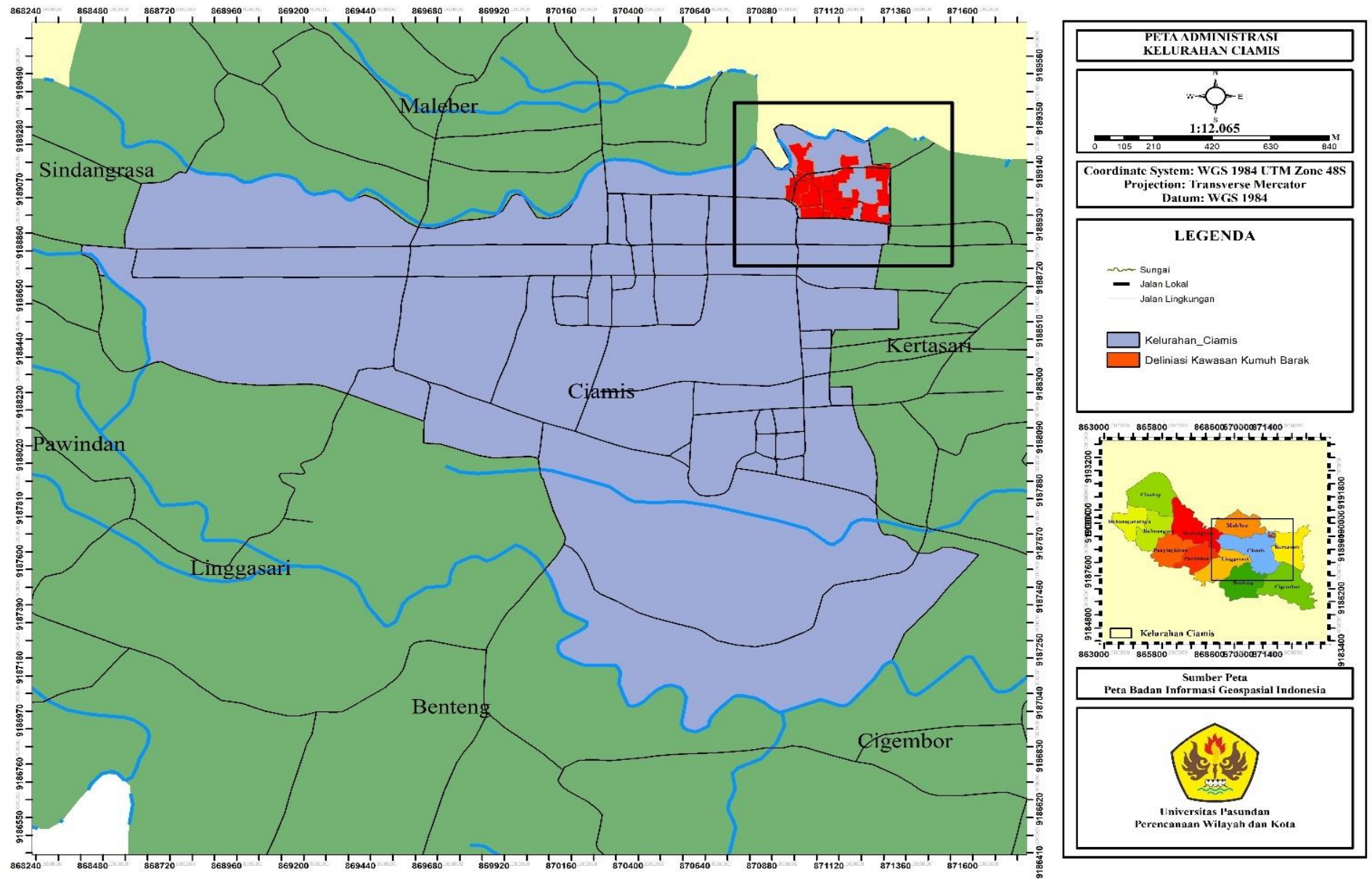
Batas Deliniasi Kawasan kumuh di Kecamatan Ciamis merujuk pada peraturan SK Bupati Nomor 593/Kpts.719-Huk/2021 tentang penetapan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan surat Keputusan bupati tersebut terdeliniasi bahwa luas dari kawasan kumuh barak Kelurahan Ciamis berluaskan 6,14 Ha. berikut adalah tabel sebaran Lokasi kekumuhan terdeliniasi di Kecamatan Ciamis:

Tabel IV. 5 Sebaran Kawasan Kumuh Terdeliniasi di Kec. Ciamis berdasarkan SK Bupati Nomor 593/Kpts.719-Huk/2021

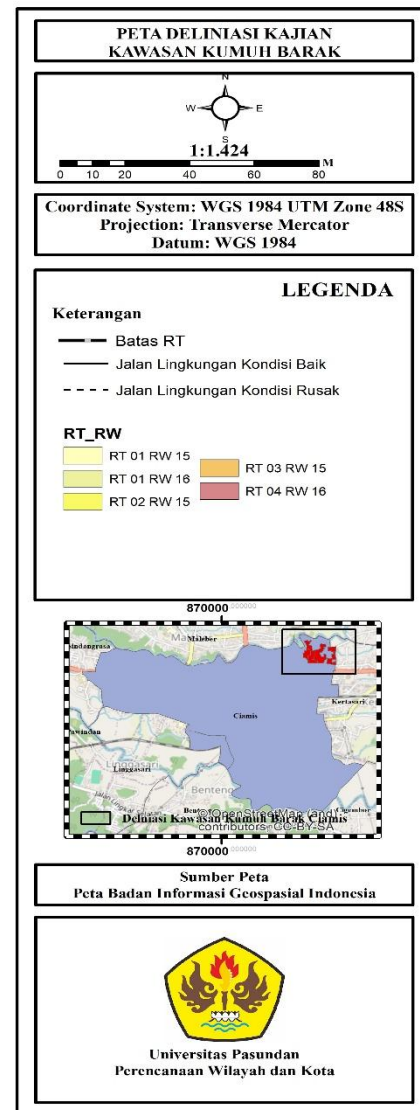
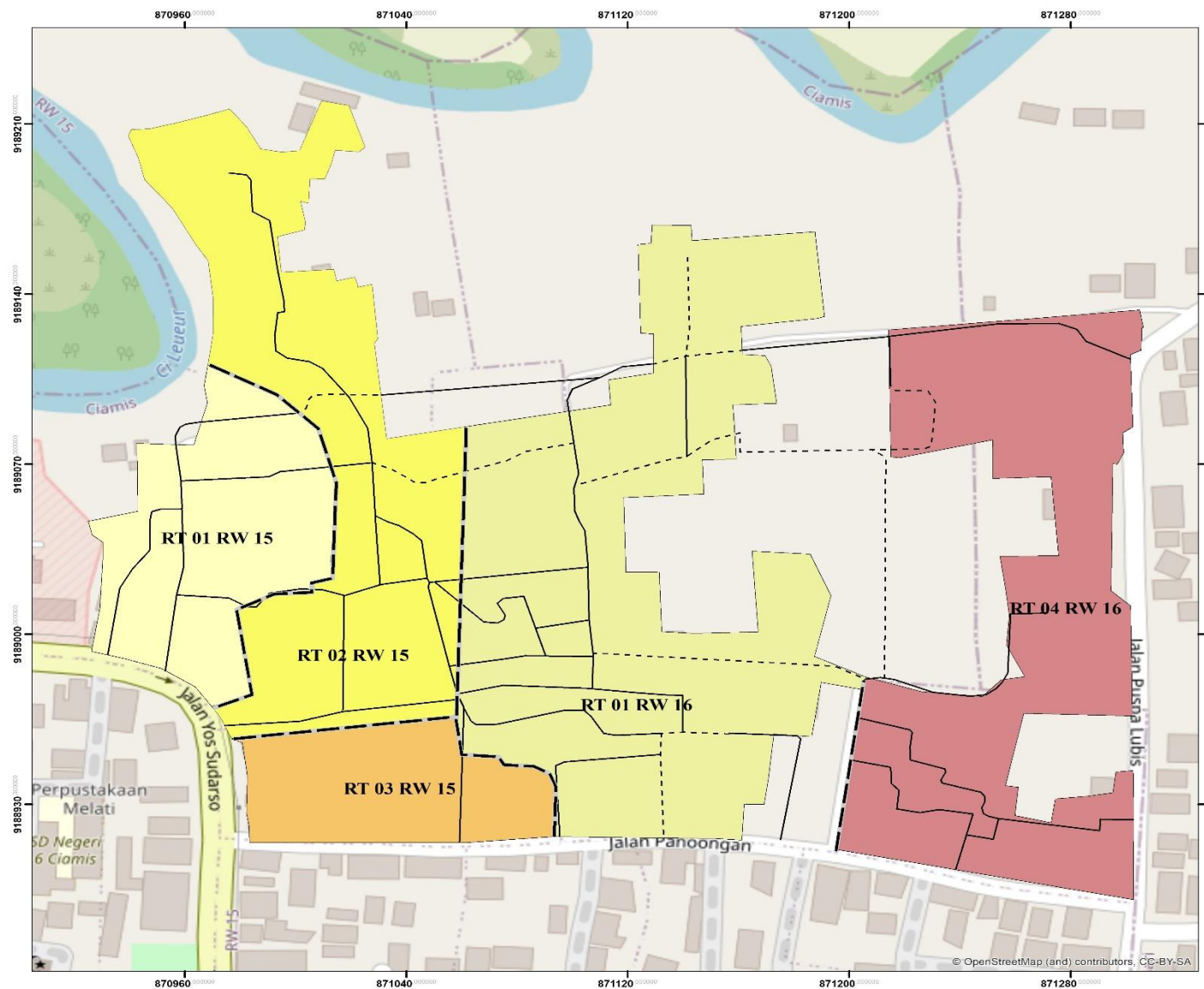
No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkungan Administratif				Kependudukan	
			RW	RT	Desa/Kel	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan
1	Kel. Ciamis Barak	0,75	15	001	Ciamis	Ciamis	102	136,00
		1,4		002	Ciamis	Ciamis	131	93,57
		0,47		003	Ciamis	Ciamis	78	165,96
		2,07	16	001	Ciamis	Ciamis	135	65,22
		1,45		004	Ciamis	Ciamis	111	76,55
Jumlah		6.14					557	90,71

Sumber: Sk Bupati Nomor 593/Kpts.719-Huk/2021

Dari total keseluruhan deliniasi kumuh barak di kelurahan ciamis yaitu 6,14 Ha, RW 16 yang memiliki luas paling tinggi yaitu RT 01 seluas 2.07 Ha dan RT 04 seluas 1,45 Ha. Namun kepadatan penduduk di RW 16 tidak terlalu padat dibandingkan dengan RW 15 khususnya di 3 RT tersebut.



Gambar IV. 4 Peta Administrasi Kelurahan Ciamis



Gambar IV. 5 Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis

4.3 Kondisi Fisik Wilayah

Kondisi Fisik Wilayah terdiri dari Topografi, kemiringan lereng, morfologi, curah hujan, hidrologi, jenis tanah, geologi, tutupan lahan dan resiko bencana alam.

4.3.1 Topografi, Kemiringan Lereng dan Morfologi Kawasan

Topografi adalah representasi permukaan bumi yang menunjukkan variasi bentuk lahan, termasuk ketinggian, kemiringan dan bentuk fisik permukaan tanah, topografi disini mencakup aspek spasial yang sangat berpengaruh pada pola aliran air, penggunaan lahan dan aktivitas manusia.

Morfologi adalah bentuk dan struktur permukaan bumi yang mengacu pada fisik lahan seperti bukit, Lembah, dataran dan pegunungan yang memiliki karakteristik lerengnya yaitu curam, landai, cekung dan cembung.

Kemiringan lereng adalah sudut atau kemiringan permukaan tanah yang terbentuk akibat perbedaan ketinggian antara dua titik di permukaan bumi, kemiringan lereng ini berperan dalam proses erosi, aliran air permukaan dan stabilitas tanah.

Di dalam kawasan kumuh barak ini kondisi topografi yaitu 500 mdpl, lalu morfologi atau bentuk permukaan bumi di Kawasan ini terbagi 2 yaitu datar dan landai serta kemiringan lereng terbagi menjadi 2 kelas yaitu 0,2 % dan 2-8% kemiringan lereng. Berikut ini tabel yang dapat dilihat secara keseluruhan.

Tabel IV. 6 Topografi Kawasan Kumuh Barak Ciamis

Topografi	Kelurahan	RT & RW	Jumlah
500	Kumuh Barak Ciamis	RT 01 RW 15	0,75
		RT 02 RW 15	1,40
		RT 03 RW 15	0,47
		RT 01 RW 16	2,07
		RT 04 RW 16	1,45
Total			6,14

Sumber: Hasil GIS 2025

Tabel IV. 7 Morfologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis

No	Morfologi	Kelurahan	RT & RW	Jumlah
1	Datar	Kumuh Barak Ciamis	RT 01 RW 15	0,22
			RT 02 RW 15	0,48
			RT 03 RW 15	0,47
			RT 01 RW 16	2,07
			RT 04 RW 16	1,45
2	Landai		RT 01 RW 15	0,53
			RT 02 RW 15	0,92
			RT 01 RW 16	0,00
Total				6,14

Sumber: Hasil GIS 2025

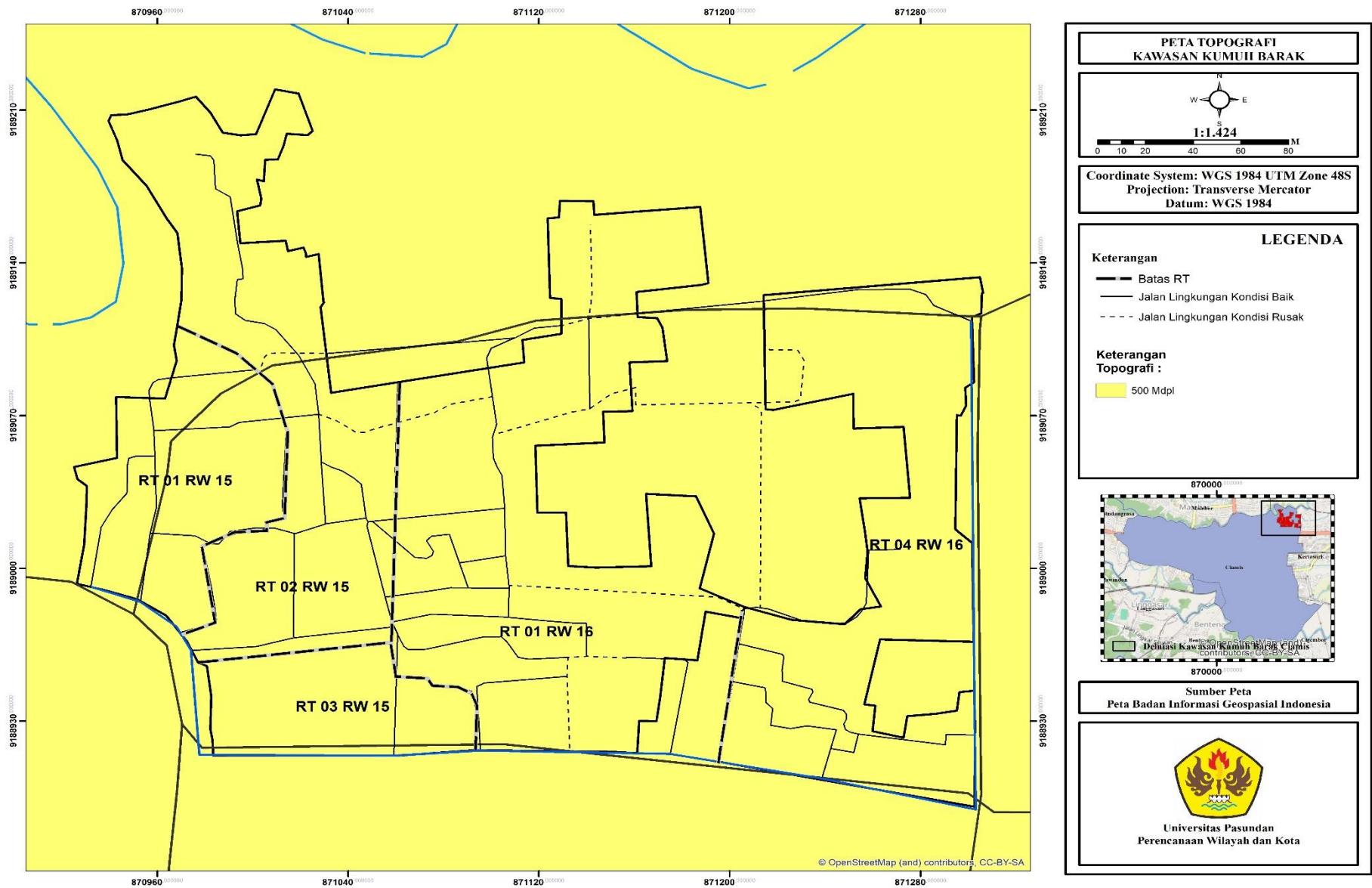
Tabel IV. 8 Kemiringan Lereng Kawasan Kumuh Barak Ciamis

No	Kelas	Kelurahan	RT & RW	Jumlah
1	0-2 %	Kumuh Barak Ciamis	RT 01 RW 15	0,22
			RT 02 RW 15	0,48
			RT 03 RW 15	0,47
			RT 01 RW 16	2,07
			RT 04 RW 16	1,45
2	2-8 %		RT 01 RW 15	0,53
			RT 02 RW 15	0,92
			RT 01 RW 16	0,00
Total				6,14

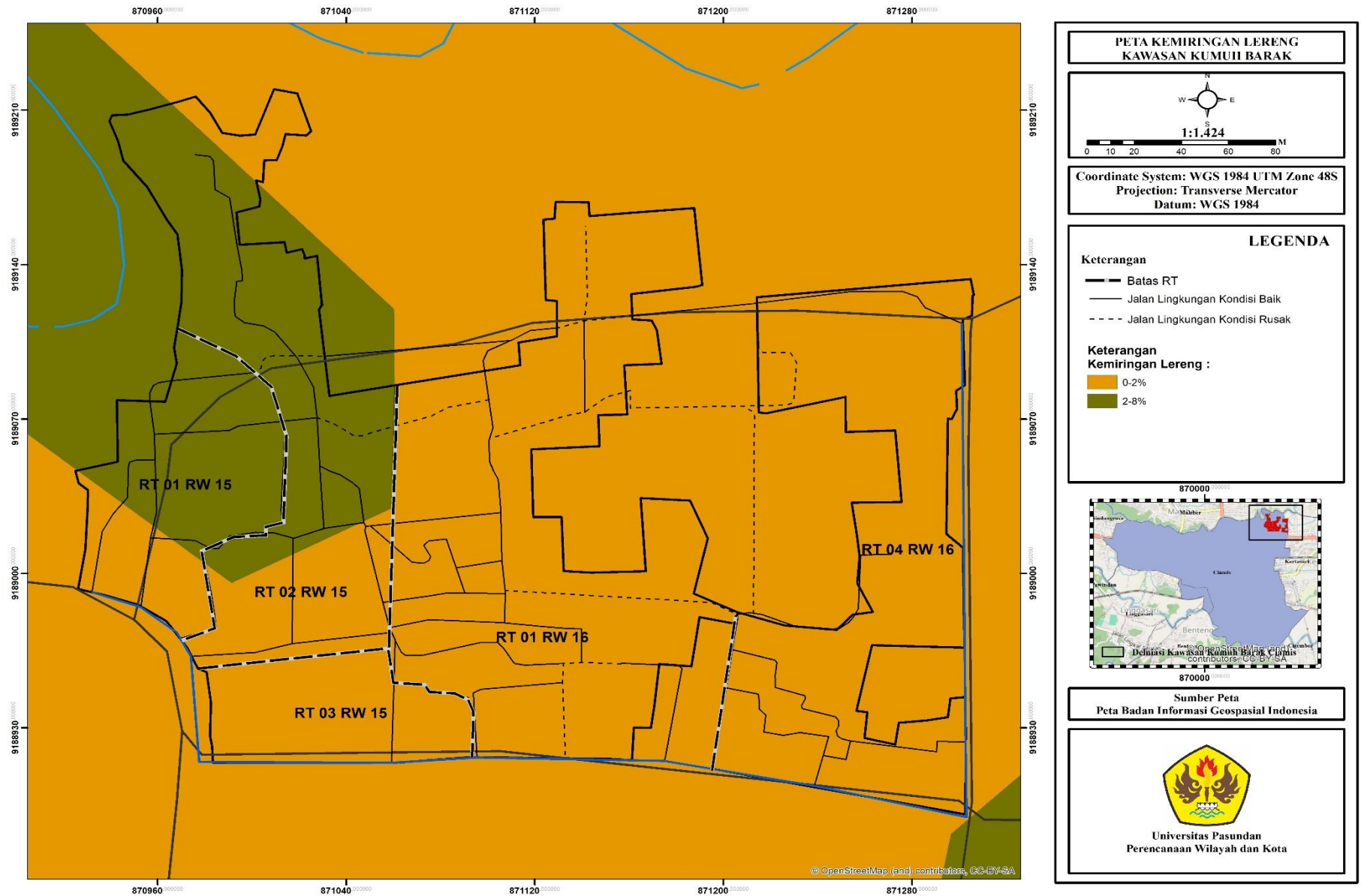
Sumber: Hasil GIS 2025

Dalam topografi atau ketinggian diatas permukaan laut menjelaskan bahwa pada tabel diatas yaitu berkisar 500 mdpl. Yang berarti memiliki dataran yang cukup datar sebagaimana dalam morfologi atau permukaan bumi di kelurahan ciamis ini datar dan landai, serta kemiringan lereng di kelurahan ciamis ini dibawah 10% yang berarti tidak terlalu curam kemiringan lerengnya.

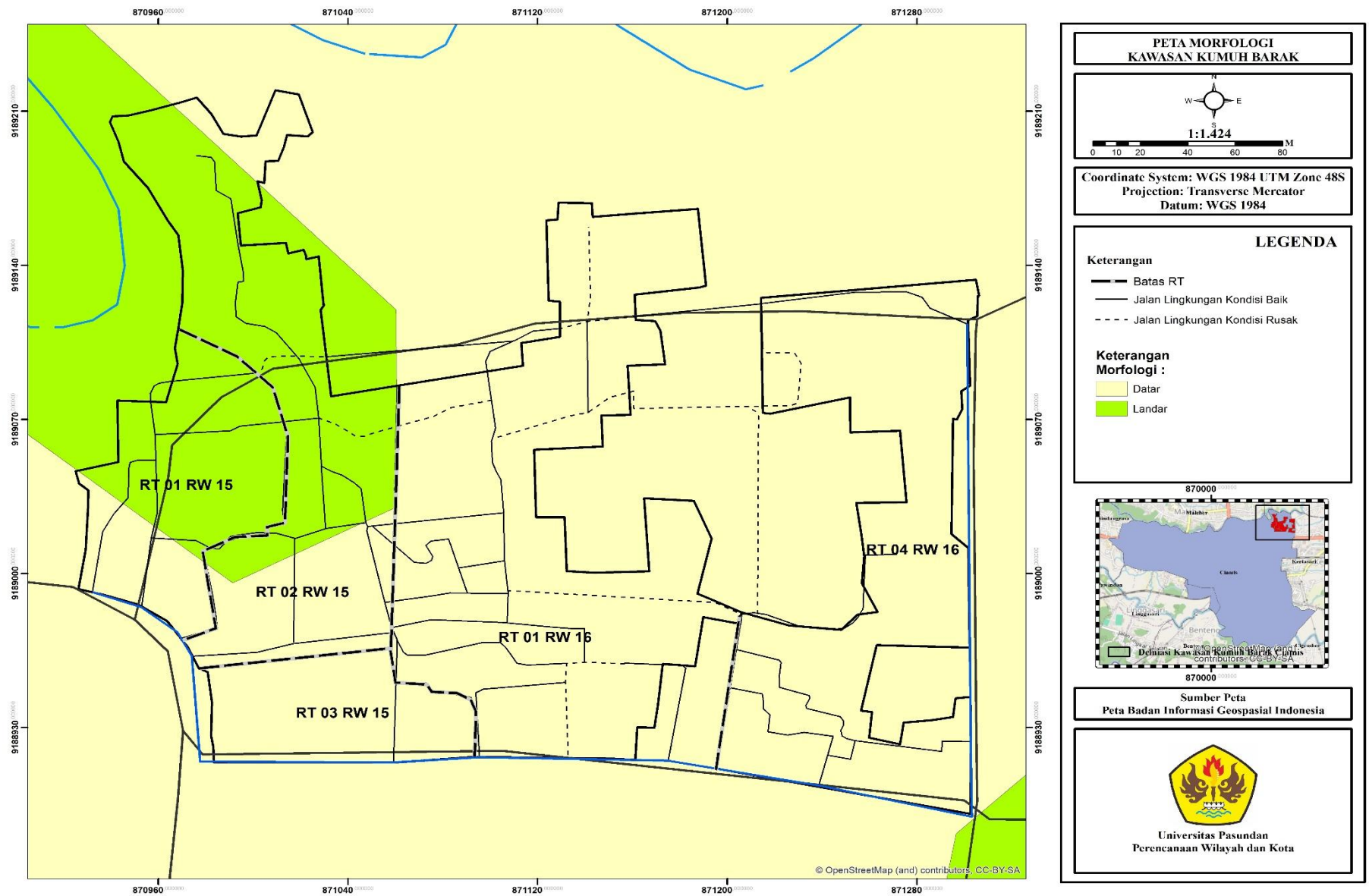
Berikut adalah peta topografi, morfologi dan kemiringan sebagai berikut:



Gambar IV. 6 Peta Topografi Kawasan Kumuh Barak Ciamis



Gambar IV. 7 Peta Kemiringan Lereng Kawasan Kumuh Barak Ciamis



Gambar IV. 8 Peta Morfologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis

4.3.2 Curah Hujan dan Hidrologi Kawasan

Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun dan terkumpul disuatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Dan hidrologi sendiri adalah siklus pergerakan air tanah yang menjadi sumber utama air yang mempengaruhi ketersediaan air di suatu wilayah.

Kondisi curah hujan di Kawasan barak ciamis ini berkisar antara 2500 – 3500 mm/tahun. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi di Kawasan ini memiliki kategori rendah. Untuk hidrologi itu sendiri terdapat Sungai cileeur diatasnya yang dimana produktivitas air tanahnya itu sedang. Berikut ini untuk lebih jelasnya yaitu tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel IV. 9 Curah Hujan Kawasan Kumuh Barak Ciamis

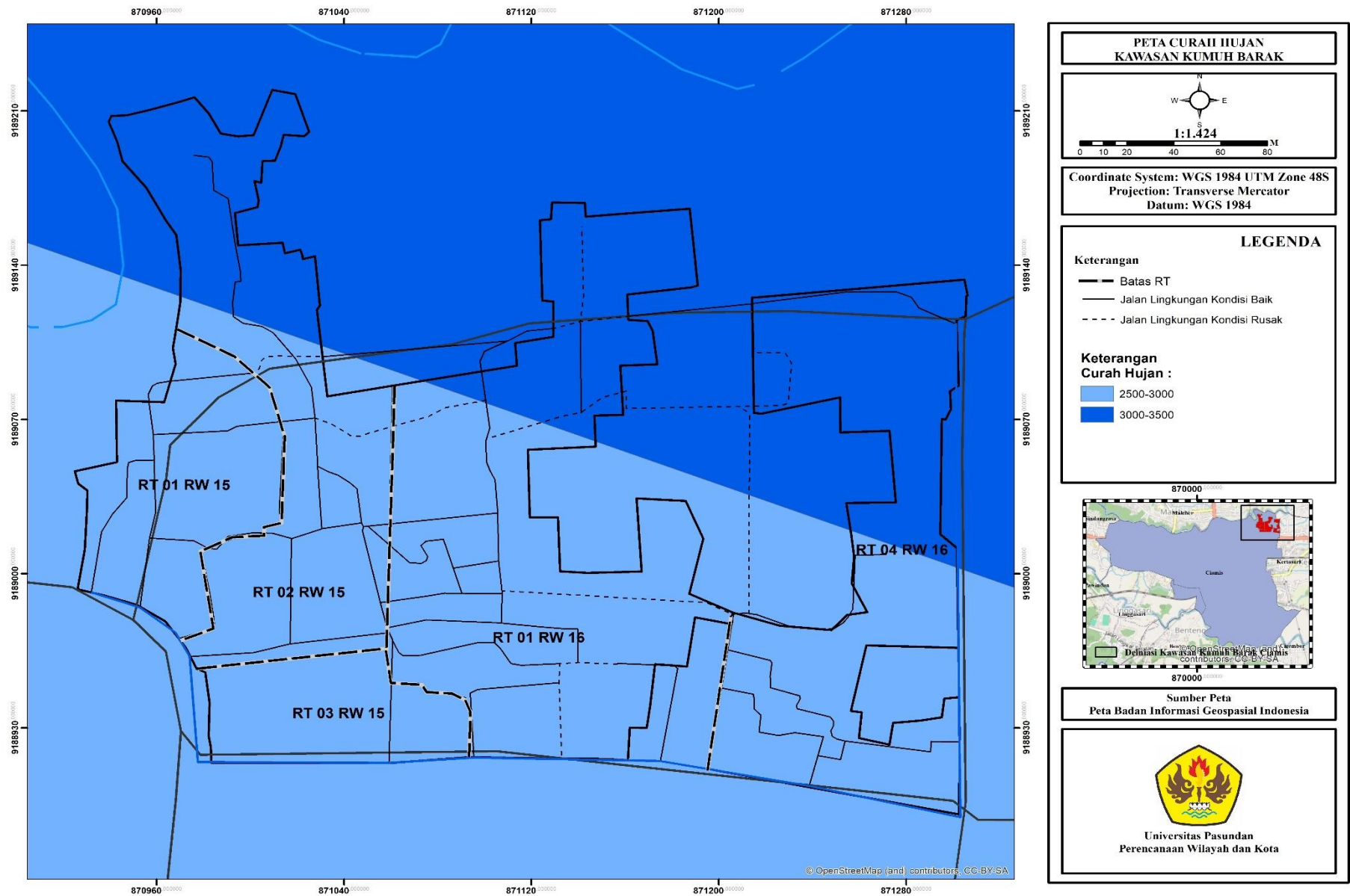
No	Curah Hujan	Kelurahan	RT & RW	Jumlah
1	2500-3000	Kumuh Barak Ciamis	RT 01 RW 15	0,75
			RT 02 RW 15	0,88
			RT 03 RW 15	0,47
			RT 01 RW 16	1,52
			RT 04 RW 16	0,78
2	3000-3500		RT 01 RW 15	0,55
			RT 02 RW 15	0,52
			RT 01 RW 16	0,67
Total				6,14

Sumber: Hasil GIS 2025

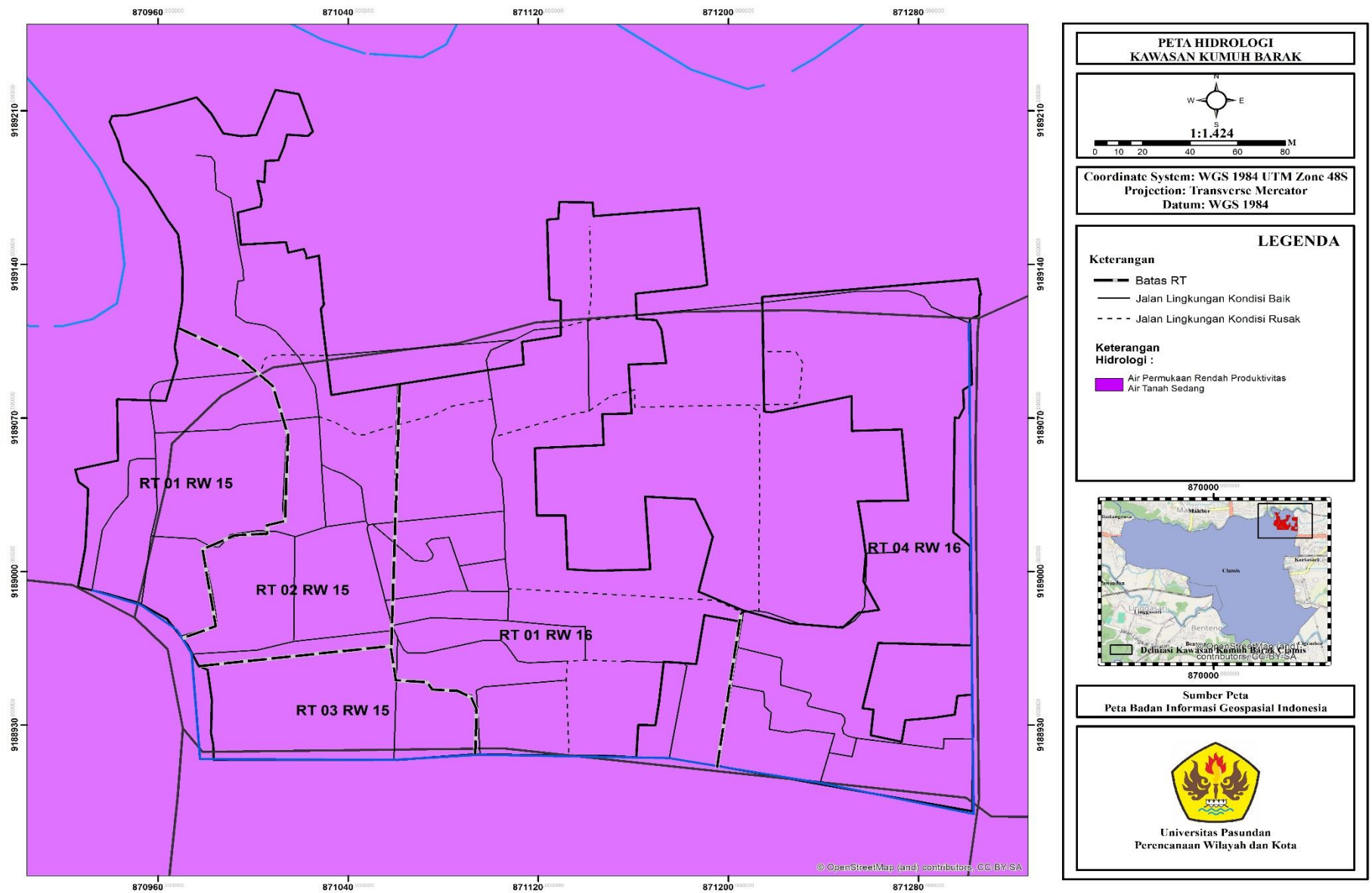
Tabel IV. 10 Hidrologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis

Keterangan	Kelurahan	RT & RW	Jumlah
Air Permukaan Rendah Produktivitas Air Tanah Sedang	Kumuh Barak Ciamis	RT 01 RW 15	0,75
		RT 02 RW 15	1,40
		RT 03 RW 15	0,47
		RT 01 RW 16	2,07
		RT 04 RW 16	1,45
Total			6,14

Sumber: Hasil GIS 2025



Gambar IV. 9 Peta Curah Hujan Kawasan Kumuh Barak Ciamis



Gambar IV. 10 Peta Hidrologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis

4.3.3 Jenis Tanah dan Geologi Kawasan

Jenis tanah adalah lapisan permukaan bumi yang terbentuk dari pelapukan batuan induk dan bahan organik yang memiliki berbagai jenis proses pembentukan dan kandungan. Dan Geologi disini adalah jenis jenis batuan yang didalamnya mempelajari mineral, struktur, proses pembentukan dan dapat mempengaruhi jenis tanah dari pelapukan batuan induk (batuan asal).

Untuk jenis tanah di Kawasan kumuh barak ini termasuk jenis tanah ultisols, dimana secara umum tanah ultisols ini memiliki tekstur yang lempung berliat serta rendahnya kandungan hara didalamnya, oleh karena itu tidak cocok untuk pertanian. untuk geologinya yaitu batuan gunung api Plio – Plistosen dimana batuan ini ditandai oleh aktivitas vulkanik yang lebih intens dan pembentukan batuan muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel IV. 11 Jenis Tanah Kawasan Kumuh Barak Ciamis

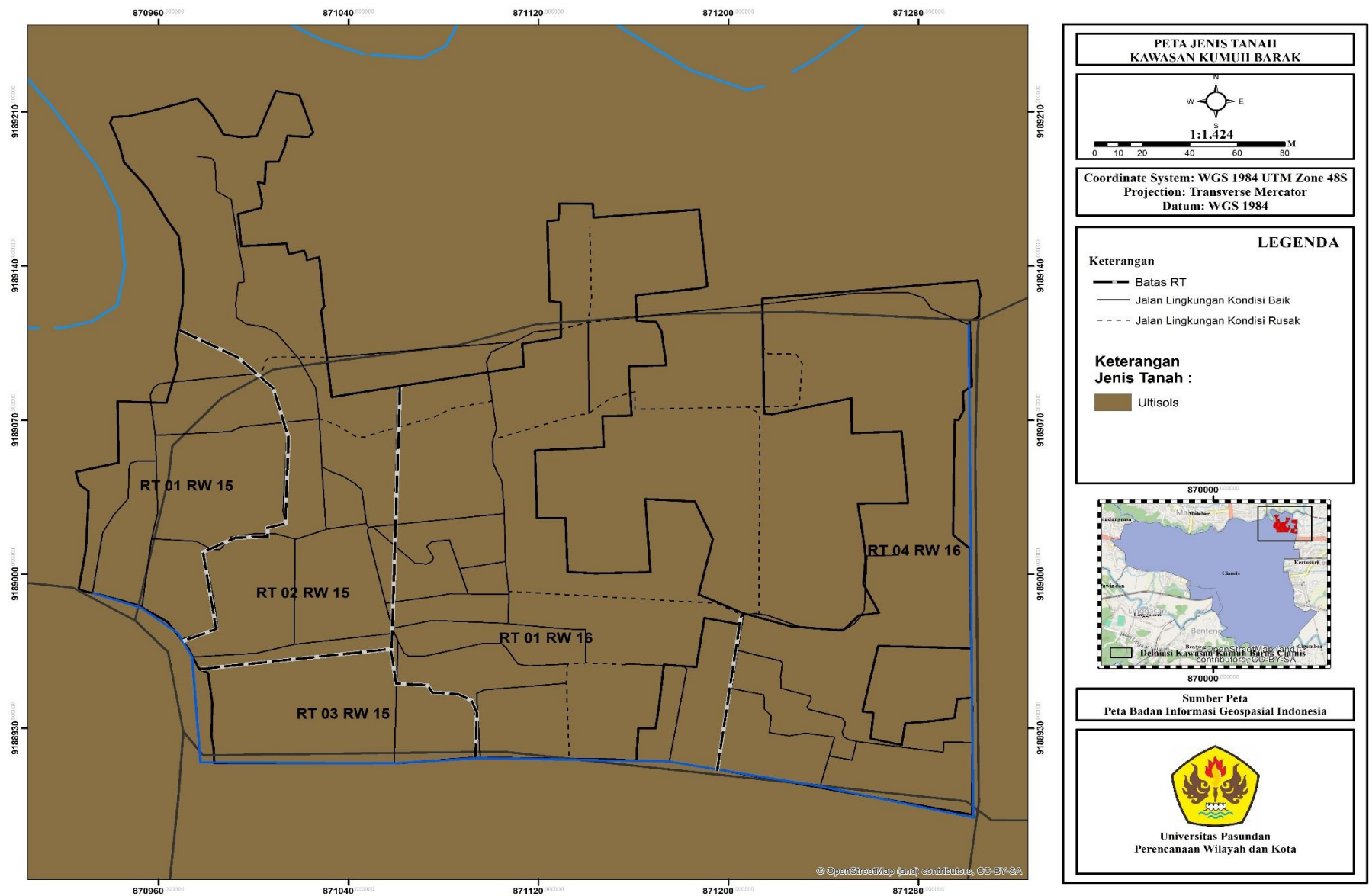
Jenis	Kelurahan	RT & RW	Jumlah
Ultisols	Kumuh Barak Ciamis	RT 01 RW 15	0,75
		RT 02 RW 15	1,40
		RT 03 RW 15	0,47
		RT 01 RW 16	2,07
		RT 04 RW 16	1,45
Total			6,14

Sumber: Hasil GIS 2025

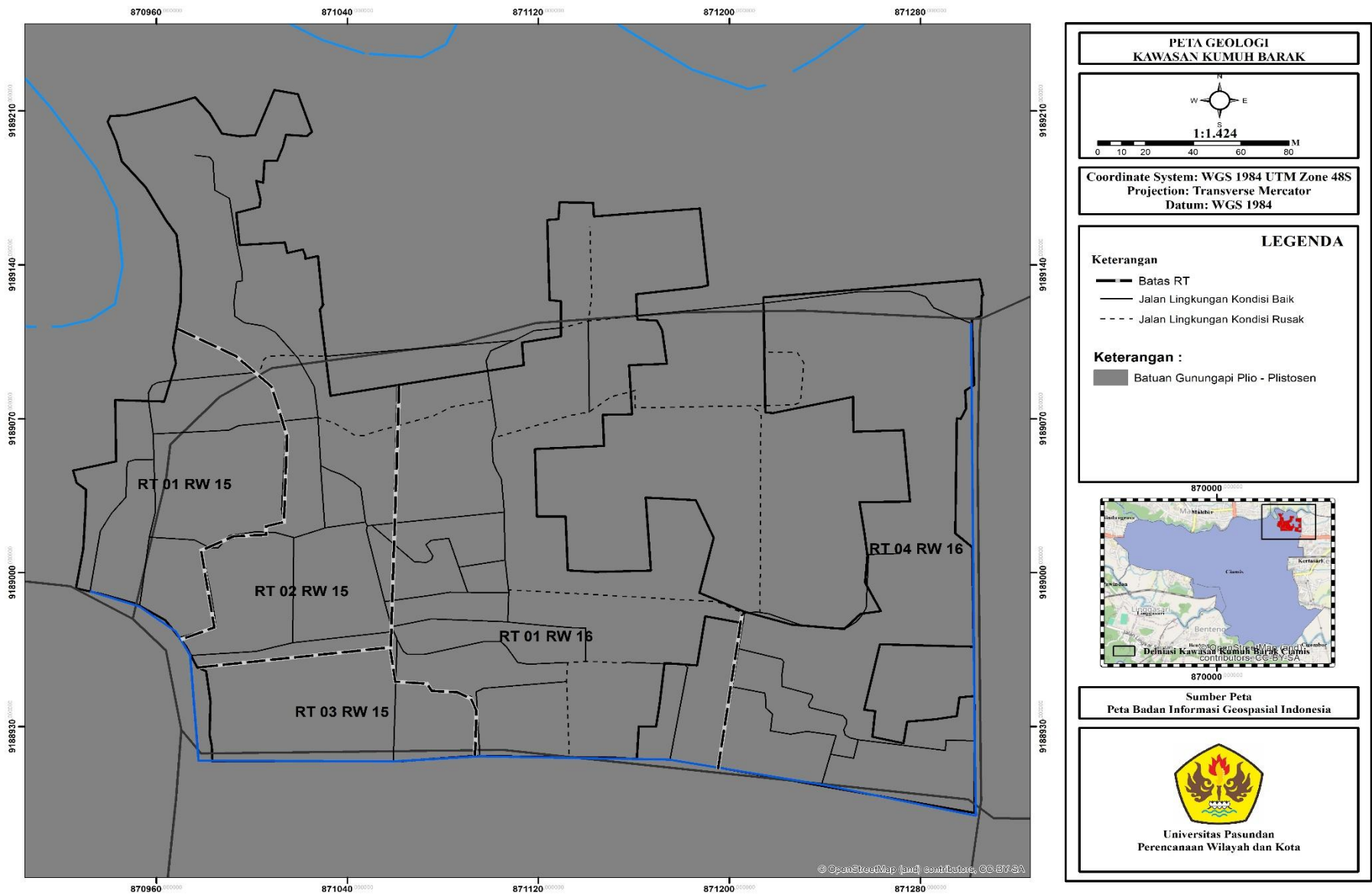
Tabel IV. 12 Geologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis

Keterangan	Kelurahan	RT & RW	Jumlah
Batuan Gunungapi Plio - Plistosen	Kumuh Barak Ciamis	RT 01 RW 15	0,75
		RT 02 RW 15	1,40
		RT 03 RW 15	0,47
		RT 01 RW 16	2,07
		RT 04 RW 16	1,45
Total			6,14

Sumber: Hasil GIS 2025



Gambar IV. 11 Peta Jenis Tanah Kawasan Kumuh Barak Ciamis



Gambar IV. 12 Peta Geologi Kawasan Kumuh Barak Ciamis

4.3.4 Tutupan Lahan Kawasan

Tutupan Lahan adalah kondisi fisik dan biologis permukaan bumi yang tampak secara langsung yang mencakup segala sesuatu yang menutupi permukaan tanah, baik itu alami maupun yang dihasilkan oleh aktivitas manusia.

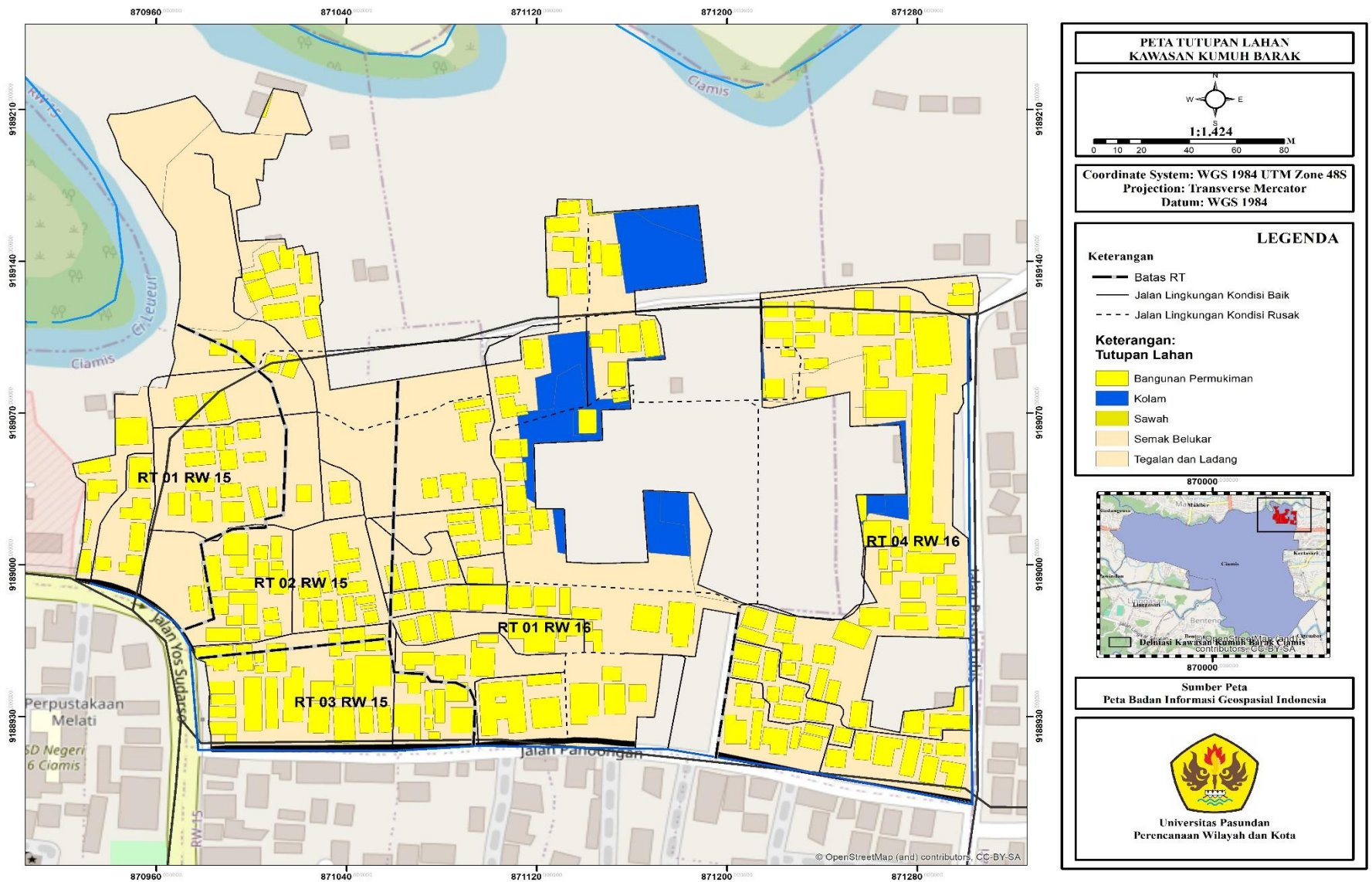
Kondisi tutupan lahan di Kawasan kumuh barak ini didominasi oleh Semak belukar sebesar 3,24 Ha, disusul dengan bangunan hunian dengan luas sebesar 2,00 Ha dimana dengan pola bangunan mengikuti jaringan jalan atau jalan gang, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel IV. 13 Tutupan Lahan Kawasan Kumuh Barak Ciamis

No	Tutupan Lahan	Kumuh Barak Ciamis
1	Bangunan Permukiman	2,00
2	Jalan	0,07
3	Kolam	0,34
4	Sawah	0,00
5	Semak Belukar	3,24
6	Tegalan dan Ladang	0,49
Total		6,14 Ha

Sumber: Hasil Analisis 2025

Didalam tabel di atas tutupan lahan khususnya Semak belukar sangat luas sebesar 3,24 Ha yang dimana Semak belukar ini merupakan salah satu jenis tutupan lahan yang ditandai oleh keberadaan vegetasi rendah, biasanya terdiri dari berbagai jenis tanaman kecil, rerumputan dan tumbuhan menjalar. Yang dimana ketinggian vegetasi Semak belukar ini diantara 50 cm hingga 2 meter yang tumbuh secara alami di suatu area kawasan.



Gambar IV. 13 Peta Tutupan Lahan Kawasan Kumuh Barak Ciamis

4.3.5 Risiko Bencana Alam Kawasan

Berdasarkan tingkat risiko bencana alamnya kawasan kumuh barak ini memiliki risiko bencana alam banjir dan bencana gerakan tanah. Untuk bencana alam banjir memiliki kategori rendah – sedang dan untuk bencana gerakan tanah memiliki kategori sangat rendah – rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel IV. 14 Tingkat Risiko Banjir di Kawasan Kumuh Barak Ciamis

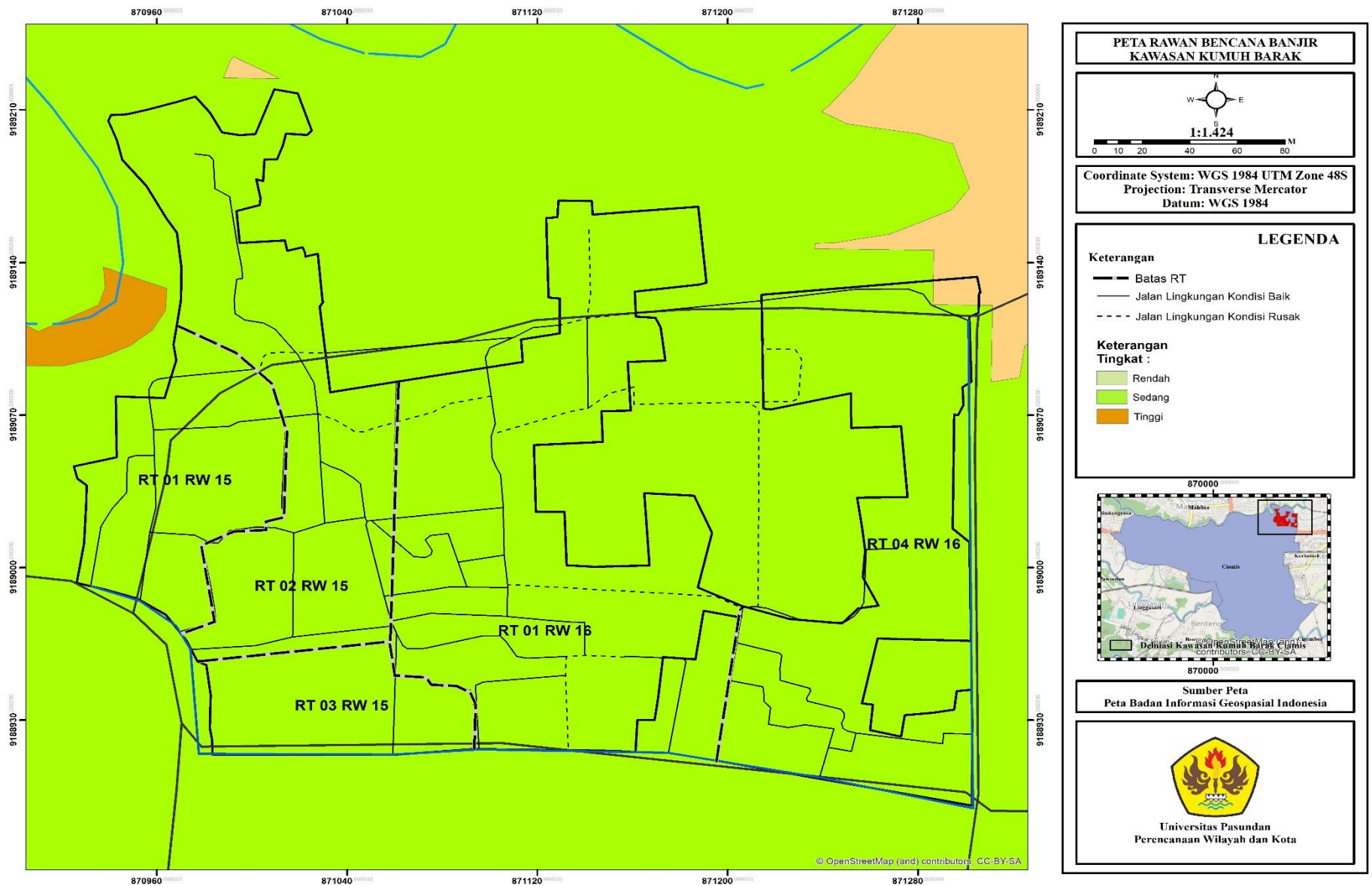
No	Tingkat Risiko Banjir	Kelurahan	RT & RW	Jumlah
1	Rendah	Kumuh Barak Ciamis	RT 04 RW 16	0,02
2	Sedang		RT 01 RW 15	0,75
			RT 02 RW 15	1,40
			RT 03 RW 15	0,47
			RT 01 RW 16	2,07
			RT 04 RW 16	1,43
Total				6,14

Sumber: Hasil Analisis 2025

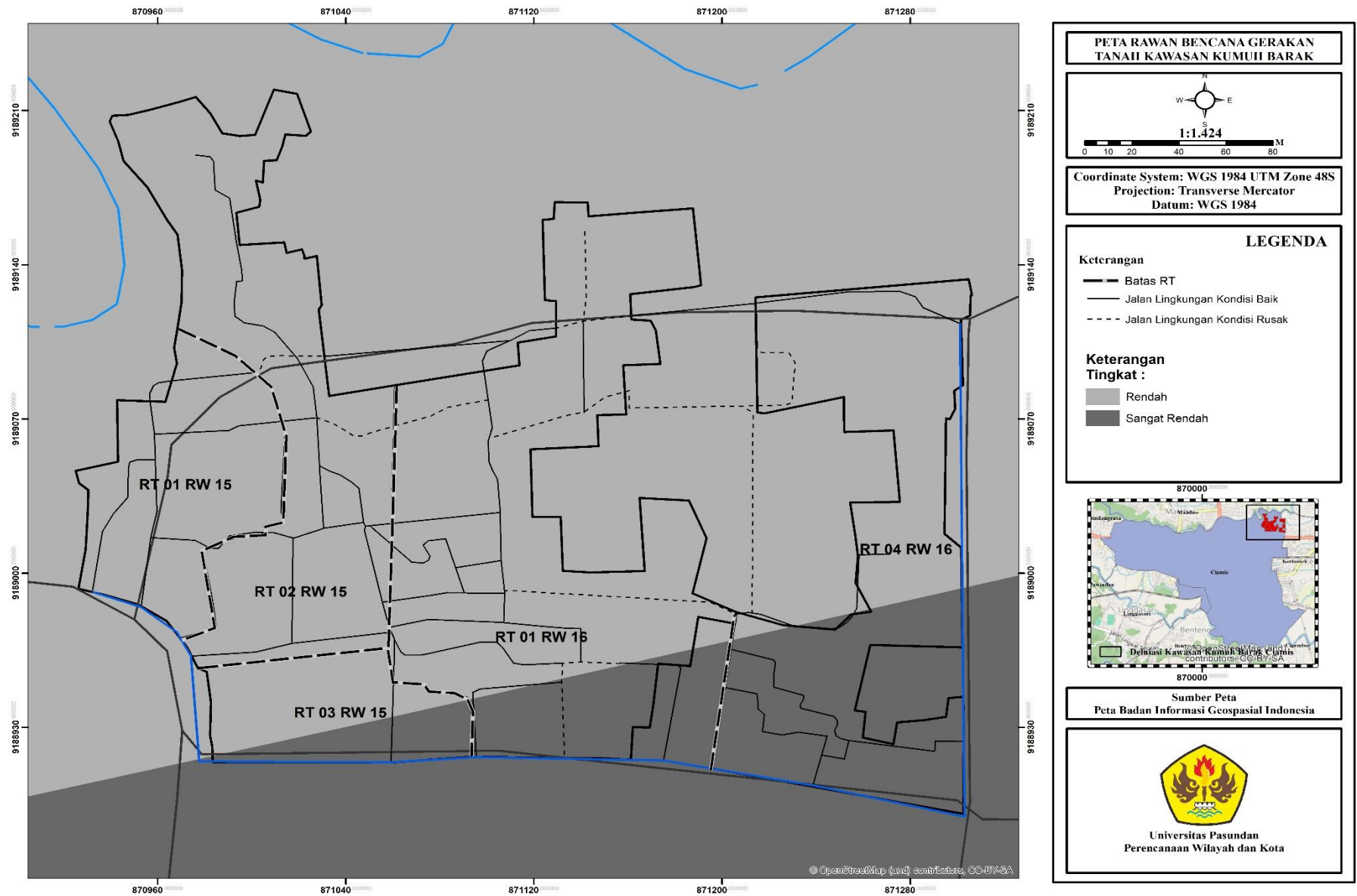
Tabel IV. 15 Tingkat Risiko Bencana Gerakan Tanah di Kawasan Kumuh Barak Ciamis

No	Tingkat Rawan	Kelurahan	RT & RW	Jumlah
1	Sangat Rendah	Kumuh Barak Ciamis	RT 01 RW 16	0,27
			RT 03 RW 15	0,17
			RT 04 RW 16	0,66
2	Rendah		RT 01 RW 15	0,75
			RT 02 RW 15	1,40
			RT 03 RW 15	0,31
			RT 01 RW 16	1,79
			RT 04 RW 16	0,79
Total				6.14

Sumber: Hasil Analisis 2025



Gambar IV. 14 Peta Rawan Bencana Banjir di Kawasan Kumuh Barak Ciamis



Gambar IV. 15 Peta Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kawasan Kumuh Barak Ciamis

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Hasil dan pembahasan ini menjelaskan tentang hasil dari analisis – analisis yang sudah dilakukan yang memenuhi sasaran dalam pembahasan, yaitu:

5.1 Karakteristik Kawasan Kumuh di Kelurahan Ciamis

5.1.1 Vitalitas Non Ekonomi

Vitalitas non ekonomi disini yaitu mencakup kriteria kondisi bangunan hunian permukiman (seperti kualitas dan intensitas bangunan) serta kondisi kependudukan yang dilihat dari kepadatan dan jumlah penduduk dikawasan tersebut, yang dimana vitalitas non ekonomi ini untuk mengetahui kelayakan hidup di Kawasan kumuh barak.

5.1.1.1 Kondisi Bangunan Hunian

Kondisi bangunan hunian di lingkungan kawasan barak ini berdasarkan hasil survey observasi lapangan yang dilakukan pada setiap unit RT pada umumnya tidak memiliki keteraturan bangunan yang baik. Ada beberapa temuan dalam kondisi bangunan hunian yaitu:

1. Jarak antar bangunan rata-rata kurang dari 1 meter, sedangkan jarak terhadap jalan kurang dari 2meter yang dimana kerapatan bangunan antar bangunan rumah membuat sirkulasi tata udara tidak sehat.
2. Bangunan ada yang tidak menghadap langsung ke jalan
3. Kondisi bangunan rata-rata sudah permanen
4. Terdapat bangunan hunian tidak layak huni (RTLH) di kedua Lokasi.

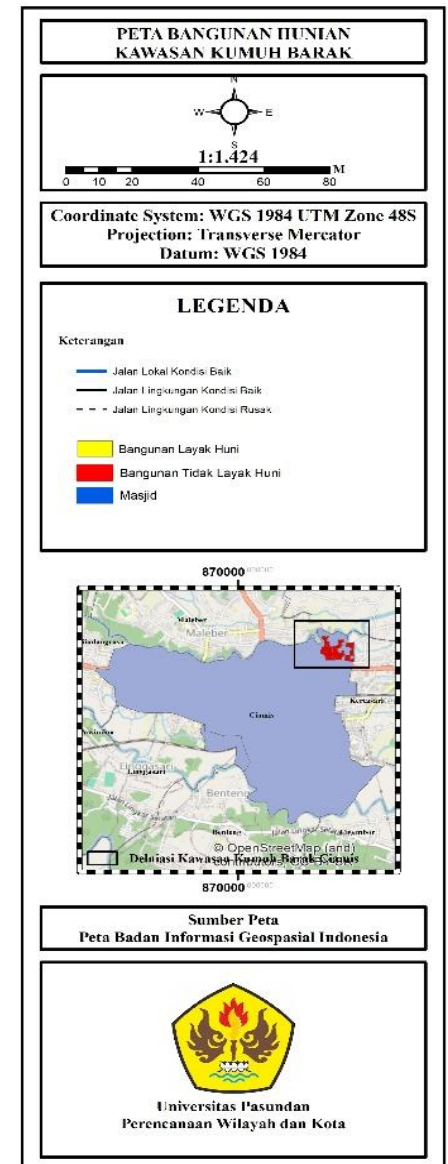
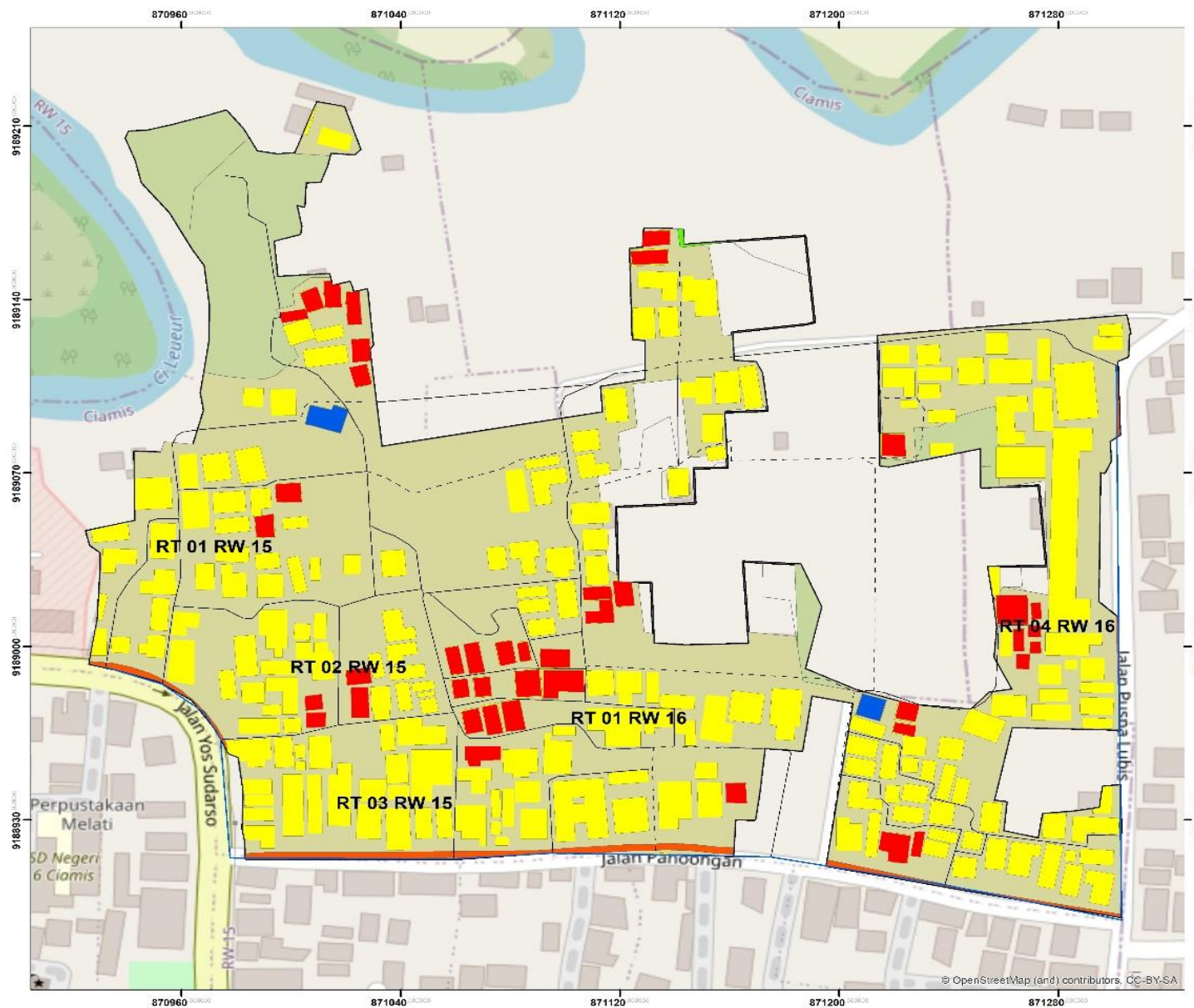
Tabel V. 1 Kondisi Bangunan Hunian di Kawasan Kumuh Barak Kelurahan Ciamis

No	Lokasi	Jumlah Bangunan (Unit)	Ketidakteraturan Bangunan (Unit)	Rutilahu (Unit)	Kepadatan Bangunan (Unit/Ha)
1	RW 15	97	70	23	37
2	RW 16	73	62	25	21
	Jumlah	170	132	48	58

Sumber: Hasil Analisis 2025



Gambar V. 1 Visualisasi Kondisi Bangunan Hunian di Kawasan Kumuh Barak Kelurahan Ciamis



Gambar V. 2 Peta Bangunan Hunian

5.1.1.2 Kondisi Kependudukan

Di Kawasan permukiman kawasan kumuh barak ini memiliki jumlah penduduk sebesar 788 Jiwa/Orang, dengan jumlah KK sebanyak 197 KK. Rata – rata mata pencaharian penduduk yang berada di kawasan permukiman kumuh barak ini berupa buruh harian lepas dan pekerja kantor. Untuk lebih lengkapnya yaitu sebagai tabel berikut:

Tabel V. 2 Jumlah Kependudukan

No	Kawasan Kumuh Barak	Luas Kawasan kumuh Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ha)
1	RW 15	2,62	416	104	158,7
2	RW 16	3,52	372	93	105,6
Jumlah		6,14	788	197	264,3

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berikut ini adalah visualisasi masyarakat di Lokasi kajian:





Gambar V. 3 Visualisasi masyarakat dikawasan kumuh barak

5.1.2 Vitalitas Ekonomi

Vitalitas Ekonomi disini mencakup 2 hal yaitu letak strategis Kawasan yang didalamnya seperti dekat dengan pusat bisnis, terminal, pasar atau perkantoran yang dimana Kawasan tersebut peruntukannya sesuai dengan tata ruang.

Kondisi sosial budaya dikawasan kumuh barak ini terbilang rendah dikarenakan keterikatan antar masyarakat dengan yang lainnya begitu akrab dengan budaya agama islam yang rata-rata beragama muslim serta ekonomi dikawasan kumuh ini terbilang cukup. Berikut penjelasan lebih lengkapnya:

1. Letak Strategis Kawasan

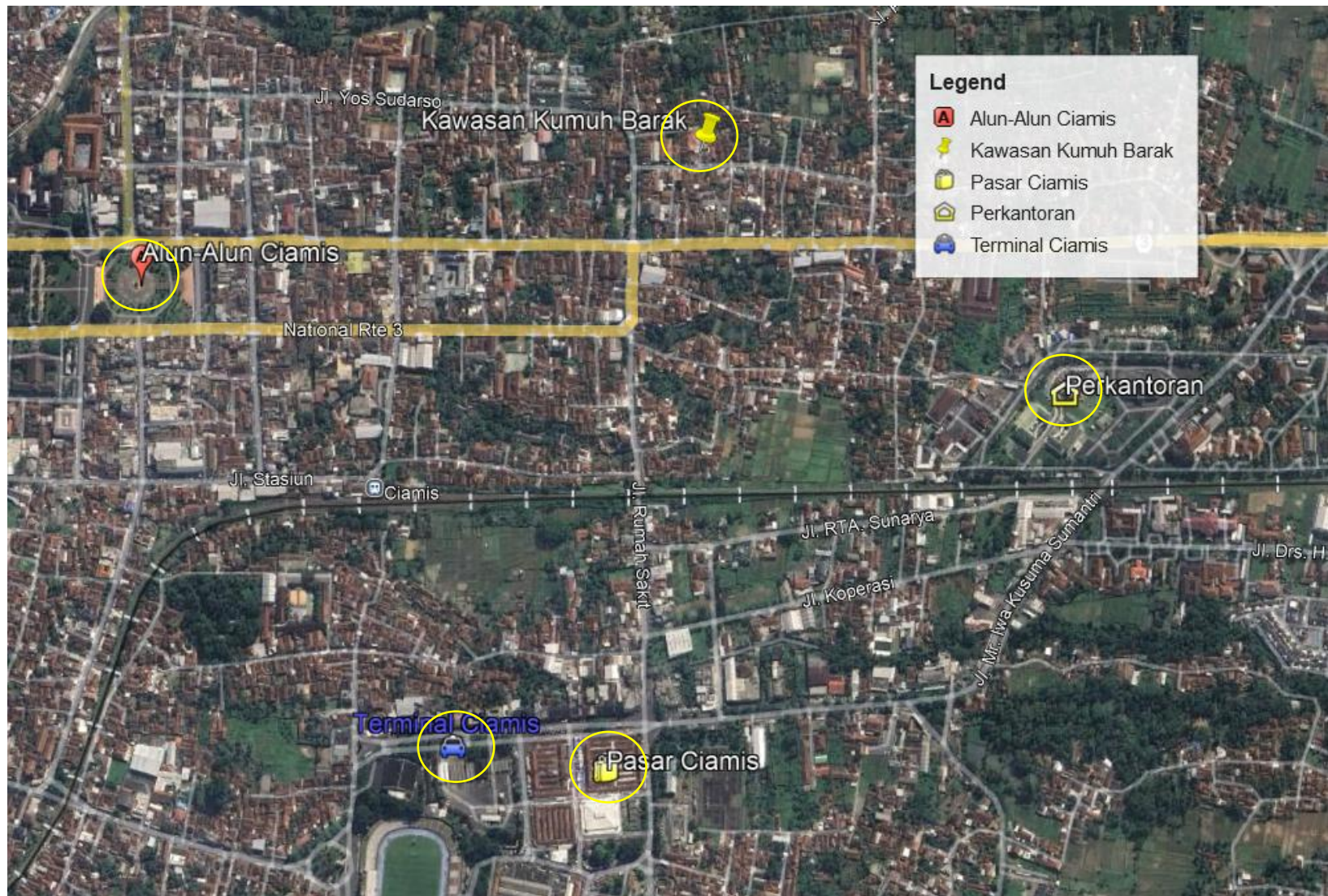
Letak strategis yang dimaksud adalah posisi atau lokasi suatu kawasan yang memiliki nilai penting dan keunggulan dari segi aksesibilitas, fungsi dan potensi pengembangan, sehingga menjadi pusat atau area utama bagi pengembangan sektor sektor pembangunan. Dengan melihat kriteria seperti dekat dengan pusat bisnis, terminal, pasar atau perkantoran. Berikut ini tabel

Tabel V. 3 Pusat kegiatan strategis di Kawasan Kumuh Barak

No	Lokasi	Tujuan	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh
1	Kawasan Kumuh Barak	Terminal Ciamis	1,5 km	4 menit
2		Alun-alun Ciamis	1 km	3 menit
3		Pasar Ciamis	1,2 km	3 menit
4		Perkantoran	1,4 km	3 menit

Sumber: Hasil Analisis 2025

Dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata rata untuk ke tempat pusat kegiatan seperti terminal, alun-alun, pasar dan perkantoran itu dengan jarak tempuh kurang dari 2 km dan waktu tempuh kurang dari 5 menit berdasarkan melihat dari sumber google maps. Berikut ini peta titik pusat kegiatan di Kawasan kumuh barak :



Gambar V. 4 Peta Titik Pusat Kegiatan di Kawasan Kumuh Barak

2. Sosial Budaya

Sosial budaya yang dimaksud disini adalah menggambarkan kondisi masyarakat dari segi hubungan sosial, identitas budaya yang dimana menjadi dasar dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah agar terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian nilai nilai sosial budaya masyarakat. Kondisi sosial budaya ini cenderung memiliki pendapatan dan Pendidikan yang rendah yang dimana mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat. Berikut Faktor yang membentuk kondisi sosial budaya dikawasan kumuh barak ini yaitu:

- Faktor **ekonomi** yang dimana dikawasan kumuh barak ini berbagai macam pekerjaan namun untuk warga yang terdampat rumah tidak layak huni itu hanya mengandalkan pekerjaan buruh harian lepas.
- Faktor **sosial budaya** masyarakat di Kawasan kumuh barak ini terbilang erat dikarenakan warga setempat sering berkumpul atau mengobrol di teras rumah warganya, berikut dokumentasinya



Di Kawasan kumuh barak ini rata-rata sangat kental dengan budaya **Islam**. Dimana rata-rata mayoritas adalah pemeluk agama islam sehingga fasilitas sosial /umum berupa masjid atau mushola yang hampir di setiap RT.

Berikut adalah dokumentasi fasilitas masjid dan mushola di setiap Rukun Tetangga:



Gambar V. 5 Visualisasi Masjid dan Mushola

Setelah melihat gambar diatas yaitu untuk mesjid di RW 15 ada 2 mesjid besar, untuk di RW 16 ada 2 mesjid besar dan 1 mushola, untuk total mesjid di 2 RW yaitu berjumlah 5 Mesjid

5.1.3 Status Legalitas Tanah

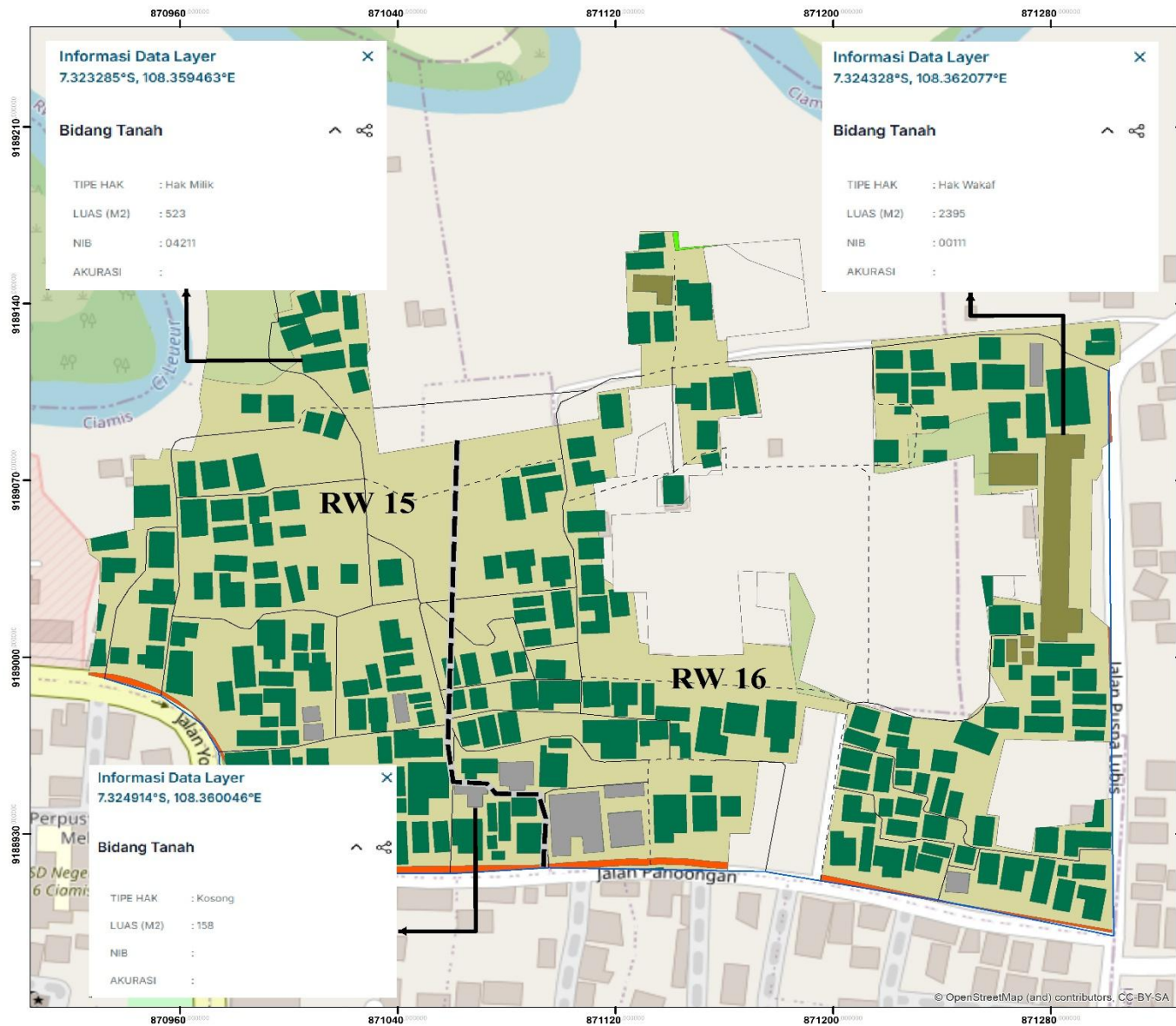
Di Kelurahan Ciamis khususnya kawasan permukiman kumuh barak ini semua legalitas tanahnya bersifat legal yang dimana tertera dalam SK Bupati Ciamis Nomor 593/Kpts.719- Huk/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Ciamis.

Tabel V. 4 Legalitas Tanah menurut SK Bupati Ciamis Nomor 593/Kpts.719-Huk/2021

Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkungan Administratif				Kependudukan		Legalitas Tanah
		RW	RT	Desa/Kel	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan	
Kawasan Kumuh Barak Ciamis	0,75	15	001	Ciamis	Ciamis	102	136,00	Legal
	1,4		002	Ciamis	Ciamis	131	93,57	Legal
	0,47		003	Ciamis	Ciamis	78	165,96	Legal
	2,07	16	001	Ciamis	Ciamis	135	65,22	Legal
	1,45		004	Ciamis	Ciamis	111	76,55	Legal
Jumlah	6,14							

Sumber: Surat Keputusan Bupati No 593/Kpts.719-Huk/2021

Selain melihat dari SK Bupati Nomor 593/Kpts.719- Huk/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Ciamis. Status legalitas tanah disini juga melihat dari Kementrian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang dimana melihat dari web resmi ATR/BPN yaitu BHUMI Geoportal Atlas melihat bahwa kelurahan ciamis khususnya di Kawasan kumuh barak RW 15 dan RW 16 yaitu sebagai Hak milik atau milik pribadi oleh warga setempat. Berikut adalah peta legalitas tanah di kelurahan ciamis khususnya Kawasan barak menurut data BHUMI ATR/BPN yaitu:



**PETA LEGALITAS TANAH
KAWASAN KUMUH BARAK**

1:1.424
 0 10 20 40 60 80 M

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 48S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984

LEGENDA

Keterangan

- Batas RW
- Jalan Lokal Kondisi Baik
- Jalan Lingkungan Kondisi Baik
- Jalan Lingkungan Kondisi Rusak
- Legalitas Tanah Terdaftar (Hak Milik)
- Legalitas Tanah Terdaftar (Hak Wakaf)
- Legalitas Tanah Belum Terdaftar (Kosong)

© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA
 Delimitasi Kawasan Kumuh Barak Ciamis

Sumber Peta
 Peta Badan Informasi Geospasial Indonesia

Universitas Pasundan
 Perencanaan Wilayah dan Kota

Gambar V. 6 Peta Legalitas Tanah di Kawasan Kumuh Barak

Berdasarkan Sumber **Bhumi Kementrian ATR/BPN** yang dimana dalam pencarian bidang tanah dengan data kepemilikannya itu bisa dilihat di sumber tersebut, sebagaimana yaitu:

Legal: status tanah jelas, memiliki kepemilikan yang mempunyai dokumen dan sertifikat sah. **Illegal:** status tanah tidak jelas asal usulnya, tidak memiliki dokumen dan sertifikat yang jelas. Berikut ini penjelasan mengenai bidang terdaftar dan bidang belum terdaftar, yaitu:

1. Bidang Terdaftar

Bidang tanah yang sudah memiliki hak dan terdaftar secara resmi dalam pendaftaran tanah dengan contoh tipe hak yaitu Hak Milik dan Hak Wakaf.

2. Bidang Belum Terdaftar

Bidang tanah yang belum memiliki pendaftaran resmi atau belum memiliki sertifikat hak atas tanah dengan contoh tipe hak yaitu Kosong

Berikut ini keterangan pada Gambar V.6 di atas yaitu:

1. RW 15

- Bidang Terdaftar atau memiliki tipe **Hak Milik** terdiri 93 Bangunan
- Bidang Belum Terdaftar atau memiliki tipe **Kosong** terdiri dari 4 Bangunan.
- Total keseluruhan bangunan yaitu 97 Bangunan

2. RW 16

- Bidang Terdaftar atau memiliki tipe **Hak Milik** terdiri dari 61 Bangunan dan tipe **Hak Wakaf** terdiri dari 6 Bangunan
- Bidang Belum Terdaftar atau memiliki tipe **Kosong** terdiri dari 6 Bangunan
- Total keseluruhan bangunan yaitu 73 Bangunan

3. RW 15 & 16

- Total bangunan bidang terdaftar dengan tipe hak milik dan hak wakaf terdiri dari **160** bangunan
- Total bangunan tidak terdaftar dengan tipe kosong terdiri dari **10** bangunan
- Total keseluruhan bangunan yaitu 170 Bangunan

5.1.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana disini mencakup kondisi dilapangan berdasarkan hasil observasi yang berisikan kondisi jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air bersih / minum. Pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran, untuk lebih lengkap yaitu sebagai berikut:

5.1.4.1 Kondisi Jalan Lingkungan

Jaringan jalan lingkungan permukiman yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan kendaraan bermotor. Selain itu harus didukung oleh ketersediaan prasarana pendukung jalan, seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, dan lainnya.

Kondisi jaringan jalan di dalam lingkungan permukiman kumuh yang menghubungkan antar RT dilayani oleh jalan gang dengan lebar rata – rata 1 meter – 2 meter dan jalan lingkungan/jalan utama dengan lebar 3 meter – 6meter. Jenis permukaan jalan di kawasan kumuh barak rata rata berupa cor beton dengan kondisi baik dan beberapa pada ruas jalan masih terdapat rusak dan berupa jalan tanah sehingga tidak dapat memberikan rasa aman, nyamann bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda maupun motor.

Berdasarkan hasil survey lapangan, terdapat beberapa ruas jalan lingkungan yang perlu penanganan seperti perbaikan jalan lingkungan karena kondisi permukaan rusak, lalu kondisi perlengkapan penerangan lampu jalan (PJU) belum tersedia sepenuhnya yang dimana dimalam hari koridor jalan tersebut terlihat gelap dan terkesan menyeramkan, dan jalan hanya diterangi oleh lampu pada setiap rumah. Berikut adalah tabel kondisi aksesibilitas dan jaringan jalan disetiap Rukun Tetangga (RT):

Tabel V. 5 Kondisi Aksesibilitas Jaringan Jalan

No	Lokasi	Kondisi Jaringan Jalan				
		Nama	Kondisi	Lebar (M)	Jenis Perkerasan	Jumlah (M)
1	RT 01 RW 15	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	134,4

No	Lokasi	Kondisi Jaringan Jalan				
		Nama	Kondisi	Lebar (M)	Jenis Perkerasan	Jumlah (M)
2	RT 01 RW 15	Jl Yos Sudarso	Baik	3,5	Aspal	21,36
3	RT 01 RW 15	Jl Yos Sudarso	Baik	3,5	Aspal	21,97
4	RT 01 RW 15	Gg Barokah	Baik	1,5	Beton	67,29
5	RT 01 RW 15	Gg Barokah	Baik	1,5	Beton	63,53
6	RT 01 RW 16	Jl Panoongan	Baik	3,5	Aspal	109,45
7	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Aspal	122,56
8	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Rusak	1,5	Beton	65,21
9	RT 01 RW 16	Gg Barokah	Rusak	1,5	Beton	32,45
10	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	23,15
11	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Aspal	50,06
12	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Rusak	1,5	Beton	4,41
13	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Rusak	1,5	Beton	53,38
14	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Rusak	1,5	Beton	47,27
15	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	65,14
16	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	49,68
17	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	78,76
18	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Rusak	1,5	Beton	44,84
19	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Rusak	1,5	Tanah	210,94
20	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	68,58
21	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	50,4
22	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	74,58
23	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	37,12
24	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	20,9

No	Lokasi	Kondisi Jaringan Jalan				
		Nama	Kondisi	Lebar (M)	Jenis Perkerasan	Jumlah (M)
25	RT 01 RW 16	Jl. Gang	Rusak	1,5	Beton	40,39
26	RT 02 RW 15	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	14,23
27	RT 02 RW 15	Gg Barokah	Rusak	1,5	Beton	32,55
28	RT 02 RW 15	Jl. Gang	Baik	1,5	Aspal	89,75
29	RT 02 RW 15	Jl. Gang	Baik	1,5	Aspal	58,54
30	RT 02 RW 15	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	113,85
31	RT 02 RW 15	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	118,93
32	RT 02 RW 15	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	3,13
33	RT 02 RW 15	Jl Yos Sudarso	Baik	3,5	Aspal	9,58
34	RT 02 RW 15	Gg Barokah	Baik	1,5	Beton	100,47
35	RT 02 RW 15	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	96,12
36	RT 02 RW 15	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	47,44
37	RT 02 RW 15	Jl. Gang	Rusak	1,5	Beton	38,49
38	RT 03 RW 15	Jl Panoongan	Baik	3,5	Aspal	111,37
39	RT 03 RW 15	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	34,07
40	RT 03 RW 15	Jl Yos Sudarso	Baik	3,5	Aspal	45,73
41	RT 04 RW 16	Jl Panoongan	Baik	3,5	Aspal	106,8
42	RT 04 RW 16	Gg Barokah	Baik	1,5	Beton	91,54
43	RT 04 RW 16	Jl Puspallubis	Baik	3,5	Aspal	218,58
44	RT 04 RW 16	Gg Barokah	Baik	1,5	Beton	53,5
45	RT 04 RW 16	Jl Panoongan	Rusak	3,5	Beton	64,71
46	RT 04 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	79,77

No	Lokasi	Kondisi Jaringan Jalan				
		Nama	Kondisi	Lebar (M)	Jenis Perkerasan	Jumlah (M)
47	RT 04 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	70,1
48	RT 04 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	66,81
49	RT 04 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	40,14
50	RT 04 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	41,48
51	RT 04 RW 16	Jl. Gang	Rusak	1,5	Beton	53,88
52	RT 04 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	82,06
53	RT 04 RW 16	Jl. Gang	Baik	1,5	Beton	19,01
Jumlah						3.460

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berikut ini adalah rekapitulasi dari tabel sebelumnya yaitu:

Tabel V. 6 Rekapitulasi Kondisi Aksesibilitas Jaringan Jalan

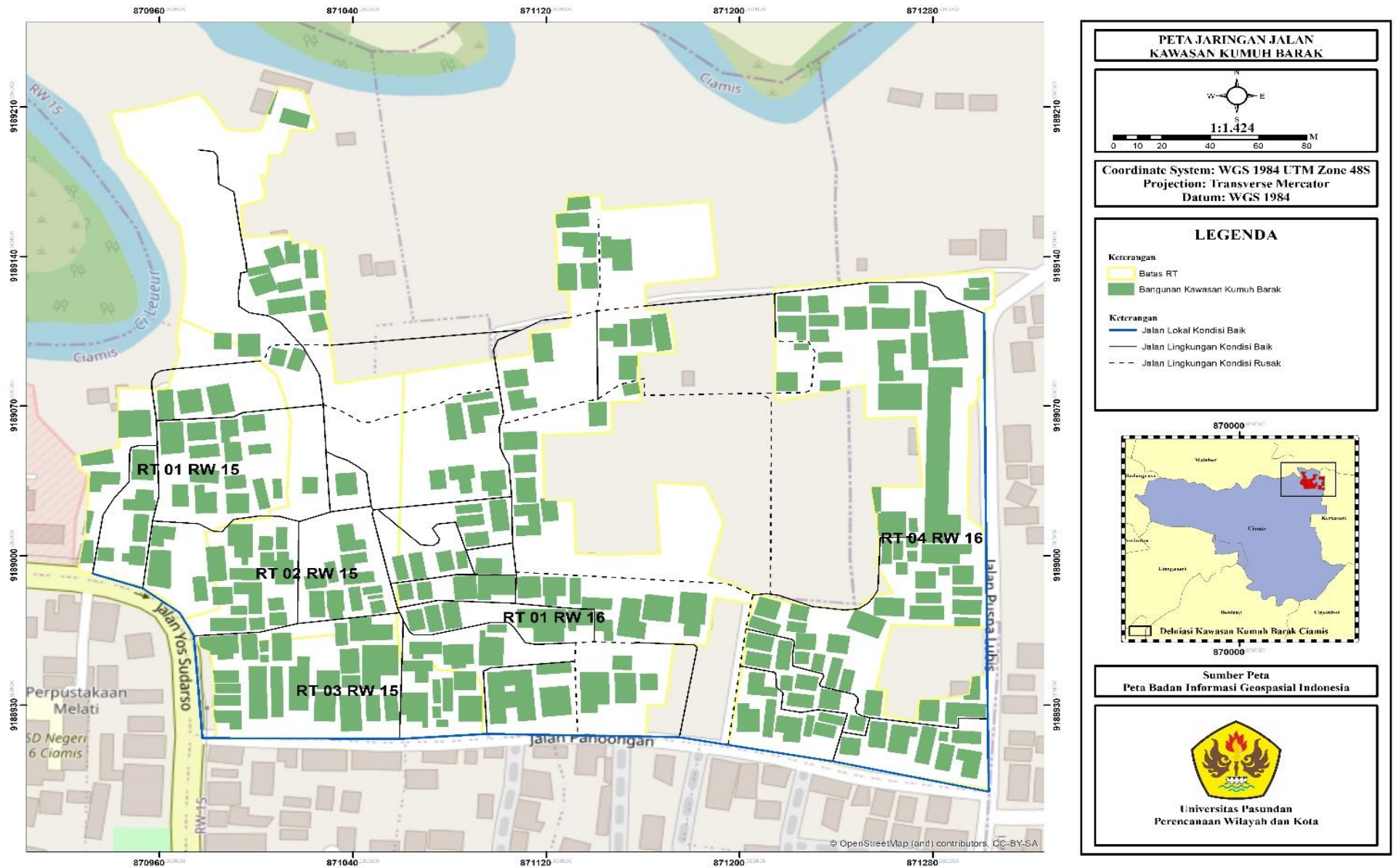
No	Keterangan	Kumuh Barak		
		RW 15	RW 16	Jumlah
1	Panjang Jalan Ideal (M) (Sumber: Rumus dari Buku Saku)	18.325	64.151	82.476
	$\frac{\text{Luas jalan tidak terlayani}}{\text{Luas Keseluruhan kawasan kumuh}} \times \text{Panjang jalan eksisting}$	$\frac{92}{6.14} \times 1.223$	$\frac{176}{6.14} \times 2.238$	
2	Total Panjang Jalan (M)	1.223	2.238	3.461
3	Jalan Belum Terlayani (M)	92	176	268
4	Kondisi Jalan (M)			
	a. Baik	1.152	1.620	2.772
	b. Rusak	71	617	688
5	Jenis Perkerasan			
	a. Aspal	358	607	965
	b. Beton	856	1.419	2.275
	c. Tanah	-	211	211

Sumber: Hasil Analisis 2025

Total Panjang jalan di kedua RW yaitu 3.461 Meter dengan dominasi kondisi jalan baik di kedua RW, hanya sekitar 688 meter dengan kondisi rusak baik itu RW 15 berjumlah 71 meter dan RW 16 berjumlah 617 meter. Dan jenis perkerasan yang masih menggunakan tanah yaitu di RW 16 dengan 211 meter. Berikut adalah dokumentasi visualisasi dan peta kondisi jaringan jalan:



Gambar V. 7 Visualisasi Kondisi Aksesibilitas Jaringan Jalan



Gambar V. 8 Peta Kondisi Jaringan Jalan

5.1.4.2 Kondisi Drainase Lingkungan

Kondisi drainase lingkungan di Kawasan kumuh barak berdasarkan hasil observasi lapangan pada setiap unit RT pada umumnya masih memiliki kondisi yang masih bagus namun masih terdapat drainase yang terputus / tidak menyambung dengan drainase lainnya.

Rata – rata lebar drainase 0.3 meter sampai 0.5 meter dan terhimpit oleh bangunan rumah warga, selain itu saluran drainase dijadikan sebagai pembuangan air limbah rumah tangga (grey water).

Berikut kondisi saluran drainase di Kawasan Kumuh barak di Kelurahan Ciamis:

- Kondisi saluran drainase di RW 15 khususnya di RT 03 terdapat masalah terkait saluran air atau drainase yang digunakan untuk keperluan buang air besar (BAB). Hal ini menunjukkan kebutuhan akan infrastruktur sanitasi yang lebih baik.
- Kondisi saluran drainase di RW 16 tergolong cukup baik dengan rata rata sudah di perkeras, dimensi ukuran lebar 30-40 cm kedalaman 50 cm.

Berikut ini tabel dan visualisasi kondisi saluran Drainase lingkungan:

Tabel V. 7 Kondisi Saluran Drainase Lingkungan

No	Lokasi	Saluran Drainase (M)					
		Nama	Jenis	Kondisi	Lebar	Kedalaman	Panjang (M)
1	RT 01 RW 16	Jl Panoongan	Baik	Drainase Terbuka	40 Cm	50 Cm	136,02
2	RT 01 RW 16	Kaw. Permukiman	Baik	Drainase Terbuka	30 Cm	50 Cm	122,56
3	RT 01 RW 16	Kaw. Permukiman	Baik	Drainase Tertutup	30 Cm	40 Cm	65,21
4	RT 01 RW 15	Jl Yos Sudarso	Baik	Drainase Terbuka	40 Cm	50 Cm	42,73
5	RT 04 RW 16	Jl Puspalubis	Baik	Drainase Terbuka	40 Cm	50 Cm	218,58
6	RT 01 RW 16	Kaw. Permukiman	Baik	Drainase Terbuka	20 Cm	30 Cm	100,66
7	RT 01 RW 15	Gg Barokah	Baik	Drainase Terbuka	30 Cm	30 Cm	67,29

No	Lokasi	Saluran Drainase (M)					
		Nama	Jenis	Kondisi	Lebar	Kedalaman	Panjang (M)
8	RT 02 RW 15	Gg Barokah	Baik	Drainase Terbuka	2,5 M	1,7 M	130,51
9	RT 03 RW 15	Kaw. Permukiman	Baik	Drainase Terbuka	30 Cm	30 Cm	56,36
10	RT 04 RW 16	Jl Panoongan	Baik	Drainase Terbuka	40 Cm	50 Cm	106,8
11	RT 03 RW 15	Jl Panoongan	Baik	Drainase Terbuka	40 Cm	50 Cm	84,8
12	RT 03 RW 15	Jl Yos Sudarso	Baik	Drainase Terbuka	40 Cm	50 Cm	45,73
13	RT 02 RW 15	Jl Yos Sudarso	Baik	Drainase Terbuka	40 Cm	50 Cm	10,18
14	RT 04 RW 16	Gg Barokah	Baik	Drainase Terbuka	2,5 M	1,7 M	177,57
15	RT 01 RW 15	Gg Barokah	Baik	Drainase Terbuka	2,5 M	1,7 M	65,96
	Jumlah A						1.431

Sumber: Hasil Analisis 2025

Berikut ini adalah Rekapitulasi dari tabel sebelumnya yaitu:

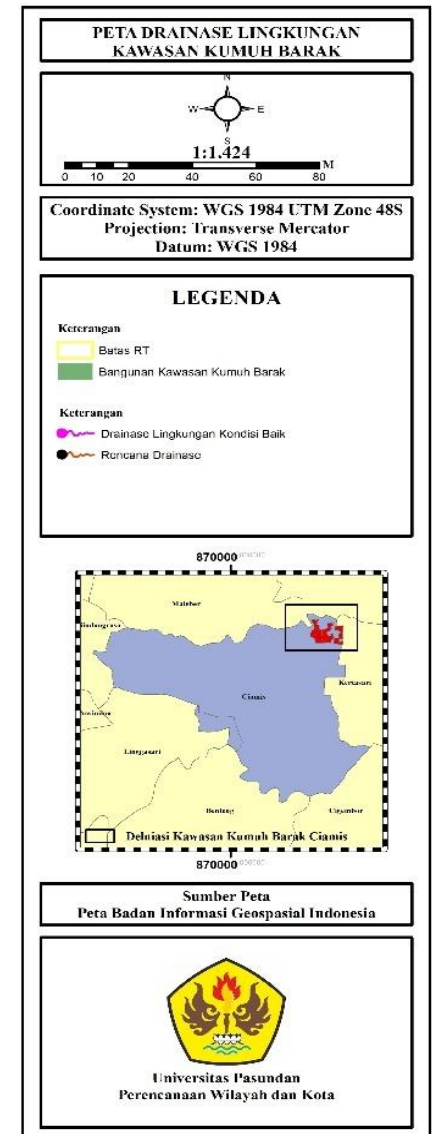
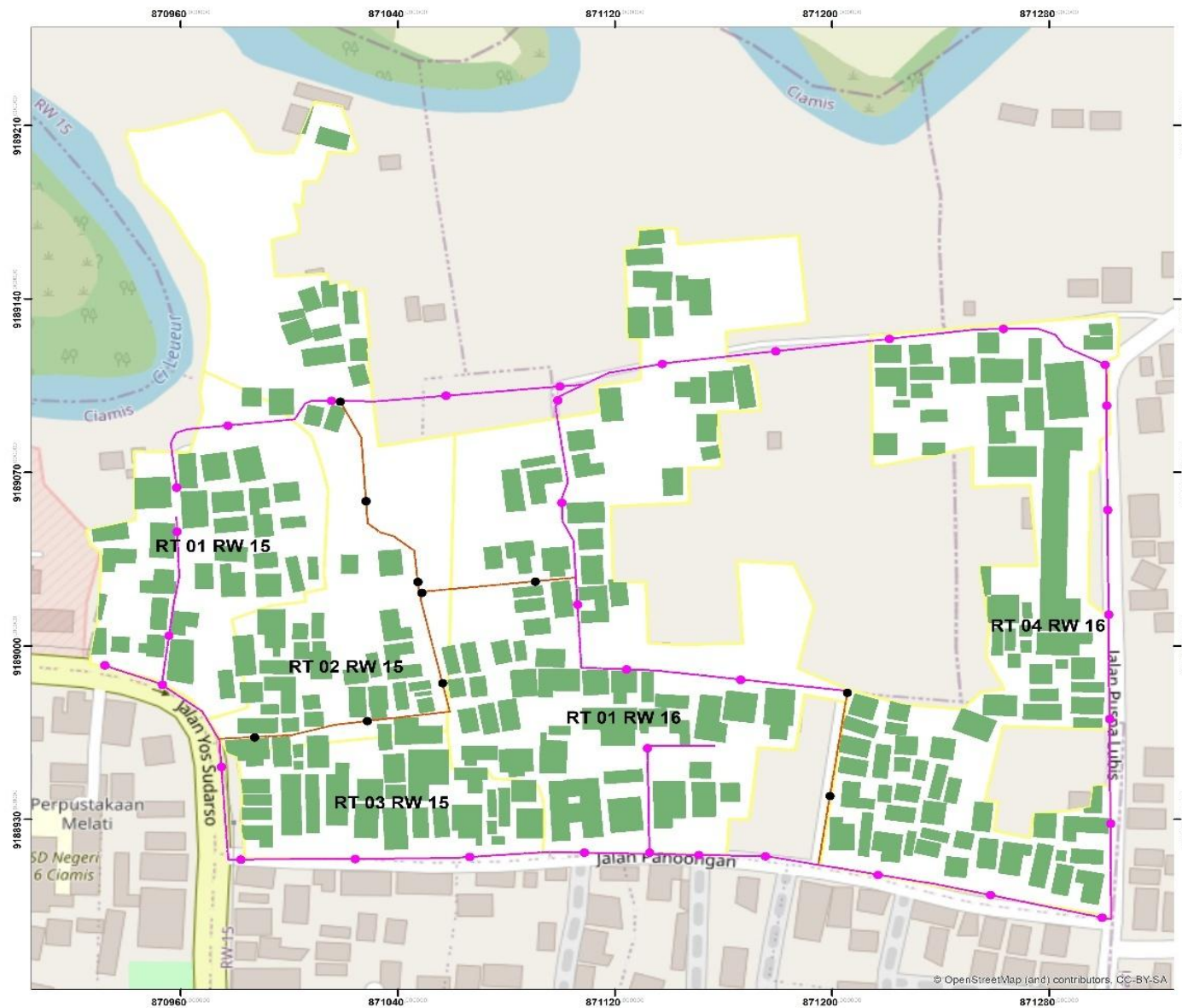
No	Keterangan	Kumuh Barak		
		RW 15	RW 16	Jumlah
1	Panjang Ideal Drainase (M)	8.208	15.097	23.305
	$\frac{\text{Panjang Drainase Eksisting}}{\text{Luas keseluruhan Kawasan kumuh (Ha)}} \times 100\%$	$\frac{504}{6.14} \times 100$	$\frac{927}{6.14} \times 100$	
2	Panjang Drainase (M)	504	927	1.431
3	Tipe Drainase			
	• Terbuka	504	862	1.366
	• Tertutup	-	65	65
4	Kondisi Drainase (M)			
	• Baik	504	927	1.431
	• Rusak	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis 2025

Total Panjang drainase di kedua RW berjumlah 1.431 Meter, dengan tipe drainase terbuka dan tertutup. Kondisi drainase di RW 15 & 16 cukup terbilang baik.



Gambar V. 9 Visualisasi Kondisi Drainase Lingkungan



Gambar V. 10 Peta Kondisi Drainase Lingkungan

5.1.4.3 Kondisi Penyediaan Air Bersih / Minum

Kondisi penyediaan air bersih maupun air minum sebagaimana yang tercantum dalam UU Republik Indonesia No 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air bersih, bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup yang sehat, produktif dan bersih.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Kawasan permukiman kumuh barak, rata-rata penduduk untuk mendapatkan air bersih bersumber dari air tanah (sumur gali dan sumur pompa yang dipasang Listrik), untuk jaringan sumber air menggunakan PDAM masih sedikit KK yang menggunakannya. Berikut ini adalah tabel sistem jaringan air PDAM dan Jaringan Air bersih yang berdasarkan Jumlah KK.

Tabel V. 8 Sistem Jaringan Air PDAM di Kawasan Kumuh Barak

No	Lokasi	Jaringan Air Bersih (M)
1	RT 01 RW 15	51
2	RT 01 RW 16	175,8
3	RT 02 RW 15	15
4	RT 03 RW 15	155,7
	Jumlah	397,7

Sumber: Hasil Observasi Lapangan 2025



Gambar V. 11 Visualisasi Sistem Jaringan Air PDAM

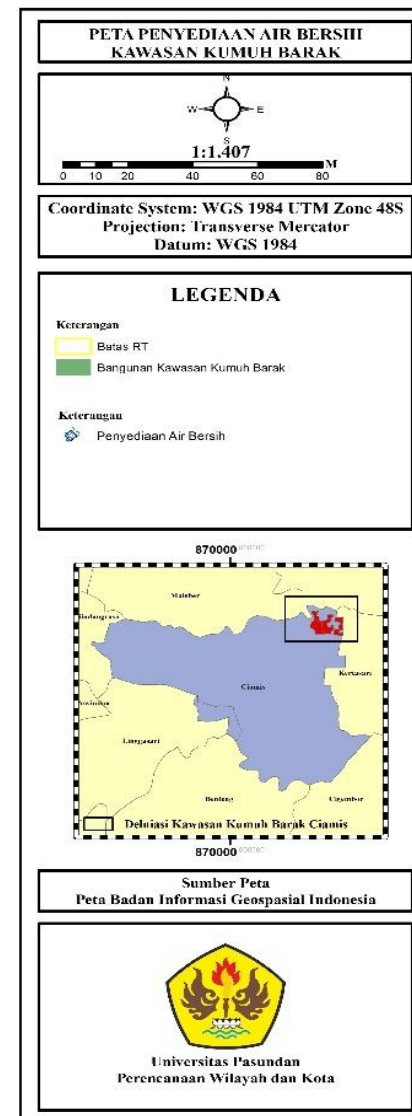
Tabel V. 9 Sistem Jaringan Air Bersih berdasarkan Sumber Air (KK)

No	Lokasi	Ketersediaan Sumber Air Bersih (KK)	
		PDAM (KK)	Sumur Galian (KK)
1	RW 15	4	100
2	RW 16	8	85
Jumlah		12	185

Sumber: Hasil Observasi Lapangan 2025



Gambar V. 12 Visualisasi Jaringan Kondisi Air Bersih Sumur Bor Galian



Gambar V. 13 Peta Penyediaan Air Bersih

5.1.4.4 Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Limbah cair rumah tangga atau limbah domestik yang berasal dari hasil buangan kegiatan masyarakat permukiman, seperti air detergen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Pengelolaan limbah cair rumah tangga di lingkungan permukiman Kawasan kumuh barak yaitu masih secara konvensional, yang ditampung dalam tangka septic sedangkan limbah cair lain (air bekas cucian, mandi, dapur) langsung dibuang ke saluran drainase.

Berikut ini adalah tabel, peta dan visualisasi dokumentasi sistem pengelolaan air limbah dapat dilihat dibawah ini:

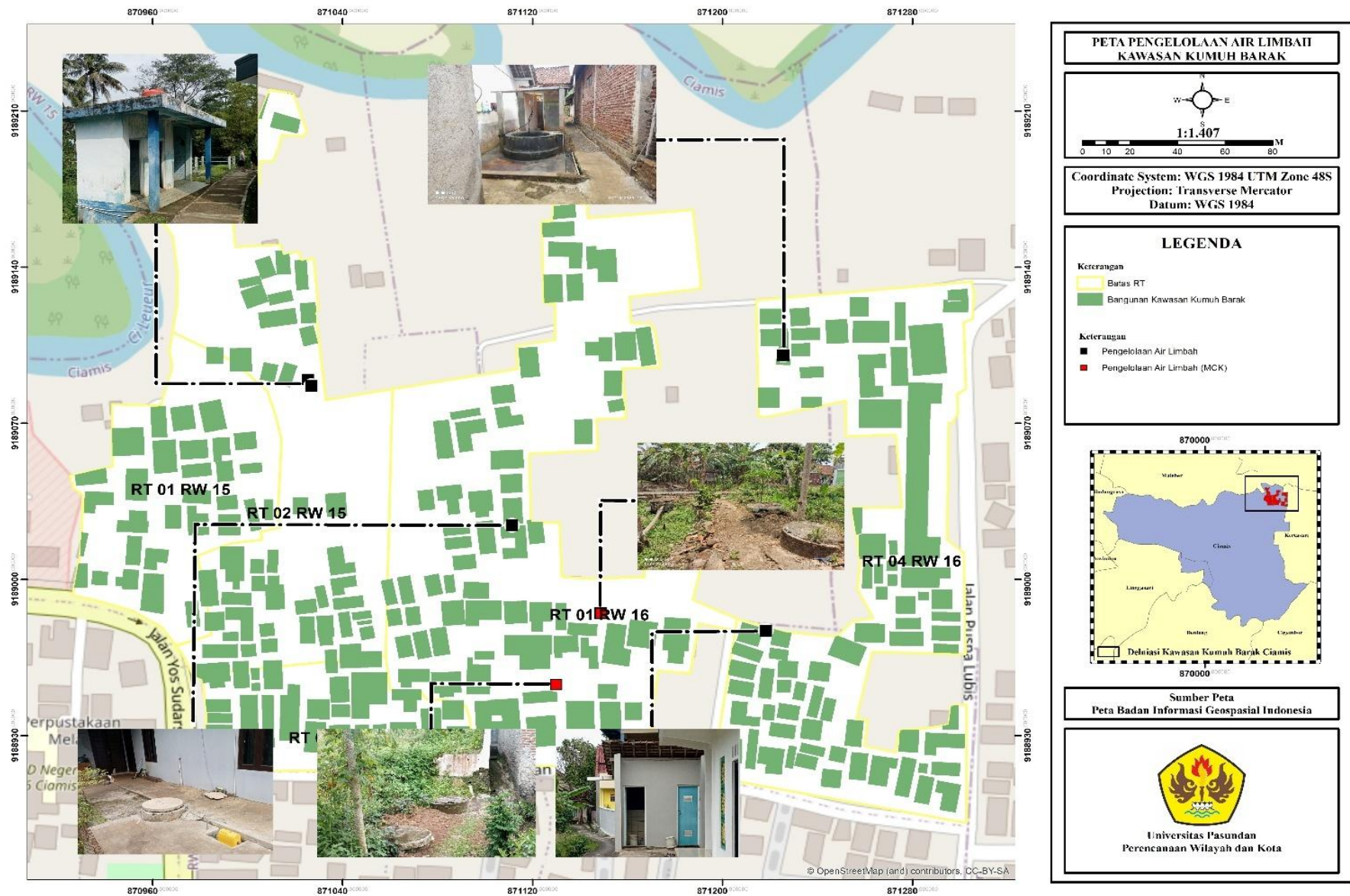
Tabel V. 10 Sistem Pengelolaan Air Limbah berdasarkan Jenis & Jumlah KK

No	Lokasi	Sistem Pengelolaan Air Limbah		
		Cubluk (KK)	Septic Tank (KK)	Saluran Drainase (KK)
1	RW 15	76	-	28
2	RW 16	88	5	-
	Jumlah A	164	5	28

Sumber: Hasil Analisis 2025



Gambar V. 14 Visualisasi Pengelolaan Air Limbah



Gambar V. 15 Peta Pengelolaan Air Limbah

5.1.4.5 Kondisi Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan sampah yang dihasilkan dilingkungan permukiman kumuh barak ini pada umumnya adalah sampah rumah tangga dari hasil kegiatan masyarakat seperti sampah dapur, sampah kebun, plastik, dan lain-lain.

Sistem pembuangan sampah domestik di kawasan kumuh barak ini dibuang tidak di tempat pembuangan sampah sementara (TPS) melainkan di pinggir jalan, di pekarangan rumah atau di tempat terbuka. Selain itu, sistem pengelolaan sampah masih bersifat konvensional yaitu dengan cara dibakar ditempat terbuka.

Berikut ini adalah tabel, peta dan visualisasi kondisi pengelolaan persampahan yang ada di lingkungan Kawasan permukiman kumuh barak yaitu:

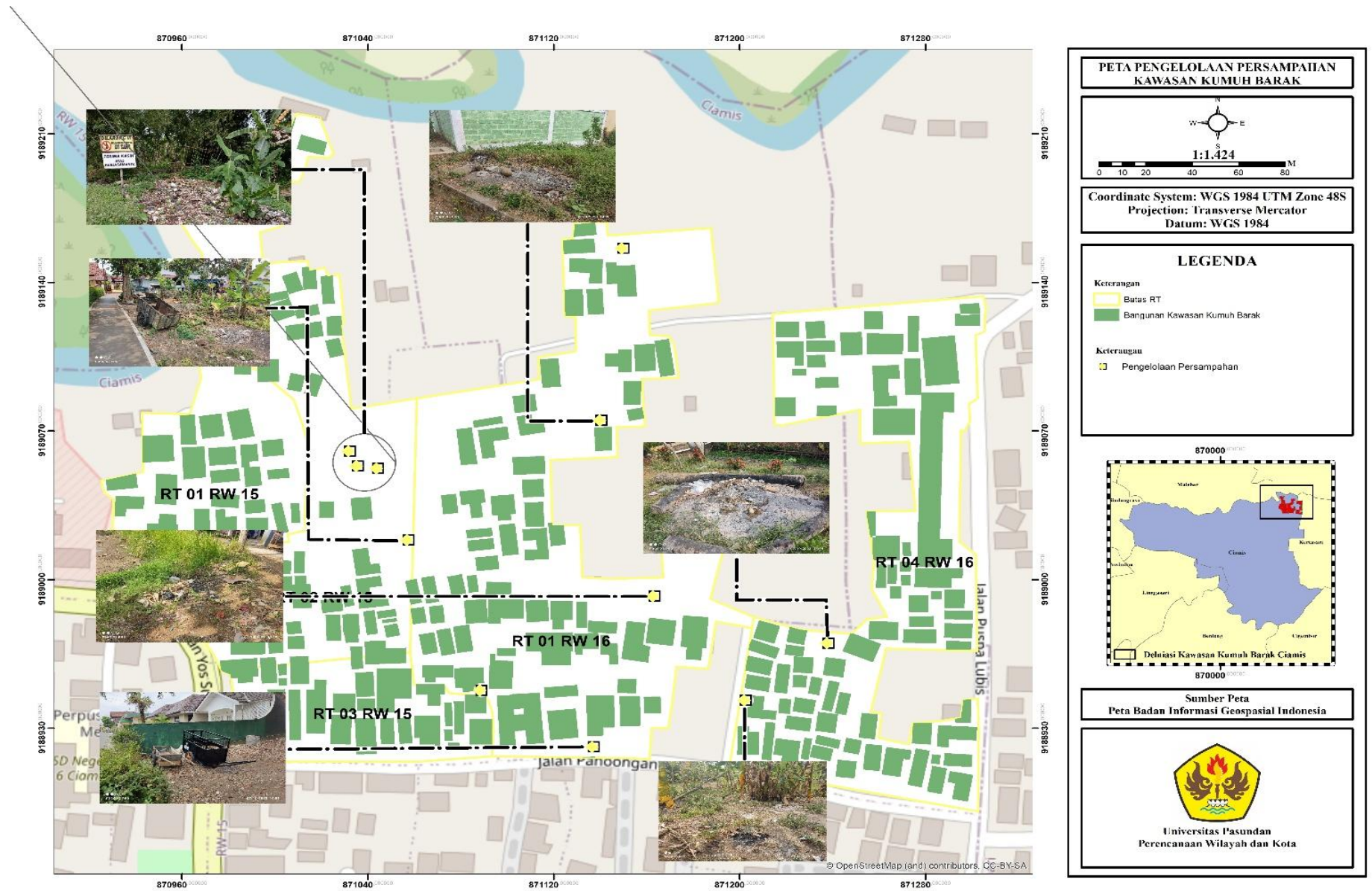
Tabel V. 11 Sistem Pengelolaan Persampahan Berdasarkan Jenis & Jumlah KK

No	Lokasi	Sistem Pengelolaan Persampahan (KK)	
		TPS (KK)	Di Bakar (KK)
1	RW 15	24	80
2	RW 16	60	33
	Jumlah A	84	113

Sumber: Hasil Analisis 2025



Gambar V. 16 Visualisasi Kondisi Pengelolaan Persampahan dengan cara Dibakar



Gambar V. 17 Peta Pengelolaan Persampahan

5.1.4.6 Kondisi Proteksi Kebakaran

Kondisi penanganan proteksi kebakaran di lingkungan permukiman kumuh barak meliputi pengamanan terhadap bahaya kebakaran yang pada umumnya kejadian kebakaran disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor teknis (konsleting Listrik) dan faktor kesalahan masyarakat itu sendiri, disisi lain prasarana proteksi kebakaran APAR (alat pemadam api ringan) atau *Hydrant* dipinggir jalan tidak terdapat di lingkungan Kawasan Kumuh Barak.

Kondisi eksisting proteksi kebakaran adalah masih menggunakan media siskamling dengan menggunakan kentongan (alat komunikasi tradisional) sebagai sarana komunikasi untuk menarik perhatian masyarakat antar RT apabila terjadi kebakaran.

Berikut visualisasi media sarana sistem proteksi kebakaran di Lingkungan Kawasan Kumuh barak yaitu:



Gambar V. 18 Media Sarana Sistem Proteksi Kebakaran

5.1.5 Kesimpulan Karakteristik Kawasan Kumuh Barak

Kawasan permukiman yang teridentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh di kawasan kumuh barak Kelurahan Ciamis meliputi 2 RW yakni RW 15 dan RW 16. Berdasarkan hasil survey lapangan, kondisi fisik bangunan ini didominasi lebih dari 80% rumah permanen, jaringan jalan yang sudah mengalami perkerasan namun sebagian juga mengalami kerusakan, jalan lingkungan ini juga masih banyak yang disertai dengan sistem pembuangan air limbah/drainase. Kondisi drainase itu sendiri masih terdapat saluran parit alami dan Sebagian ada yang belum memiliki drainase sama sekali.

Ruas jalan lingkungan terbangun yang memiliki saluran drainase permanen kondisinya sebagian terawat dan ada beberapa titik yang mengalami penyumbatan oleh sampah, pembuangan air limbah (green water) masih menggunakan saluran tersier (saluran drainase), khususnya di permukiman kumuh barak ciamis RW 15 RT 03. Dimana pembuangan limbah baik kakus maupun rumah tangga dibuang langsung ke saluran drainase.

Sedangkan untuk penggunaan lahan di kawasan permukiman tersebut terdiri dari penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun dengan kondisi permukiman yang menyebar. Kondisi bangunan perumahan tidak tertata dan rata rata rumah sudah permanen terbuat dari bata dan hanya sebagian yang memiliki konstruksi non permanen yang terbuat dari kayu. Berikut adalah tabel data variabel numerik karakteristik.

Berikut ini adalah tabel data variabel numerik karakteristik di 2 lokasi yaitu RW 15 dan RW 16 sebagai berikut:

Tabel V. 12 Karakteristik di RW 15 Kawasan Kumuh Barak

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	RW 15		
1	Vitalitas Non Ekonomi	Kondisi Fisik Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur, bangunan yang tidak menghadap ke jalan, bangunan tidak memiliki akses langsung ke jalan	70	Unit	
			Tingkat Kepadatan Bangunan	Kawasan permukiman yang memiliki kepadatan jarak antar bangunan hunian dengan bangunan lainnya	37	Unit	
			Ketidaksesuaian Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak sesuai dengan keterangan, kondisi atap rumah rusak, kondisi dinding memakai kayu dan jenis lantai berupa tanah	23	Unit	

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	RW 15		
		Kondisi Kependudukan	Tingkat Kepadatan Penduduk	rendah dibawah (150 jiwa/ha). Sedang (151 - 200 jiwa/ha). Tinggi (201 - 400 jiwa/ha). Sangat padat > (400 jiwa/ha)	158,07 jiwa/ha	KK	
			Tingkat Pertumbuhan Penduduk		416		
2	Vitalitas Ekonomi	Letak Strategis Kawasan	Lokasi Strategis Kawasan	lokasi tersebut apakah masuk kedalam lokasi strategis atau tidaknya, dan bagaimana kegiatan sosial budaya dilokasi tersebut	Di lokasi RW 15 ini tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota.	Teks	

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh RW 15	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria			
		Sosial Budaya Kawasan	Kegiatan Budaya yang dimiliki Masyarakat Setempat		Di Lokasi RW 15 ini tidak memiliki potensi sosial ekonomi budaya yang tinggi.		
3	Status Tanah	Kriteria Status Tanah	Kejelasan Status Penguasaan Tanah	status tanah milik pribadi atau pemerintah dan apakah legal atau ilegal	Status kejelasan tanah berdasarkan hasil survey di RW 15 adalah milik sendiri	Legal (+)	
4	Kondisi Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal (m), panjang jalan existing (m)	Ideal: 18.325 - Existing: 1.223 = 17.102	Meter	

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh RW 15	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria			
	Kondisi Drainase		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Panjang jalan rusak (m)	71		
			Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	kawasan yang terkena genangan	0		
		Ketidaktersediaan Saluran Drainase	Ketidaktersediaan Saluran Drainase	Panjang drainase ideal (m), panjang drainase existing (m)	Ideal:8.208 - Existing:504 = 7.704	Meter -	
				Panjang Drainase yang buruk	0		
	Kondisi Air minum	Ketidaktersediaan Akses air minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa		4	KK	

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh RW 15	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	RW 15		
		Kondisi Air Limbah	Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih	Jumlah KK tidak terakses air bersih cukup, yang kebutuhan masyarakat mencapai minimal 30 liter/hari	100	KK	
			sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak memiliki kloset yang tidak terhubung dengan tangka septic secara individual maupun komunal terpusat	28		
			sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sarana prasarana air limbah terpusat atau setempat dengan yang lainnya contohnya WC umum, dan kakus	76		

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh RW 15	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria			
							
		Kondisi Persampahan	sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sarana prasarana persampahan tidak tersedia hanya beberapa gerobak sampah dan tidak terawat/ terpeliharanya infrastruktur sampah	24	KK	
			sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan persampahan dengan cara dibakar langsung tidak dipilah terlebih dahulu antara organik dan anorganik	80		
		Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	-		-

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	RW 15		
			Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	97	Unit	 

Sumber: Hasil Observasi Lapangan dan Analisis 2025

Tabel V. 13 Karakteristik di RW 16 Kawasan Kumuh Barak

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh RW 16	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria			
1	Vitalitas Non Ekonomi	Kondisi Fisik Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur, bangunan yang tidak menghadap ke jalan, bangunan tidak memiliki akses langsung ke jalan	62	Unit	
			Tingkat Kepadatan Bangunan	Kawasan permukiman yang memiliki kepadatan jarak antar bangunan hunian dengan bangunan lainnya	21	Unit	
			Ketidaksesuaian Persyaratan Teknis Bangunan	Jumlah bangunan tidak sesuai dengan keterangan, kondisi atap rumah rusak, kondisi dinding memakai kayu dan jenis lantai berupa tanah	25	Unit	

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh RW 16	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria			
		Kondisi Kependudukan	Tingkat Kepadatan Penduduk	rendah dibawah (150 jiwa/ha). Sedang (151 - 200 jiwa/ha). Tinggi (201 - 400 jiwa/ha). Sangat padat > (400 jiwa/ha)	105,06 jiwa/ha	KK	
			Tingkat Pertumbuhan Penduduk		372		
2	Vitalitas Ekonomi	Letak Strategis Kawasan	Lokasi Strategis Kawasan	lokasi tersebut apakah masuk kedalam lokasi strategis atau tidaknya, dan bagaimana kegiatan sosial budaya dilokasi tersebut	Di lokasi RW 16 ini tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota.	Teks	

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	RW 16		
		Sosial Budaya Kawasan	Kegiatan Budaya yang dimiliki Masyarakat Setempat		Di Lokasi RW 16 ini tidak memiliki potensi sosial ekonomi budaya yang tinggi.		
3	Status Tanah	Kriteria Status Tanah	Kejelasan Status Penguasaan Tanah	status tanah milik pribadi atau pemerintah dan apakah legal atau ilegal	Status kejelasan tanah berdasarkan hasil survey di RW 15 adalah milik sendiri	Legal (+)	
4	Kondisi Sarana dan Prasarana	Kondisi Jalan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Panjang jalan ideal (m), panjang jalan existing (m)	Ideal: 64.151 - Existing: 2.238 = 61.913	Meter	

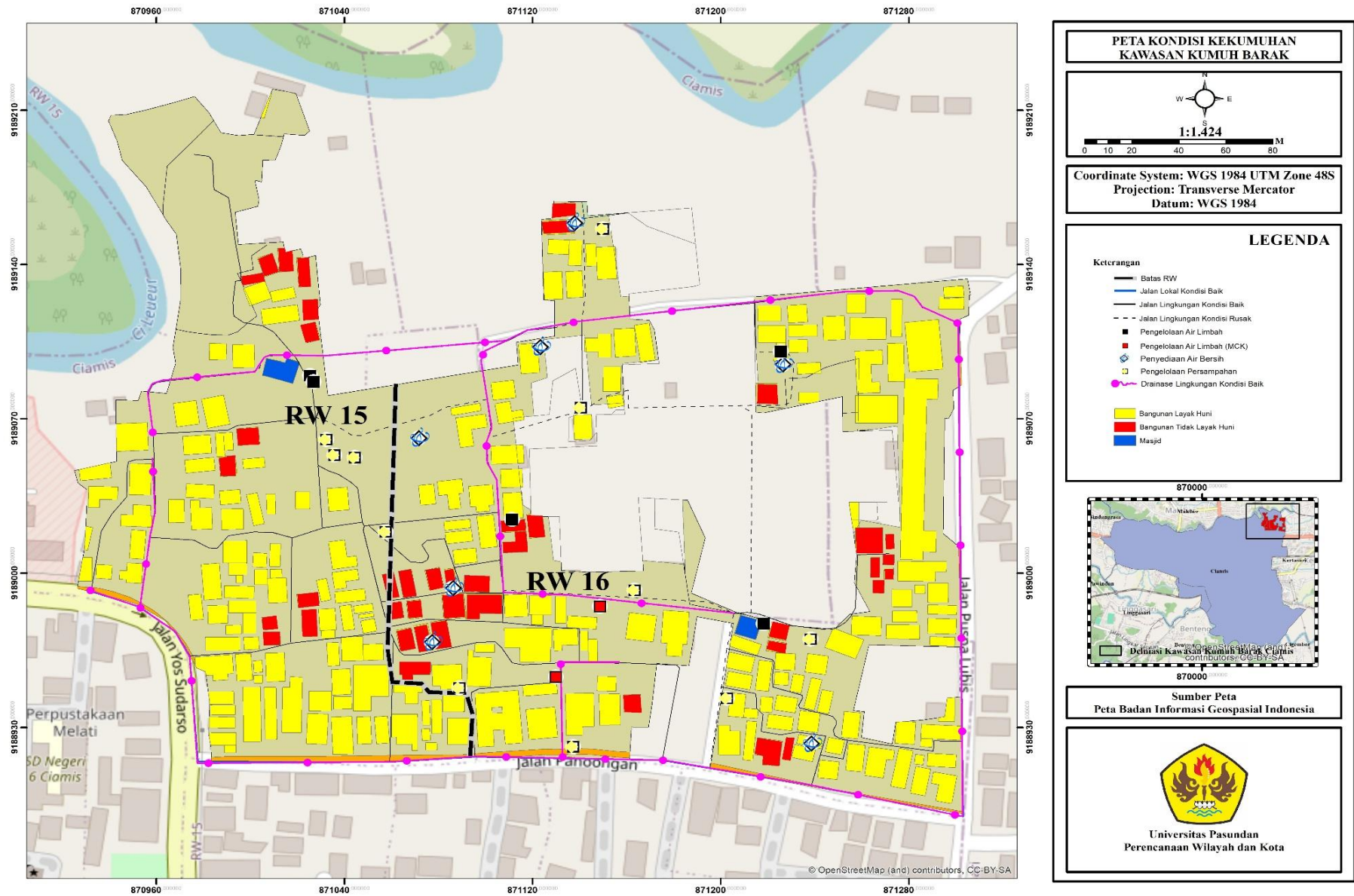
No	Data Variabel				Lokasi Kumuh	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	RW 16		
			Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Panjang jalan rusak (m)	617		
		Kondisi Drainase	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan	-	Meter -	
			Ketidaktersediaan Saluran Drainase	Panjang drainase ideal (m), panjang drainase existing (m)	Ideal: 15.097 - Existing: 927 = 14.170		
			Kualitas Drainase	Panjang Drainase yang buruk	-		
		Kondisi Air minum	Ketidaktersediaan Akses air minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa	8	KK	

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	RW 16		
			Tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih	Jumlah KK tidak terakses air bersih cukup, yang kebutuhan masyarakat mencapai minimal 30 liter/hari	85		
		Kondisi Air Limbah	sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak memiliki kloset yang tidak terhubung dengan tangka septic secara individual maupun komunal terpusat	-	KK	

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	RW 16		
							
			sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sarana prasarana air limbah terpusat atau setempat dengan yang lainnya contohnya WC umum, dan kakus	88		
		Kondisi Persampahan	sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sarana prasarana persampahan tidak tersedia hanya bak sampah dan tidak terawat/ terpeliharanya infrastruktur sampah	33	KK	 

No	Data Variabel				Lokasi Kumuh	Satuan	Dokumentasi
	Variabel	Indikator	Kriteria	Sub Kriteria	RW 16		
			sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan persampahan dengan cara dibakar langsung tidak dipilah terlebih dahulu antara organik dan anorganik	60		
		Kondisi Proteksi Kebakaran	Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	-	Unit	-
			Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	73	Unit	

Sumber: Hasil Observasi Lapangan dan Analisis 2025



Gambar V. 19 Peta Karakteristik Kekumuhan di Kawasan Kumuh Barak

5.2 Tingkat Prioritas Kekumuhan di Kelurahan Ciamis

Berdasarkan hasil analisis karakteristik kawasan kumuh barak di Kelurahan Ciamis khususnya RW 15 dan RW 16 berikut ini adalah untuk mengetahui hasil persentase dan nilai menggunakan Teknik Skoring dan rumus perhitungan Numerik Kawasan. Didalam Analisis Skala tingkat prioritas ada 3 variabel yaitu Kondisi kekumuhan yang berisikan kondisi bangunan, Jalan lingkungan, penyediaan air minum, Drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Untuk yang kedua yaitu ada pertimbangan lain yang berisikan Nilai strategis Lokasi, kependudukan dan nilai sosial budaya dan ekonomi, serta yang terakhir yaitu variabel legalitas tanah Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat sebagai berikut:

5.2.1 Kondisi Kekumuhan

5.2.1.1 Kondisi Bangunan Hunian

Tabel V. 14 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Bangunan Hunian di RW 15

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 15			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Vitalitas Non Ekonomi	Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur (unit)	- Bangunan Hunian tidak memiliki akses langsung ke jalan - posisi muka bangunan tidak menghadap jalan.	70	Unit	72,10%	3
		Tingkat Kepadatan Bangunan	Kawasan Permukiman Memiliki Kepadatan bangunan hunian (Unit/Ha)	Kepadatan jarak antar bangunan yang satu dengan yang lainnya	$97 / 2,62 = 37$	Unit/ha	37.0%	1

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 15			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
		Kualitas Bangunan yang tidak memenuhi kriteria	Jumlah bangunan tidak sesuai keterangan (unit)	- kondisi atap rumah rusak - kondisi dinding memakai kayu - jenis lantai masih rumah panggung atau berupa tanah	23	Unit	23,70%	0
	Aspek Kondisi Bangunan							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan untuk Lokasi RW 15:

1. Persentase Ketidakteraturan bangunan dihitung dengan rumus $\frac{\sum \text{Bangunan tidak teratur (Unit)}}{\sum \text{Bangunan Keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$ atau $\frac{70}{97} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 72.1 %. Dan nilai ketidakteraturan bangunan adalah “3” karena persentase berada di antara klasifikasi 50 % - 75%.
2. Persentase Kepadatan Bangunan dihitung dengan rumus $\frac{\text{Jumlah Bangunan Hunian}}{\text{Luas sebagian Kawasan Kumuh (Ha)}} \times 100\%$ atau $\frac{97}{2,62} \times 100\%$ sehingga menghasilkan persentase 37 %. Dan nilai kepadatan bangunan adalah “1” karena persentase berada diantara klasifikasi 25 – 50%.
3. Persentase Kualitas bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis dihitung dengan rumus $\frac{\sum \text{Bangunan tidak sesuai persyaratan keterangan (Unit)}}{\sum \text{Bangunan Keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$ atau $\frac{23}{97} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 23.7 %. Dan nilai kualitas bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis adalah “0” karena persentase berada dibawah klasifikasi 25 %.

Tabel V. 15 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Bangunan Hunian di RW 16

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 16			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Vitalitas Non Ekonomi	Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	Jumlah bangunan tidak teratur (unit)	- Bangunan Hunian tidak memiliki akses langsung ke jalan - posisi muka bangunan tidak menghadap jalan.	62	Unit	84,90%	5
		Tingkat Kepadatan Bangunan	Luas Kawasan Permukiman Memiliki Kepadatan Bangunan Hunian (Unit/Ha)	Kepadatan jarak antar bangunan yang satu dengan yang lainnya	73 / 3,52 = 21	Unit	21%	0
		Kualitas Bangunan yang tidak memenuhi kriteria	Jumlah bangunan tidak sesuai keterangan (unit)	- kondisi atap rumah rusak, kondisi dinding memakai kayu - jenis lantai masih rumah panggung atau berupa tanah	25	Unit	34,20%	1
	Aspek Kondisi Bangunan							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan untuk Lokasi RW 16:

1. Persentase Ketidakteraturan bangunan dihitung dengan rumus $\frac{\sum \text{Bangunan tidak teratur (Unit)}}{\sum \text{Bangunan Keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$ atau $\frac{62}{73} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 84.9 %. Dan nilai ketidakteraturan bangunan adalah “5” karena persentase berada di antara klasifikasi 75 % - 100 %.
2. Persentase Kepadatan bangunan dihitung dengan rumus $\frac{\text{Jumlah Bangunan Hunian}}{\text{Luas sebagian Kawasan Kumuh (Ha)}} \times 100\%$ atau $\frac{73}{3,52} \times 100\%$ Sehingga Menghasilkan persentase 21 %. Dan nilai kepadatan bangunan adalah “0” karena persentase berada dibawah klasifikasi 25%
3. Persentase Kualitas bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis dihitung dengan rumus $\frac{\sum \text{Bangunan tidak sesuai Keterangan (Unit)}}{\sum \text{Bangunan Keseluruhan (Unit)}} \times 100\%$ atau $\frac{25}{73} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 34,2 %. Dan nilai kualitas bangunan yang tidak sesuai persyaratan teknis adalah “1” karena persentase berada diantara klasifikasi 25 - 50 %.

5.2.1.2 Kondisi Jalan Lingkungan

Tabel V. 16 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Jalan Lingkungan RW 15

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 15			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• Panjang jalan ideal (m) • Panjang jalan existing (m)	lokasi bangunan hunian atau perumahan tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	18.325 – 1.223 = 17.102	Meter	5,73%	0
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Panjang jalan rusak (m)	Seluruh atau Sebagian jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan	71	Meter	0.38%	0
	Aspek Kondisi Jalan Lingkungan							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 15:

1. Persentase cakupan pelayanan jalan lingkungan dihitung terlebih dahulu Panjang jalan idealnya dengan rumus $\frac{\text{Luas Jalan Tidak Terlayani (M)}}{\text{Luas keseluruhan Kawasan Kumuh (Ha)}} \times \text{Panjang Jalan Eksisting}$ atau $\frac{92}{6,14} \times 1.223$ sehingga mempunyai nilai Panjang ideal yaitu 18.325 Meter lalu setelah itu dilanjutkan dengan rumus $\frac{\text{Panjang Jalan ideal (M)} - \text{Panjang Jalan Eksisting (M)}}{\text{Panjang Jalan Ideal (M)}} \times \text{luas keseluruhan kawasan kumuh} \times 100\%$ atau $\frac{18.325 - 1.223}{18.325} \times 6,14 \times 100\%$ sehingga menghasilkan persentase 5,73 %. Dan nilai cakupan pelayanan jalan lingkungan adalah “0” karena persentase berada dibawah klasifikasi parameter 25%.
2. Persentase kualitas permukaan jalan lingkungan dihitung dengan rumus $\frac{\text{Panjang Jalan Rusak}}{\text{Panjang Jalan ideal}} \times 100\%$ atau $\frac{71}{18.325} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 0.38%. Dan nilai kualitas permukaan jalan lingkungan adalah “0” karena persentase berada dibawah klasifikasi parameter 25 %

Tabel V. 17 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Jalan Lingkungan RW 16

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 16			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	• Panjang jalan ideal (m) • Panjang jalan existing (m)	lokasi bangunan hunian atau perumahan tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	64.151 – 2.238 = 61.913	Meter	5,92%	0
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Panjang jalan rusak (m)	Seluruh atau Sebagian jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan	617	Meter	0,96%	0
	Aspek Kondisi Jalan Lingkungan							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 16:

- Persentase cakupan pelayanan jalan lingkungan dihitung terlebih dahulu Panjang jalan idealnya dengan rumus

$$\frac{\text{Luas Jalan Tidak Terlayani (M)}}{\text{Luas keseluruhan Kawasan Kumuh (Ha)}} \times \text{Panjang Jalan Eksisting}$$

atau

$$\frac{176}{6.14} \times 2.238$$

sehingga mempunyai nilai Panjang jalan idealnya yaitu 64.151 meter lalu dilanjutkan dengan rumus

$$\frac{\text{Panjang Jalan ideal (M)} - \text{Panjang Jalan Eksisting (M)}}{\text{Panjang Jalan Ideal (M)}} \times \text{luas keseluruhan kawasan kumuh} \times 100\%$$

atau

$$\frac{64.151 - 2.238}{64.151} \times 6,14 \times 100\%$$

sehingga menghasilkan persentase 5.92 %. Dan nilai cakupan pelayanan jalan lingkungan adalah “0” karena persentase berada dibawah klasifikasi parameter 25%.
- Persentase kualitas permukaan jalan lingkungan dihitung dengan rumus

$$\frac{\text{Panjang Jalan Rusak}}{\text{Panjang Jalan ideal}} \times 100\%$$

atau

$$\frac{617}{64.151} \times 100$$

sehingga menghasilkan persentase 0.96 %. Dan nilai kualitas permukaan jalan lingkungan adalah “0” karena persentase berada dibawah klasifikasi parameter 25 %.

5.2.1.3 Kondisi Air Minum

Tabel V. 18 Nilai Hasil Numerik Aspek Kondisi Air Minum RW 15

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 15			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi Air Minum	Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa	4	KK	2,03%	0
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum cukup	kebutuhan air minum masyarakat mencapai minimal 30 liter/hari	100	KK	51%	3
	Aspek Kondisi Air Minum							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 15:

1. Data numerik ketersediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum adalah 4 dan 100 KK, dimasukan kedalam kolom volume.
2. Persentase ketersediaan akses aman air minum dihitung dengan rumus

$$\frac{\sum KK \text{ tidak terakses air minum aman}}{\sum KK \text{ keseluruhan}} \times 100\% \text{ atau } \frac{4}{197} \times 100 \text{ sehingga menghasilkan persentase 2.03\%}.$$

Dan nilai ketersediaan akses air minum adalah “0” karena persentase berada dibawah klasifikasi parameter 25%.
3. Persentase tidak terpenuhinya kebutuhan air minum dihitung dengan rumus

$$\frac{\sum KK \text{ tidak terakses air minum cukup}}{\sum KK \text{ keseluruhan}} \times 100\% \text{ atau } \frac{100}{197} \times 100 \text{ sehingga menghasilkan persentase 50.7\%}$$

dibulatkan menjadi 51 %. Dan nilai tidak terpenuhinya kebutuhan air minum adalah “3” karena persentase berada di antara klasifikasi parameter 51 % – 75 %.

Tabel V. 19 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Air Minum RW 16

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 16			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi Air Minum	Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum aman	masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa	8	KK	4,06%	0
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Jumlah KK tidak terakses air minum cukup	kebutuhan air minum masyarakat mencapai minimal 30 liter/hari	85	KK	43,1%	1
	Aspek Kondisi Air Minum							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 16:

1. Data Numerik ketersediaan akses aman air minum dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum adalah 8 dan 85 KK, dimasukan kedalam kolom volume.
2. Persentase ketersediaan akses aman air minum dihitung dengan rumus $\frac{\sum KK \text{ tidak terakses air minum aman}}{\sum KK \text{ keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{8}{197} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 4.06 %.
Dan nilai ketersediaan akses air minum adalah “0” karena persentase berada dibawah klasifikasi parameter 25%.
3. Persentase tidak terpenuhinya kebutuhan air minum dihitung dengan rumus $\frac{\sum KK \text{ tidak terakses air minum cukup}}{\sum KK \text{ keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{85}{197} \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 43.1%.
Dan nilai tidak terpenuhinya kebutuhan air minum adalah “1” karena persentase berada di antara klasifikasi parameter 25 % – 50 %.

5.2.1.4 Kondisi Drainase Lingkungan

Tabel V. 20 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Drainase Lingkungan RW 15

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 15			
					Volum e	Satuan	Perse n (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)	Sistem Saluran drainase tidak tersedia atau tidak terhubung dengan saluran lainnya yang menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	0	Ha	0	0
		Ketidaktersediaan Saluran Drainase	• Panjang drainase ideal (m) • Panjang drainase existing (m)	Sistem saluran pembuangan air hujan dan air limbah dibuang langsung ke drainase sekitar tidak ke saluran pembuangan yang seharusnya	8.208 – 504 = 7.704	Meter	5,76 %	0
		Kualitas Drainase	Panjang drainase yang buruk (m)	Kualitas konstruksi drainase buruk berupa galian tanah tanpa pelapis atau penutup beton	0	Meter	0	0
	Aspek Kondisi Drainase							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 15:

Persentase ketidaktersediaan drainase dihitung terlebih dahulu Panjang Drainase idealnya dengan rumus $\frac{\text{Panjang Drainase Eksisting}}{\text{Luas Keseluruhan Kawasan kumuh (Ha)}} \times 100\%$ atau $\frac{504}{6.14} \times 100\%$ lalu mendapatkan nilai Panjang drainase ideal sebesar 8.208 meter lalu dilanjutkan dengan rumus $\frac{\text{Panjang Drainase ideal (M)} - \text{Panjang Drainase Eksisting (M)}}{\text{Panjang Drainase Ideal (M)}} \times \text{luas kawasan kumuh} \times 100\%$ atau $\frac{8.208 - 504}{8.208} \times 6,14 \times 100\%$ sehingga menghasilkan persentase 5,76 %. dan nilai ketidaktersediaan drainase adalah “0” karena persentase berada dibawah klasifikasi parameter 25 %.

Tabel V. 21 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Drainase Lingkungan RW 16

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 16			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)	Sistem saluran drainase tidak tersedia atau tidak terhubung dengan saluran lainnya yang menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	0	Ha	0 %	0
		Ketidaktersediaan Saluran Drainase	• Panjang drainase ideal (m) • Panjang drainase existing (m)	Sistem saluran pembuangan air hujan dan air limbah dibuang langsung ke drainase sekitar tidak ke saluran pembuangan yang seharusnya	15.097 – 927 = 14.170	Meter	5,76%	0
		Kualitas Drainase	Panjang drainase yang buruk (m)	Kualitas konstruksi drainase buruk berupa galian tanah tanpa pelapis atau penutup beton	0	Meter	0	0
	Aspek Kondisi Drainase							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 16:

Persentase ketidaktersediaan drainase dihitung terlebih dahulu Panjang Drainase Idealnya dengan rumus $\frac{\text{Panjang Drainase Eksisting}}{\text{Luas Keseluruhan Kawasan kumuh (Ha)}} \times 100\%$ atau $\frac{927}{6.14} \times 100\%$ lalu mendapatkan nilai Panjang Drainase ideal sebesar 15.097 meter lalu dilanjutkan dengan rumus $\frac{\text{Panjang Drainase ideal (M)} - \text{Panjang Drainase Eksisting (M)}}{\text{Panjang Drainase Ideal (M)}} \times \text{luas kawasan kumuh} \times 100\%$ atau $\frac{2.073}{3.000} \times 6,14 \times 100$ sehingga menghasilkan persentase 5,76 %. dan nilai ketidaktersediaan drainase adalah “0” karena persentase berada dibawah klasifikasi parameter 25 %.

5.2.1.5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Tabel V. 22 Hasil Nilai Numerik Kondisi Pengelolaan Air Limbah RW 15

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan <i>Detail</i> <i>Baseline</i>	Kondisi Eksisting			
					RW 15			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai Keterangan	Saluran Pengelolaan air limbah tidak memiliki kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik secara individual maupun komunal terpusat	28	KK	26,90%	1
		Prasarana dan Sarana pengelolaan Air Limbah tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai Keterangan	Kondisi Sarpras pengelolaan air limbah terpusat atau setempat dengan yang lain contohnya wc umum dan kakus	76	KK	73 %	3
	Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 15:

1. Persentase sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai keterangan dihitung

dengan rumus $\frac{\sum \text{KK dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{28}{104} \times 100$ dan menghasilkan

persentase 26.9 %. Nilai sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai keterangan adalah “1” karena persentase diantara klasifikasi parameter 25 – 50%.

2. Persentase sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan

keterangan dihitung dengan rumus $\frac{\sum \text{KK dengan Sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$ atau

$\frac{76}{104} \times 100$ dan menghasilkan persentase 73 %. Nilai sarana prasarana pengelolaan

air limbah tidak sesuai dengan keterangan adalah “3” karena persentase di antara klasifikasi parameter 50 % - 75 %.

Tabel V. 23 Hasil Nilai Numerik Kondisi Pengelolaan Air Limbah RW 16

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan <i>Detail Baseline</i>	Kondisi Eksisting			
					RW 16			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai Keterangan	Saluran Pengelolaan air limbah tidak memiliki kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik secara individual maupun komunal terpusat	0	KK	0	0
		Prasarana dan Sarana pengelolaan Air Limbah tidak sesuai keterangan	Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai Keterangan	Kondisi Sarpras pengelolaan air limbah terpusat atau setempat dengan yang lain contohnya wc umum dan kakus	88	KK	94,60%	5
	Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 16:

Persentase sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan keterangan

dihitung dengan rumus $\frac{\sum \text{KK dengan Sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{88}{93} \times 100$ dan

menghasilkan persentase 94.6 %. Nilai sarana prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis adalah “5” karena persentase di antara klasifikasi parameter 75 % - 100 %.

5.2.1.6 Kondisi Pengelolaan Persampahan

Tabel V. 24 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan RW 15

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 15			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan Keterangan	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana sampah yang tidak sesuai Keterangan	Sarana dan prasarana Persampahan di Lokasi tidak tersedia dan tidak terpeliharanya gerobak sampah atau bak sampah	24	KK	23 %	0
		Sistem Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan Keterangan	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai Keterangan	Sistem Pengelolaan persampahan dengan cara di bakar dan tidak dipilah terlebih dahulu antara organik dan anorganik	80	KK	76,9 %	5
	Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 15:

1. Persentase Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan

keterangan dihitung dengan rumus $\frac{\sum \text{KK dengan Sarpras persampahan tidak sesuai keterangan}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{24}{104} \times 100$ dan menghasilkan persentase 23 %. Nilai prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan keterangan adalah “0” karena persentase dibawah klasifikasi parameter 25 %.

2. Persentase sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai keterangan dihitung

dengan rumus $\frac{\sum \text{KK dengan Sistem pengolahan sampah tidak sesuai keterangan}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{80}{104} \times 100$ dan menghasilkan persentase 75,9 %. Nilai sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan keterangan adalah “5” karena persentase diantara klasifikasi parameter 75 – 100 %.

Tabel V. 25 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan RW 16

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 16			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan Keterangan	Jumlah KK dengan prasarana dan sarana sampah yang tidak sesuai Keterangan	Sarana dan prasarana Persampahan di Lokasi tidak tersedia dan tidak terpeliharanya gerobak sampah atau bak sampah	60	KK	64,5 %	3
		Sistem Pengelolaan Persampahan tidak sesuai dengan Keterangan	Jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah tidak sesuai Keterangan	Sistem Pengelolaan persampahan dengan cara di bakar dan tidak dipilah terlebih dahulu antara organik dan anorganik	33	KK	35,4 %	1
	Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 16:

1. Persentase Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan

keterangan dihitung dengan rumus $\frac{\sum \text{KK dengan Sarpras persampahan tidak sesuai keterangan}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{60}{93} \times 100$ dan menghasilkan persentase 64,5 %. Nilai prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan keterangan adalah “3” karena persentase diantara klasifikasi parameter 50 – 75 %.

2. Persentase sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai keterangan dihitung

dengan rumus $\frac{\sum \text{KK dengan Sistem pengolahan sampah tidak sesuai keterangan}}{\sum \text{KK keseluruhan}} \times 100\%$ atau $\frac{33}{93} \times 100$ dan menghasilkan persentase 35,4 %. Nilai sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai dengan keterangan adalah “1” karena persentase diantara klasifikasi parameter 25 – 50%.

5.2.1.7 Kondisi Proteksi Kebakaran

Tabel V. 26 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran RW 15

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 15			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Proteksi Kebakaran	Prasarana Proteksi Kebakaran tidak tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)	Tidak Tersedianya Pasokan Air, akses jalan lingkungan, dan sarana komunikasi dalam memproteksi kebakaran	0	Unit	0	0
		Sarana Proteksi Kebakaran tidak Tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (unit)	tidak tersedianya APAR, Kendaraan Pemadam Kebakaran dan Mobil tangga sesuai kebutuhan	97	Unit	100%	5
	Aspek Proteksi Kebakaran							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 15:

1. Data Numerik prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia di RW 15 ini adalah 0 atau tidak ada dan untuk sarana proteksi kebakaran tidak tersedianya yaitu 97 Unit dimasukkan kedalam kolom Volume
2. Persentase dan Nilai pada prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia adalah “0”
3. Persentase sarana proteksi kebakaran tidak tersedia dihitung dengan rumus

$$\frac{\sum \text{Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (Unit)}}{\sum \text{Bangunan keseluruhan (Unit)}} \times 100\% \text{ atau } \frac{97}{97} \times 100 \text{ dan menghasilkan persentase } 100\%.$$

Nilai pada sarana proteksi kebakaran tidak tersedia ini adalah “5” karena persentase diantara klasifikasi parameter 75 % - 100 %.

Tabel V. 27 Hasil Nilai Numerik Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran RW 16

Variabel	Aspek	Kriteria	Baseline	Keterangan Detail Baseline	Kondisi Eksisting			
					RW 16			
					Volume	Satuan	Persen (%)	Nilai
Kondisi Sarana Prasarana	Proteksi Kebakaran	Prasarana Proteksi Kebakaran tidak tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran (unit)	Tidak Tersedianya Pasokan Air, akses jalan lingkungan, dan sarana komunikasi dalam memproteksi kebakaran	0	Unit	0	0
		Sarana Proteksi Kebakaran tidak Tersedia	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (unit)	tidak tersedianya APAR, Kendaraan Pemadam Kebakaran dan Mobil tangga sesuai kebutuhan	73	Unit	100%	5
	Aspek Proteksi Kebakaran							

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan RW 16:

1. Data Numerik prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia di RW 16 ini adalah 0 atau tidak ada dan untuk sarana proteksi kebakaran tidak tersedianya yaitu 73 Unit dimasukkan kedalam kolom Volume
2. Persentase dan Nilai pada prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia ini adalah “0” dikarenakan tidak ada atau tidak tersedia.
3. Persentase sarana proteksi kebakaran tidak tersedia dihitung dengan rumus
$$\frac{\sum \text{Bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran (Unit)}}{\sum \text{Bangunan keseluruhan (Unit)}} \times 100\% \text{ atau } \frac{73}{73} \times 100 \text{ dan menghasilkan persentase } 100\%.$$

Nilai pada sarana proteksi kebakaran tidak tersedia ini adalah “5” karena persentase diantara klasifikasi parameter 75 % - 100 %.

5.2.2 Status Legalitas Tanah

Di Kelurahan Ciamis khususnya kawasan permukiman kumuh barak ini semua legalitas tanahnya bersifat legal yang dimana tertera dalam SK Bupati Ciamis Nomor 593/Kpts.719- Huk/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Ciamis. Yang dimana dalam Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ciamis, Lokasi perencanaan ini berada pada zona peruntukan permukiman kepadatan sedang dan merupakan Kawasan Perkotaan Ciamis.

Berikut ini sebagaimana legalitas tanah dan legalitas status bangunan di Kawasan kumuh barak yaitu RW 15 dan RW 16:

Tabel V. 28 Kejelasan Status Tanah dan Status Bangunan di Kawasan Kumuh Barak

No	Lokasi Kumuh	Kejelasan Status Tanah		Kejelasan Status Bangunan			
		Legal	Ilegal	Bidang Terdaftar		Bidang Tidak Terdaftar	Total Status Bangunan
				Hak Milik	Hak Wakaf	Kosong	
1	RW 15	100%	-	93	-	4	97
2	RW 16	100%	-	61	6	6	73

Sumber: Hasil Analisis 2025

1. RW 15
 - Bidang Terdaftar atau memiliki tipe **Hak Milik** terdiri 93 Bangunan
 - Bidang Belum Terdaftar atau memiliki tipe **Kosong** terdiri dari 4 Bangunan.
 - Total keseluruhan bangunan yaitu 97 Bangunan
2. RW 16
 - Bidang Terdaftar atau memiliki tipe **Hak Milik** terdiri dari 61 Bangunan dan tipe **Hak Wakaf** terdiri dari 6 Bangunan
 - Bidang Belum Terdaftar atau memiliki tipe **Kosong** terdiri dari 6 Bangunan
 - Total keseluruhan bangunan yaitu 73 Bangunan

5.2.3 Pertimbangan Lain

Dalam Pertimbangan lain menjelaskan tentang nilai strategis Lokasi, kependudukan dan nilai sosial budaya ekonomi untuk lebih jelasnya yaitu dapat dilihat sebagai berikut ini:

5.2.3.1 Nilai Strategis Lokasi

Tabel V. 29 Hasil Nilai Strategis Lokasi

	Indikator	Kriteria	Nilai	Lokasi Kawasan Kumuh Barak RW 15 & 16
Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:	Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	5	
	1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau 2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota	Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota	1	√

Sumber: Hasil Analisis 2025 dan Revisi RTRW Kab Ciamis tahun 2017-2037 serta Lamp 2 Permen PUPR No 14 tahun 2018

Keterangan:

Di kawasan permukiman kumuh barak khususnya di RW 15 dan RW 16 dinyatakan dalam Revisi RTRW Kabupaten Ciamis 2017 – 2037 yaitu Lokasi ini tidak terletak pada fungsi Strategis Kabupaten/Kota. Namun dalam arahan rencana struktur ruang Kecamatan Ciamis Merupakan **Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)**.

Pusat Kegiatan Wilayah Promosi ini adalah Kawasan perkotaan yang dirancang untuk dipromosikan dan dikembangkan menjadi **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur diwilayah tersebut.

- Nilai Kawasan kumuh barak di RW 15 dan RW 16 adalah “1” dikarenakan Lokasi tersebut tidak terletak kedalam fungsi strategis kabupaten/kota.

5.2.3.2 Kependudukan

Di Kawasan permukiman kawasan kumuh barak ini memiliki jumlah penduduk sebesar 788 Jiwa/Orang, dengan jumlah KK sebanyak 197 KK. Rata – rata mata pencaharian penduduk yang berada di Kawasan permukiman kumuh barak ini berupa buruh harian lepas dan pekerja kantoran. Untuk lebih lengkapnya yaitu sebagai tabel berikut:

Tabel V. 30 Jumlah Kependudukan di Lokasi Kawasan Kumuh Barak

No	Kawasan Kumuh Barak	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	RW 15	2,62	416	104	158,7
2	RW 16	3,52	372	93	105,6
Jumlah		6,14	788	197	264,3

Sumber: Hasil Analisis 2025

Dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa RW 15 memiliki jumlah penduduk sekitar 416 Jiwa dengan total jumlah 104 Kartu Keluarga. Sedangkan RW 16 memiliki jumlah penduduk sekitar 372 Jiwa dengan totak jumlah 93 Kartu Keluarga.

Selanjutnya bahwa jumlah penduduk di RW 15 berada diantara 150 - 200 jiwa/ha yang dimana masuk ke kategori untuk kota sedang dan kota kecil yang kepadatannya mencapai 150 - 200 jiwa/ha. Untuk jumlah penduduk di RW 16 berada dibawah 150 jiwa/ha, yang dimana masuk ke kategori untuk rendah dengan kurang dari 150 jiwa/ha.

Tabel V. 31 Hasil Nilai Kependudukan

	Indikator	Kriteria	Nilai	Lokasi Kawasan Kumuh Barak	
				RW 15	RW 16
Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada Lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:	Untuk metropotan & kota besar - Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar >400 jiwa/ha	5		
	1. Rendah yaitu kepadatan penduduk dibawah 150 jiwa/ha.	Untuk kota sedang & kota kecil - Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar >200 jiwa/ha			
	2. Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha.	- Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar 151 – 200 jiwa/ha	3	√	
	3. Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha	- Kepadatan penduduk pada Lokasi sebesar <150 jiwa/ha	1		√
	4. Sangat padat yaitu kepadatan penduduk diatas 400 jiwa/ha.				

Sumber: Hasil Analisis 2025

Keterangan:

$$1. \text{ RW 15 : } \frac{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}{\text{Luas Wilayah}} = \text{Kepadatan Penduduk} = \frac{416}{2,62} = 158,7 \text{ jiwa/ha}$$

Oleh karena itu RW 15 masuk kedalam kategori Kepadatan penduduk sedang dengan klasifikasi diantara 150 – 200 jiwa/ha.

$$2. \text{ RW 16 : } \frac{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}{\text{Luas Wilayah}} = \text{Kepadatan Penduduk} = \frac{372}{3,52} = 105,6 \text{ jiwa/ha}$$

Oleh karena itu RW 16 masuk kedalam kategori Kepadatan penduduk rendah dengan klasifikasi dibawah 150 jiwa/ha.

5.2.4 Kesimpulan Tingkat Prioritas Kekumuhan Kawasan Kumuh Barak

Setelah seluruh hasil analisis dilakukan pada setiap variabel, berikut ini adalah hasil rekapitulasi atau hasil tabulasi dari jumlah nilai peraspek dan formulasi tingkatan dari setiap aspek, untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

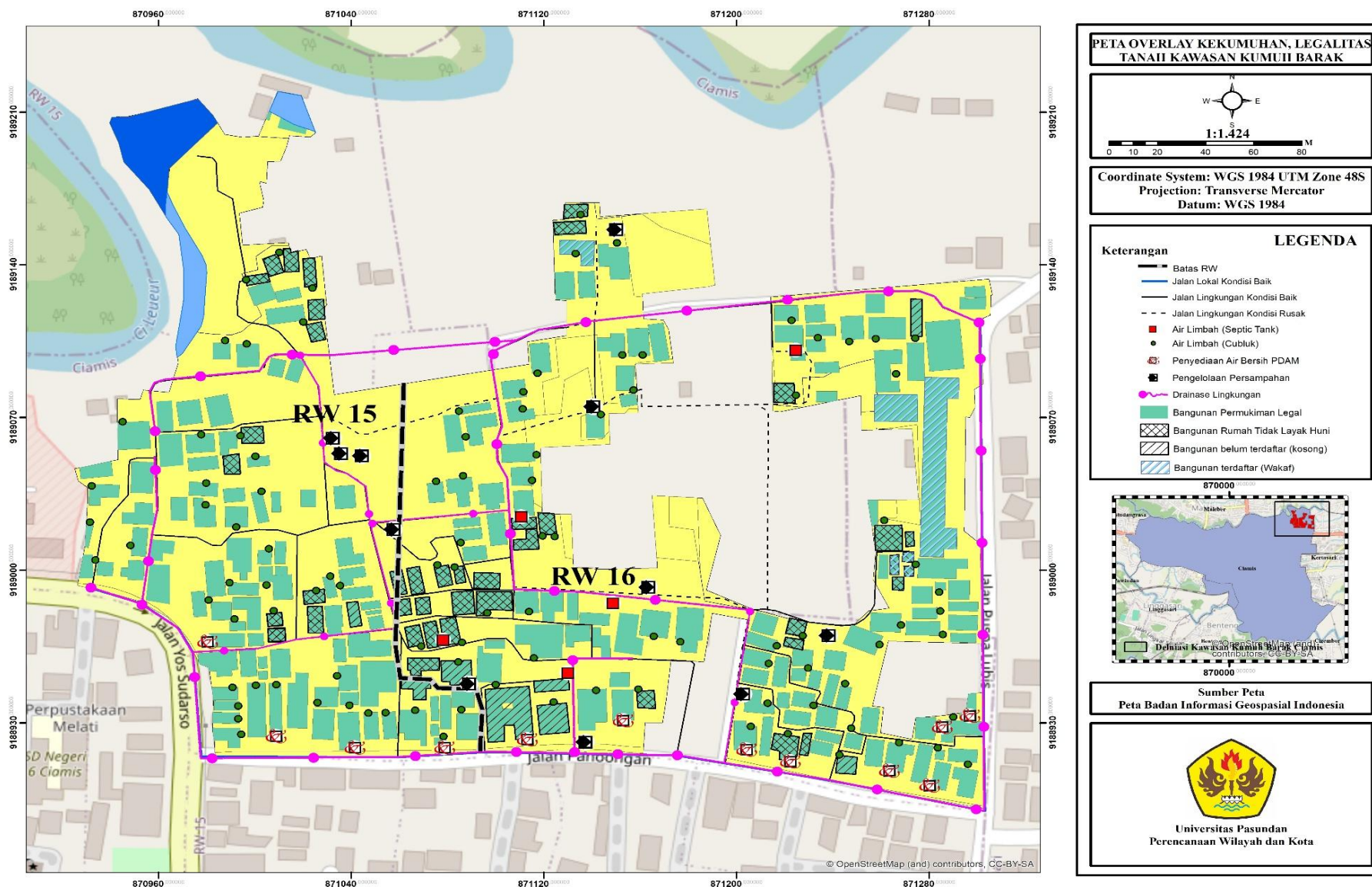
Tabel III. 18 Hasil Formulasi Tingkatan Prioritas

Nilai	Keterangan	Lokasi	
		RW 15	RW 16
Kondisi Kekumuhan			
60 - 80	Kumuh Berat		
38 - 59	Kumuh Sedang		
16 - 37	Kumuh Rendah	21	21
Legalitas Lahan			
(+)	Status lahan legal	√	√
(-)	Status ilegal		
Pertimbangan Lain			
11 - 15	Tinggi		
6 - 10	Sedang		
1 - 5	Rendah	4	2
Tingkat Prioritas		C5	

Sumber: Hasil Analisis 2025

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkatan prioritas di Kawasan kumuh barak ini berada di tingkat prioritas C5 yang berarti dengan kondisi kekumuhan kumuh rendah dengan nilai 21, legalitas lahannya bersifat legal dan pertimbangan lainnya berada di klasifikasi 1-5 yang berarti rendah.

Berikut ini Peta Overlay kondisi kekumuhan, legalitas lahan dan pola ruang sebagai berikut:



Gambar V. 20 Peta Overlay Kondisi Kekumuhan, Legalitas Tanah dan Pola Ruang di Kawasan Kumuh Barak

5.2.5 Perbandingan Tingkat Kekumuhan Hasil Analisis dengan SK Kumuh

Tabel V. 28 Perbandingan Tingkat Kekumuhan Hasil Analisis dengan SK Kumuh

No	Nama Lokasi	Luas (Ha)	Lingkungan Administratif				Kependudukan		Kekumuhan		Pertimbangan Lain		Legalitas Tanah	Prioritas	
			RW	RT	Desa/Kel	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan	Nilai	Tingkat	Nilai	Tingkat			
1	Barak SK Kumuh	0,75	15	001	Ciamis	Ciamis	102	136,00	24	Kumuh Rendah	11	Tinggi	Legal	C1	3
		1,4		002	Ciamis	Ciamis	131	93,57	26	Kumuh Rendah	11	Tinggi	Legal	C1	3
		0,47		003	Ciamis	Ciamis	78	165,96	22	Kumuh Rendah	11	Tinggi	Legal	C1	3
		2,07	16	001	Ciamis	Ciamis	135	65,22	37	Kumuh Rendah	11	Tinggi	Legal	C1	3
		1,45		004	Ciamis	Ciamis	111	76,55	33	Kumuh Rendah	11	Tinggi	Legal	C1	3
1	Barak Hasil Analisis Lapangan	2,62	15	3	Ciamis	Ciamis	416	158,78	21	Kumuh Rendah	4	Rendah	Legal	C5	9
		3,52	16	2	Ciamis	Ciamis	372	105,68	21	Kumuh Rendah	2	Rendah	Legal	C5	9

Sumber: Hasil Analisis 2025

Dalam tabel diatas terdapat perbedaan yaitu dalam tingkatan prioritas yang dimana dalam SK kumuh itu prioritasnya di klasifikasi C1 dengan nomor prioritas ke 3 sedangkan hasil analisis yang penulis kerjakan itu prioritas klasifikasinya berada di C5 dengan nomor prioritas ke 9 yang berarti prioritas penangannya rendah.

5.3 Rencana Hasil Arahkan Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Ciamis

Dalam rencana hasil arahan penanganan ini kawasan kumuh barak di Kelurahan Ciamis termasuk kedalam tipe klasifikasi C5 prioritas ke 9 yang berarti tipe penanganannya yaitu pemugaran, dikarenakan memiliki tingkatan kumuh rendah, berdasarkan sumber rekomendasi penanganan menurut Kementrian PUPR Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang berjudul Indikator dan Penanganan Kawasan Padathuni-Kumuh.

Dalam model penentuan Tingkat Kekumuhan dan cara penanganannya yaitu lokasi kajian kawasan kumuh barak ini termasuk kedalam tipologi kawasan padathuni-kumuh dengan tindak penanganan PHKP tahap Embrio di kawasan legal/*slum*. Namun untuk studi ini tidak membahas kumuh yang bertipe Ilegal/*squatter* atau yang bisa disebut permukiman yang dibangun dilahan ilegal atau tanpa izin. Selanjutnya dengan upaya **PREVENTIF** penanganan PHKP tahap **Embrio** ini yaitu pencegahan lingkungan hunian padathuni-kumuh yang baru tumbuh (tahap embrio) menjadi berkembang/ekspansif secara informal di zona peruntukan permukiman

Preventif disini meliputi pengawasan terhadap pembangunan dan permukiman agar tidak terjadi ketidakteraturan dan kepadatan yang berlebihan, selain itu pencegahan juga dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat agar mereka mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk menjaga lingkungan permukiman tetap sehat dan tertib. Kegiatan yang termasuk dalam preventif adalah pemantauan kondisi permukiman, sosialisasi aturan, penegakan hukum, dan peningkatan kualitas sarana prasarana yang dapat menunjang kehidupan layak huni.

Tahapan dan rumus penanganan preventif tahap embrio yaitu sebagai berikut:

$$\text{TRGL} \rightarrow \text{PT} + \text{L} \rightarrow \text{PSU 1} + \text{PSU 2}$$

Keterangan :

TRGL : Tata Ruang dan Guna Lahan

PT : Penataan Tanah

L : Legalitas

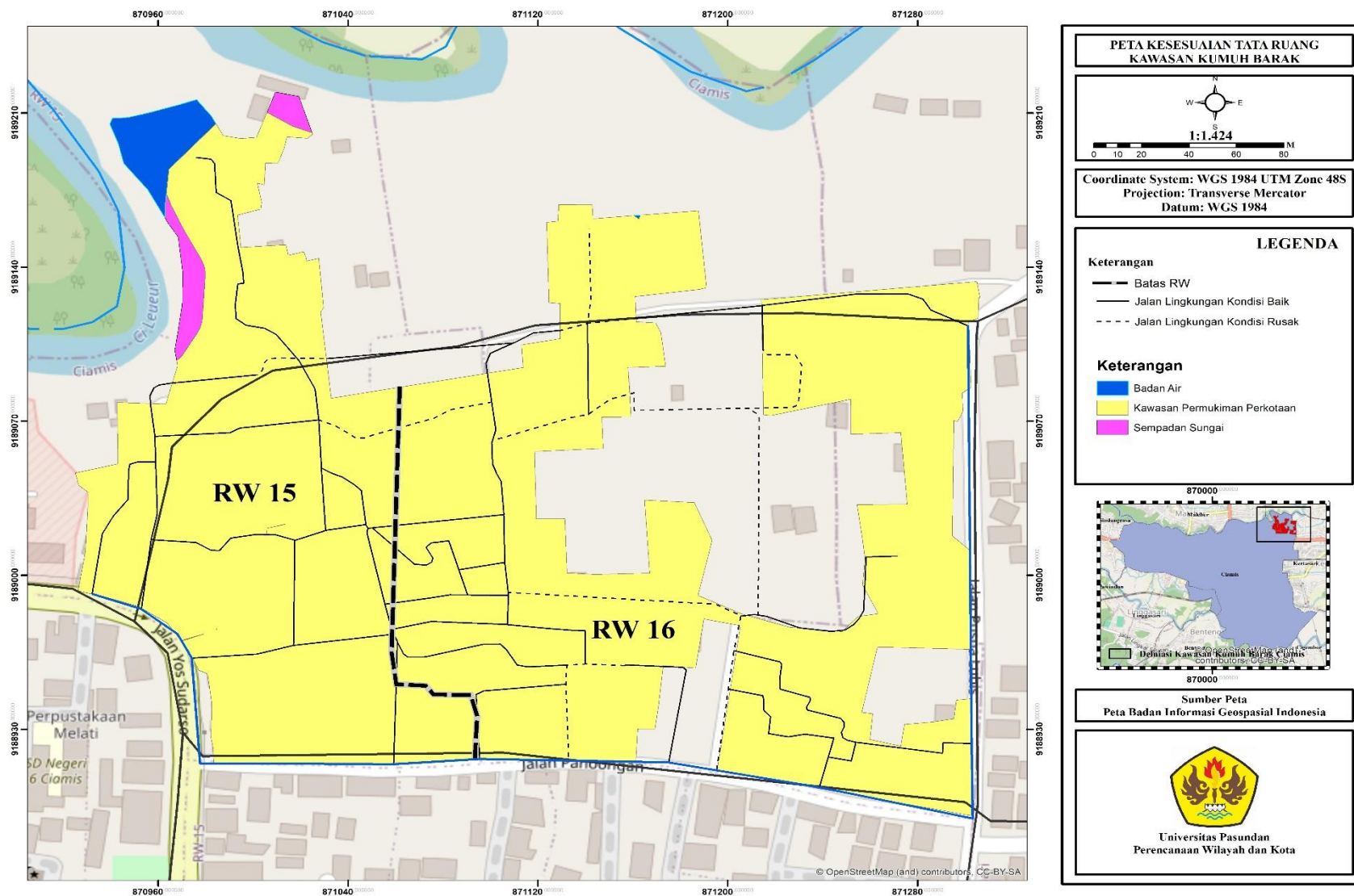
PSU 1 : Prasarana dan Utilitas

PSU 2 : Perumahan dan Sarana Lingkungan

5.3.1 Tata Ruang dan Guna Lahan

- Penegasan aturan pembangunan rumah di perkotaan pada penghuni, berikut konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan
- Penegasan dan penegakan hukum garis sempadan sebagai zona aman dan harus bebas bangunan
- Pembangunan *buffer zone* berupa jalur inspeksi, jalur hijau / biru (*green blue belt*) pada garis sempadan (pantai, sungai, jalan, rel KA, dan sebagainya) yang tidak boleh dijadikan area hunian.
- Pengawasan berkala pertumbuhan penggunaan dan pembangunan lahan untuk tidak melebihi ambang batas daya dukung dan melanggar persyaratan pembangunan rumah (administrasi, ekologis, teknis)
- Penegakan hukum penerapan NSPK tata ruang dan peruntukan lahan

Dalam tata ruang dan guna lahan di Kawasan kumuh barak ini dimana melihat dari peta kesesuaian rencana tata ruang yaitu sudah sesuai dengan peruntukannya dikarenakan khususkan untuk Kawasan permukiman perkotaan. Berikut ini peta kesesuaian pemanfaatan ruang:



Gambar V. 21 Peta Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kawasan Kumuh Barak

5.3.2 Penataan Tanah dan Legalitas

- Penegasan batas kawasan peruntukan perumahan dan penataan kembali batas-batas kavling sesuai daya tampung populasi pada kawasan tersebut.
- Pengendalian perkembangan pemanfaatan tanah kavling oleh penghuni
- Program pembangunan
 - a. Pembangunan kembali lokasi perumahan melalui perbaikan setempat
 - b. Program pembangunan baru tatanan perumahan menggunakan *Guided Land Development, Site Services* dan kasiba lisiba dengan tanah matang

Berikui ini penataan tanah yang memiliki tanah milik siapa di Kawasan kumuh barak ini:

RW 15

- Bidang Terdaftar atau memiliki tipe **Hak Milik** terdiri 93 Bangunan
- Bidang Belum Terdaftar atau memiliki tipe **Kosong** terdiri dari 4 Bangunan.
- Total keseluruhan bangunan yaitu 97 Bangunan

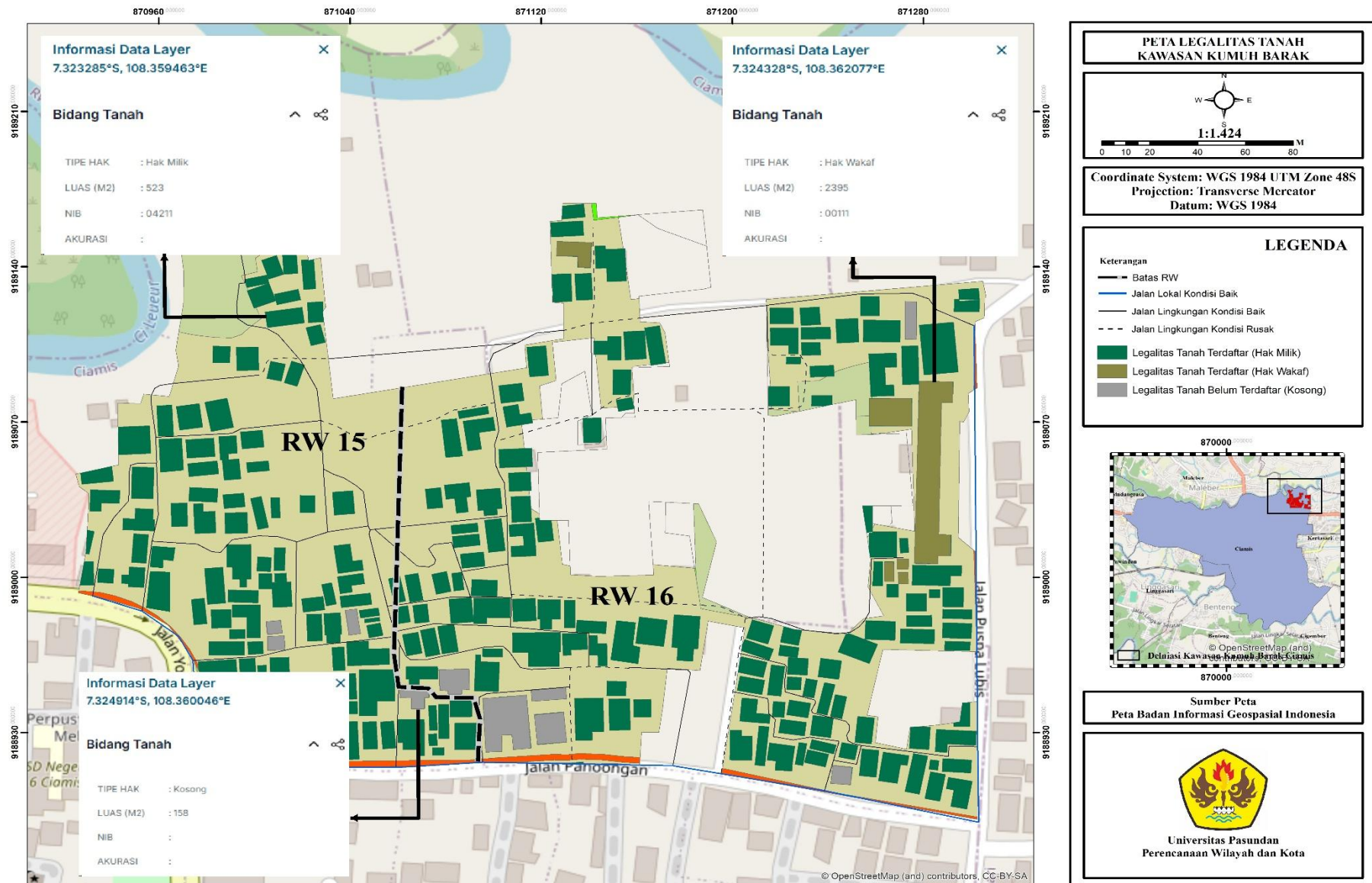
RW 16

- Bidang Terdaftar atau memiliki tipe **Hak Milik** terdiri dari 61 Bangunan dan tipe **Hak Wakaf** terdiri dari 6 Bangunan
- Bidang Belum Terdaftar atau memiliki tipe **Kosong** terdiri dari 6 Bangunan
- Total keseluruhan bangunan yaitu 73 Bangunan

RW 15 & 16

- Total bangunan bidang terdaftar dengan tipe hak milik dan hak wakaf terdiri dari **160** bangunan
- Total bangunan tidak terdaftar dengan tipe kosong terdiri dari **10** bangunan
- Total keseluruhan bangunan yaitu 170 Bangunan

Berikut ini peta legalitas tanah dalam bidang penataan tanah:



Gambar V. 22 Peta Legalitas Lahan dalam Bidang Penataan Tanah

Legalitas di Kawasan kumuh barak ini berdasarkan observasi lapangan dengan cara (by name by address)

- Peningkatan legalitas kependudukan dengan menerbitkan KTP tetap dan KTP sementara
- Pengendalian migran (KTP sementara)
- Penyederhanaan administrasi pertanahan untuk memperoleh legalitas hasil penataan tanah yang dilaksanakan melalui *Landsharing* (LS) atau Konsolidasi tanah (KT)

Berikut ini sebagian gambar yang menunjukkan photo rumah warga dengan nama, NIK dan keterangan tanahnya yaitu sebagai berikut:

Tabel V. 29 Sebagian Contoh Legalitas (*By Name By Address*) di Kawasan Kumuh Barak

	Nining Rismalaningsih, Wahyat (2kk 1 rumah) Rt02 Rw015 NIK: 3207015708410001(Nining) NIK: 3278081305670005(Wahyat) Tanah Milik Pribadi
	Yuyun Sunarya, Dede Ramdani (2kk 1 Rumah) Rt02 Rw015 NIK: 3207011612670002(Yuyun) NIK: 3207012203930004 (Dede) Tanah Milik Pribadi
	Adong Suherli Rt02 Rw015 NIK: 3207010404420001 Tanah Milik Pu

Sumber: Hasil Observasi dan Analisis 2025

5.3.3 PSU 1 + PSU 2 (Pembangunan Prasarana dan Utilitas) + (Pembangunan Perumahan dan Sarana Lingkungan Perumahan)

Tahapan PSU 1 + PSU 2 menurut sumber Kementrian PUPR Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang berjudul Indikator dan Penanganan Kawasan Padathuni-Kumuh yaitu:

- Implementasi prasyarat pranata pembangunan prasarana dan prasarana perumahan
- Rehabilitasi peningkatan prasarana (infrastruktur) perumahan
- Sosialisasi dan penyiapan SDM untuk pemeliharaan prasarana dan sarana terbangun
- Rehabilitasi dan penyediaan hunian yang layak huni

Dikawasan kumuh barak ini untuk prasarana dan sarana lingkungannya terbilang baik, namun ada beberapa yang harus perlu diperhatikan seperti kondisi bangunan hunian ada yang tidak layak huni baik itu di RW 15 maupun RW 16, lalu ada penyediaan air minum / bersih yang harus ada jalur penampungan air seperti toren dengan jalur pemipaan dari sumur galian, pengelolaan air limbah yang harus diperhatikan dengan mengadakan IPAL berbasis SANIMAS (sanitasi berbasis masyarakat). Pengelolaan persampahan harus diadakannya TPS 3R dengan penunjang gerobak sampah di setiap RW agar memudahkan pada saat pengambilan sampah tersebut, dan harus adanya alat penyediaan proteksi kebakaran seperti APAR (alat pemadam api ringan) baik itu perwakilan RW atau RT yang dimana tercantum dalam sumber pedoman. Untuk drainase terbilang baik dikarenakan hampir semua drainase baik yang tertutup maupun terbuka itu dilapisi dengan semen atau turap berbentuk U, untuk jalan lingkungan diperlukannya perbaikan untuk jalan yang rusak dan mengecor jalan yang masih menggunakan tanah, agar masyarakat dapat menikmati fasilitas yang baik.

Berikut ini tabel lengkap terkait kondisi di kawasan kumuh barak dengan **arahan penanganan** serta ada acuan / pedoman yang dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

Tabel V. 30 Arahan Penanganan di Kawasan Kumuh Barak

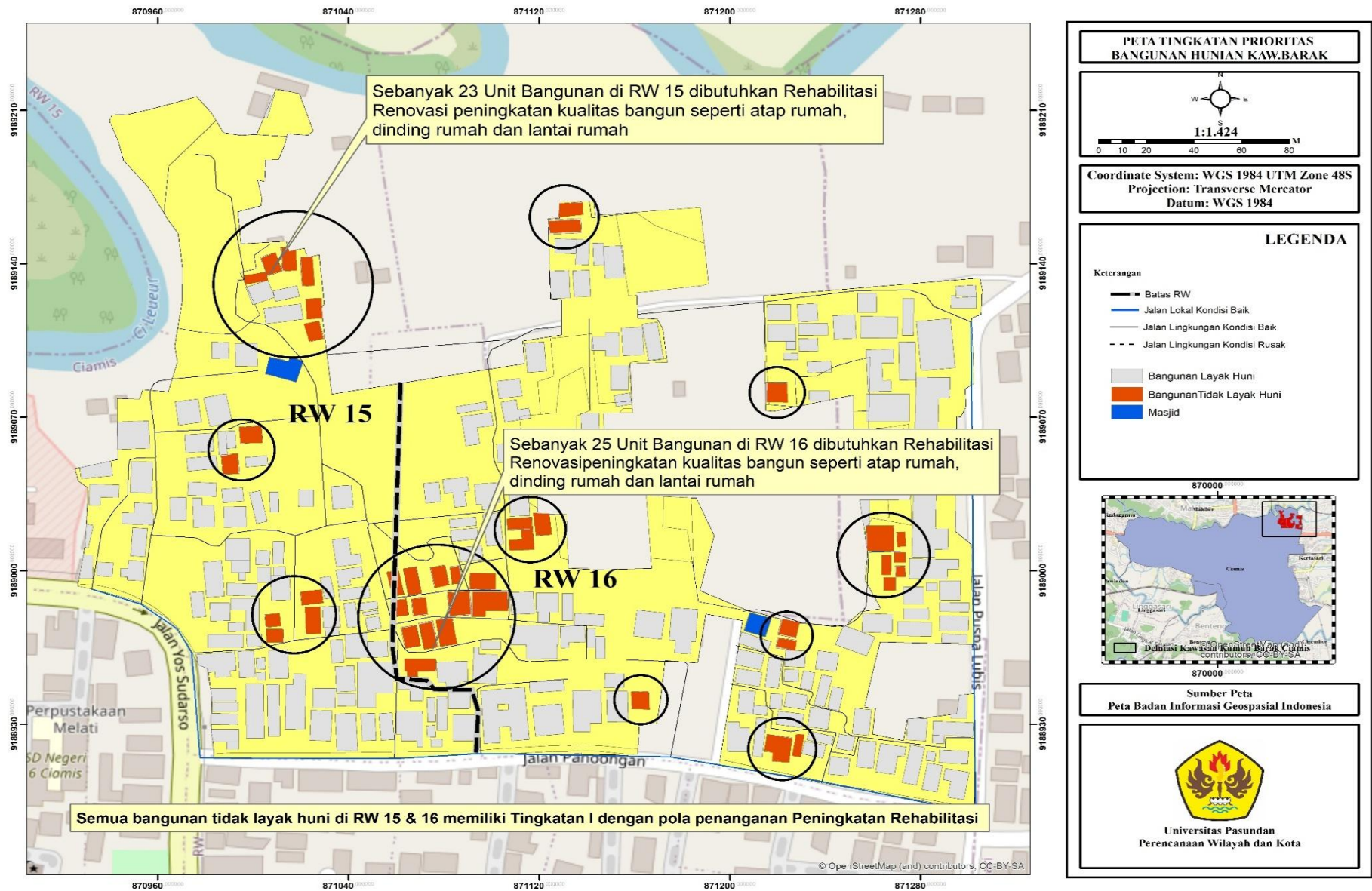
Lokasi Kawasan	Aspek	Keterangan	Peningkatan	Dimensi	Detail Jenis Penanganan	Sumber Acuan/Pedoman
RW 15	Bangunan Hunian	bangunan tidak sesuai dengan ketentuan kualitas (RTLH)	Rehabilitasi kualitas bangunan agar fungsi dan masa bangunan sesuai dengan kondisi yang diharapkan	Sebanyak 23 Unit Bangunan Renovasi	Perbaikan Rumah tidak layak huni (RTLH) seperti kondisi atap rumah rusak, dinding memakai kayu dan jenis lantai masih rumah panggung dan berupa tanah	Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat
	Penyediaan Air Minum / Bersih	tidak terpenuhinya kebutuhan air minum / bersih cukup	Rehabilitasi pengelolaan unit air minum seperti penyediaan sistem jaringan perpipaan pada PDAM ke Terminal Air lalu disalurkan kesetiap rumah warga yang kekurangan kebutuhan air minum	Sebanyak 10 titik Terminal air (Toren Air) untuk 100 KK dengan sistem jaringan perpipaan	Penyediaan sistem jaringan perpipaan untuk mengambil sumber air dari sumur galian dengan tersedianya terminal air (toren air) yang dilengkapi pemompaan sesuai dengan persyaratan klasifikasi pedoman teknis no 9 tahun 2005 tentang (PAM BM)	- Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, - Buku Saku Petunjuk Penyediaan Air Minum - Pedoman Teknis No 9 Tahun 2005 tentang penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAM BM)
	Pengelolaan Air Limbah	sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai dengan keterangan	Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah seperti penyediaan komponen pada SPAL-Terpusat skala permukiman dengan sistem SANIMAS dan Memelihara serta merawat dan menjaga Sarana Prasarana Umum	Sebanyak 28 KK Penyediaan sistem pengelolaan saluran air limbah	Penyediaan IPAL-Terpusat dengan sistem perpipaan yang menghubungkan langsung ke rumah masyarakat dengan filterisasi limbah grey water (air bekas mandi, dapur, cucian) dan black water (urin, kloset) sesuai dengan standar persyaratan IPAL (ukuran perpipaan dan tangki septik)	Kementrian PUPR DPPLP tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - Terpusat Skala Permukiman dan Buku Saku Petunjuk Kontruksi SANITASI
		terdapat sarana prasarana pengelolaan air limbah		Sebanyak 76 KK Sarana dan Prasarana pengelolaan air limbah	Memperbaiki, merawat dan menjaga sarana prasarana setempat untuk meningkatkan kualitas sarpras pengelolaan air limbah	

Lokasi Kawasan	Aspek	Keterangan	Peningkatan	Dimensi	Detail Jenis Penanganan	Sumber Acuan/Pedoman
	Pengelolaan Persampahan	sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan keterangan	Rehabilitasi penyediaan pengelolaan persampahan dengan pengambilan sampah yang sudah di kumpulkan di gerobak sampah bersekat ke TPS 3R	1 titik TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Dan 3 titik gerobak sampah bersekat	Penyediaan gerobak sampah bersekat di tiap RT. Dan penyediaan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan klasifikasi pengelolaan 1 RW didalamnya berjumlah 2.500 jiwa (-+ 500 rumah) dan klasifikasi TPS 1 dilengkapi dengan ruang pemilahan, gudang, tempat pemindahan sampah	SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman
	Proteksi Kebakaran	ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Rehabilitasi penyediaan unit proteksi kebakaran seperti tersedianya alat pemadam api ringan	1 titik unit proteksi kebakaran dengan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL)	Penyediaan Proteksi Kebakaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berbasis peran masyarakat sarana didalamnya berisikan (APAR, pompa jinjing, slang kebakaran 1.5 m minimal 200 meter)	Permen PU No 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan bagian Bab II sub bab bagian 6
	Jalan Lingkungan	kualitas permukaan jalan yang rusak	Pemeliharaan dengan cara memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi agar tetap berfungsi normal dan tahan lama pada infrastruktur tersebut	71 meter	memperbaiki permukaan jalan yang rusak dengan cara menambal atau mengecor jalan yang rusak sesuai dengan persyaratan umum prasarana bagian jalan lingkungan	SNI 03-6967-2003 tentang Persyaratan Umum Sistem Jaringan dan Geometrik Jalan Perumahan
	Drainase Lingkungan	kualitas drainase lingkungan	Pemeliharaan dengan cara merawat dan menjaga agar tetap berfungsi optimal pada infrastruktur tersebut	-	Merawat dan menjaga kondisi drainase lingkungan yang sudah ada sesuai dengan persyaratan umum prasarana bagian drainase lingkungan	

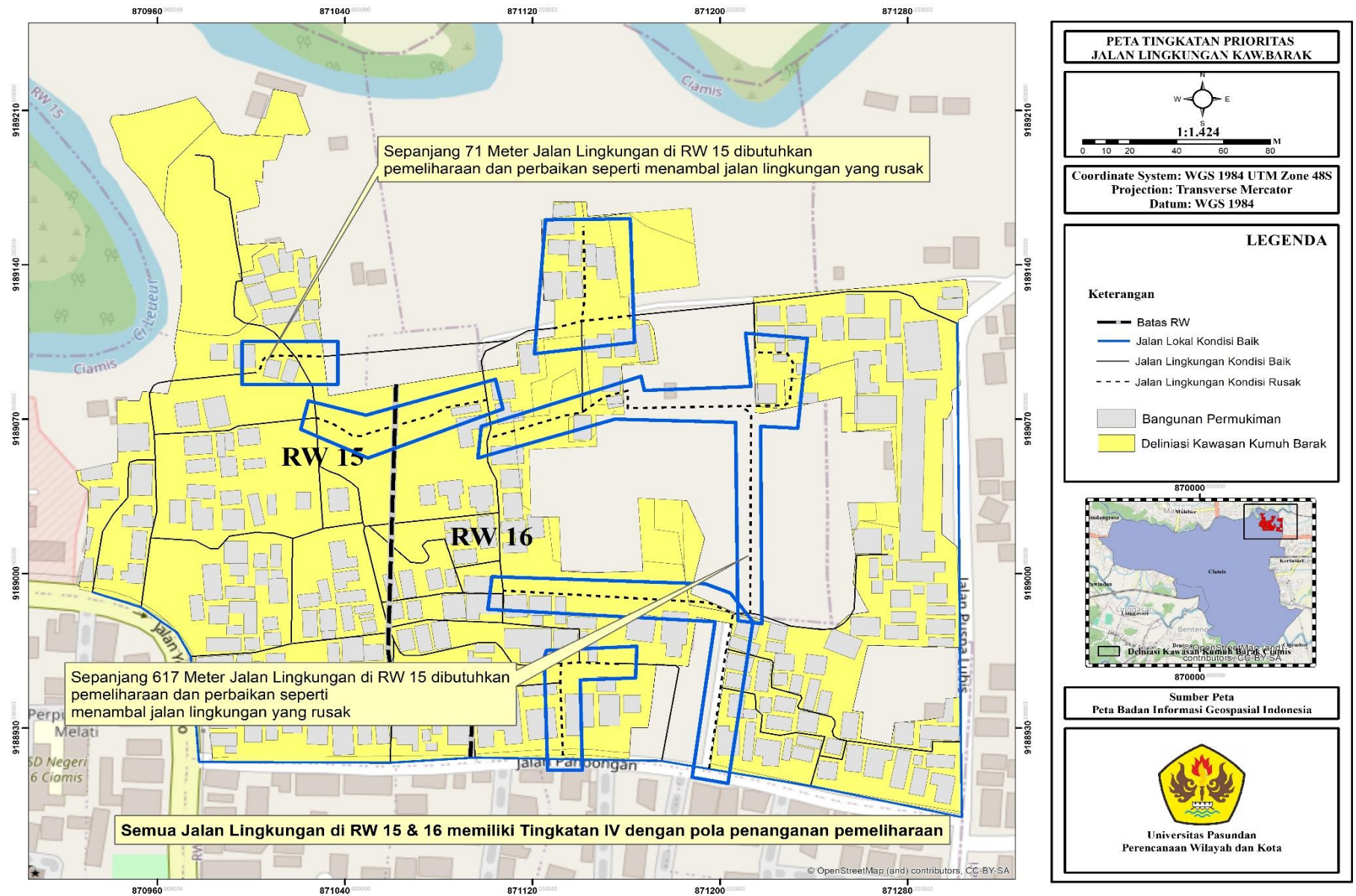
Lokasi Kawasan	Aspek	Keterangan	Peningkatan	Dimensi	Detail Jenis Penanganan	Sumber Acuan/Pedoman
RW 16	Bangunan Hunian	bangunan tidak sesuai dengan ketentuan kualitas (RTLH)	Rehabilitasi kualitas bangunan agar fungsi dan masa bangunan sesuai dengan kondisi yang diharapkan	Sebanyak 25 Unit Bangunan Renovasi	Renovasi Rumah tidak layak huni (RTLH) seperti kondisi atap rumah rusak, dinding memakai kayu dan jenis lantai masih rumah panggung dan berupa tanah	Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah No. 403/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat
	Pengelolaan Air Limbah	terdapat sarana prasarana pengelolaan air limbah terpusat atau setempat	Rehabilitasi kualitas unit pengelolaan air limbah seperti memperbaiki, merawat dan menjaga sarana prasarana pengelolaan air limbah setempat	Sebanyak 88 KK Sarana dan Prasarana pengelolaan air limbah	Memperbaiki, merawat dan menjaga sarana prasarana setempat untuk meningkatkan kualitas sarpras pengelolaan air limbah	Kementrian PUPR DPPLP tentang Buku Saku Petunjuk Kontruksi SANITASI
	Pengelolaan Persampahan	sarana dan prasarana tidak tersedia dan tidak terpelihara	Rehabilitasi penyediaan unit pengelolaan persampahan dengan menyediakan gerobak sampah bersekat	Sebanyak 2 titik gerobak sampah bersekat	Penyediaan Tempat Pembuangan Sampah dengan gerobak pengangkut sampah agar mudah diangkut ke TPS 3R setempat serta memelihara, merawat dan menjaga sarpras tersebut	SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman
		sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan keterangan	Rehabilitasi penyediaan unit pengelolaan persampahan dengan tipe TPS 1	1 titik TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Penyediaan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan klasifikasi pengelolaan 1 RW didalamnya berjumlah 2.500 jiwa (-+ 500 rumah) dan klasifikasi TPS 1 dilengkapi dengan ruang pemilahan, gudang, tempat pemindahan sampah	

Lokasi Kawasan	Aspek	Keterangan	Peningkatan	Dimensi	Detail Jenis Penanganan	Sumber Acuan/Pedoman
	Proteksi Kebakaran	ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran	Rehabilitasi penyediaan unit proteksi kebakaran seperti tersedianya alat pemadam api ringan	1 titik unit proteksi kebakaran dengan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL)	Penyediaan Proteksi Kebakaran Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berbasis peran masyarakat sarana didalamnya berisikan (APAR, pompa jinjing, slang kebakaran 1.5 m minimal 200 meter)	Permen PU No 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan bagian Bab II sub bab bagian 6
	Penyediaan Air Minum / Bersih	tidak terpenuhinya kebutuhan air minum / bersih cukup	Rehabilitasi pengelolaan unit air minum seperti penyediaan sistem jaringan perpipaan pada PDAM ke Terminal Air	Sebanyak 9 titik Terminal air (Toren Air) untuk 85 KK dengan sistem jaringan perpipaan	Penyediaan sistem jaringan perpipaan untuk mengambil sumber air dari sumur galian dengan tersedianya terminal air (toren air) yang dilengkapi pemompaan sesuai dengan persyaratan klasifikasi pedoman teknis no 9 tahun 2005 tentang (PAM BM)	- Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, - Buku Saku Petunjuk Penyediaan Air Minum Pedoman Teknis No 9 Tahun 2005 tentang penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAM BM)
	Jalan Lingkungan	kualitas permukaan jalan yang rusak	Pemeliharaan dengan cara memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi agar tetap berfungsi normal dan tahan lama pada infrastruktur tersebut	617 meter	memperbaiki permukaan jalan yang rusak dengan cara menambal atau mengecor jalan yang rusak sesuai dengan persyaratan umum prasarana bagian jalan lingkungan	SNI 03-6967-2003 tentang Persyaratan Umum Sistem Jaringan dan Geometrik Jalan Perumahan
	Drainase Lingkungan	kualitas drainase lingkungan	Pemeliharaan dengan cara merawat dan menjaga agar tetap berfungsi optimal pada infrastruktur tersebut	-	Merawat dan menjaga kondisi drainase lingkungan yang sudah ada sesuai dengan persyaratan umum prasarana bagian drainase lingkungan	

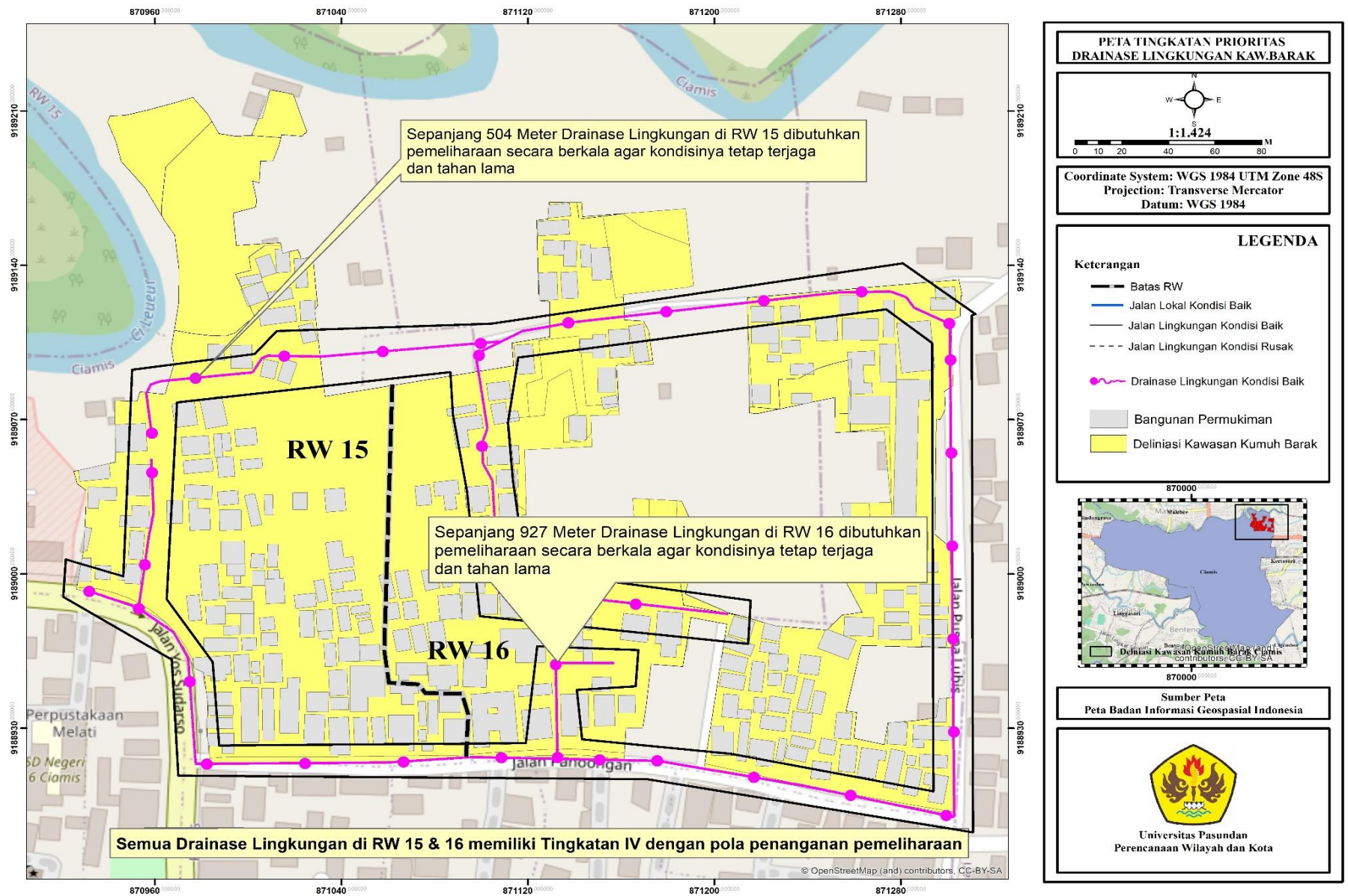
Sumber: Hasil Analisis 2025



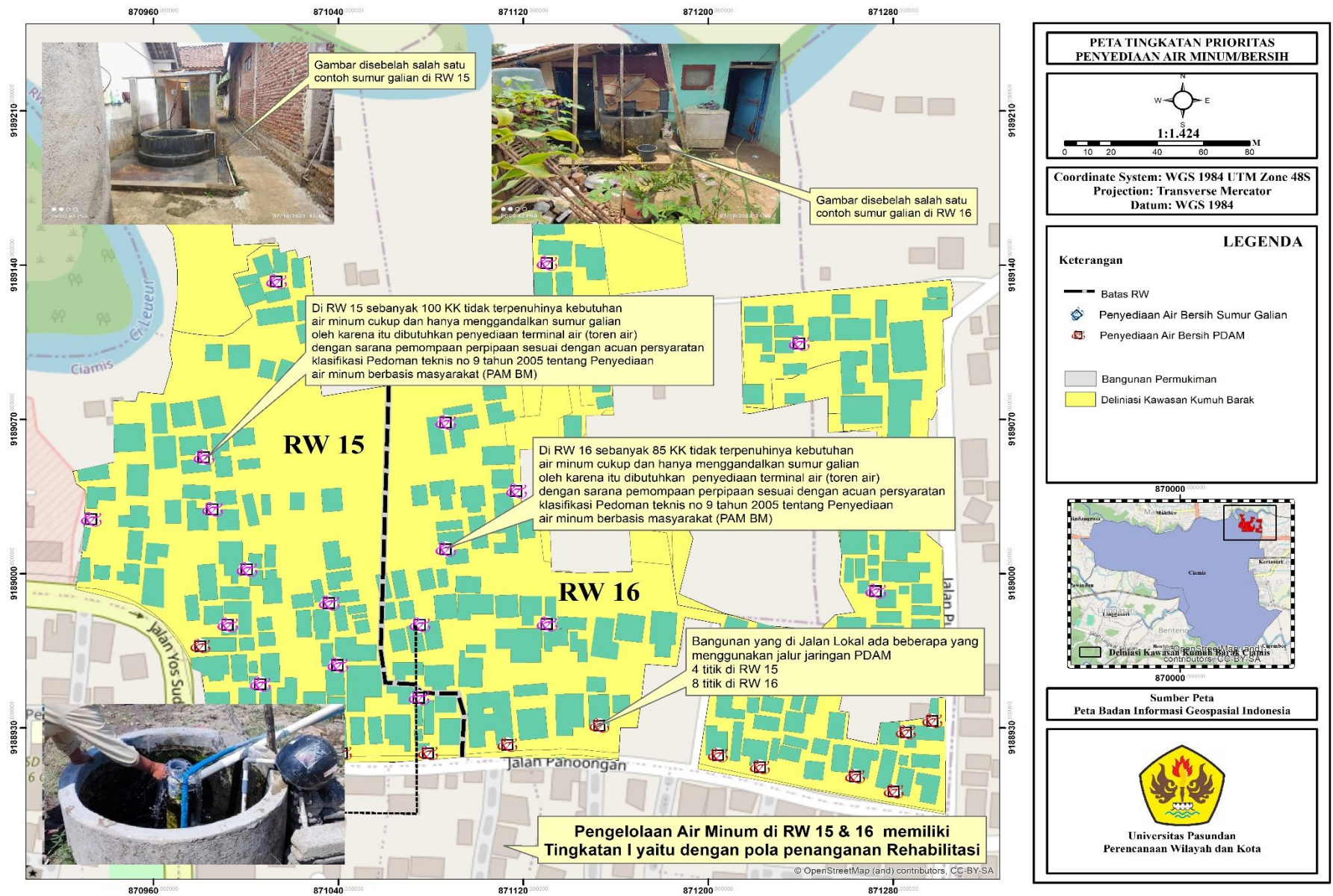
Gambar V. 23 Peta Arah Penanganan Bangunan Hunian di Kawasan Kumuh Barak



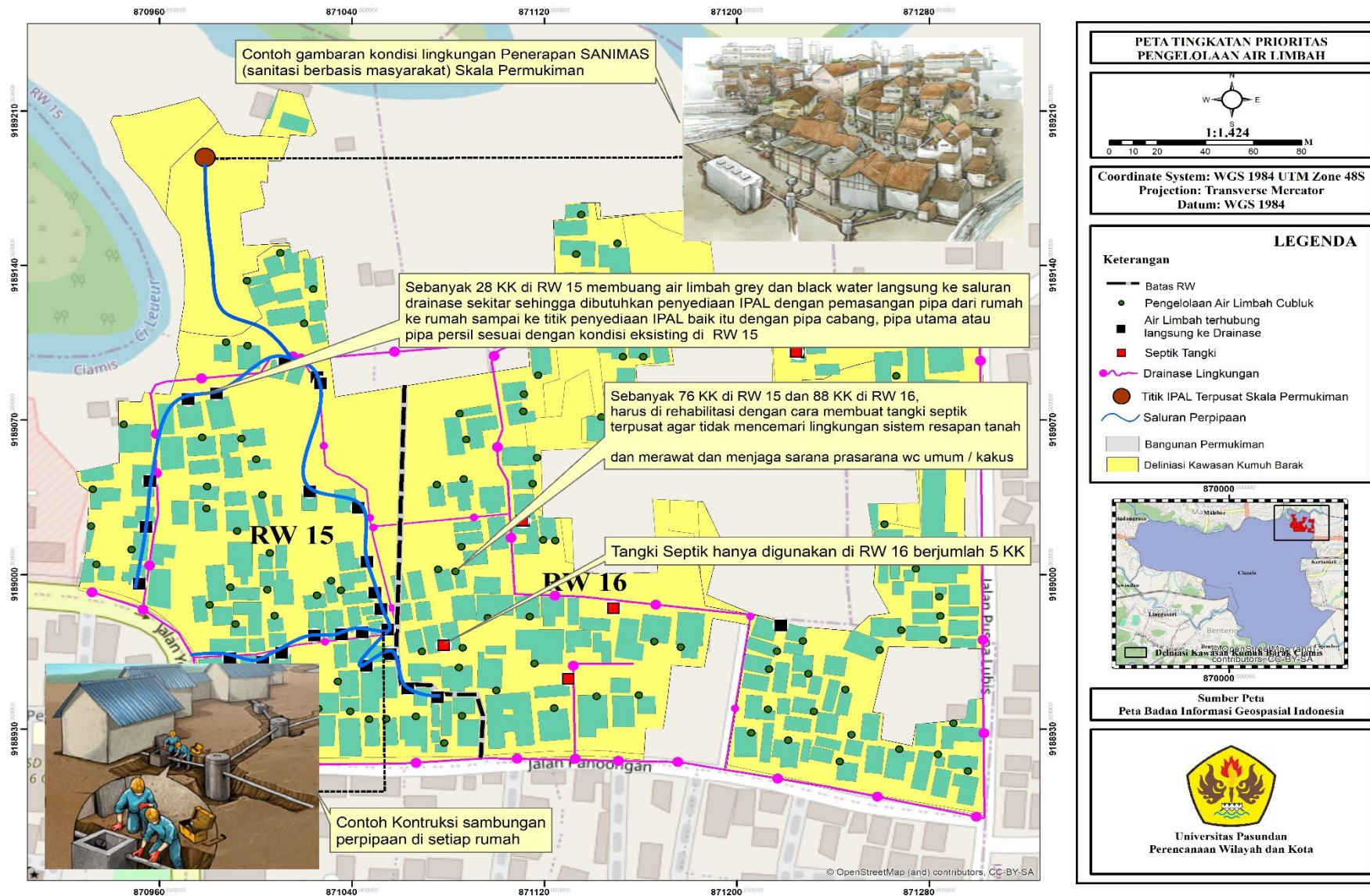
Gambar V. 24 Peta Arah Penanganan Jalan Lingkungan di Kawasan Kumuh Barak



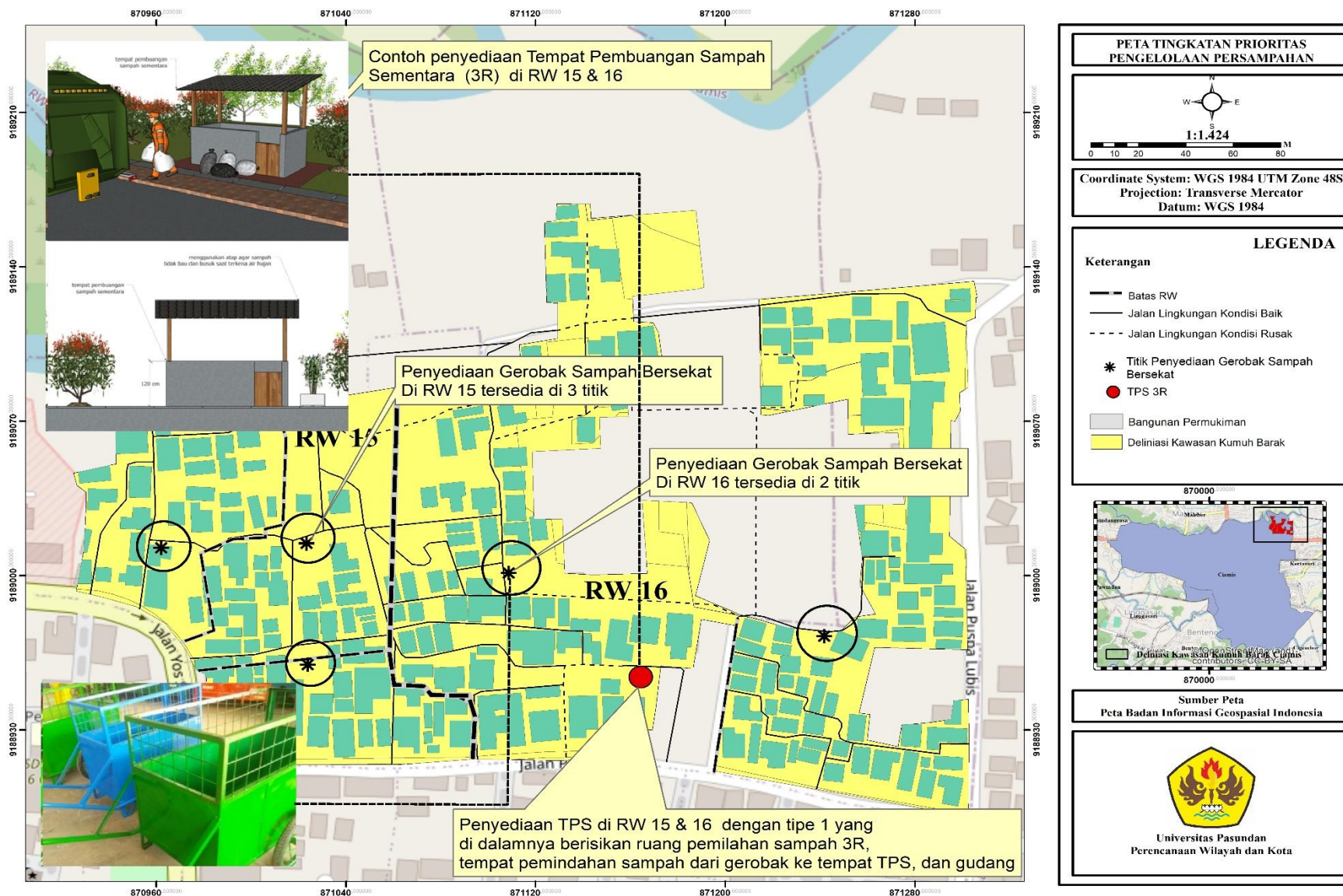
Gambar V. 25 Peta Arah Penanganan Drainase Lingkungan di Kawasan Kumuh Barak



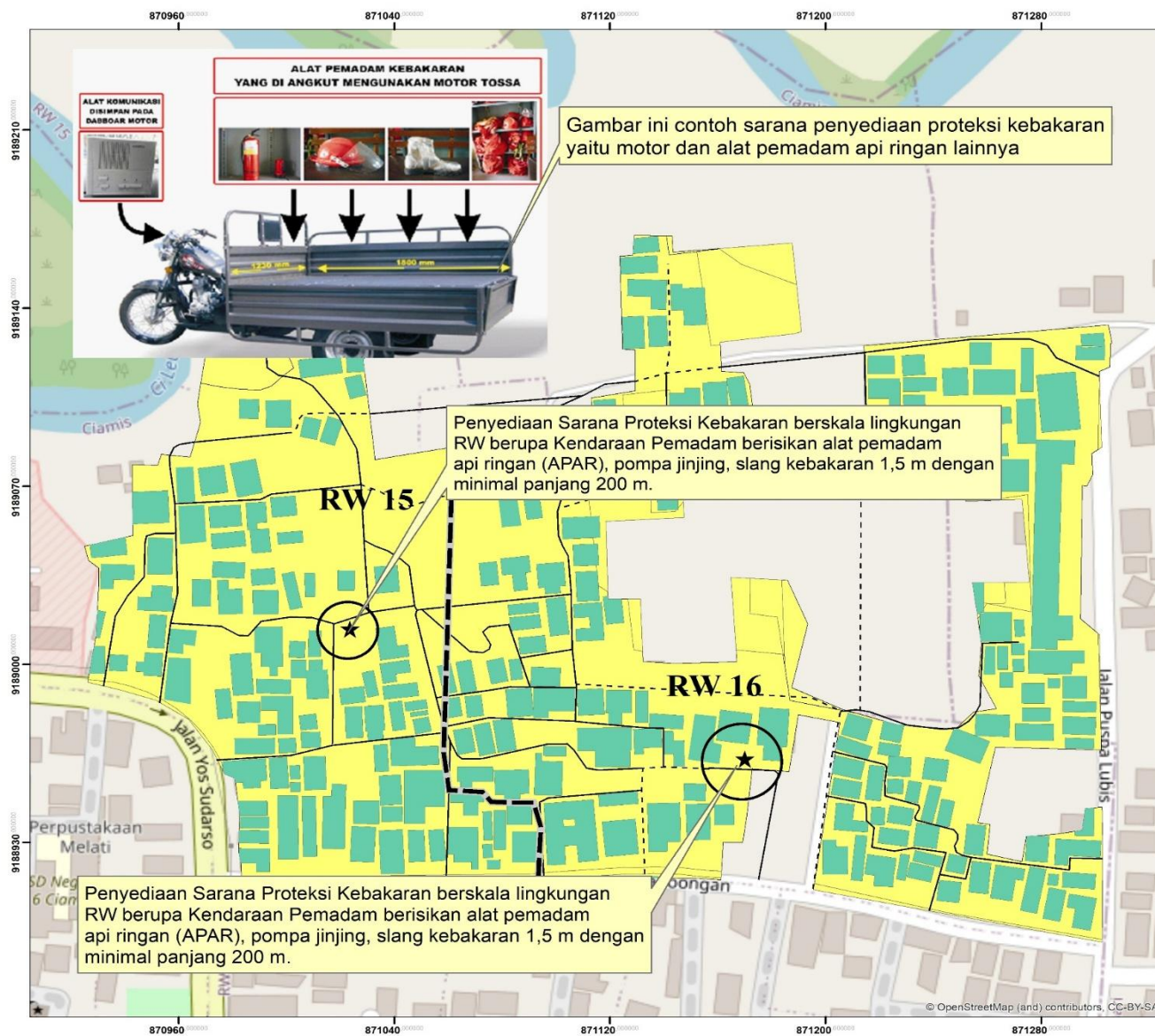
Gambar V. 26 Peta Arahan Penanganan Pengelolaan Air Minum di Kawasan Kumuh Barak



Gambar V. 27 Peta Arahan Penanganan Pengelolaan Air Limbah di Kawasan Kumuh Barak



Gambar V. 28 Peta Arah Penanganan Pengelolaan Persampahan di Kawasan Kumuh Barak



Gambar V. 29 Peta Arahan Penanganan Proteksi Kebakaran di Kawasan Kumuh Barak

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis studi terkait analisis karakteristik, analisis skala tingkat skala prioritas kekumuhan serta rencana hasil arahan penanganan dapat disimpulkan sebagai berikut:

6.1.1 Karakteristik Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis

Karakteristik hasil pengamatan langsung pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Ciamis khususnya kawasan barak memiliki bangunan hunian yang rata rata sudah semi permanen dengan total 170 bangunan dan terdapat rumah tidak layak huni di RW 15 sebanyak 23 unit dan di RW 16 sebanyak 25 Unit, kondisi jalan baik namun hanya beberapa meter saja yang terlihat rusak yaitu di RW 15 sepanjang 71 meter dan di RW 16 sepanjang 617 meter. Kondisi saluran drainase baik dan tidak ada kerusakan hanya dibutuhkan pemeliharaan secara berkala, penyediaan air minum / bersih rata rata masih menggunakan sumur galian oleh karena itu tidak tercukupinya kebutuhan air minum/bersih secara cukup, pengelolaan air limbah rata rata masih menggunakan cubluk dan ada pembuangan saluran air limbah yang mengarah langsung ke drainase terkhususnya di RW 15, pengelolaan persampahan dengan cara dibakar tidak di kumpulkan disuatu tempat untuk di olah dan diangkut namun dibakar dipekarangan rumah, dan tidak adanya proteksi kebakaran hanya mengandalkan pos kamling sebagai media evakuasi dan pemberitahuan.

6.1.2 Tingkat Prioritas Kekumuhan Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis

Tingkat Prioritas di Kawasan kumuh barak ini dalam kondisi kekumuhan nya memiliki nilai yang sama yaitu 21 dengan klasifikasi kumuh rendah, legalitas lahannya bersifat legal yang dimana melihat dari web BHUMI Atr/Bpn dimana seluruh tempat tinggal nya bersifat Hak milik ataupun Hak Wakaf dengan peruntukan pemanfaatan ruangnya sudah sesuai yaitu dikawasan permukiman,

untuk pertimbangan lainnya yang berisikan kependudukan, sosial budaya dan ekonomi nya berada diklasifikasi rendah yang dimana RW 15 memiliki nilai 4 dan RW 16 memiliki nilai 2. Oleh karena itu tingkatan prioritasnya memiliki nilai C5 yang berarti penanganan prioritasnya ke 9 yang dimana penanganan dalam prioritasnya yaitu pemugaran.

6.1.3 Arahan Penanganan Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis

Arahan Penanganan di kawasan kumuh barak ini melihari dari sumber Kementrian PUPR Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman yang berjudul Indikator dan Penanganan Kawasan Padathuni-Kumuh yaitu berisikan tahapan penanganannya yaitu:

- Tata Ruang dan Guna lahan: dikawasan kumuh barak ini sudah sesuai dengan peruntukannya yang dimana melihat dari peta pemanfaatan tata ruang nya yaitu sebagai kawasan permukiman.
- Penataan Tanah dan Legalitas: dikawasan kumuh barak ini penataan tanah nya terbagi 3 yaitu tanah milik pribadi, tanah wakaf dan kosong hampir semua tanah dikawasan kumuh barak ini yaitu tanah milik pribadi dan legalitas dengan melihat (*by name by address*) dikawasan kumuh barak ini rata rata pemilik rumah ada yang berisikan 3 KK 1 Rumah dan ada juga yang 1 KK 1 Rumah.
- PSU 1 + PSU 2 (Pembangunan Sarana dan Prasana lingkungan perumahan permukiman) dikawasan kumuh barak ini khususnya di RW 15 & 16 aspek bangunan hunian jenis penanganannya yaitu rehabilitasi penataan dan renovasi pada rumah tidak layak huni seperti mengganti atap rumah yang rusak, dinding yang masih memakai kayu dan lantai berupa tanah, aspek pengelolaan air limbah dengan jenis penanganannya yaitu menyediakan komponen pemipaan agar terhubungnya saluran yang mengalir ke drainase dan dapat dipindahkan ke tangksi septik individu maupun komunal terpusat dan merawat dan menjaga area sarana prasarana pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan disediakannya tempat pembuangan sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) terpusat di masing masing RT, dan menyediakan proteksi kebakaran seperti alat pemadam api ringan. Untuk drainase dan jalan lingkungan penanganannya

berupa pemeliharaan secara berkala, merawat dan menjaga kualitas infrastruktur tersebut.

Temuan Studi dalam Kajian Penanganan Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis

Terdapat perbedaan antara SK Kumuh dengan Analisis yang dikaji yaitu didalam tingkatan prioritasnya yang didalam SK Kumuh memiliki prioritas ke 3 yaitu dengan klasifikasi C3 dan kajian analisis yang penulis kerjakan yaitu memiliki prioritas ke 9 yaitu dengan klasifikasi C5.

6.2 Saran

Adapun saran yang didapatkan dari hasil penelitian kajian penanganan permukiman Kawasan kumuh barak di Kelurahan Ciamis yaitu:

6.2.1 Saran Bagi Masyarakat

Warga masyarakat RW 15 dan RW 16 khususnya di Kawasan Kumuh Barak ini agar dapat membantu memelihara, merawat dan menjaga kondisi lingkungannya agar menjadi lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.

6.2.2 Saran Bagi Pemerintah

Saran bagi pemerintah yaitu bertujuan untuk memberikan masukan agar dalam hal penanganan Kawasan kumuh barak khususnya di Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ini kedepannya jadi lebih baik dan berkembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai pihak yang mengelola Kawasan Perkumuhan, yang dimana Kawasan Kumuh Barak ini dapat menjadi lingkungan yang bebas akan Kondisi Kekumuhan. Dengan demikian hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal baik itu dalam kondisi aspek kekumuhan dan legalitas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Muta'ali, L., & Rahman Arif, N. (2019). Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa: Perkembangan Program Penanganan.
- Anas (1995). Ciri-iri Permukiman Kumuh dalam Bentuk dasar Kriteria dan karakteristik Permukiman Kumuh.
- Deliana (2015). Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Drakakakis dan Grimes dalam Muta'ali. (2016). Tingkat Kekumuhan
- Soestrisno (1998). Teori tentang Karakteristik Permukiman Kumuh
- Theogive Hosea Tangkudung, Sonny Tilaar, & Rieneke Sela (2021). Studi Penentuan Tingkat Kekumuhan dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Arraniri Alfarisyi (2018). Kajian Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
- Hanafi Hidayat (2021). Studi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru.
- Dicky Rianda Azry (2021). Penentuan Kawasan Prioritas Untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Rhu.
- Agung Pri Aji – FKIP UMP (2018). Bab II tentang Kajian Karakteristik Permukiman dan Perumahan Kumuh.
- Kholisma Putri & Mohammad Agung Ridho, Jurnal Kajian Ruang Vol 3 No 1 Maret (2023) tentang : Studi Literatur Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan
- Bunga Annisa Fadillah, Wisnu Sasongko & I Nyoman Suluh Wijaya, Vol 11 No 4 Oktober (2022) tentang Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat Kekumuhan di Desa Karangasih, Kabupaten Bekasi

Deni Irawan, Ichwan Arief & Jhanty Trilusianthy Hidajat (2019) tentang Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Menuju Program Pemerintah “Kotaku” (Kota Tanpa Kumuh) Lokasi Studi : Kampung Lio, Kota Depok

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah

Perkim.id (22 – Oktober – 2020) Kriteria, Indikator, dan Klasifikasi Penentuan Kategori Kumuh

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Teknis Deliniasai Kawasan Permukiman Kumuh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2037

Keputusan Menter Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karta, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat Skala Permukiman

Standar Nasional Indonesia Nomor 3242 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomo 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman tentang Buku Saku Petunjuk Kontruksi – Sanitasi

Standar Nasional Indonesia Nomor 03-6967 Tahun 2003 tentang Persyaratan Umum Sistem Jaringan dan Geometrik Jalan Perumahan

Pedoman Teknis Nomor 09 – Tahun 2005-C tentang Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAM BM)

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman tentang Buku Saku Petunjuk Kontruksi – Air Minum

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman tentang Buku Saku Petunjuk Kontruksi – Proteksi Kebakaran

TABEL KENDALI

Nama : Arif Rivan

NPM : 203060050

Pembimbing Utama : Dr. Ir. H. Ari Djatmiko. MT.

Co-Pembimbing : Ibnu Kusuma Ardhi, ST., MT.

Judul TA : Kajian Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Ciamis
Kabupaten Ciamis

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Keterangan	Ceklis
1	29 – 02 – 2024	- Studi Terdahulu terkait topik yang diinginkan - Tambahkan studi sendiri ditinjau terdahulu	Pak Ari	√
2	21 – 03 – 2024	- Kriteriaa dicari lagi jangan hanya 1 sudut pandang - Cek di tinjauan terdahulu apakah menggunakan Permen PUPR No 14 Tahun 2018		√
3	18 – 07 – 2024	- Tambahkan Tinjauan Teori tentang Skala Prioritas - Tinjauan Terdahulu Variabel Penelitian dijabarkan dan ditambahkan indikatornya	Pak Ibnu	√
4	22 – 07 – 2024	- Kebijakan pakai Permen PUPR No 14 Tahun 2018 - Kesimpulan Studi Terdahulu - Desain Survey	Pak Ari	√
5	25 – 07 – 2024	- Kriteria Pakai Bobot - Arahan Penanganan dijelaskan - Identifikasi Kawasan kumuh di analisis dan dijelaskan - Peta tambahkan terkait lokus		√
6	06 – 08 – 2024	- Latar Belakang - Studi Terdahulu - Metodologi - Matriks Penelitian	Pak Ibnu	√
7	13 – 08 – 2024	- Arahan Penanganan sesuaikan dengan sasaran 1 - Vitalitas ekonomi tentang jarak pekerjaan di koreksi kembali didesain survey - Table kendali	Pak Ari	√
8	15 – 08 – 2024	- Latar Belakang tambahkan data terkait Prov Jawa Barat - Alasan kenapa pilih Kelurahan Ciamis - Isi dari Tabel 3.7		√
9	21 – 08 – 2024	- Tabel Arahan Penanganan tambahkan Klasifikasi		√

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Keterangan	Ceklis
		- Desur tentang Tingkat Kekumuhan		
10	26 – 08 – 2024	- Acc Seminar Proposal	Pak Ari	
11	28 – 08 – 2024	- Acc Seminar Proposal	Pak Ibu	
12	28 – 10 – 2024	- Judul Kota / Desa - Pola Penanganan tambahkan di teori dan kebijakan - Peta administrasi Kecamatan Ciamis dan Kelurahan Ciamis wilayah studi - Profil Kecamatan Ciamis - Analisis dilakukan per sasaran - Jelaskan dulu Pola rencana penanganan, jangan langsung ke penanganannya	Masukan Seminar Proposal	√
13	20 – 02 – 2025	- Luasan, Kepadatan, jumlah penduduk - Tabel Tingkat Skala prioritas dan hasil formulasi tingkat skala prioritas di pahami - Peta deliniasi kelurahan berapa persen dari keseluruhan Kelurahan Ciamis - Rumus Teknik Skoring - Gambaran Umum (Kecamatan lalu Kelurahan)	Pak Ari	√
14	15 – 03 – 2025	- Peta Insert - Peta Struktur ruang dan pola ruang - Tabel Hasil formulasi tingkat skala prioritas di ubah menjadi lebih dipahami	Pak Ibnu	√
15	20 – 03 – 2025	- Klasifikasi skala prioritas jelaskan mana yang didahulukan - Lengkapi dan Update Desain Survey	Pak Ari	√
10 – 04 – 2025		Survey Melengkapi Data - data		
16	05 – 05 – 2025	- Tabel data variable numerik karakteristik di pisah per RW - Cari teori atau kajian tentang bobot persentase	Pak Ibnu	√
17	15 – 05 – 2025	- Pemilihan Aspek Prioritas dibuatkan excell - Aspek dibuat perbobot dan cari sumber nya contohnya RPJMD, RTRW dsb.	Pak Ibnu	√
18	03 – 06 – 2025	- Tambahkan indikator penjelasan disamping baseline / kriteria - Koreksi Kembali perhitungan Skala Prioritas	Pak Ari	√
19	12 – 06 – 2025	- Bereskan laporan sesuai dengan panduan penulisan tugas akhir	Pak Ibnu	√

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Keterangan	Ceklis
		- Cari RPJMD Kab Ciamis tahun 2025 – 2029 untuk tahap arah penanganan yg dihubungkan dengan kajian yang ditangani		
20	26 – 06 – 2025	- Legalitas tanah jelaskan dan peta kan - Overlay peta legalitas tanah, kondisi kekumuhan dan pemanfaatan polar ruang - Hasil arahan penanganan turunan dari skala tingkat prioritas	Pak Ari	√
21	01 – 07 – 2025	- Arsir Peta Overlay kondisi kekumuhan, dan legalitas tanah yang berisikan bangunan tidak layak huni - Lengkapi rencana arahan penanganan bagian periode jangka waktu - Tambahkan peta tingkatan prioritas per aspek	Pak Ari	√
22	03 – 07 – 2025	- Peta dibuatkan 1 bangunan 2 warna merangkap (bangunan layak huni dan legalitas tanah) - Tambahkan detail penanganan dalam rencana aksi penanganan (contoh penyediaan air minum – pemipaan) - Hapuskan jangka periode - Peta tingkatan prioritas lengkapi	Pak Ari	√
23	14 – 07 – 2025	- Perbaiki Kata Pengantar, rata kiri dan kanan pada daftar isi, huruf kapital pada setiap kalimat, judul gambar yang tercantum, selaraskan rumusan masalah di latar belakang dan kerangka pemikiran, dan redaksional kalimat - Cek Kembali total bangunan agar konsistensi, perhitungan interval bukan bobot, dan sumber sumber dibenarkan - Peta di Gambaran umum sebaiknya di munculkan secara keseluruhan tanpa ada Batasan wilayah, hanya di perjelas untuk deliniasi wilayah kajiannya.	Pak Ibnu	√

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Keterangan	Ceklis
24	14 – 07 – 2025	- Redaksi didalam tabel rencana aksi penanganan diganti dengan kalimat yang lebih detail, kalau ada cantumkan acuan /sumber pedoman - Peta tingkatan prioritas penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran di betulkan sesuai dengan acuan / pedoman	Pak Ari	√
25	SIDANG PEMBAHASAN			
	25 – 07 – 2025	- Sandingkan SK Bupati yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan	Bu Ratih	√
		- Letak strategis dibetulkan dengan Lokasi terminal, pasar, dan perkantoran		√
		- Pedoman harus konsisten dan pilih salah satu (Permen atau Buku Saku)		√
		- Populasi jelaskan sampel bangunan / kk		√
		- Judul pisahkan antara kata Permukiman dengan Kawasan	Pak Aji	√
		- Skala dan tingkat itu pilih salah satu, kalau disatukan jadi makna dan tujuan yang berbeda		√
		- Unit analisis konsisten per RW		√
		- Cek pedoman SE cipta karya / permukiman kumuh / ekonomi sosial tentang pencegahan dan peningkatan	Pak Ari	√
		- Konsisten keterangan di hasil analisis di indikator contohnya cukup baik / semi permanen		√
		- Koreksi / periksa lagi (SLUM & SQUATTER) kondisi fisik lingkungan dan kepemilikan lahan		√

Tabel Rencana Penyelesaian Tugas Akhir

No	Kegiatan	Bulan 03				Bulan 04				Bulan 05			
	Tahap 1	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan dan Pembahasan Proposal TA												
2	Revisi Proposal TA												
3	Seminar Ujian Proposal TA												
Tahap 2													
1	Persiapan Survey												
2	Survey Lapangan Primer dan Sekunder												
3	Tabulasi Hasil Kompilasi Data												
Tahap 3													
1	Analisis Karakteristik Kawasan Kumuh Barak												
2	Analisis Skala Tingkat Kekumuhan												
3	Analisis Arah Penanganan Kekumuhan												
4	Bimbingan Hasil Analisis												
5	Revisi Hasil Analisis												
Tahap 4													
1	Penyusunan Kesimpulan dan Saran												
2	Bimbingan Laporan Keseluruhan												
3	Finalisasi Laporan Keseluruhan												
4	Sidang TA												

LAMPIRAN

Lampiran A Form SK Pembimbing



UNIVERSITAS PASUNDAN

Fakultas Teknik

Teknologi Pangan	022 - 2019339
Teknik dan Manajemen Industri	022 - 2019335
Teknik Mesin	022 - 2019352
Teknik Informatika	022 - 2019371
Teknik Lingkungan	022 - 2009574
Teknik Planologi	022 - 2006466

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PASUNDAN

Nomor: 305/UNPAS.FT-PWK.D/SK/III/2024

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Tugas Akhir

Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasundan

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswa Fakultas Teknik yang melakukan penelitian, perlu ditunjuk Pembimbing Utama dan atau Pembimbing Pendamping;
- Mengingat : 2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Pembimbing dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.02 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No.04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Mendikbud nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan No.755/YPTPIA/2015 tentang Statuta Universitas Pasundan;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan No.205/Unpas.R/SK/XII/2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Para Dekan di Lingkungan Universitas Pasundan.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota;
2. Keputusan Pimpinan Fakultas Teknik.
- Menetapkan : **Memutuskan :**
- Pertama: Terhitung mulai tanggal 06-03-2024 pada semester GENAP tahun akademik 2023/2024 mengangkat saudara, sebagai berikut :
1. Nama : DR. IR. H. ARI DJATMIKO, MT.
Kode/NIP/NIDN : PL003/15110186/0410027101
Pangkat/Jabatan : (kosong)
Sebagai : Pembimbing Utama
2. Nama : IBNU KUSUMA ARDHI, ST., MT.
Kode/NIP/NIDN : PL163/0415078702
Pangkat/Jabatan : (kosong)
Sebagai : Pembimbing Pendamping
- Diberi tugas sebagai Pembimbing Tugas Akhir, di Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pasundan Bandung, untuk mahasiswa sebagai berikut :
- NPM : 203060050
Nama : Arif Rivan
Judul : KAJIAN PENANGANAN PERMUKIMAN KAWASAN KUMUH DI KELURAHAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS
- Kedua: Menugaskan kepada dosen tersebut di atas untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga: Kepada Pembimbing tersebut di atas diberikan honorarium sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Teknik;
- Keempat: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tugas Akhir mahasiswa ybs, dan semua ketentuan yang bertentangan dengan surat keputusan ini dianggap tidak berlaku, dengan ketentuan bilamana didalamnya terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandung
pada tanggal: 06-03-2024
Dekan Fakultas Teknik,



(Prof. Dr. Ir. Yusman Taufik, M.P.)
NIPY: 15110230

Tembusan kepada :
1. Ketua Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
2. Yang Bersangkutan
3. Berhimpun

Lampiran B Form Bimbingan Dosem Pembimbing 1



UNIVERSITAS PASUNDAN Fakultas Teknik

FORMULIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Teknik Sipil ☐ 022 2014031
Teknik Pangan ☐ 022 2014036
Teknik Mesin ☐ 022 2014032
Teknik Informatika ☐ 022 2014031
Teknik Lingkungan ☐ 022 2014034
Teknik Biologi ☐ 022 2014035

Form : TA-2

Nama/Nep. : Arif Rivan /203060050
Judul TA : Kajian Penanganan Permukiman Kawasan Kumuh Di Kelurahan Ciamis Kabupaten
Pembimbing Utama : Dr. Ir. H. Ari Djatmiko, MT.
Co-Pembimbing : Ibnu Kusuma Ardhi, ST., MT.

Uraian Bimbingan TA :

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	TandaTangan Pembimbing
1.	20/02/25	Luas kepadatan penduduk, tabel Tingkat skala prioritas, hasil formulasi, peta definisi kelurahan, rumus Teknik skoring, Gambaran umum dari kecamatan ke kelurahan.	
2.	20/03/25	Klasifikasi skala Tingkat prioritas lengkapi dan update data data desain survey.	
3.	03/06/25	Tambahkan indikator penjelasan disamping baseline kriteria Koreksi Kembali perhitungan skala prioritas	
4.	26/06/25	Legalitas tanah jelaskan dan peta kan Overlay peta legalitas tanah, kondisi kekumuhan dan polar uang Hasil arahan penanganan turunan dari skala Tingkat prioritas	
5.	01/07/25	Arsir peta overlay kondisi kekumuhan, legalitas tanah yg berisikan bangunan tidak layak huni, tambahkan peta tingkatan prioritas perspektif. Lengkapi rencana arahan penanganan	
6.	03/07/25	Peta dibuahkan 1 bangunan 2 warna merangkap (bangunan tidak layak huni dan legalitas bangunan/tanah) Tambahkan detail penanganan dalam rencana aksi penanganan Peta tingkatan prioritas dilengkapi	
7.	14/07/25		
8.			
9.			
10.			
Disetujui untuk melaksanakan Sidang Pembahasan pada tanggal :			1407 2015

Pembimbing Utama,

(Dr. Ir. H. Ari Djatmiko, MT.)

Co-Pembimbing,

(Ibnu Kusuma Ardhi, ST., MT.)

Pembayaran Biaya Bimbingan :

Semester Th akd. /	Semester Th akd. /	Semester Th akd. /	Semester Th akd. /

Keterangan : Bimbingan dilayani bila telah memenuhi persyaratan administrasi

Lampiran C Form Bimbingan Dosen Pembimbing 2



UNIVERSITAS PASUNDAN *Fakultas Teknik*

FORMULIR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Teknik Informatika ☐ 402 - 2019/20
 Teknik Pangan ☐ 402 - 2019/20
 Teknik Mesin ☐ 402 - 2019/20
 Teknik Industri ☐ 402 - 2019/20
 Teknik Lingkungan ☐ 402 - 2019/20
 Teknik Planologi ☐ 402 - 2019/20

Form : TA 2

Nama/Npm : Arif Rivan / 203060050
 Judul TA : Kajian Penanganan Pemukiman Kawasan Kumuh Di Kelurahan Ciamis Kabupaten
 Pembimbing Utama : Dr. Ir. H. Ari Djatmoko, MT.
 Co Pembimbing : Ibnu Kusuma Ardhi, ST., MT.

Uraian Bimbingan TA :

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	15/03/25	Peta insert, peta struktur ruang dan pola ruang, tabel hasil formulasi Tingkat skala prioritas diubah menjadi lebih dipahami	
2.	05/05/25	Tabel variable numerik karakteristik per RW di pisah Cari teori atau kajian tentang bobot persentase	
3.	15/05/25	Pemilihan aspek prioritas dibuatkan dalam bentuk excell Aspek dibuat perbobot dan cari sumbernya (RPJMD, RTRW) dan sebagainya	
4.	12/06/25	Bereskan dan rapikan laporan sesuai dengan panduan penulisan tugas akhir Cari RPJMD kab ciamis tahun 2025-2029 untuk tahap arah penanganan yg dihubungkan dengan kajian yg dilakukan.	
5.	14/07/25		
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Disetujui untuk melaksanakan Sidang Pembahasan pada tanggal :			

Pembimbing Utama,

Co-Pembimbing,

(Dr. Ir. H. Ari Djatmoko, MT.)

(Ibnu Kusuma Ardhi, ST., MT.)

Pembayaran Biaya Bimbingan :

Semester Th akd. /	Semester Th akd. /	Semester Th akd. /	Semester Th akd. /

Keterangan : Bimbingan dibayar bila telah memenuhi persyaratan administrasi

Lampiran D Form Surat Pengantar Survei



UNIVERSITAS PASUNDAN
Fakultas Teknik

Teknologi Pangan ☐ 022 - 2019339
Teknik dan Manajemen Industri ☐ 022 - 2019335
Teknik Mesin ☐ 022 - 2019352
Teknik Informatika ☐ 022 - 2019371
Teknik Lingkungan ☐ 022 - 2009574
Teknik Planologi ☐ 022 - 2006466

Bandung, 10 April 2025

No. : 058/Unpas-FT.PWK/K.3/IV/2025
Lamp. : -
Hal. : Izin Survey

Kepada Yth.
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Ciamis
di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

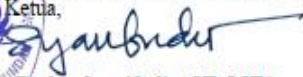
Sehubungan dengan kegiatan pengumpulan data & penelitian dengan judul "*Kajian Penanganan Permukiman Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis*" yang akan digunakan sebagai bahan input data dalam melengkapi Mata Kuliah Tugas Akhir di Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Pasundan, maka dengan ini kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan dapat dibantu dalam melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian Tugas Akhir.

Adapun mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut adalah :

Nama	Nrp.
1. Arif Rivan	203060050

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Fakultas Teknik – UNPAS
Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota
Ketua,

(Deden Syarifudin, ST.,MT.)





UNIVERSITAS PASUNDAN
Fakultas Teknik

Teknologi Pangan	022 - 2019339
Teknik dan Manajemen Industri	022 - 2019335
Teknik Mesin	022 - 2019352
Teknik Informatika	022 - 2019371
Teknik Lingkungan	022 - 2009574
Teknik Pimologi	022 - 2006466

Bandung, 10 April 2025

No. : 058/Unpas-FT.PWK/K.3/IV/2025
Lamp. : -
Hal. : Izin Survey

Kepada Yth.
Kantor Kecamatan Ciamis
di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan kegiatan pengumpulan data & penelitian dengan judul "*Kajian Penanganan Permukiman Kawasan Kumuh Barak di Kelurahan Ciamis Kabupaten Ciamis*" yang akan digunakan sebagai bahan input data dalam melengkapi Mata Kuliah Tugas Akhir di Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Pasundan, maka dengan ini kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan dapat dibantu dalam melakukan wawancara untuk keperluan Penelitian Tugas Akhir.

Adapun mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut adalah :

Nama	Nrp.
1. Arif Rivan	203060050

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Fakultas Teknik – UNPAS
Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota
Ketia.



Syaubudin
(Deden Syarifudin, ST.,MT.)